

Laporan
Keberlanjutan
2025



Integrity in Action:

Building Trust and Sustainable Value



Tentang Sampul

Sampul ini menggambarkan kegiatan monitoring dalam program PPM SRI Organik PTVI di IGP Morowali, Desa Ululere, yang menampilkan interaksi antara personel PTVI dan masyarakat dalam pelaksanaan program. Dimulai pada tahun 2023, program ini telah memasuki siklus musim tanam kedelapan, dengan monitoring yang dilakukan setiap tiga bulan untuk mendukung implementasi yang efektif dan evaluasi program yang berkelanjutan.

Program ini mencakup pendampingan budidaya padi organik dan sayuran organik, yang didukung oleh penggunaan kompos yang diproduksi secara mandiri dari sekam padi, dengan aktivator mikroba yang disediakan melalui program. Program ini juga mencakup dukungan bagi kelompok UKBM herbal melalui budidaya tanaman berkhasiat obat, serta dukungan infrastruktur pertanian, termasuk sekitar 800 meter saluran irigasi dan peralatan pendukung pertanian.

Sampul ini mencerminkan tema laporan kami, **Integrity in Action: Building Trust and Sustainable Value**, dengan menampilkan contoh nyata keterlibatan kami dengan masyarakat sekitar melalui monitoring dan pelaksanaan program yang berkelanjutan.

Untuk Dicermati

Laporan Keberlanjutan PT Vale Indonesia Tbk, selanjutnya disebut “Laporan”, memuat data dan informasi yang material bagi pemangku kepentingan terkait kinerja keberlanjutan PT Vale Indonesia pada tahun 2025. Secara umum, isi Laporan ini disusun berdasarkan analisis internal serta sumber dan dokumen yang kredibel. Istilah “PTVI” atau “Kami” yang digunakan dalam Laporan ini merujuk pada PT Vale Indonesia Tbk.

Pembaca perlu memahami bahwa Laporan ini memuat informasi yang mengandung pernyataan dan pandangan berwawasan ke depan (forward-looking statements). PT Vale memahami bahwa risiko dan ketidakpastian dari berbagai faktor dapat memengaruhi kinerja operasional dan kondisi bisnis di masa mendatang. Oleh karena itu, kami mengingatkan pembaca bahwa Perseroan tidak dapat menjamin bahwa pernyataan berwawasan ke depan akan mencerminkan kondisi aktual di masa depan. Dengan demikian, kami menganjurkan pembaca untuk menggunakan informasi ini secara bijaksana.

Tabel dan grafik yang disajikan dalam Laporan ini menampilkan data numerik menggunakan standar notasi Bahasa Indonesia. Penyajian nilai numerik dalam narasi juga menggunakan standar notasi Bahasa Indonesia.

Daftar Isi

Untuk Dicermati	2	Pengelolaan Keberlanjutan	35	Reklamasi dan Rehabilitasi	102
Daftar Isi	3	Keberlanjutan dalam Operasional Kami	36	Perencanaan Penutupan Tambang	104
Sorotan Kinerja Keberlanjutan 2025	5	Keterlibatan Pemangku Kepentingan	38	Tenaga Kerja Kami	107
Kinerja Operasional	5	Tinjauan Materialitas	41	Pendekatan PTVI terhadap Sumber Daya Manusia	108
Kinerja Lingkungan	6	Peta Jalan ESG	45	Statistik Karyawan	109
Kinerja Sosial	8	Tata Kelola Keberlanjutan	46	Menghargai Hak Ketenagakerjaan dan Hak Asasi Manusia	112
Kinerja Tata Kelola	11	Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Keberlanjutan	47	Komitmen terhadap Keberagaman, Kesenjangan, dan Inklusi	114
Deskripsi Tema	12	Konservasi Mineral dan Efisiensi Sumber Daya	48	Remunerasi dan Tunjangan Karyawan	120
Pesan dari Pimpinan	13	Rantai Pasok yang Bertanggung Jawab	49	Pelatihan dan Pengembangan Karyawan	121
Pesan CEO	13	Tanggung Jawab atas Kualitas Produk dan Layanan	51	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	125
Pesan Dewan Komisaris	17	Tata Kelola	52	Mekanisme Pelaporan dan Penyelesaian Keluhan Karyawan	133
Tanda Tangan Direksi dan Komisaris	18	Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik	53	Masyarakat	134
Tentang PTVI	20	Organ Tata Kelola	54	Pendekatan Kami terhadap Keterlibatan Masyarakat yang Bertanggung Jawab	136
Profil Perusahaan dan Kegiatan Usaha Utama	21	Kinerja dan Proses Remunerasi Organ Tata Kelola	57	Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia	136
Tujuan dan Nilai Inti Kami	22	Etika Bisnis dan Kepatuhan	63	Relokasi dan Hak atas Tanah serta Sumber Daya	138
Bentuk Hukum dan Kepemilikan	23	Program Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing)	70	Keterlibatan Masyarakat	138
Identitas Perusahaan	24	Privasi Data dan Keamanan Siber	72	Mekanisme Pengaduan Masyarakat	139
Wilayah Operasional	25	Lingkungan	74	Pengelolaan Dampak terhadap Masyarakat	140
Kinerja Keuangan	26	Pendekatan PTVI terhadap Lingkungan	75	Program Pemberdayaan Masyarakat	144
Sertifikasi dan Keanggotaan Asosiasi	29	Adaptasi dan Ketahanan terhadap Perubahan Iklim	77		
Penghargaan dan Pengakuan	31	Pengelolaan Energi dan Emisi	79		
		Air dan Efluen	86		
		Pengelolaan Limbah	92		
		Keanekaragaman Hayati	97		

Tentang Laporan Ini	153
Pengungkapan Topik Material	154
Kontribusi Kami terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	157
Tabel Data	162
Tentang PTVI	162
Pengelolaan Keberlanjutan	164
Tata Kelola	164
Lingkungan	165
Sumber Daya Manusia	181
Lampiran	186
Pernyataan Assurance Independen	186
Indeks POJK	188
Indeks GRI	192
Indeks SASB	206
Lembar Umpan Balik	209

Kinerja Operasional^[POJK51-B.1]

Total Produksi dan Penjualan Nikel dalam Matte (Ton)



Produksi mencapai

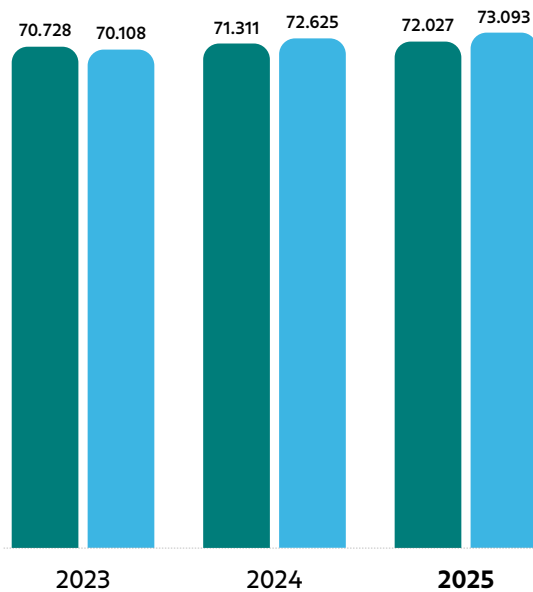
72.027 ton

↑ 1,00% dari 2024

Penjualan mencapai

73.093 ton

↑ 0,64% dari 2024



■ Production ■ Sales

Pendapatan dan Laba (Ribu US\$)



Pendapatan usaha mencapai

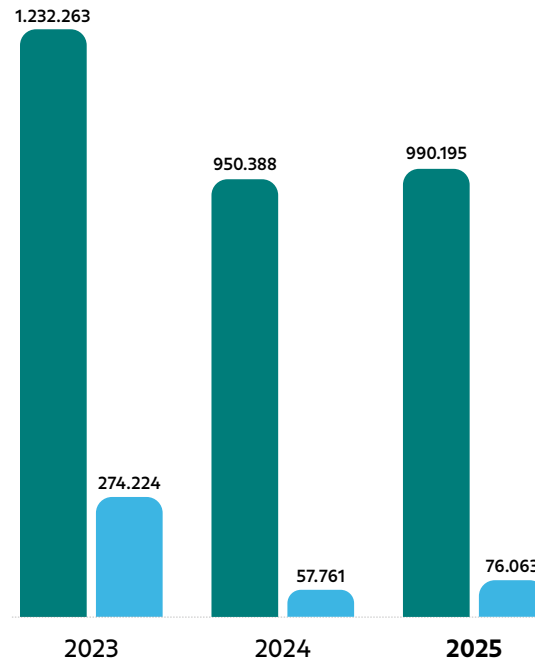
990.195 Ribu US\$

↑ 4,19% dari 2024

Laba tahun berjalan mencapai

76.063 Ribu US\$

↑ 31,69% dari 2024



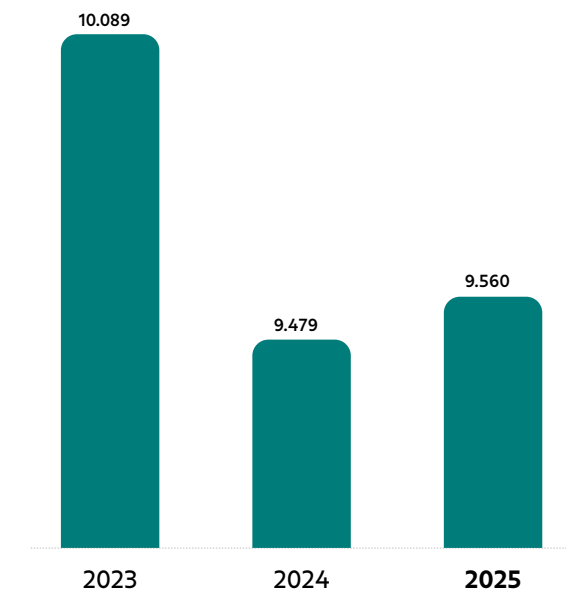
■ Operating Revenue ■ Profit for the Year

Biaya Produksi Nikel dalam Matte (US\$ per Ton)



Biaya produksi nikel matte mencapai

US\$9.560 per ton ↑ 0,85% dari 2024



Meskipun harga nikel masih mengalami volatilitas, PTVI tetap menjaga kinerja operasional yang stabil. Melalui peningkatan efisiensi dan disiplin operasional, kami berhasil memperkuat profitabilitas sekaligus mempertahankan kinerja produksi dan penjualan.^[POJK51-E.5]

Kinerja Lingkungan^[POJK51-B.2]

Biaya Pengelolaan Lingkungan



US\$43.79M

dialokasikan untuk kegiatan pengelolaan lingkungan
↑ 54,34% dari 2024

Energi dan Emisi



Sorowako

Penggunaan Energi (GJ)

31.589.023

↓ 0,62% dari 2024

2024: 31.785.370

2023: 30.974.878

Intensitas Energi (GJ/Ton Matte)

438,57

↓ 1,61% dari 2024

2024: 445,73

2023: 473,94

Proporsi Energi Terbarukan (%)

30,87%

↑ 0,91% dari 2024

2024: 30,60%

2023: 30,84%

IGP Morowali

Penggunaan Energi
2025 (GJ)

13.498

Proporsi Energi
Terbarukan (%)

31,06%

IGP Pomalaa

Penggunaan Energi
2025 (GJ)

8.422

Proporsi Energi
Terbarukan (%)

28,82%

GHG Emissions



Sorowako

Total Emisi GRK (Ton CO2eq)

2.074.623

↑ 1,15% dari 2024

2024: 2.050.990

2023: 2.032.313

Intensitas Emisi GRK (Ton CO2eq/Ton Matte)

28,80

↑ 0,14% dari 2024

2024: 28,76

2023: 28,7,

IGP Morowali

Total Emisi GRK 2025
(GJ)

4,553.14

IGP Pomalaa

Total Emisi GRK 2025
(GJ)

419

Air Pollution



Sorowako

Total Emisi SO2 (Ton SO2)

49.297

↓ 5,51% dari 2024

2024: 52.172

2023: 53.188

Intensitas Emisi SO2 (Ton SO2/Ton Ni)

0,68

↓ 6,85% dari 2024

2024: 0,73

2023: 0,75

Total Emisi Partikulat (Ton Partikulat)

647

↓ 26,39% dari 2024

2024: 879

2023: 600

Intensitas Emisi Partikulat (Ton Partikulat/Ton Ni)

0,009

↓ 25,00% dari 2024

2024: 0,012

2023: 0,007



Kinerja Lingkungan^[POJK51-B.2]

Pengelolaan Air



Pengambilan Air (m³)

Sorowako

15.079.167

2024: 11.748.150

2023: 9.442.313

Peningkatan signifikan dalam pengambilan air terutama disebabkan oleh penyempurnaan titik pemantauan dan pengukuran flowmeter pada tahun 2025.

IGP Morowali

20.612

↑ 14,29% dari 2024

IGP Pomalaa

9.969

↑ 11,93% dari 2024

Intensitas Pengambilan Air (m³/Ton Matte)

Sorowako

209,35

2023: 113,50

2024: 164,75

Pembuangan Air

Sorowako

89.695.408

2024: 100.709.771

2023: 50.226.716

↓ 10,94% dari 2024

IGP Morowali

113.251 m³ pada tahun 2025

Limbah yang Dihasilkan (Ton)



Limbah B3

Sorowako

2.353

2024: 2.696

2023: 2.041

↓ 12,74% compared to 2024

IGP Morowali

85,24

2023: 0,93

2024: 7,22

IGP Morowali

58,42

2023: 4,06

2024: 5,71

Peningkatan timbulan limbah di IGP Morowali dan Pomalaa terutama disebabkan oleh dimulainya aktivitas produksi yang lebih intensif pada tahun 2025.

Limbah Non-B3

Sorowako

5.349

2024: 5.906

2023: 6.378

↓ 9,43% dari 2024

IGP Morowali

76 ton pada 2025

IGP Pomalaa

375 ton pada 2025

Konservasi Keanekaragaman Hayati



Sorowako

72.296 pohon lokal, endemik, dan dilindungi dilestarikan dan dibudidayakan ↑ 6% dari 2024

18 rusa Timor

(*Rusa timorensis*) dilestarikan

1 anoa dataran rendah

(*Bubalus depressicornis*) dilestarikan

Reklamasi dan Rehabilitasi



Reklamasi Tambang Progresif

156,67

hektare di Sorowako

1,42

hektare di Bahodopi

Rehabilitasi DAS di Luar Konsesi

17.877

hektare area rehabilitasi DAS di lima provinsi: Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Jawa Barat, dan Bali

Pelatihan Lingkungan



338 karyawan, 1.966 kontraktor

mengikuti pelatihan lingkungan

60 karyawan, 6 kontraktor

mengikuti sertifikasi pengelolaan lingkungan

Kinerja Sosial^[POJK51-B.3]

Sumber Daya Manusia

Komposisi Tenaga Kerja



2.985 karyawan dalam total tenaga kerja

361 karyawan perempuan
12,09% dari total tenaga kerja
↑ 0,51% dari 2024

2.486 karyawan lokal
83,28% dari total tenaga kerja
↑ 0,28% dibandingkan 2024

89,95% karyawan merupakan anggota serikat pekerja

Perempuan dalam Kepemimpinan

131 perempuan dalam posisi kepemimpinan (L1–L3)
17,21% dari total posisi kepemimpinan
↑ 1,00% dari 2024

Tingkat Perputaran Karyawan

1,04% tingkat turnover
↑ 0,12% dari 2024

Partisipasi dalam Pelatihan

2.493 karyawan mengikuti program pelatihan

Total Jam Pelatihan

70.656 jam pelatihan diberikan pada tahun 2025

Program Sertifikasi

277 karyawan mengikuti program sertifikasi profesional

Persiapan Pensiun

176 karyawan mengikuti program pelatihan persiapan purna tugas



Kesehatan dan Keselamatan Kerja



Nihil kematian akibat kerja

(zero fatalities) pada tahun 2025

Nihil cedera kerja tercatat

pada karyawan

Pemberdayaan Masyarakat



US\$4.734.128

dialokasikan untuk Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada tahun 2025

↑ 18,35% dari 2024

2024: US\$4.000.198 2023: US\$5.571.359

US\$3,98 juta

dialokasikan untuk program PPM di Sorowako

US\$751 ribu

dialokasikan untuk program PPM di IGP Morowali

US\$138 ribu

dialokasikan untuk program PPM di IGP Pomalaa

Kinerja Sosial^[POJK51-B.3]

Penerima Manfaat & Jangkauan

300+ KK

menerima dukungan subsidi listrik di Sorowako

~21 fasilitas umum

didukung melalui program subsidi listrik

8 desa

menerima manfaat dari infrastruktur distribusi air bersih di Towuti

13 desa

terlibat dalam pembangunan infrastruktur partisipatif di Morowali

13 desa pemberdayaan

dijangkau melalui program kesehatan dan pembangunan di Morowali

267 KK

terlayani melalui fasilitas pengelolaan sampah TPS3R berbasis masyarakat

95 peserta

mengikuti program pelatihan bahasa Inggris di Morowali

20 mahasiswa

berpartisipasi dalam program penelitian dan magang

43 petani

menerima peningkatan kapasitas dan pendampingan teknis dalam budidaya padi organik di lahan seluas 12 hektare

37 petani

didukung dalam budidaya sayuran organik di lahan sekitar 5 hektare

100 petani

kakao terlibat dalam persiapan sertifikasi di Pomalaa

133 UMKM

didukung melalui program kemandirian ekonomi di Sorowako

38 desa

didukung melalui inisiatif pemberdayaan terkait SDGs Desa



Bentuk Dukungan Pendidikan & Peningkatan Kapasitas

5 desa

mendapatkan dukungan transportasi sekolah di Sorowako

3 penerima program magister dan 2 penerima program doktor

didukung melalui program beasiswa

57 peserta

mengikuti pelatihan vokasi dalam dua angkatan

45 guru PAUD

mengikuti program peningkatan kapasitas

347 mahasiswa

terlibat dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik

15 laptop

disumbangkan untuk mendukung fasilitas pembelajaran di sekolah-sekolah setempat

1 kendaraan praktik

disediakan untuk SMKN 1 Luwu Timur



Bentuk Dukungan Pemberdayaan Ekonomi

4.600 bibit kakao

dikembangkan melalui Rumah Pembibitan Kakao di Pomalaa

80 petani

didukung di lahan budidaya seluas sekitar 17 hektare



Kinerja Sosial^[POJK51-B.3]

Bentuk Dukungan Lingkungan



18 unit Bank Sampah dan 11 Bank Sampah
didukung di Sorowako

10 desa

didukung melalui fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)

118 ton sampah

dikelola melalui TPS3R di Bahodopi

8.000+ kg kompos

dihasilkan melalui program pengelolaan sampah berbasis masyarakat

Bentuk Dukungan Infrastruktur & Layanan Dasar



14 lampu jalan tenaga surya
dipasang di Desa Bahomotefe

225 meter

pagar desa dibangun di Desa Kolono

10 booth UMKM

dikembangkan sebagai bagian dari fasilitas wisata desa di Unsongi



Kinerja Tata Kelola^[POJK51-B.1]

Penilaian Kinerja Keberlanjutan



Sustainalytics

23.7 Skor Risiko ESG Sustainalytics – Kategori Risiko Menengah

↓ 19.39% lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya

ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)

99.53

↑ 0.86% dibandingkan kinerja 2023

Keberagaman Dewan



50% anggota Dewan Komisaris adalah perempuan

Rantai Pasok Bertanggung Jawab



85% dari total pemasok merupakan pemasok domestik





Deskripsi Tema

Integrity in Actions: Building Trust and Sustainable Value

Memasuki tahun 2025, PTVI menghadapi ujian ketangguhan yang signifikan, dipicu oleh berbagai tantangan operasional, termasuk insiden kebocoran pipa minyak, di tengah dinamika pasar yang fluktuatif serta perubahan regulasi yang terus berkembang. Kondisi ini menuntut tidak hanya disiplin dalam pelaksanaan, tetapi juga peninjauan kembali terhadap cara kami beroperasi, menetapkan prioritas, dan mengelola risiko di tengah kompleksitas yang terus meningkat.

Tema **“Integrity in Action: Building Trust and Sustainable Value”** mencerminkan bagaimana PTVI merespons kondisi tersebut, tidak hanya dengan menjaga kinerja, tetapi juga dengan memastikan bahwa integritas diterjemahkan menjadi tindakan nyata di seluruh organisasi. Tantangan yang dihadapi sepanjang tahun menjadi pengingat penting untuk mengantisipasi risiko complacency serta memperkuat kelincahan, akuntabilitas, dan perbaikan berkelanjutan di seluruh lini.

Sepanjang tahun, PTVI juga mengalami perubahan signifikan dalam kepemimpinan dan tata kelola, yang ditandai dengan penunjukan CEO baru, perubahan pada Dewan Komisaris, serta restrukturisasi organisasi. Perkembangan ini berkontribusi dalam memperkuat proses pengambilan keputusan, meningkatkan fungsi pengawasan, serta memperbaiki keselarasan antara strategi, operasional, dan komitmen keberlanjutan.

Di saat yang sama, PTVI meningkatkan fokus pada transparansi komunikasi dan keterlibatan pemangku kepentingan secara aktif, terutama dalam merespons tantangan operasional, termasuk insiden kebocoran pipa minyak. Sepanjang tahun, kami memperkuat keterlibatan dengan masyarakat terdampak, regulator, serta pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan penyampaian informasi yang tepat waktu, merespons berbagai kekhawatiran, serta mendukung upaya penanganan dan pemulihan. Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen kami dalam membangun kepercayaan melalui keterbukaan, akuntabilitas, dan keterlibatan yang konsisten.

Ke depan, pembelajaran dan perbaikan yang dilakukan sepanjang tahun ini semakin memperkuat fondasi kami dalam membangun organisasi yang lebih tangguh. Integritas terus menjadi panduan dalam cara kami merespons, memperkuat tata kelola, serta berinteraksi secara terbuka dengan para pemangku kepentingan. Melalui berbagai tantangan yang dihadapi, kami menegaskan bahwa integritas dalam tindakan tetap menjadi kunci dalam membangun kepercayaan dan menciptakan nilai berkelanjutan.

Sambutan Presiden Direktur^{[POJK51-D.1][GRI 2-22]}

Para Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Transisi energi global yang semakin cepat membentuk ulang arah industri, termasuk industri nikel. Indonesia berada di posisi kunci sebagai pemilik cadangan terbesar dunia sekaligus produsen utama. Melalui kebijakan hilirisasi, Indonesia mendorong peningkatan nilai tambah di dalam negeri serta memperkuat perannya dalam mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Namun, percepatan ini juga membawa konsekuensi berupa tekanan pasokan dan harga, yang mengingatkan kita bahwa pertumbuhan harus diiringi dengan tanggung jawab.

Dalam konteks ini, PTVI terus menghadapi dinamika industri sekaligus memperkuat ketahanan operasional. Di tengah kondisi yang tidak selalu mudah, kami tetap berkomitmen memastikan setiap keputusan selaras dengan prinsip keberlanjutan serta tanggung jawab kami terhadap masyarakat dan lingkungan.

Tahun ini, kami menghadapi tantangan besar ketika terjadi kebocoran pipa minyak pada 23 Agustus 2025 di Desa Lioka, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, yang menyebabkan minyak bahan bakar mencemari perairan dan lahan pertanian di sekitarnya. Ini adalah kejadian yang serius, dan saya ingin menanggapiinya secara terbuka dan jujur.

Saya menyampaikan permohonan maaf kepada para petani yang sawahnya terdampak, serta kepada keluarga di Lioka, Langkea Raya, Baruga, Matompi, Wawondula, dan Timampu yang menghadapi ketidakpastian atas air, lahan, dan mata pencaharian mereka. Saya juga memohon maaf karena, meskipun kami berupaya menjalankan standar terbaik,

kejadian ini tetap tidak dapat kami cegah.

Saya mengunjungi Towuti beberapa hari setelah kejadian untuk melihat langsung kondisi di lapangan dan mendengarkan masyarakat. Pengalaman tersebut menegaskan bahwa di balik setiap angka, ada kehidupan dan kepercayaan yang harus kami jaga.

Sejak awal, kami berkomitmen pada tiga hal: menghentikan dampak secepat mungkin, bersikap transparan atas apa yang terjadi dan langkah yang kami ambil, serta tetap hadir hingga pemulihan benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Tim kami bekerja tanpa henti untuk mengendalikan sumber kebocoran dan membatasi dampaknya. Kami juga membuka Posko Pengaduan dan Informasi agar masyarakat dapat berkomunikasi langsung dengan kami. Selain itu, kami melibatkan para ahli independen dari IPB, UNHAS, Sucofindo, serta Pusat Pengurangan Risiko Bencana Universitas Indonesia untuk memastikan penanganan dilakukan secara kredibel dan berbasis ilmiah.

Saat ini kami tengah melakukan evaluasi menyeluruh dan penguatan sistem pipa agar kejadian serupa tidak terulang. Proses pemulihan lingkungan dan kompensasi kepada masyarakat masih terus berjalan, dengan pembaruan informasi yang kami sampaikan secara berkala. Kami tidak akan menganggap proses ini selesai sebelum pemulihan benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Pengalaman ini menegaskan pentingnya bertindak cepat, transparan, dan dengan kepedulian yang tulus terhadap masyarakat dan lingkungan. Ini juga memperkuat komitmen



Bernardus Irmanto

CEO dan Presiden Direktur



"Keberlanjutan bukanlah proses yang linier. Melainkan perjalanan yang terus berkembang—melalui perbaikan, refleksi, dan pembaruan."

kami untuk terus memperbaiki cara kami beroperasi, mengelola risiko, dan membangun ketahanan jangka panjang. Saya juga bersyukur atas semangat gotong royong yang muncul dalam situasi ini—masyarakat, pemerintah, dan relawan bekerja bersama setiap hari. Semangat inilah yang harus terus kami jaga dan layak kami perjuangkan.

Bagi kami, tanggung jawab tidak hanya diukur dari kinerja operasional. Tanggung jawab tercermin dari bagaimana kami memperkuat operasi, mendukung kehidupan masyarakat, menjaga lingkungan, dan menciptakan nilai jangka panjang bagi Indonesia.

Melalui Laporan Keberlanjutan ini, kami menyampaikan capaian sekaligus pembelajaran yang kami peroleh sebagai bagian dari komitmen kami terhadap perbaikan berkelanjutan dan akuntabilitas.

Kinerja Operasional dan Proyek Strategis

Sepanjang tahun 2025, PTVI mempertahankan kinerja operasional yang solid di tengah lingkungan pasar yang menantang. Di Sorowako, produksi nikel dalam matte mencapai 72.027 metrik ton, sedikit meningkat sebesar 1,00% dibandingkan tahun sebelumnya, sementara volume penjualan naik 0,64% menjadi 73.093 metrik ton. Meskipun kinerja volume ini positif, pendapatan operasional dari Sorowako menurun 6,5% menjadi US\$888.584 ribu, mencerminkan pelemahan harga nikel sepanjang tahun. Namun demikian, kami terus memperkuat disiplin biaya dan efisiensi operasional, yang tercermin dari kenaikan biaya produksi nikel matte yang sangat marginal sebesar 0,85%, dari US\$9.479 per metrik ton pada 2024 menjadi US\$9.560 per metrik ton pada 2025.

Di luar Sorowako, kami mulai melihat kontribusi pendapatan awal dari proyek-proyek pertumbuhan kami. Indonesia

Growth Project (IGP) Morowali menghasilkan pendapatan operasional sebesar US\$91.517 ribu, sementara IGP Pomalaa berkontribusi sebesar US\$10.095 ribu pada 2025. Kontribusi ini membantu mendorong kenaikan total pendapatan operasional sebesar 4,19% menjadi US\$990.195 ribu, meskipun pendapatan Sorowako menurun, sekaligus menjadi tonggak penting dalam mendiversifikasi basis pendapatan kami.

Secara keseluruhan, kami membukukan total pendapatan operasional sebesar US\$990.195 ribu, meningkat 4,19% dibandingkan tahun sebelumnya. Kinerja ini diikuti peningkatan profitabilitas yang signifikan, dengan laba tahun berjalan meningkat 31,68% menjadi US\$76.063 ribu, didukung oleh efisiensi yang lebih kuat dan disiplin pengelolaan biaya di seluruh operasi kami, sekaligus mencerminkan ketahanan operasional yang terus kami jaga di tengah tekanan pasar.

Pada saat yang sama, proyek-proyek strategis kami terus berkembang, memperkuat jalur pertumbuhan jangka panjang kami. Secara bersama-sama, proyek-proyek ini memperkuat keterkaitan antara operasi hulu dan hilir kami.

Di Sorowako, Proyek Limonit diproyeksikan mulai beroperasi pada pertengahan 2027. Sementara itu, Proyek HPAL Pomalaa juga ditargetkan mulai commissioning pada awal 2027, dengan infrastruktur utama telah tersedia dan konstruksi terus berjalan stabil. Sebagai salah satu pengembangan hilir kami yang paling maju, proyek ini merupakan langkah penting dalam memperkuat kapasitas pengolahan kami dan mendukung agenda hilirisasi nikel Indonesia.

Proyek HPAL Sambalagi di Bahodopi juga menunjukkan kemajuan yang menggembirakan, dengan konstruksi yang terus berkembang dan keyakinan kuat bahwa proyek ini akan selesai tepat waktu, sesuai

biaya, dan dengan kualitas yang dipersyaratkan.

Di Morowali, kami mencapai tonggak penting ketika aktivitas penambangan berkembang signifikan menuju kesiapan operasional, sementara pengiriman awal saprolit telah dimulai. Secara paralel, pembangunan fasilitas HPAL terus berjalan menuju target penyelesaian pada 2027.

Penguatan Tata Kelola dan Kinerja ESG

PTVI terus memperkuat tata kelola dan kinerja ESG sebagai landasan untuk menciptakan nilai jangka panjang. Kami mencatat Sustainability ESG Risk Rating sebesar 23,7, dengan tingkat risiko menurun sebesar 19,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, skor ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) kami meningkat sebesar 0,86% menjadi 99,53 pada tahun 2025 dibandingkan dengan capaian tahun 2023.

Perkembangan ini menunjukkan peningkatan penyelarasan dengan praktik terbaik di tingkat regional, khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan hak pemegang saham. Kami memandang capaian ini tidak hanya sebagai peningkatan skor, tetapi juga mencerminkan penguatan dalam penerapan tata kelola serta integrasi aspek keberlanjutan dalam proses pengambilan keputusan. Kami juga memperkuat tata kelola melalui penyempurnaan kebijakan, penguatan fungsi pengawasan, serta peningkatan integrasi ESG ke dalam keputusan bisnis.

Untuk memastikan komitmen tersebut tercermin dalam praktik yang terukur di lapangan, Sustainability Roadmap kami saat ini sedang dikalibrasi ulang agar target yang ditetapkan tetap terukur, realistis, dan selaras dengan arah jangka panjang, seiring dengan proses transformasi internal, pertumbuhan usaha, serta perkembangan standar global.

Keberlanjutan tidak dikelola sebagai agenda yang terpisah, melainkan semakin diintegrasikan ke dalam proses manajemen risiko, alokasi modal, dan evaluasi kinerja di seluruh organisasi.

Kinerja Lingkungan

Selama tahun pelaporan, kami terus meningkatkan kinerja lingkungan dengan tetap menjaga keberlangsungan operasional di tengah lingkungan operasi yang menantang. Di Sorowako, konsumsi energi terbarukan meningkat tipis dari 9,73 juta GJ pada tahun 2024 menjadi 9,75 juta GJ pada tahun 2025, yang berkontribusi sekitar 30,9% terhadap total konsumsi energi. Peningkatan ini didukung oleh keberlanjutan transisi penggunaan biodiesel dengan campuran 40% bahan baku biologis (B40).

Pada proyek pertumbuhan kami, energi terbarukan berkontribusi sekitar 31,1% terhadap total konsumsi energi di IGP Morowali dan 28,8% di IGP Pomalaa, terutama melalui penggunaan biodiesel B35 dan B40 dalam kegiatan pertambangan.

Untuk operasi Sorowako, kami menargetkan penurunan emisi absolut Cakupan 1 dan 2 sebesar 33% pada tahun 2030 dibandingkan baseline 2017. Pada tahun 2025, total emisi di Sorowako tercatat sebesar 2.074.623 ton CO₂e, sehingga kami tetap berada pada jalur menuju target 2030. Dalam jangka pendek, tingkat emisi diperkirakan relatif stabil, mengingat sejumlah inisiatif dekarbonisasi utama baru akan mulai diimplementasikan sejak 2027, termasuk heat recovery, peningkatan dewatering bijih, serta elektrifikasi operasional. Inisiatif-inisiatif ini diharapkan dapat menurunkan emisi GRK dan mendukung transisi menuju operasi yang lebih rendah karbon. Di Sorowako, kami juga mencatat penurunan emisi SO₂ sebesar 5,5% serta penurunan emisi partikulat sebesar 26,4%, yang menunjukkan

pengendalian dampak kualitas udara yang lebih baik.

Dalam pengelolaan lahan, kami melaksanakan reklamasi pascatambang seluas 156,67 hektare di Sorowako dan 1,42 hektare di IGP Morowali, serta rehabilitasi DAS di luar area konsesi seluas 17.877 hektare. Selain itu, seluruh titik pengolahan dan pemantauan air tetap memenuhi standar regulasi yang berlaku.

Kami juga melanjutkan program efisiensi sumber daya melalui pemanfaatan kembali produk samping operasional. Pada tahun 2025, lebih dari 5 juta ton slag dan hampir 1 juta ton produk samping lainnya dimanfaatkan kembali untuk konstruksi internal, sehingga membantu mengurangi pembuangan ke landfill dan potensi pelepasan polutan ke lingkungan.

Kami menyadari bahwa kinerja lingkungan dapat berfluktuasi seiring dinamika operasional. Namun, arah kami tetap jelas, yaitu menurunkan emisi, meningkatkan efisiensi, dan bergerak secara bertahap menuju praktik pertambangan yang lebih bertanggung jawab.

Sumber Daya Manusia, Keselamatan, dan Dampak Sosial

Karyawan dan kontraktor kami merupakan fondasi keberhasilan kami. Kami memastikan setiap individu diperlakukan secara adil, aman, dan bermartabat, sejalan dengan prinsip hak asasi manusia yang kami junjung. Hingga akhir 2025, PTVI mempekerjakan 2.985 orang, dengan 83,3% merupakan tenaga kerja lokal yang berasal dari Luwu Timur, Morowali, dan Kolaka. Perempuan mewakili 12,09% dari total tenaga kerja di seluruh lokasi operasional kami. Selain itu, dari total 761 posisi manajerial, 17,21% di antaranya ditempati oleh perempuan.

Keselamatan merupakan prioritas yang tidak dapat ditawar. Pada tahun 2025, kami mencatat nol fatalitas terkait pekerjaan, yang mencerminkan komitmen berkelanjutan kami dalam

melindungi kesehatan dan keselamatan seluruh pekerja di area operasional. Sepanjang tahun, sebanyak 17.947 karyawan dan kontraktor menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk mendorong kesehatan, deteksi dini, dan kesejahteraan secara menyeluruh, melampaui rencana yang ditetapkan. Program ini dilengkapi dengan pelatihan keselamatan secara berkala, penilaian risiko, serta inisiatif peningkatan kesadaran untuk memastikan seluruh pekerja memiliki kesiapan dalam menjalankan pekerjaan secara aman.

Kami juga terus memperkuat kesiapan tenaga kerja melalui pengembangan kapabilitas, dengan menyediakan lebih dari 70.000 jam pelatihan sepanjang tahun. Upaya ini mendukung pengembangan individu sekaligus kesiapan organisasi dalam menghadapi perubahan.

Di luar operasional, investasi kami dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat mencapai US\$4,73 juta pada tahun 2025, meningkat sekitar 18,35% dibandingkan tahun sebelumnya. Program ini berfokus pada pendidikan, pengembangan ekonomi lokal, infrastruktur, serta akses terhadap layanan dasar di wilayah operasional kami.

Melalui berbagai upaya tersebut, kami terus membangun hubungan yang dilandasi kepercayaan, keterbukaan, dan tanggung jawab jangka panjang.



Apresiasi dan Penutup

Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh karyawan, mitra usaha, pemerintah, pemegang saham, dan masyarakat atas kepercayaan dan kolaborasi yang terus terjalin.

Ke depan, kami menyadari bahwa dinamika industri akan terus berkembang. Dalam menghadapi hal tersebut, kami akan tetap berfokus pada eksekusi yang disiplin, pertumbuhan yang bertanggung jawab, serta kemajuan yang terukur dalam keberlanjutan.

Integritas akan terus menjadi landasan kami dalam memimpin, mengelola risiko, dan menciptakan nilai jangka panjang. Pembelajaran dari tantangan yang kami hadapi tahun ini akan terus membentuk langkah kami ke depan.

Kami percaya bahwa keberlanjutan bukan sekadar komitmen tahunan, melainkan tanggung jawab yang kami jalankan setiap hari.

Terima kasih atas kepercayaan dan perjalanan yang kita jalani bersama.

Jakarta, April 2026

Bernardus Irmanto
Presiden Direktur
PT Vale Indonesia Tbk



F. S. Multhazar

Presiden Komisaris

Sambutan Presiden Komisaris

Tahun 2025 menjadi periode yang menentukan bagi PTVI, di mana kami tidak hanya diuji dari sisi ketahanan operasional, tetapi juga dari kekuatan tata kelola serta disiplin dalam pengambilan keputusan strategis.

Kami beroperasi di tengah volatilitas pasar yang masih tinggi, perkembangan regulasi, serta meningkatnya ekspektasi terhadap tanggung jawab lingkungan dan sosial. Dalam kondisi seperti ini, tata kelola bukan sekadar struktur formal, melainkan fondasi yang memastikan kedisiplinan dalam pengambilan keputusan, memperkuat akuntabilitas, dan menjaga nilai jangka panjang.

Sepanjang tahun, PTVI mengalami berbagai perkembangan struktural dan strategis. Perubahan organisasi, kemajuan proyek strategis, serta penguatan pengawasan keberlanjutan menuntut kejelasan peran dan akuntabilitas yang lebih kuat. Dalam masa perubahan, pengawasan yang cermat menjadi semakin penting. Peran Dewan Komisaris adalah memastikan setiap keputusan tetap selaras dengan nilai perusahaan, profil risiko, dan arah jangka panjang.

Tahun ini juga menjadi fase penting dalam pembaruan kepemimpinan, dengan penunjukan Presiden Komisaris serta Presiden Direktur dan Chief Executive Officer yang baru, disertai perubahan dalam komposisi Dewan Komisaris dan Direksi.

Dewan Komisaris memiliki keberagaman latar belakang, pengalaman, dan perspektif yang memperkuat pendekatan perusahaan dalam tata kelola dan keberlanjutan. Komposisi

ini mencerminkan struktur kepemilikan multi-pemangku kepentingan, sekaligus memastikan bahwa praktik terbaik global dipertimbangkan sejalan dengan pemahaman yang mendalam terhadap konteks regulasi dan pemangku kepentingan di Indonesia.

Komposisi Dewan Komisaris pada tahun 2025 juga menunjukkan peningkatan keberagaman perspektif, dengan perempuan mewakili 50% dari total anggota. Kepemimpinan yang inklusif di tingkat tertinggi mencerminkan arah dan nilai yang kami pegang, dan kami akan terus memperkuat keberagaman dalam struktur tata kelola PTVI.

Dalam aspek keberlanjutan dan ESG, Dewan Komisaris memiliki kapasitas untuk memberikan pengawasan yang efektif, dengan keahlian yang mencakup strategi ESG, keterlibatan pemangku kepentingan, hak asasi manusia, serta penerapan standar internasional dan agenda nasional Indonesia terkait transisi energi dan investasi berkelanjutan.

Secara keseluruhan, Dewan Komisaris memberikan landasan yang kuat dalam mengawasi komitmen ESG perusahaan, memastikan bahwa keberlanjutan tetap menjadi bagian inti dari strategi jangka panjang PTVI.

Jakarta, April 2026

F. S. Multhazar

Presiden Komisaris
PT Vale Indonesia Tbk

Tanda Tangan Direksi dan Komisaris

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Keberlanjutan PT Vale Indonesia Tbk tahun 2024 telah dimuat secara lengkap, dan kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan sesuai dengan POJK 51/POJK.03/2017. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Direksi*



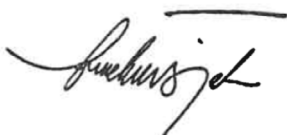
Bernardus Irmanto
Presiden Direktur



Abu Ashar
Wakil Presiden Direktur



Heriyanto Agung Putra
Direktur



Budiawansyah
Direktur



Rizky Andhika Putra
Direktur



Muhammad Asril
Direktur



Slamet Sugiharto
Direktur

Dewan Komisaris*



F. S. Multhazar
Presiden Komisaris



Emily Olson**
Wakil Presiden Komisaris



Kristina Gauthier
Komisaris



Christopher McCleave
Komisaris



M Jasman Panjaitan
Komisaris



Komisaris
Komisaris



Shiro Imai
Komisaris



Rudiantara
Komisaris Independen



Retno L.P. Marsudi
Komisaris Independen



Marita Alisjahbana
Komisaris Independen

Notes:

*Struktur Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada September 2025.

**Anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku 2025, namun telah efektif mengundurkan diri sejak 3 April 2026, dengan pengunduran diri tersebut akan dimintakan persetujuannya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada 2 Juni 2026



Tentang PTVI

Profil dan Kegiatan Usaha Utama Perseroan^[GRI 2-6] ^[POJK51-C.4]

Kehadiran PTVI di Indonesia dimulai pada tahun 1968 dengan pendirian PT International Nickel Indonesia (INCO), sebelum resmi mengadopsi nama PT Vale Indonesia Tbk pada tahun 2011. Sejak itu, kami berkembang menjadi salah satu produsen nikel olahan terkemuka di Indonesia, berkontribusi terhadap upaya hilirisasi nasional jauh sebelum menjadi agenda strategis negara, dengan pengalaman lebih dari setengah abad sejak mulai mengoperasikan pabrik pengolahan pada tahun 1977. Sejak awal, PTVI juga membangun warisan sebagai pelopor pengolahan berbasis energi terbarukan di industri nikel nasional, dengan mengandalkan pembangkit listrik tenaga air sebagai sumber energi utama di tambang Sorowako kami. Selama beberapa dekade, kami terus mendorong praktik produksi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, yang dengan bangga kami sajikan dalam laporan ini.

Operasi kami dijalankan berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kontrak Karya (KK) dengan masa konsesi 30 tahun sejak dimulainya operasi. Kontrak tersebut diperpanjang pada tahun 1996 dan selanjutnya beralih menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada tahun 2025, yang berlaku hingga tahun 2035 dengan peluang perpanjangan lebih lanjut. Sejalan dengan transisi perizinan ini, kami terus melanjutkan pengembangan Indonesia Growth Project (IGP), yakni IGP Pomalaa, IGP Morowali, dan proyek Sorowako Limonite. Proyek-proyek IGP tersebut saat ini masih berada pada tahap awal pengembangan tambang.

Beberapa kegiatan usaha kami tetap konsisten dengan tahun sebelumnya, yaitu penambangan bijih nikel, pengolahan bijih menjadi nikel matte, serta penjualan produk nikel matte yang dihasilkan. Dengan demikian, produk utama kami adalah nikel

matte, yang dipasok kepada Vale Canada Limited (VCL) dan Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. (SMM). Selain kegiatan inti tersebut, PTVI juga menjalankan berbagai kegiatan pendukung, seperti transportasi, pengadaan listrik, pengelolaan properti, pengolahan air limbah, pengelolaan dan daur ulang limbah, serta kegiatan remediasi.^[GRI 2-6] ^[POJK51-C.4]

Gambaran Umum Proses Produksi Nikel Matte PT Vale



Tujuan dan Nilai-Nilai Kami ^{[GRI 2-24][POJK51-C.1][POJK51-F.1]}

PTVI beroperasi dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan berkontribusi pada masa depan yang lebih berkelanjutan. Kami menyadari bahwa pertambangan memegang peran penting dalam mendukung pembangunan global serta kebutuhan transisi energi. Pada tahun 2024, kami memperkenalkan prinsip CARES sebagai landasan dalam cara kami bekerja dan mengambil keputusan. Prinsip ini tercermin dalam lima nilai inti dan diterjemahkan ke dalam perilaku-perilaku utama yang menjadi pedoman dalam operasional sehari-hari serta penciptaan nilai jangka panjang.

Untuk memastikan nilai-nilai tersebut tertanam kuat di seluruh organisasi, kami secara aktif dan konsisten menyosialisasikan prinsip CARES melalui forum town hall, keterlibatan pimpinan, dan berbagai kegiatan perusahaan. Berbagai forum ini menjadi titik sentuh strategis untuk memperkuat tujuan bersama, menyelaraskan karyawan dengan standar etika kami, serta menumbuhkan budaya integritas, kolaborasi, dan akuntabilitas.

Nilai-Nilai Perseroan



Compassion

Kami menjalankan setiap tindakan dengan rasa kepedulian mendalam, mengutamakan keselamatan pekerja, aset, dan masyarakat kami, karena kehidupan adalah prioritas utama.



Accountability

Kami bertanggung jawab penuh atas tindakan kami dengan penuh integritas untuk menciptakan nilai dan mencapai tujuan bagi masyarakat Indonesia dan dunia.



Resilience

Kami tetap tangguh dalam menghadapi tantangan, dengan ketangkasan dan kemampuan beradaptasi.



Excellence

Kami berupaya mencapai keunggulan melalui sinergi, inovasi, dan efisiensi, untuk mendorong pertumbuhan.



Sustainability

Kami berkomitmen menjalankan prinsip-prinsip keberlanjutan melalui pemanfaatan sumber daya yang bertanggung jawab, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan.

Perilaku Utama



Selalu Melampaui Ekspektasi



Bergerak Bersama Untuk Mencapai Keberhasilan



Ambil Tanggung Jawab dan Tuntaskan



Ciptakan Lebih Banyak Dengan Sumber Daya Yang Ada



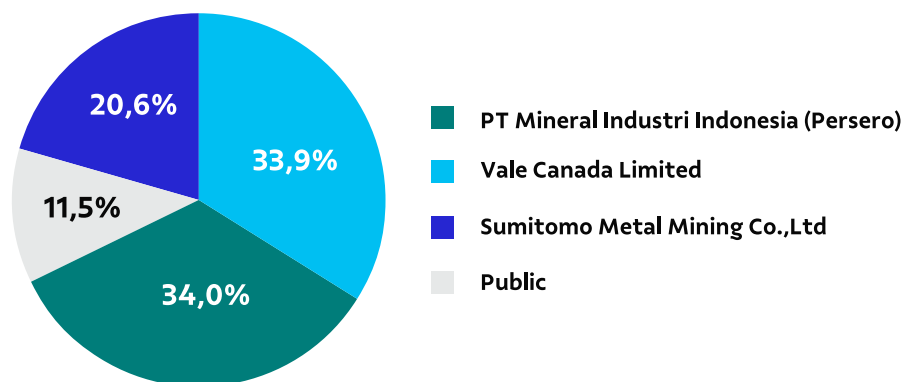
Peduli Dengan Tulus, Bertindak Secara Adil

Bentuk Hukum dan Kepemilikan [GRI 2-1][POJK51-C.3]

Sejak 16 Mei 1990, PTVI tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode saham INCO. Per 31 Desember 2025, sekitar 20% saham kami dimiliki oleh publik. Mayoritas saham perusahaan dimiliki oleh PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID), badan usaha milik negara, sebesar 34,00%, diikuti oleh Vale Canada Limited (VCL) sebesar 33,88%, serta Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. sebesar 11,48%.

PTVI dikendalikan bersama oleh MIND ID dan VCL sebagai dua pemegang saham terbesar kami. Struktur ini mendukung pengawasan yang seimbang dan keberlangsungan bisnis jangka panjang di pasar nasional maupun internasional, sekaligus menjaga keselarasan dengan kerangka regulasi dan prioritas pembangunan Indonesia.

**Komposisi Kepemilikan Saham Perusahaan
(pada 31 Desember 2025)**



Company Identity [GRI 2-1][POJK51-C.2]

Nama

Nama Perusahaan

PT Vale Indonesia Tbk

Nama lain

PT Vale

Tanggal Pendirian

25 Juli 1968

Tanggal Pencatatan di Bursa Efek

16 Mei 1990

Alamat

Kantor Pusat

Sequis Tower, Lantai 20, Unit 6 & 7

Jl. Jend. Sudirman Kav. 71,

Jakarta 12190, Indonesia

Telepon: +62 21 524 9000

Faksimile: +62 21 524 9020

Situs web: <https://vale.com/indonesia>

Surel: ptvicommunications@vale.com

Kantor Perwakilan

Makassar, Sulawesi Selatan

Jl. Somba Opu, PO Box 1143

Makassar 90001, Sulawesi Selatan, Indonesia

Telepon : +62 411 873731, 873732

Faksimile: +62 411 856157

Pabrik Pengolahan

Main Office Plant Site Sorowako

Luwu Timur 92984,

Sulawesi Selatan, Indonesia

Telepon: +62 475 332 9100

Faksimile: +62 475 332 9575

Indonesia Growth Project Pomalaa

Jl. Alam Mekongga No. 81 A

Kel. Laloeha, Kec. Kolaka

Kab. Kolaka 93561,

Sulawesi Tenggara, Indonesia

Indonesia Growth Project Morowali

Port PT Vale, Jl. Trans Sulawesi

Desa Bahomotefe, Kecamatan Bungku Timur

Kab. Morowali 94973

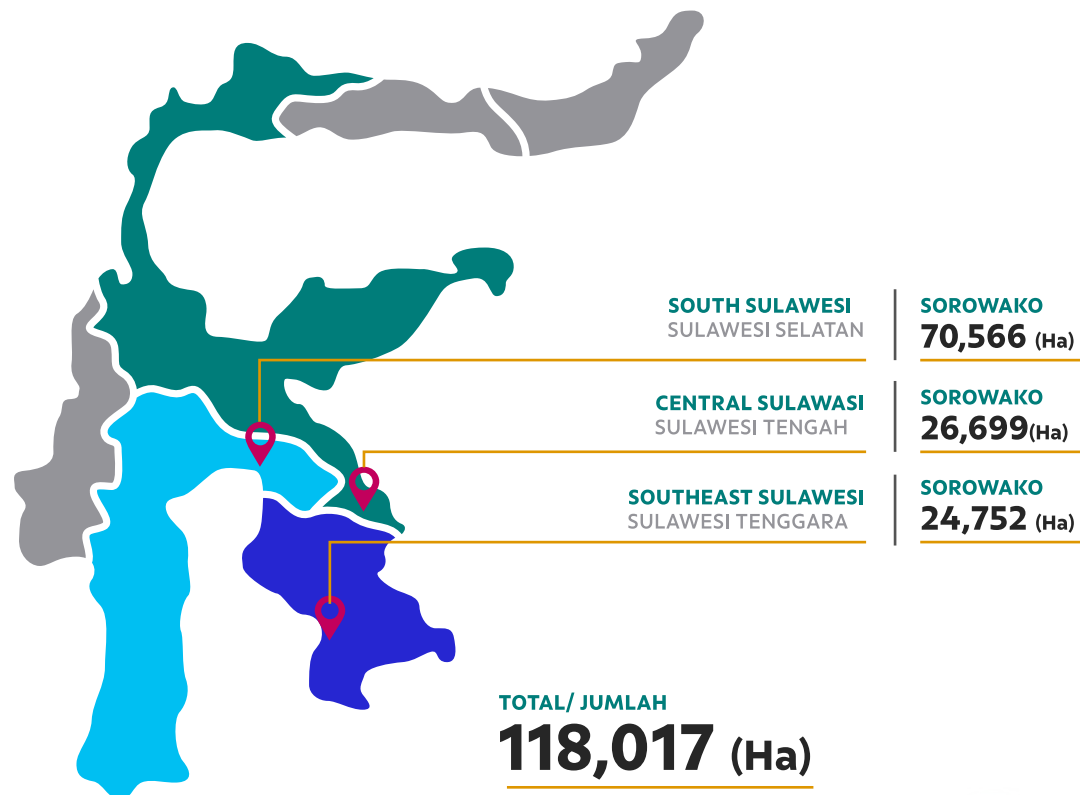
Sulawesi Tengah, Indonesia



Wilayah Operasional [GRI 2-1][POJK51-C.3]

Kami beroperasi secara eksklusif di Indonesia, di dalam wilayah yang diberikan berdasarkan IUPK yang berlaku hingga 28 Desember 2035. Izin tersebut mencakup total wilayah konsesi seluas 118.017 hektare, yang tersebar di tiga blok operasi yang berlokasi di tiga provinsi:

- Blok Sorowako, Sulawesi Selatan (70.566 ha)
- Blok Bahodopi, Sulawesi Tengah (22.699 ha)
- Blok Pomalaa dan Sua-Sua, Sulawesi Tenggara (24.752 ha)



Operasi inti PTVI berlokasi di Blok Sorowako, yang saat ini berfokus pada penambangan bijih nikel saprolit (laterit berkadar nikel tinggi) dan produksi nikel matte menggunakan teknologi pirometalurgi. Fasilitas pengolahan mineral kami di Sorowako dilengkapi dengan tanur pengering, tanur reduksi, tanur listrik, dan konverter, dengan kapasitas produksi 180–216 ton nikel matte per hari.

Selain operasi yang telah berjalan, kami juga tengah mengembangkan Indonesia Growth Project (IGP), yang mencakup inisiatif ekspansi di Pomalaa, Morowali, dan Sorowako. Proyek-proyek ini dirancang untuk memperkuat peran kami dalam agenda hilirisasi nikel Indonesia, sekaligus mendiversifikasi kapabilitas pengolahan dan mengoptimalkan pemanfaatan bijih.



IGP Pomalaa

IGP Pomalaa berlokasi di Pomalaa dan diluncurkan pada 27 November 2022. Proyek ini akan memasok bijih nikel ke ventura bersama kami dengan PT Kolaka Nickel Indonesia (KNI) yang memproduksi nikel dalam bentuk Mixed Hydroxide Precipitate (MHP), bahan antara utama untuk baterai kendaraan listrik, melalui teknologi High-Pressure Acid Leach (HPAL).

Area penambangan memiliki kapasitas produksi 28 juta ton per tahun (Mtpa) bijih limonit dan saprolit, sementara fasilitas HPAL memiliki kapasitas produksi 120 ribu ton per tahun (ktpa) MHP. [POJK51-F.26]

IGP Morowali

IGP Morowali diresmikan pada 10 Februari 2023. Kegiatan penambangan dilakukan di Kecamatan Bungku Timur dan Bahodopi, dengan fasilitas pengolahan berlokasi di Kecamatan Bungku Pesisir. Proyek ini akan memasok bijih ke ventura bersama kami dengan PT Bahodopi Smelter Nickel Indonesia (BNSI) untuk memproduksi MHP melalui proses HPAL. Area penambangan memiliki kapasitas produksi 16 Mtpa bijih limonit dan saprolit, serta fasilitas HPAL dengan estimasi kapasitas produksi 60 ktpa MHP yang diharapkan mulai beroperasi pada tahun 2027.

IGP Sorowako Limonite Ore (SLO)

IGP Sorowako Limonite Ore (SLO) berlokasi di dalam Blok Sorowako yang telah ada dan memperoleh persetujuan investasi final pada Mei 2024. Proyek ini berfokus pada pengolahan bijih limonit (laterit berkadar nikel rendah), yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara optimal. Proyek ini akan memasok bijih ke ventura bersama kami dengan PT Huali Nickel Indonesia (HNI) untuk memproduksi MHP melalui proses HPAL. Kapasitas penambangan bijih limonit mencapai 11 Mtpa, dengan fasilitas HPAL yang memiliki estimasi kapasitas produksi 60 ktpa MHP.

Kinerja Ekonomi

Kinerja Operasional dan Keuangan

Dalam beberapa tahun terakhir, pasar nikel global mengalami periode pelemahan yang menyebabkan penurunan harga rata-rata nikel dan memberikan tekanan pada kinerja keuangan industri secara luas. Meskipun kondisi pasar tetap menantang, disiplin pengendalian biaya yang prudent, operasi yang stabil, dan kinerja produksi yang solid mendukung ketahanan hasil keuangan kami.

Pada tahun 2025, PTVI membukukan total pendapatan sebesar US\$990.195 ribu, meningkat US\$39.807 ribu atau 4,19% dibandingkan tahun 2024. Laba bersih juga meningkat menjadi US\$76.063 ribu, naik US\$18.302 ribu atau 31,68% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan kinerja operasional yang lebih kuat serta upaya berkelanjutan dalam mengelola biaya di tengah fluktuasi kondisi pasar.

Di tengah lingkungan pasar yang menantang, PTVI tetap mempertahankan posisi keuangan yang sehat sambil mendukung pengembangan proyek melalui peningkatan pembiayaan. Total aset mencapai US\$3.345.847 ribu, meningkat US\$169.319 ribu atau 5,33% dibandingkan tahun 2024. Total ekuitas juga tumbuh sebesar US\$42.300 ribu atau 1,55% menjadi US\$2.775.076 ribu. Pada saat yang sama, liabilitas meningkat menjadi US\$570.771 ribu, terutama mencerminkan pembiayaan untuk kegiatan operasional dan pengembangan proyek.



Posisi dan Kinerja Keuangan (dalam ribuan US\$) [POJK51-C.3]

Data Keuangan	2025	2024	2023	Varians (2025:2024)	
				Nominal	%
Total Aset	3.345.847	3.176.528	2.925.999	169.319	5,33%
Total Liabilitas	570.771	443.752	361.462	127.019	28,62%
Total Ekuitas	2.775.076	2.732.776	2.564.537	42.300	1,55%
Total Pendapatan	990.195	950.388	1.232.263	39.807	4,19%
Laba Bersih	76.063	57.761	274.334	18.302	31,68%

Meskipun menghadapi tantangan pasar, kami mempertahankan kinerja operasional yang stabil sepanjang tahun. Produksi nikel matte mencapai 72.027 metrik ton, meningkat 716 metrik ton atau 1,0% dibandingkan tahun 2024. Realisasi produksi juga melampaui target tahunan sebesar 71.234 metrik ton, mencerminkan perencanaan dan pelaksanaan operasional yang efektif.

Kinerja penjualan juga tetap positif. Penjualan nikel matte mencapai 73.093 metrik ton, meningkat 468 metrik ton atau 0,65% dibandingkan tahun sebelumnya, sekaligus melampaui target penjualan tahunan sebesar 72.234 metrik ton.

Target dan Realisasi Produksi dan Penjualan Nikel Matte (Ton) 2023–2025

[POJK51-B.1][POJK51-F.2][SASB EM-MM-000.A]

Nickel Matte		2025	2024	2023	Varians (2025:2024)	
					Nominal	%
Produksi	Target	71.234	70.805	–	429	0,61%
	Realisasi	72.027	71.311	70.728	716	1,00%
Penjualan	Target	72.234	71.797	–	437	0,61%
	Realisasi	73.093	72.625	70.108	468	0,65%

Biaya operasional relatif stabil, dengan biaya produksi nikel matte mencapai US\$9.560 per ton pada tahun 2025, dibandingkan US\$9.479 per ton pada tahun 2024, atau meningkat 0,85%. Meskipun biaya produksi naik tipis secara tahunan, angka tersebut tetap lebih rendah dibandingkan tahun 2023 sebesar US\$10.089 per ton, mencerminkan ketahanan pengelolaan biaya di tengah tekanan inflasi dan volatilitas pasar.

Biaya Produksi Nikel Matte (US\$ per ton)

2025	2024	2023
9.560	9.479	10.089

Penjualan kepada Pembeli Utama

Meskipun volume penjualan nikel matte meningkat sepanjang tahun, nilai penjualan kepada pembeli utama menurun 6,50% secara tahunan menjadi US\$888.584 ribu, terutama dipengaruhi oleh pelemahan harga nikel. Pendapatan dari pelanggan utama, termasuk Vale Canada Limited dan Sumitomo Metal Mining Co., Ltd., menurun sejalan dengan kondisi pasar yang berlaku. Namun demikian, total pendapatan perusahaan meningkat, didukung oleh sumber pendapatan lainnya dan kinerja operasional yang lebih kuat.

Penjualan Nikel Matte kepada Pembeli Utama (dalam ribu US\$)

[POJK51-B.1]

Pembeli	2025	2024	2023	Varians (2025:2024)	
				Nominal	%
Vale Canada Limited	711.475	760.201	985.812	(48.726)	–6,41%
Sumitomo Metal Mining Co., Ltd	177.109	190.187	246.451	(13.078)	–6,88%
Total	888.584	950.388	1.232.263	(61.804)	–6,50%

Nilai Ekonomi Langsung yang Dihasilkan dan Didistribusikan

[POJK51-B.1][POJK51-F.2][GRI 201-1]

Pada tahun 2025, PTVI menghasilkan dan mendistribusikan nilai ekonomi kepada para pemangku kepentingan melalui aktivitas operasional dan keuangan kami, yang mencerminkan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional dan regional.

Kami menghasilkan total nilai ekonomi sebesar US\$994.117 ribu, meningkat dari US\$954.107 ribu pada tahun 2024. Peningkatan ini terutama didorong oleh pendapatan operasional yang lebih tinggi, didukung produksi yang stabil dan peningkatan kinerja penjualan. Pendapatan lain juga meningkat, mencerminkan kenaikan pendapatan non-operasional. Dibandingkan pendapatan yang disajikan kembali (*restated*) sebesar US\$1.233.086 ribu pada tahun 2023, kinerja 2025 menunjukkan stabilisasi setelah fluktuasi pasar sebelumnya dan selaras dengan peningkatan laba bersih yang tercatat selama tahun berjalan.

Kami mendistribusikan nilai ekonomi sebesar US\$944.234 ribu pada tahun 2025, mencerminkan pengeluaran berkelanjutan untuk menopang operasi, mendukung karyawan, memenuhi kewajiban fiskal, dan berkontribusi pada

pembangunan masyarakat. Biaya operasional merupakan porsi terbesar dari nilai ekonomi yang didistribusikan, disertai gaji dan tunjangan karyawan, pembayaran kepada penyedia modal, pembayaran kepada pemerintah, serta investasi masyarakat.

Pembayaran kepada penyedia modal pada tahun 2025 mencerminkan kewajiban pembiayaan terkait aktivitas sepanjang tahun. Pembayaran kepada pemerintah tetap menjadi kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara, meskipun berfluktuasi dipengaruhi laba kena pajak dan kewajiban fiskal. Investasi masyarakat meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan dukungan berkelanjutan terhadap inisiatif pengembangan masyarakat.

Nilai ekonomi yang ditahan pada tahun 2025 mencerminkan keseimbangan antara nilai ekonomi yang dihasilkan dan distribusi nilai yang lebih tinggi kepada pemangku kepentingan selama tahun berjalan. Angka-angka nilai ekonomi yang diungkapkan berasal dari dan selaras dengan Laporan Keuangan audit kami. Beberapa angka tahun sebelumnya telah disajikan kembali untuk menyesuaikan dengan metodologi Laporan Keuangan, guna memastikan konsistensi dan keterbandingan antarperiode pelaporan. Rincian angka disajikan pada tabel terkait.



PTVI tidak menerima bantuan keuangan apa pun dari Pemerintah Indonesia. Namun demikian, sejalan dengan struktur kepemilikan saham kami, Pemerintah Indonesia secara tidak langsung memiliki saham di PTVI melalui MIND ID, yang telah menjadi salah satu pemegang saham kami sejak tahun 2020. ^[GRI 201-4]

Nilai Ekonomi Langsung yang Dihasilkan, Didistribusikan, dan Disimpan (dalam ribuan US\$)

Deskripsi	2025	2024	2023	Variance (2025:2024)	
				Nominal	%
Nilai Ekonomi Dihasilkan					
Pendapatan Usaha	990.195	950.388	1.232.263	39.807	4%
Pendapatan Lain	3.922	3.719	823*	203	5%
Total Pendapatan	994.117	954.107	1.233.086*	3.922	3.719%
Nilai Ekonomi Didistribusikan					
Biaya Operasi	638.007	785.160*	550.958*	48.841	8%
Gaji dan Tunjangan Karyawan	101.002	95.254	87.436	5.748	6%
Pembayaran kepada Penyandang Dana	34.607	0	60.093	34.607	100%
Pembayaran Pajak kepada Pemerintah	170.419	202.242	204.617	-35.607	-18%
Investasi Sosial	3.983	3.912*	4.291	358	9%
Total Nilai Ekonomi Didistribusikan	948.018	1.082.656*	907.395*	53.947	6%
Nilai Ekonomi Disimpan (Nilai Ekonomi Dihasilkan - Nilai Ekonomi Didistribusikan)					
Total Nilai Ekonomi Disimpan	49.883	73.693*	361.444*	-13.937	-22%

**Penyajian kembali (restatement) atas angka tahun sebelumnya dilakukan untuk menyesuaikan dengan metodologi Laporan Keuangan serta memastikan konsistensi dan keterbandingan antarperiode pelaporan.*

Sertifikasi dan Keanggotaan pada Asosiasi [POJK51-C.5][GRI 2-28]

Sertifikasi

Sertifikat	Nama Sertifikasi	No. Sertifikasi	Masa Berlaku	Lingkup	Sertifikat	Nama Sertifikasi	No. Sertifikasi	Masa Berlaku	Lingkup
	ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan	ID005666, oleh Bureau Veritas ISO 14001:2015	23 September 2024 – 3 Oktober 2027	Pabrik penambangan dan pengolahan nikel, termasuk unit dan layanan pendukung di lokasi pabrik Sorowako		Great Place to Work	Disertifikasi oleh Great Place to Work	1 September 1 2025 – 1 September 2026	PT Vale Indonesia Tbk
	ISO 17025 Standar Uji dan Kalibrasi Laboratorium	LP-1729-DN, oleh Komite Akreditasi Nasional	28 Desember 2022 – 27 Desember 2027	Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi di lokasi pabrik Sorowako		EDGE Advance Green Building	GP3-IDN-25062910 239880, oleh Bureau Veritas South Africa (Pty) Ltd.	8 Oktober 2025 – 8 Oktober 2026	Kantor Pusat PT Vale di lokasi pabrik Sorowako
	ISO 50001 Sistem Manajemen Energi	IND.25.7130/EN/U	13 Mei 2024 – 24 November 2026	Operasi penambangan dan pengolahan nikel matte di lokasi pabrik Sorowako		ISO 14064-1:2018 Pernyataan Verifikasi Gas Rumah Kaca (Inventarisasi GRK)	0003/LVV/XI/2025 (diterbitkan oleh tekMIRA – KESDM)	1 Januari 2024 – 31 Desember 2024 (periode inventarisasi) Diterbitkan: 14 November 2025	Verifikasi inventarisasi emisi gas rumah kaca PT Vale Indonesia Tbk., area operasional Sorowako, mencakup: a. Emisi langsung (Scope 1) b. Emisi tidak langsung dari energi (Scope 2) c. Emisi tidak langsung lainnya (kategori Scope 3 yang dilaporkan)

Sertifikasi dan Keanggotaan pada Asosiasi [POJK51-C.5][GRI 2-28]

Keanggotaan pada Asosiasi

Asosiasi Internasional



UN Global Compact
Anggota

Link:



Asosiasi Nasional



Indonesian Mining Association
Anggota

Link:



Asosiasi Nasional



Forum Industri Nikel Indonesia
Anggota

Asosiasi Nasional



Indonesia Global Compact Network
Anggota

Link:



Asosiasi Nasional



Asosiasi Emiten Indonesia
Anggota

Link:



Asosiasi Nasional



Asosiasi Pengusaha Indonesia
Anggota asosiasi

Asosiasi Nasional



Indonesia Business Council for Sustainable Development
Anggota

Link:



Asosiasi Nasional



Indonesia Corporate Secretary Association
Anggota

Penghargaan dan Pencapaian

Pada tahun 2025, komitmen PT Vale terhadap perlindungan lingkungan, tanggung jawab sosial, dan tata kelola yang kuat, menerima pengakuan dari berbagai institusi. Penghargaan ini menunjukkan bahwa kontribusi Perseroan terhadap praktik pertambangan berkelanjutan tidak hanya diakui di lingkungan perusahaan, tetapi juga diapresiasi oleh para pihak eksternal, antara lain sebagai berikut:



TOP CSR Awards 2025

TopBusiness

11 Juni 2025

- **TOP CSR Awards 2025 Star 4** – sistem, kebijakan, dan implementasi CSR yang baik di IGP Morowali
- **TOP Leader on CSR Commitment 2025** – Diberikan kepada Bernardus Irmanto (CEO PT Vale) atas komitmennya terhadap keberlanjutan



SDG Innovation Accelerator for Young Professionals

UNGC

31 Juli 2025

Top 6 Innovations



The Asia Responsible Enterprise Award (AREA)

Enterprise Asia

27 Juni 2025

- Penerima penghargaan AREA di kategori *Social Empowerment*
- Penerima penghargaan AREA di kategori *Green Leadership*



Innovation Technology for Social and Environmental Awards (InTechSEA)

Universitas Hasanuddin

31 Juli 2025

- **Predikat Platinum** – kategori Keanekaragaman Hayati
- **Predikat Emas** – kategori Pangan, Energi dan Air



Energi Mineral Festival 2025

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan B-Universe

30–31 Juli 2025

Penerima apresiasi kategori inisiatif bidang ESG



Eco Tech Pioneer and Sustainability Award (EPSA)

Department of Environmental Engineering, Diponegoro University

20 August 2025

- **Predikat Emas** – *Green Power Innovation*
- **Predikat Emas** – *Hydro Smart Innovation*
- **Predikat Emas** – *Ecosystem Protection*
- **Predikat Perak** – *Low Carbon Innovation*
- **Predikat Perak** – *Community Development*
- **Predikat Perunggu** – *Eco-Cycle Innovation*
- **Predikat Perunggu** – *Eco-Hazard Innovation*



Katadata ESG Index Awards

Katadata Indonesia

10 September 2025

- Penerima penghargaan Katadata ESG Index Awards untuk sektor pertambangan
- Penerima penghargaan Katadata ESG Index 2025 Awarding Gender untuk sektor pertambangan



ESG Business Awards

ESG Business

25 September 2025

- **Penghargaan** – *Waste Management Award*, Indonesia.
- **Penghargaan** – *Biodiversity Conservation Award*, Indonesia



Investortrust ESG Awards 2025

Investortrust

23 Oktober 2025

- **Gold Star Award** – untuk perusahaan terbuka dengan kapitalisasi besar
- **Investortrust ESG Awards 2025** – kategori Transparansi dan Pengungkapan Kinerja ESG



Penghargaan Subroto 2025

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

24 Oktober 2025

Penerima Penghargaan Subroto 2025 – Program Matano Iniaku



Bisnis Indonesia CSR Awards (BISRA) 2025

Bisnis Indonesia

30 September 2025

- **Predikat Platinum** – IGP Morowali
- **Penghargaan Khusus** – Program CSR terbaik dalam Perencanaan Strategis (IGP Morowali)



Asia ESG Positive Impact Awards 2025

Asia ESG Positive Impact Consortium (A-EPIC)

5–7 November 2025

Predikat Emas (Perusahaan Besar) – Kategori Lingkungan (Konservasi Keanekaragaman Hayati)



Lestari Award 2025

Kompas Gramedia

2 Oktober 2025

Kategori Ekosistem Berkelanjutan – Program Kehati Lutim Bersinergi



ESG Leadership Awards 2025

Bumi Global Karbon (BGK) Foundation

16 November 2025

Penerima penghargaan Leadership AA – Advancing ESG Transparency Leadership



ESG B–Universe 2025

Investor Daily

20 November 2025

ESG Appreciation – kategori Pemberdayaan Masyarakat



Temu Karya Mutu dan Produktivitas Nasional (TKMPN) XXIX

PT Wahana Kendali Mutu

24–29 November 2025

- **Predikat Berlian dan Pilihan Favorit** – Green Breaker, inovasi reklamasi area berbatu menggunakan limbah sabuk kelapa
- **Predikat Platinum** – Innovator Tim, perbaikan metode penyiraman *slag launder* untuk menurunkan risiko kerja dan biaya
- **Predikat Platinum** – Autopipe, alat pembuka pipa sulit pada proyek eksplorasi untuk meningkatkan efisiensi kerja
- **Predikat Platinum** – Slag Warrior, pemanfaatan limbah slag nikel sebagai material infrastruktur ramah lingkungan
- **Predikat Platinum** – Stock Master, efisiensi biaya pembelian unit tuyere baru sebesar 21%
- **Predikat Emas** – The Energizer, solusi mempercepat penanganan gangguan jaringan listrik tambang hingga 71%
- **Predikat Emas** – Sarakaloka, optimalisasi pemanfaatan sampah apu–apu di area *lagoon*



Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2025

National Center for Corporate (NCCR) 28 November 2025

Predikat Emas – Laporan Keberlanjutan 2024



Penghargaan Mitra Bhakti Husada (MBH) 2025

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

9 Desember 2025

Penerima Penghargaan kategori Perlindungan Kesehatan Pekerja Perempuan



Indonesian CSR Awards (ICA) & Indonesian SDGs Awards (ISDA) 2025

Corporate Forum for CSR Development (CFCD)

17 Desember 2025

- **Predikat Platinum dan Emas untuk ICA** – program Matano Iniaaku
- **Predikat Silver untuk ISDA** – program *Closed-loop Livestock System*



Program Wajib Pajak

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka

18 Maret 2025

Penerima penghargaan Laporan Pajak Terbaik Tahun 2024 Kabupaten Kolaka



10th Asia's Sustainability Reporting Awards (ASRA) 2025

CSR Works International Pte Ltd, 24 Oktober 2025
Singapura

Predikat Perunggu – Kategori Asia's Best Sustainability Report (CEO Letter)



Operational Excellence Conference (OPEXCON) 2025

Shift Indonesia 13 November 2025

Predikat Emas – Inovasi otomasi pengaturan rasio Silica/Magnesia (S/M) pada slag furnace berbasis machine learning



Fortune Indonesia 100 - 2025

Fortune Indonesia 12 September 2025

Penerima penghargaan Peringkat 79



Perhumas PR Excellence Awards 2025

Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas) 13 December 2025

Penerima penghargaan Juara II Kategori Digital PR Program Tema Umum



Global Supply Chain Excellence Awards (SCEA) Asia Pacific 2025

Supply Chain Excellence Award – Asia Pacific 30 September 2025

Penerima Penghargaan kategori Manufacturing (Program 0-Hour Truck Rebuild)



HR Excellence Awards 2025

Human Resource Online 6 November 2025

Predikat Emas – Kategori Keunggulan dalam Strategi CSR

Untuk informasi lebih lanjut mengenai sertifikasi, keanggotaan, dan penghargaan PTVI, silakan kunjungi situs web kami:



A photograph showing two workers in the foreground, seen from behind. They are wearing white hard hats with black earmuffs and green high-visibility work shirts. The worker on the left is pointing towards a large dam in the background. The worker on the right is holding a black tablet. The dam is a massive concrete structure with several spillways, and a large volume of water is cascading over it, creating a thick mist. The surrounding landscape is hilly and covered in green vegetation. The sky is blue with scattered white clouds.

Manajemen Keberlanjutan

Keberlanjutan dalam Operasional Kami^[POJK51-A.1]

Dalam mewujudkan aspirasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan berkontribusi pada masa depan yang lebih baik, PTVI menyadari pentingnya untuk terus merefleksikan cara kami beroperasi, serta memastikan bahwa kehadiran kami mendorong kemajuan yang positif, bukan sebaliknya. Kesadaran ini menjadi landasan komitmen kami terhadap praktik pertambangan yang bertanggung jawab, sekaligus dalam membangun operasional yang tangguh, meminimalkan risiko, dan memberikan dampak yang bermakna. Selain itu, mengingat kegiatan operasional kami bergantung pada komoditas dengan umur terbatas, komitmen ini menjadi semakin penting untuk menjaga keberlanjutan jangka panjang serta daya saing bisnis kami.

Untuk memperkuat komitmen terhadap praktik pertambangan yang bertanggung jawab di tingkat tertinggi, PTVI telah mengintegrasikannya ke dalam Kebijakan Keberlanjutan yang terakhir diperbarui pada tahun 2024 dan telah disetujui oleh Direksi. Kami memastikan bahwa keberlanjutan tidak hanya menjadi prinsip panduan, tetapi juga pengungkit strategis yang membentuk pengambilan keputusan, mendorong transformasi, dan menjadi dasar arah jangka panjang operasional kami.

Pada bagian ini, kami menguraikan elemen-elemen utama yang menunjukkan bagaimana komitmen tersebut diwujudkan dalam praktik, mencakup dimensi aktivitas kami, pilar-pilar yang menjadi pedoman operasional, serta fokus utama pada masing-masing pilar.

Pedoman yang Mengatur Operasional Berkelanjutan Kami

Operasional dan praktik keberlanjutan PTVI berlandaskan pada peraturan perundang-undangan di Indonesia serta standar dan pedoman yang diakui secara global. Landasan ini memastikan bahwa seluruh aktivitas kami dijalankan secara bertanggung jawab dan efektif, sekaligus tetap selaras dengan komitmen dan persyaratan yang telah kami adopsi. Berikut adalah regulasi, standar, dan kerangka kerja nasional maupun internasional yang menjadi acuan kami.

Regulasi Nasional

- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1827/K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik
- Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik

Kerangka dan Standar Global

- ISO 26000 – Panduan Tanggung Jawab Sosial
- ISO 14001:2015 – Sistem Manajemen Lingkungan
- ISO 45001:2018 – Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja
- ISO 9001:2015 – Sistem Manajemen Mutu
- ISO 31000:2018 – Manajemen Risiko
- Prinsip International Council on Mining and Metals (ICMM)

- Sustainability Accounting Standards Board (SASB) Metals & Mining 2021
- Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)
- Standar dan konvensi ketenagakerjaan International Labour Organization (ILO)
- United Nations Basic Principles on the Use of Force and Firearms
- United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights
- United Nations Global Compact (UNGC) Principles
- International Finance Corporation (IFC) Performance Standards
- Global Reporting Initiative (GRI)
- Voluntary Principles on Security and Human Rights
- Perjanjian Paris Perserikatan Bangsa-Bangsa 2015
- United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples
- OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas



Akses Kebijakan Keberlanjutan kami:



Integrasi Keberlanjutan dalam Strategi Bisnis

[POJK51-A.1][GRI 2-12][GRI 2-13]

Pertimbangan keberlanjutan terintegrasi dalam strategi bisnis PTVI untuk memastikan bahwa penciptaan nilai jangka panjang selaras dengan praktik bisnis yang bertanggung jawab serta pengelolaan risiko yang efektif. Keberlanjutan tidak diposisikan sebagai agenda terpisah, melainkan menjadi bagian yang melekat dalam perencanaan strategis, proses pengambilan keputusan, dan pengawasan operasional kami.

Direksi, dengan pengawasan dari Dewan Komisaris, memegang peran sentral dalam memastikan bahwa prinsip keberlanjutan tercermin dalam keputusan strategis utama, termasuk perencanaan jangka panjang, alokasi modal, dan evaluasi proyek-proyek signifikan. Melalui pembahasan dan penelaahan secara berkala, Direksi memberikan arahan dan pengawasan agar aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dipertimbangkan secara seimbang bersama faktor keuangan dan operasional. Peran ini didukung oleh Komite Keberlanjutan yang memfasilitasi integrasi serta pemantauan inisiatif keberlanjutan di seluruh PTVI (penjelasan lebih lanjut disampaikan pada bagian Tata Kelola Keberlanjutan).

Pada tingkat manajemen, keberlanjutan diintegrasikan dalam proses manajemen risiko perusahaan (enterprise risk management) dan pelaksanaan strategi. Risiko dan peluang terkait ESG diidentifikasi, dinilai, dan dipantau sebagai bagian dari kerangka manajemen risiko yang lebih luas, sehingga PTVI dapat mengantisipasi dampak terhadap ketahanan dan kinerja bisnis, sekaligus memahami potensi dampak terhadap masyarakat dan lingkungan. Pendekatan terintegrasi ini mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan memperkuat kemampuan kami dalam merespons tantangan yang terus berkembang.

Sepanjang tahun 2025, kami berfokus pada penguatan keselarasan internal dan koordinasi lintas fungsi untuk memastikan bahwa aspek keberlanjutan diterapkan secara konsisten di seluruh area operasional dan fungsi. Hal ini mencakup peningkatan koordinasi antara fungsi perencanaan strategis, manajemen risiko, operasional, dan keberlanjutan guna mendukung implementasi yang terpadu serta akuntabilitas yang jelas.

Dengan mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam strategi bisnis, PTVI memastikan bahwa setiap keputusan strategis tidak hanya berkontribusi pada kinerja jangka pendek, tetapi juga memperkuat ketahanan jangka panjang, daya saing, serta penciptaan nilai bagi para pemangku kepentingan.



Keterlibatan Pemangku Kepentingan^{[POJK51-E.4][GRI 2-29]}

Keterlibatan pemangku kepentingan membantu PTVI memahami ekspektasi eksternal serta mengidentifikasi isu-isu yang dapat memengaruhi keberlanjutan operasional kami, lingkungan, dan masyarakat. Kegiatan ini dirancang untuk menghasilkan masukan yang relevan bagi pengambilan keputusan, pengelolaan risiko, dan penentuan topik material, bukan sekadar sebagai sarana komunikasi satu arah.

Kami melakukan pemetaan pemangku kepentingan di seluruh wilayah operasional untuk mengidentifikasi kelompok yang relevan serta menentukan pendekatan keterlibatan yang tepat. Umpan balik yang diperoleh melalui konsultasi, forum dialog, dan mekanisme pengaduan ditelaah dan dipertimbangkan dalam penilaian risiko dan dampak terkait ESG, sehingga memungkinkan PTVI merespons secara tepat waktu dan proporsional.

Mekanisme pengaduan kami melengkapi proses ini dengan menyediakan saluran yang mudah diakses bagi pemangku kepentingan untuk menyampaikan aspirasi, kekhawatiran, maupun permohonan penyelesaian. Melalui pendekatan ini, keterlibatan pemangku kepentingan mendukung pengelolaan dampak secara bertanggung jawab, menjaga social license to operate, serta memperkuat penciptaan nilai jangka panjang.

Tabel berikut menyajikan kelompok utama pemangku kepentingan PTVI sebagai acuan dalam pelaksanaan operasional dan pengelolaan keberlanjutan. Tabel tersebut menguraikan bentuk keterlibatan, isu utama yang menjadi perhatian, serta respons kami, sehingga memberikan gambaran terstruktur mengenai bagaimana masukan pemangku kepentingan diintegrasikan ke dalam aktivitas operasional dan proses pengambilan keputusan.



Jenis Pemangku Kepentingan	Pemangku Kepentingan	Peran dan Kepentingan	Bentuk Keterlibatan	Respons PTVI	Frekuensi Keterlibatan
Tenaga Kerja Internal	Karyawan, Manajemen PTVI, Kontraktor	Tenaga kerja merupakan pemangku kepentingan utama yang mendorong keberhasilan perusahaan melalui peningkatan kinerja ekonomi, keselamatan, dan pengelolaan lingkungan. Partisipasi aktif mereka mendukung optimalisasi produksi, manajemen risiko, serta pencapaian tujuan jangka panjang.	• Rapat internal dan saluran komunikasi • Platform pelatihan dan pembelajaran • Sistem evaluasi kinerja dan umpan balik • Forum hubungan industrial • Sesi komunikasi K3LH	• Penyusunan RJPP • Optimalisasi produksi dan penjualan • Implementasi VPS, CSMS, dan HSE • Program PNI & LBI • PKB & LKS Bipartit	• Laporan triwulanan, semester, tahunan • Evaluasi berkala • PKB setiap 2 tahun
Masyarakat Lokal & Pemangku Kepentingan Lokal	Masyarakat, Tokoh Formal & Informal, LSM	Hubungan yang kuat memastikan aspirasi dan kekhawatiran dapat ditangani serta mendukung pembangunan lokal berkelanjutan.	• Konsultasi masyarakat dan forum dialog • Forum multipihak (BKAD) • Mekanisme pengaduan • Kegiatan keterlibatan masyarakat	• Rekrutmen tenaga kerja lokal • Implementasi PPM • Komite tingkat desa • Penanganan pengaduan • Program pelatihan & pemberdayaan	• BKAD: 3x/tahun atau sesuai kebutuhan • Dialog bulanan/berbasis isu
Pemerintah	Pemerintah Pusat & Daerah, TNI, Polri	Memastikan kepatuhan regulasi, keselarasan kebijakan, dan stabilitas operasional.	• Rapat koordinasi dan pertemuan regulasi • Pelaporan dan pengungkapan • Konsultasi kebijakan • Forum koordinasi keamanan • Proses perizinan	• Pembayaran pajak & PNPB • Koordinasi dengan TNI/Polri • Pelaporan ESG & operasional • Kepatuhan AMDAL & regulasi	• Koordinasi berkelanjutan • Pelaporan berkala (Triwulan/ Semester/Tahunan) • Sesuai kebutuhan
Sektor Publik	BUMN, Institusi Publik	Mendukung keselarasan dengan kebijakan sosial-ekonomi dan inisiatif strategis.	• Forum kemitraan strategis • Koordinasi lintas sektor • Dialog kebijakan	• Proyek bersama • Partisipasi kebijakan • Kolaborasi keberlanjutan	• Pelaporan berkala (Triwulan/ Semester/Tahunan)

Jenis Pemangku Kepentingan	Pemangku Kepentingan	Peran dan Kepentingan	Bentuk Keterlibatan	Respons PTVI	Frekuensi Keterlibatan
Hubungan Bisnis	Investor, Pemasok, Mitra	Mendukung pendanaan, stabilitas rantai pasok, dan pertumbuhan operasional.	- Paparan investor - Forum pemasok - Saluran pengungkapan kinerja - Diskusi kemitraan	- Penyusunan RJPP - Laporan Tahunan & Keberlanjutan - Pengungkapan publik - Sosialisasi kebijakan pemasok	Pelaporan berkala (Triwulan/ Semester/Tahunan)
Pelanggan	Pelanggan	Mendukung peningkatan kualitas produk dan kepuasan pelanggan.	- Pertemuan rutin dan diskusi bisnis - Pengelolaan kontrak	- Penyelarasan dengan RJPP - Keterlibatan pelanggan berkelanjutan	Minimal bulanan
Media, Akademisi & LSM	Media, Akademisi, LSM	Mendukung transparansi, kepercayaan publik, dan penguatan berbasis riset.	- Interaksi media dan pers - Forum kolaborasi riset - Saluran komunikasi publik - Forum dialog	- Siaran pers & publikasi - Kolaborasi riset - Kemitraan terkait PPM	Sesuai kebutuhan

Tinjauan Materialitas^{[POJK51-E.3][GRI 3-1][GRI 3-2][GRI 3-3][GRI 201-2]}

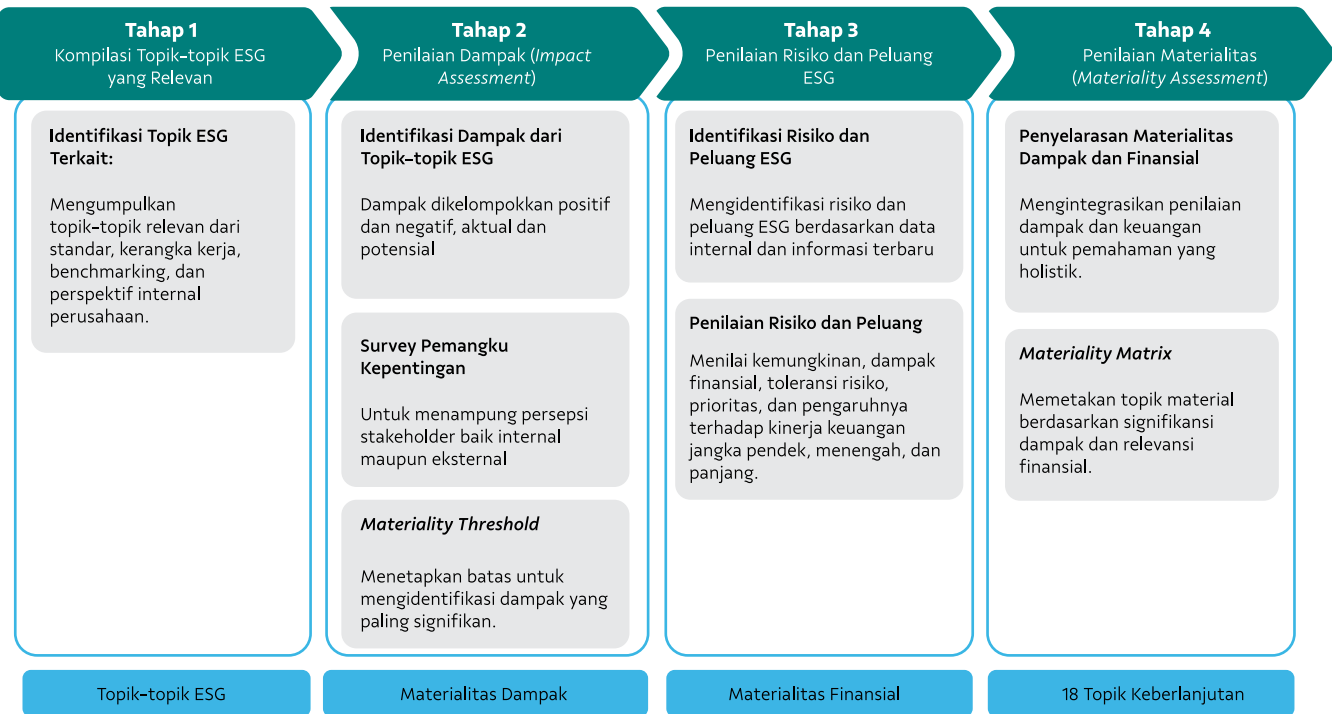
Memahami isu-isu yang paling signifikan memengaruhi bisnis dan pemangku kepentingan kami merupakan fondasi penting bagi strategi jangka panjang PTVI serta komitmen kami terhadap praktik pertambangan yang bertanggung jawab.

Sejalan dengan praktik industri, kami melakukan asesmen double materiality yang komprehensif pada 2024, dengan tinjauan tahunan untuk memvalidasi keberlanjutan relevansi topik-topik prioritas yang telah diidentifikasi.

Pendekatan kami mengacu pada *Global Reporting Initiative* (GRI), khususnya GRI 3: *Material Topics* 2021. Sesuai standar tersebut, topik material ditentukan berdasarkan signifikansi dampak kami terhadap ekonomi, lingkungan, dan manusia, termasuk hak asasi manusia, serta tingkat perhatian dan kepentingan para pemangku kepentingan. Kami juga menilai potensi implikasi topik-topik keberlanjutan terhadap operasional dan kinerja finansial kami.

Proses ini menghasilkan identifikasi 18 topik keberlanjutan yang merepresentasikan isu-isu ESG paling relevan di seluruh operasi dan rantai nilai kami. Topik-topik ini menjadi dasar untuk proses prioritas lebih lanjut dan terus menjadi acuan dalam strategi, pengelolaan risiko, serta pengungkapan kami.

Double Materiality Process



Tinjauan dan Prioritisasi Materialitas 2025

Melanjutkan asesmen double materiality tahun 2024, pada 2025 kami melakukan tinjauan terarah untuk memvalidasi keberlanjutan relevansi topik-topik keberlanjutan yang telah diidentifikasi, sekaligus memperkuat keselarasan topik-topik tersebut dengan konteks bisnis yang terus berkembang dan prioritas strategis kami.

Alih-alih melakukan asesmen ulang secara menyeluruh, kami menyempurnakan cara topik-topik tersebut diprioritaskan dan dikelola melalui proses evaluasi terstruktur yang mengintegrasikan perspektif pemangku kepentingan dan pertimbangan nilai bisnis.

Kami melibatkan enam kelompok pemangku kepentingan utama—karyawan dan serikat pekerja, LSM lokal dan masyarakat, regulator, investor, calon mitra, serta media—untuk mengonfirmasi kembali isu-isu prioritas. Kami juga menilai posisi kami saat ini untuk masing-masing topik dibandingkan dengan pelaku industri sejenis di tingkat lokal maupun global.

Setiap topik dievaluasi melalui dua perspektif yang saling melengkapi:

- **Perspektif pemangku kepentingan**, Perspektif pemangku kepentingan, yang menilai pentingnya suatu topik dalam menjaga

license to operate serta mendukung ambisi pertumbuhan kami; dan

- **Perspektif nilai**, yang mengevaluasi apakah kinerja saat ini sudah memadai sekaligus mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan penciptaan nilai melampaui praktik yang telah ada.

Selain itu, kami mengidentifikasi keterkaitan antar topik untuk mendorong pendekatan pengelolaan yang lebih terintegrasi dan terfokus.

Sebagai hasilnya, 18 topik keberlanjutan tersebut dikonsolidasikan dan diprioritaskan menjadi enam topik material yang mencakup dimensi lingkungan, sosial, dan tata kelola. Keenam topik material ini merepresentasikan area dengan signifikansi tertinggi bagi bisnis dan pemangku kepentingan kami, serta menjadi landasan strategi dan pengungkapan keberlanjutan kami.

Pendekatan ini memastikan topik-topik material kami tetap terfokus, dapat ditindaklanjuti, dan selaras dengan penciptaan nilai jangka panjang.

Topik Materialitas^{[GRI 3-2][GRI 3-3]}

No	Topik Material	Tingkat Materialitas Dampak				Tingkat Materialitas Finansial				Jangka Waktu	Strategi PTVI
		Positif	Skor (1-3)	Negatif	Skor (1-3)	Risiko	Skor (1-3)	Peluang	Skor (1-3)		
1	Pengelolaan Limbah dan Air	Peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat melalui pengelolaan air, limbah, dan tailing yang bertanggung jawab.	● ● ●	Pengelolaan air, limbah, dan tailing yang tidak efektif dapat menyebabkan pencemaran, kerusakan ekosistem, serta berkurangnya ketersediaan air.	● ● ●	Ketidakpatuhan terhadap standar limbah cair, kelangkaan air, serta kegagalan fasilitas tailing dapat memicu sanksi, biaya remediasi, dan gangguan operasional.	● ● ●	Inisiatif ekonomi sirkular, daur ulang air, dan pemanfaatan slag meningkatkan efisiensi sumber daya, menekan biaya, dan memperkuat kinerja lingkungan.	● ● ●	Jangka Pendek–Menengah	Memperkuat pengelolaan air terpadu, meningkatkan tata kelola tailing, memperluas inisiatif daur ulang dan pemanfaatan kembali, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi.
2	Produksi Rendah Emisi	Penurunan emisi gas rumah kaca melalui pengelolaan emisi dan energi yang efektif, berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim dan kualitas udara yang lebih baik.	● ● ●	Ketergantungan tinggi pada bahan bakar fosil meningkatkan emisi dan mempercepat degradasi lingkungan.	● ● ●	Kegagalan memenuhi target Net Zero dan standar emisi dapat mengakibatkan sanksi, peningkatan biaya operasional, dan penurunan daya saing.	● ● ●	Elektrifikasi, energi terbarukan, dan inisiatif dekarbonisasi meningkatkan efisiensi serta memperkuat posisi PTVI dalam rantai nilai rendah karbon.	● ● ●	Jangka Menengah–Panjang	Mempercepat roadmap dekarbonisasi melalui transisi energi, elektrifikasi operasional, serta integrasi energi terbarukan.
3	Pengelolaan Lahan	Perlindungan ekosistem melalui konservasi keanekaragaman hayati serta praktik penutupan dan rehabilitasi tambang yang bertanggung jawab.	● ● ●	Penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan kehilangan habitat, degradasi ekosistem, dan penurunan produktivitas lahan.	● ● ●	Kehilangan keanekaragaman hayati dan penutupan tambang yang tidak memadai dapat memicu sanksi, kerusakan reputasi, serta kewajiban lingkungan jangka panjang.	● ● ●	Inisiatif rehabilitasi pascatambang dan pemanfaatan lahan menciptakan peluang ekonomi alternatif dan meningkatkan kinerja ESG.	● ● ●	Jangka Menengah–Panjang	Menerapkan rehabilitasi progresif, memperkuat rencana pengelolaan keanekaragaman hayati, serta mengembangkan pemanfaatan lahan pascatambang yang selaras dengan kebutuhan masyarakat.

No	Topik Material	Tingkat Materialitas Dampak				Tingkat Materialitas Finansial				Jangka Waktu	Strategi PTVI
		Positif	Skor (1-3)	Negatif	Skor (1-3)	Risiko	Skor (1-3)	Peluang	Skor (1-3)		
4	Masyarakat Lokal	Pembangunan wilayah yang inklusif melalui keterlibatan masyarakat yang efektif, praktik relokasi yang adil, dan dampak ekonomi positif.	● ● ●	Keterlibatan yang tidak memadai atau relokasi yang tidak adil dapat memicu konflik sosial, gangguan mata pencaharian, dan menurunnya kepercayaan publik.	● ● ●	Sengketa lahan, protes masyarakat, dan ketidak-sesuaian ekspektasi dapat menghambat proyek dan mengancam <i>social license to operate</i> .	● ● ●	Kemitraan yang kuat, pembiayaan berkelanjutan, dan meningkatnya permintaan nikel yang bertanggung jawab mendorong pertumbuhan ekonomi bersama.	● ● ●	Jangka Pendek–Menengah	Memperkuat keterlibatan pemangku kepentingan, meningkatkan mekanisme pengaduan, memastikan praktik relokasi yang adil, serta menyelaraskan program masyarakat dengan prioritas lokal.
5	Kesejahteraan dan Inklusi	Lingkungan kerja yang aman dan inklusif melalui penerapan K3 dan praktik ketenagakerjaan yang adil meningkatkan ketahanan dan produktivitas tenaga kerja.	● ● ●	Penerapan K3 dan standar ketenagakerjaan yang lemah dapat menyebabkan kecelakaan kerja, diskriminasi, dan rendahnya moral karyawan.	● ● ●	Insiden kerja, perselisihan tenaga kerja, dan risiko kesehatan kerja dapat mengganggu operasional serta meningkatkan biaya hukum dan kompensasi.	● ● ●	Teknologi keselamatan, pengembangan tenaga kerja, dan praktik inklusi memperkuat ketahanan operasional dan retensi talenta.	● ● ●	Jangka Pendek–Menengah	Memperkuat budaya keselamatan, menerapkan sistem K3 yang preventif, memperluas program pelatihan, serta mendorong keberagaman dan inklusi.
6	Integritas Bisnis	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui tata kelola perusahaan yang baik dan praktik bisnis yang etis.	● ● ●	Kegagalan tata kelola dan praktik tidak etis dapat menimbulkan risiko hukum, kerusakan reputasi, dan menurunnya kepercayaan pemangku kepentingan.	● ● ●	Perubahan regulasi, tantangan perizinan, dan ketidakpatuhan dapat mengganggu operasional serta menurunkan kepercayaan investor.	● ● ●	Tata kelola yang kuat, rantai pasok yang bertanggung jawab, dan praktik transparan meningkatkan kredibilitas, menarik investasi, dan mendukung penciptaan nilai jangka panjang.	● ● ●	Jangka Pendek–Panjang (Berkelanjutan)	Memperkuat sistem kepatuhan, menegakkan kode etik, meningkatkan pengendalian internal, serta memastikan transparansi di seluruh operasional dan rantai pasok.



Peta Jalan ESG

Roadmap ESG PTVI menjadi kerangka terstruktur yang memandu integrasi prioritas lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) ke dalam strategi bisnis kami. Roadmap ini menguraikan pendekatan bertahap untuk memperkuat fondasi tata kelola, meningkatkan pengukuran dampak, serta mengintegrasikan pertimbangan ESG ke dalam operasional dan proses pengambilan keputusan.

Dalam beberapa tahun terakhir, PTVI terus meningkatkan tingkat kematangan ESG secara progresif melalui penguatan sistem manajemen, peningkatan pemantauan kinerja, serta penguatan mekanisme akuntabilitas di seluruh area operasional.

Penguatan Peta Jalan yang Sedang Berlangsung

Pada tahun 2025, PTVI memulai proses penguatan strategis terhadap Peta Jalan ESG untuk memastikan keselarasan dengan perkembangan jejak operasional, strategi pertumbuhan jangka panjang, serta aspirasi perusahaan.

Penguatan ini mencerminkan proses carve-out, ekspansi, dan pengembangan proyek IGP Morowali dan IGP Pomalaa yang menjadi tonggak penting dalam perjalanan pertumbuhan PTVI. Seiring dengan semakin luasnya portofolio operasional, penting bagi kami untuk memastikan bahwa kerangka ESG tetap komprehensif, terintegrasi, dan diterapkan secara konsisten di seluruh area operasional.

Proses peninjauan yang sedang berlangsung bertujuan untuk:

- Menyelaraskan prioritas ESG dengan proses carve-out

dan tahap pengembangan proyek baru

- Memastikan konsistensi standar dan ekspektasi kinerja di Sorowako, Morowali, dan Pomalaa
- Menyempurnakan target, metrik, dan langkah implementasi agar mencerminkan cakupan operasional yang semakin luas
- Memperkuat integrasi antara strategi ESG, manajemen risiko, dan perencanaan investasi

Proses ini mencerminkan komitmen PTVI terhadap pertumbuhan yang bertanggung jawab, serta integrasi aspek keberlanjutan sejak tahap pengembangan proyek hingga operasional dan penutupan tambang.

Menjaga Keberlanjutan Implementasi dan Kinerja

Selama proses penguatan roadmap berlangsung, implementasi ESG tetap dijalankan melalui struktur tata kelola dan sistem manajemen yang telah ada. Berbagai inisiatif utama terkait kinerja iklim, pengelolaan lingkungan, keterlibatan masyarakat, pengembangan tenaga kerja, serta tata kelola terus diimplementasikan dan dipantau.

Capaian atas komitmen ESG diungkapkan dalam laporan ini sebagai bentuk komitmen berkelanjutan PTVI terhadap praktik pertambangan yang bertanggung jawab dan penciptaan nilai jangka panjang.

Peta Jalan ESG yang telah diperbarui akan dikomunikasikan setelah proses penguatan ini selesai.

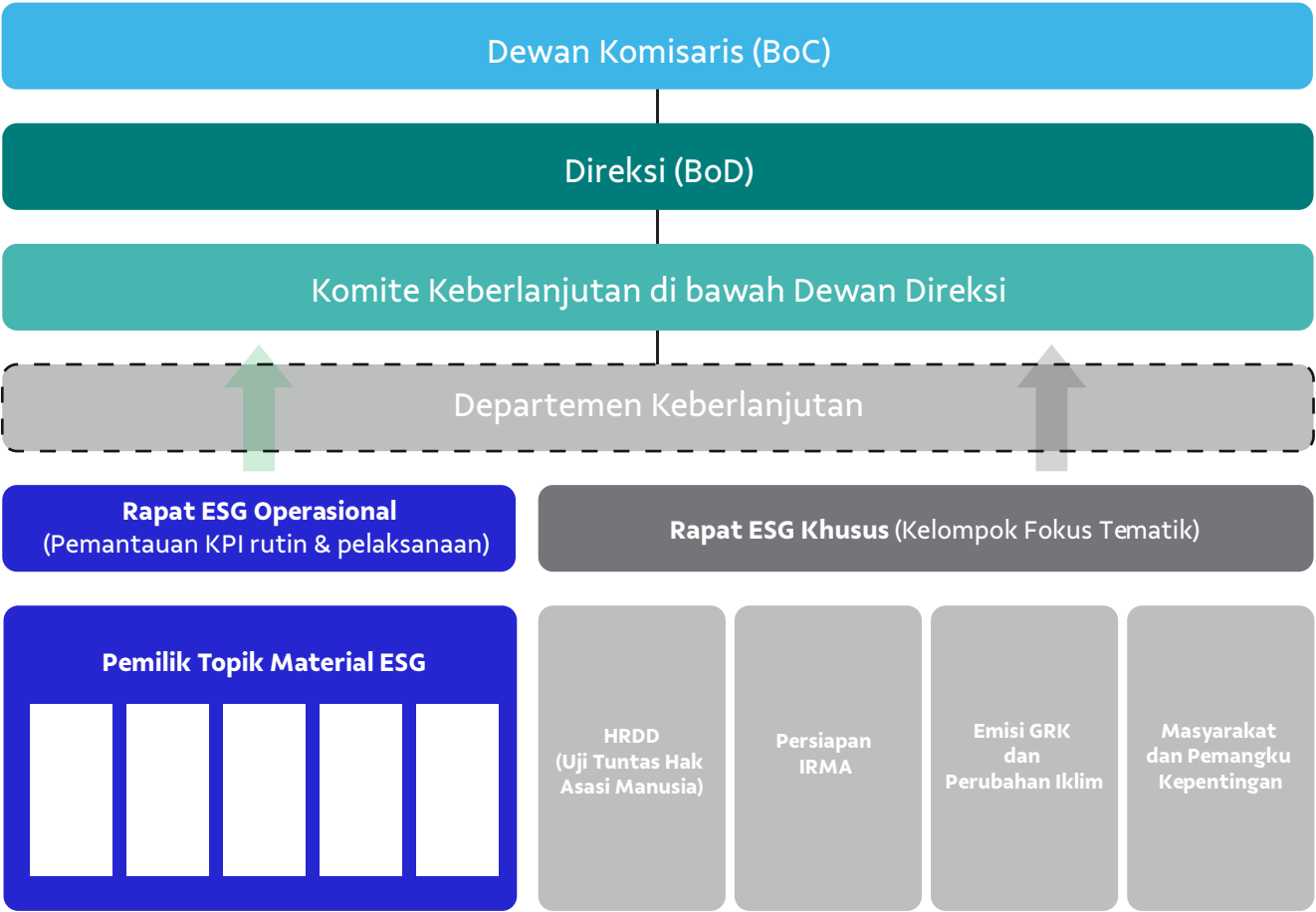


Tata Kelola Keberlanjutan^[POJK51-E.1]

PTVI memperkuat tata kelola keberlanjutan melalui pengawasan yang terstruktur baik di tingkat Direksi maupun manajemen. Isu-isu keberlanjutan dibahas melalui mekanisme tata kelola formal untuk memastikan keselarasan antara strategi perusahaan, manajemen risiko, kepatuhan terhadap regulasi, serta penciptaan nilai jangka panjang. Direksi bersama komite terkait menjalankan pengawasan aktif terhadap dampak, risiko, dan peluang keberlanjutan sebagai bagian dari kerangka tata kelola perusahaan secara keseluruhan.^{[GRI 2-12][GRI 2-13]}



KOMITE KEBERLANJUTAN



** the focus group may change from time to time, depending on specific agenda or goals that the company want to achieve*

Pada tahun 2025, PTVI menyelenggarakan lima rapat Komite Keberlanjutan untuk memantau kemajuan dan memberikan arahan terhadap prioritas utama ESG. Rapat-rapat ini menjadi platform untuk diskusi strategis yang efektif, koordinasi lintas fungsi, serta evaluasi kinerja atas inisiatif keberlanjutan di seluruh operasi kami. Departemen Keberlanjutan bertindak sebagai koordinator utama yang memastikan kebijakan dan strategi keberlanjutan diimplementasikan secara efektif.^[GRI 2-13]

Sepanjang tahun, pembahasan dalam Komite Keberlanjutan difokuskan pada penyempurnaan Peta Jalan ESG kami. Topik utama meliputi pengawasan penentuan materialitas, penyelarasan dengan lembaga pemeringkat ESG eksternal, peningkatan pengungkapan keberlanjutan, penguatan sistem pemantauan dan evaluasi, serta peninjauan kredensial keberlanjutan dan keselarasan dengan standar internasional. Komite juga meninjau akurasi dan kelengkapan informasi terkait keberlanjutan yang diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan ini.^[GRI 2-14]

Komite memberikan arahan terkait area prioritas dan alokasi sumber daya untuk mendukung peningkatan yang sistematis sejalan dengan standar pertambangan yang bertanggung jawab tingkat internasional.^[GRI 2-12]

Selain itu, Komite menerima pembaruan terkait pengelolaan dampak hak asasi manusia, termasuk penilaian risiko, identifikasi risiko HAM yang paling signifikan, investigasi, serta pengembangan langkah mitigasi yang berorientasi ke depan. Pembahasan menekankan penguatan integrasi pertimbangan HAM dalam pengambilan keputusan operasional dan proses pengelolaan pemasok, serta mekanisme pemulihan apabila dampak merugikan teridentifikasi (informasi lebih lanjut

mengenai Hak Asasi Manusia disajikan pada bagian Uji Tuntas Hak Asasi Manusia).^{[GRI 2-4][GRI 2-25]}

Melalui rapat berkala dan pengawasan yang terstruktur, PTVI memastikan bahwa aspek keberlanjutan tetap terintegrasi dalam proses tata kelola, perencanaan strategis, dan pelaksanaan operasional.^{[GRI 2-12][GRI 2-25]}

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Keberlanjutan

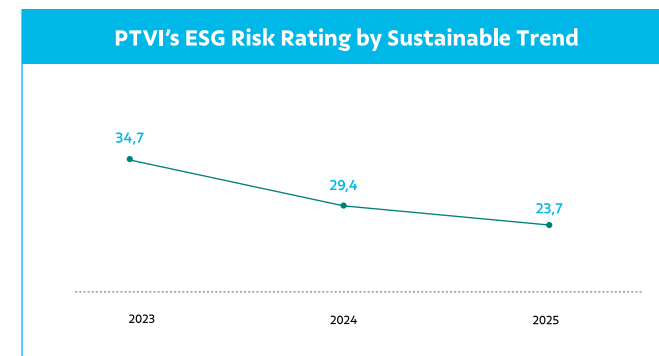
Pemantauan dan pelaporan merupakan bagian integral dari pendekatan pengelolaan keberlanjutan PTVI. Kinerja ESG dipantau melalui indikator kinerja utama (Key Performance Indicators/KPI) yang telah ditetapkan di seluruh topik material dan fungsi, serta dilaporkan secara berkala untuk memastikan keselarasan dengan roadmap keberlanjutan dan persyaratan regulasi.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap transparansi, PTVI secara konsisten menyampaikan Communication on Progress (CoP) tahunan dalam kerangka United Nations Global Compact (UNGC), yang mengungkapkan kemajuan terkait prinsip hak asasi manusia, ketenagakerjaan, lingkungan, dan anti-korupsi.

CoP tersebut tersedia untuk publik melalui platform UNGC.



Selain pemantauan internal, kinerja ESG PTVI juga dinilai oleh lembaga pemeringkat eksternal, termasuk Sustainalytics. Pada tahun 2025, skor Risiko ESG kami membaik menjadi 23,7 dibandingkan 29,4 pada tahun 2024, yang mencerminkan penurunan eksposur risiko ESG sebesar 19,4%. Skor tersebut masih berada dalam kategori Medium Risk, namun menunjukkan tren penurunan risiko yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir.



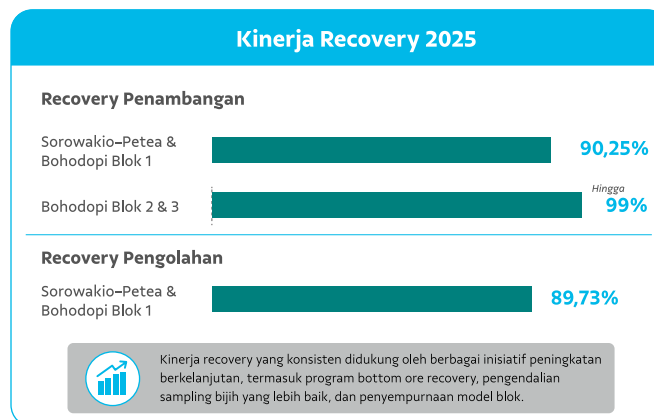
Peningkatan ini mencerminkan upaya berkelanjutan PTVI dalam memperkuat praktik pengelolaan risiko ESG serta menjaga pengawasan yang konsisten terhadap topik lingkungan, sosial, dan tata kelola yang material.

Konservasi Mineral dan Efisiensi Sumber Daya

Sebagai perusahaan pertambangan dan pengolahan nikel, PTVI menyadari bahwa pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab merupakan fondasi keberlanjutan lingkungan dan ketahanan operasional jangka panjang. Optimalisasi proses penambangan dan pengolahan memungkinkan pemanfaatan maksimum dari area tambang yang ada, sekaligus meminimalkan kehilangan material dan kebutuhan pembukaan lahan baru.

Pada tahun 2025, kegiatan penambangan dilakukan di Sorowako–Petea, Blok Bahodopi 1, serta Blok Bahodopi 2 dan 3, sementara belum terdapat aktivitas penambangan di Pomalaa. Total produksi bijih mencapai 15.918.295 wet metric tons (wmt). Kadar nikel rata-rata berada pada kisaran 1,61%–1,79%, mencerminkan penerapan grade control dan rekonsiliasi yang terstruktur untuk meminimalkan dilusi dan meningkatkan akurasi ekstraksi.^[GRI 301-1]

Kinerja *mining recovery* dipantau secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas ekstraksi terhadap cadangan yang dimodelkan. Pada tahun 2025, tingkat mining recovery di Sorowako–Petea dan Bahodopi Blok 1 mencapai rata-rata 90,25%, sementara Bahodopi Blok 2 dan 3 mencapai hingga 99%. Berbagai inisiatif peningkatan berkelanjutan—termasuk program bottom ore recovery, peningkatan kontrol sampling, dan penyempurnaan model blok—terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja ini.



Efisiensi pengolahan juga menjadi faktor kunci dalam konservasi mineral. Kegiatan pengolahan dan pemurnian di Sorowako–Petea dan Bahodopi Blok 1 mencapai tingkat recovery sebesar 89,73% pada tahun 2025, sejalan dengan parameter studi kelayakan. PTVI terus melakukan penyempurnaan operasional dan peningkatan teknologi untuk memaksimalkan perolehan nikel serta meminimalkan kehilangan material. Sementara itu, bijih dari Bahodopi Blok 2 dan 3 dijual ke pasar domestik tanpa melalui proses pengolahan internal.

Sebagai bagian dari praktik akuntansi mineral yang transparan, PTVI juga memantau mineral ikutan dalam produksi nikel matte. Pada tahun 2025, produksi kobalt tercatat sebesar 968 ton.

Pengelolaan material berkadar rendah dilakukan secara terstruktur untuk mendukung perencanaan jangka panjang. Selama tahun pelaporan, sebanyak 2.814.030 wmt bijih limonit dipisahkan dan dikelola sebagai bagian dari pengembangan

potensi pengolahan di masa depan. Pendekatan ini memastikan bahwa material tersebut tetap memiliki nilai ekonomi dan tidak diperlakukan sebagai limbah.



Sirkularitas material juga menjadi bagian integral dari konservasi sumber daya. Sepanjang tahun 2025, PTVI memanfaatkan kembali 5.352.400 ton slag dan 939.024 ton material reject dryer untuk pekerjaan sipil internal, seperti pembangunan jalan, infrastruktur tambang, dan stabilisasi lahan. Praktik ini membantu mengurangi timbulan limbah, menekan penggunaan material eksternal, serta meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya.^{[GRI 301-2][GRI 301-3]}

Melalui pemantauan recovery, optimalisasi proses, akuntansi mineral, dan pemanfaatan material secara sirkular, PTVI terus memperkuat pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab di seluruh rantai nilai pertambangan. Upaya ini mendukung kepatuhan regulasi, efisiensi operasional, serta pengurangan dampak lingkungan.



Peningkatan Efisiensi Pengolahan melalui Inovasi Terarah

Pada tahun 2025, PTVI terus menerapkan berbagai pengendalian operasional dan peningkatan teknologi untuk mengurangi kehilangan nikel serta meningkatkan efisiensi material dalam sistem pengolahan. Dua inisiatif utama memberikan dampak signifikan.

Pertama, peningkatan akurasi pemisahan slag-matte melalui penguatan sistem pemantauan pada proses *converter*. Peningkatan deteksi dan kontrol proses ini membantu mengurangi kehilangan nikel ke slag serta menjaga stabilitas recovery selama proses pemurnian.

Kedua, optimalisasi sistem granulasi melalui penerapan *oversize product crushing*, yang mengurangi sirkulasi reject dan meminimalkan kebutuhan reprocessing. Inisiatif ini memungkinkan material yang masih bernilai untuk langsung dimanfaatkan kembali dalam aliran produk jual, sehingga menekan kehilangan internal dan meningkatkan efisiensi proses secara keseluruhan.

Melalui inisiatif ini, PTVI berhasil meningkatkan presisi recovery dan efisiensi material dalam operasional pengolahan.

Rantai Pasokan yang Bertanggung Jawab

Pengadaan yang Bertanggung Jawab dan Uji Kelayakan

Kami menyadari bahwa risiko dan dampak keberlanjutan tidak hanya dapat timbul dari kegiatan operasional kami, tetapi juga dari aktivitas di sepanjang rantai pasok. Di PTVI, praktik pengadaan yang bertanggung jawab merupakan bagian yang terintegrasi dalam kerangka tata kelola dan manajemen risiko kami, untuk memastikan pemasok memenuhi standar ESG yang telah ditetapkan, selain persyaratan komersial dan teknis.

Keterlibatan dengan pemasok dimulai melalui proses prakualifikasi yang terstruktur dan mengacu pada pedoman internal. Pada awal 2025, PTVI menerapkan proses *Third Party Due Diligence* (TPDD) yang diperkuat, menggantikan mekanisme sebelumnya yaitu *Initial Risk Assessment Questionnaire* (IRAQ). Melalui TPDD, calon pemasok diwajibkan mengisi kuesioner komprehensif yang mencakup:

- Identitas organisasi dan kepemilikan manfaat (*beneficial ownership*)
- Pengurus perusahaan dan perwakilan hukum
- Keterkaitan politik dan aktivitas lobi
- Hubungan dengan pejabat pemerintah
- Riwayat pidana, hukum, dan kepatuhan regulasi
- Program kepatuhan serta penerapan ESG

Proses uji kelayakan ini wajib dilakukan bagi seluruh calon pihak ketiga sebelum dapat berpartisipasi dalam proses pengadaan, termasuk evaluasi tender dan pelaksanaan kontrak. Pemasok kemudian diklasifikasikan berdasarkan tingkat risiko (rendah, menengah, atau tinggi). Apabila teridentifikasi indikator risiko

yang lebih tinggi, langkah mitigasi tambahan dan verifikasi kepatuhan lanjutan dilakukan sebelum persetujuan diberikan.

Aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola diintegrasikan dalam seluruh proses penapisan ini. Kriteria lingkungan mencakup kepatuhan terhadap regulasi serta kinerja HSER, sementara aspek sosial dan tata kelola meliputi standar ketenagakerjaan, perilaku etis, dan penguatan integritas. Pada 2025, 100% pemasok—termasuk pemasok baru—telah dinilai terhadap aspek lingkungan dan sosial sebagai bagian dari proses uji kelayakan dan pengadaan PTVI. Pendekatan menyeluruh ini memastikan hanya mitra usaha yang bertanggung jawab dan patuh yang dapat berpartisipasi dalam rantai nilai kami.

[GRI 2-23][GRI 205-2][GRI 308-1][GRI 414-1]



100% pemasok
termasuk pemasok baru,
telah dinilai berdasarkan aspek
lingkungan dan sosial.

Setelah melalui proses TPDD, pemasok yang disetujui diwajibkan memformalkan komitmennya melalui perjanjian kontraktual. *Supplier Code of Conduct* (SCoC) kami menerjemahkan ekspektasi terkait tata kelola, integritas, lingkungan, dan hak asasi manusia ke dalam kewajiban kontraktual yang mengikat. SCoC melarang pekerja anak, kerja paksa, pembatasan kebebasan berserikat, serta praktik disipliner yang tidak pantas, termasuk hukuman fisik. Kode ini juga mewajibkan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan dan lingkungan yang berlaku.

Untuk memperkuat akuntabilitas, PTVI memasukkan mekanisme disipliner dalam perjanjian dengan pemasok dan kontraktor. Ketentuan ini mengatur jenis pelanggaran, tingkat keparahan, serta sanksi atau tindakan perbaikan yang dapat diterapkan, termasuk penghentian sementara maupun pemutusan kontrak apabila diperlukan.

Bagi pemasok yang beroperasi di area operasional kami, kepatuhan juga diperkuat melalui sistem badging wajib. Akses kerja dapat ditahan apabila persyaratan kontraktual, keselamatan, atau kepatuhan tidak dipenuhi atau terjadi pelanggaran.^{[GRI 2-23][GRI 407-1][GRI 408-1][GRI 409-1][GRI 414-2]}

Pemantauan dan Penegakan terhadap Pemasok

Seluruh pemasok dengan kontrak aktif berada dalam pemantauan kinerja berkelanjutan melalui *Contractor Performance Report* (CPR) bulanan, yang mengevaluasi kinerja operasional, HSER, dan kepatuhan kontraktual. Terdapat ambang batas kinerja minimum yang harus dipenuhi, dan kinerja yang terus berada di bawah standar dapat memengaruhi kelayakan untuk kontrak di masa mendatang.

Meskipun pada 2025 tidak terdapat pelatihan khusus *Human Rights Due Diligence* bagi pemasok, persyaratan terkait hak asasi manusia dan kepatuhan ketenagakerjaan tetap terintegrasi dalam klausul kontraktual, kontrol operasional, dan mekanisme pengawasan berkelanjutan.^[GRI 2-24]



Selama 2025, terdapat beberapa kasus terisolasi terkait keterlambatan pembayaran upah yang teridentifikasi melalui kanal pengaduan dan evaluasi berkala kinerja kontraktor. Permasalahan ini ditindaklanjuti melalui keterlibatan dengan kontraktor terkait, verifikasi kewajiban kontraktual, serta tindakan korektif lanjutan untuk mendukung penyelesaian secara tepat waktu. Berdasarkan hasil penelaahan yang dilakukan, tidak ditemukan pola berulang yang bersifat sistemik.

Pada tahun pelaporan yang sama, tiga kontrak vendor dihentikan setelah terkonfirmasi adanya pelanggaran yang diidentifikasi melalui proses pengendalian internal terkait aktivitas evaluasi anggaran. Tindakan tersebut dilakukan sesuai ketentuan kontraktual dan prosedur kepatuhan yang berlaku.

Mendukung Pemasok Domestik^[GRI 204-1]

Sebagai bagian dari komitmen kami untuk memperkuat partisipasi ekonomi domestik, PTVI melakukan penyajian kembali data Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sejak 2022, sejalan dengan perubahan metodologi perhitungan dan penerapan kriteria yang lebih ketat oleh regulator. Angka yang disajikan mencerminkan capaian berdasarkan produk tersertifikasi dan telah diverifikasi secara independen oleh PT Sucofindo yang ditunjuk oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Setelah mengalami penurunan pada tahun-tahun sebelumnya, capaian TKDN PTVI meningkat menjadi 40,58% pada 2025, atau naik 42% dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencerminkan

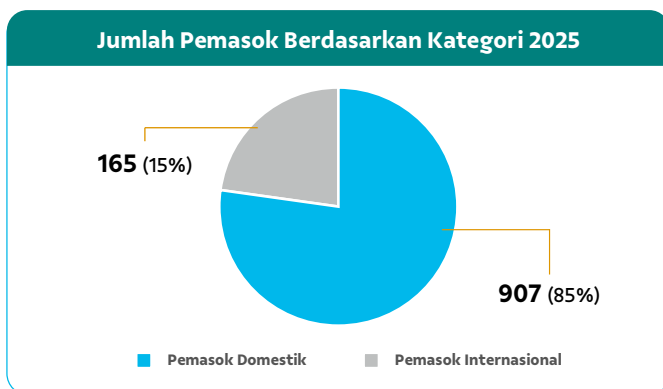
kemajuan dalam memperkuat penggunaan barang dan jasa dalam negeri. Peningkatan ini didukung oleh keterlibatan berkelanjutan dengan pemasok lokal, upaya mendorong kesiapan sertifikasi TKDN, serta penguatan koordinasi dalam proses pengadaan. Meski tantangan masih ada, terutama terkait kesiapan pemasok untuk memenuhi persyaratan sertifikasi, PTVI tetap berkomitmen meningkatkan kinerja TKDN sebagai bagian dari penguatan partisipasi rantai pasok nasional.

Capaian TKDN

2025	2024	2023
40,58%	28,52%	36,04%

Praktik pengadaan yang bertanggung jawab juga berkontribusi terhadap ketahanan ekonomi di wilayah operasional kami. Pada 2025, kami bekerja sama dengan 907 pemasok domestik, yang mewakili 85% dari total basis pemasok kami, sementara 165 pemasok atau 15% sisanya merupakan mitra internasional.





Belanja pengadaan juga mencerminkan komitmen ini. Pada 2025, alokasi belanja kepada pemasok domestik mencapai US\$895,4 juta atau 90% dari total pengeluaran pemasok, sementara US\$97,3 juta atau 10% dialokasikan kepada pemasok internasional. [GRI 204-1]

Nilai Pengadaan Berdasarkan Kategori Pemasok 2025 (US\$)

Description	Total (US\$)	%
Pemasok Domestik	895.424.509,35	90%
Pemasok Internasional	97.254.721,73	10%
Total	992.679.231,08	100%

Melalui prakualifikasi yang terstruktur, penilaian risiko berbasis tata kelola, penapisan ESG, uji kelayakan hak asasi manusia, pemantauan berkelanjutan, serta dukungan terhadap pemasok domestik, kami berupaya menjaga rantai pasok yang tangguh, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan tujuan keberlanjutan kami.

Tanggung Jawab atas Kualitas Produk dan Layanan

[POJK51-F.17]

PTVI memastikan bahwa proses produksi dan produk nikel yang dihasilkan telah memenuhi standar internasional serta kerangka regulasi yang berlaku. Operasional kami mengacu pada persyaratan seperti *Restriction of Hazardous Substances* (RoHS) dan ISO 17025, yang diakui secara luas di pasar ekspor, termasuk Uni Eropa. Selain itu, produk kami telah melalui klasifikasi bahaya sesuai dengan *Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals* (GHS) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan diimplementasikan di Indonesia melalui Peraturan Menteri Perindustrian No. 23 Tahun 2013.

Pada tahun pelaporan, selain nikel matte, PTVI mulai melakukan penjualan bijih nikel dari area proyek tertentu sesuai dengan persetujuan regulasi dan tahapan pengembangan yang berlaku. Prosedur pengendalian mutu serta mekanisme kepatuhan kontraktual diterapkan secara konsisten di seluruh portofolio produk untuk memastikan bahwa transaksi bijih nikel memenuhi spesifikasi teknis yang disepakati serta standar regulasi yang berlaku. [POJK51-F.27]

Sebagai produk antara dalam rantai nilai business-to-business, baik nikel matte maupun bijih nikel digunakan sebagai bahan baku untuk proses industri hilir dan tidak memiliki paparan langsung kepada konsumen akhir. Sepanjang periode pelaporan, tidak terdapat pengaduan terkait aspek keselamatan produk maupun dampak kesehatan dari karyawan, kontraktor, maupun pembeli. Tidak terdapat permintaan penarikan produk (*product recall*) dari pelanggan, yang mencerminkan konsistensi proses penjaminan mutu yang kami terapkan. [POJK51-F.28][POJK51-F.29]

Selain kualitas produk, PTVI juga menjaga keterlibatan yang terstruktur dengan pelanggan untuk memastikan keandalan layanan. Transaksi produk umumnya dilakukan melalui kontrak jangka panjang, sehingga tidak diterapkan mekanisme survei kepuasan pelanggan secara formal. Sebagai gantinya, kami menyelenggarakan pertemuan koordinasi secara berkala dengan pelanggan untuk membahas aspek operasional, spesifikasi produk, kinerja pengiriman, serta peluang peningkatan layanan. Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian isu secara tepat waktu, komunikasi yang transparan, serta peningkatan layanan secara berkelanjutan guna mendukung kemitraan jangka panjang. [POJK51-F.30]



Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Vale Indonesia Tbk

Jakarta, 28 Juli 2025

Tata Kelola

Menegakkan Good Corporate Governance



PTVI meyakini bahwa tata kelola yang kuat merupakan fondasi utama untuk mencapai tujuan keberlanjutan sekaligus memastikan ketahanan bisnis jangka panjang. Komitmen kami untuk menjalankan usaha secara etis, transparan, dan bertanggung jawab berlandaskan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang diterapkan secara konsisten di seluruh tingkat organisasi. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam menjalankan operasional, mengambil keputusan, serta membangun hubungan dengan para pemangku kepentingan.

Penerapan GCG didukung oleh kerangka tata kelola yang komprehensif, yang mencakup berbagai kebijakan, standar, dan pedoman internal. Di antaranya adalah Kebijakan Keberlanjutan, Kebijakan Anti-Korupsi, Kode Etik, serta berbagai piagam yang mengatur peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, dan komite pendukung. Melalui kerangka ini, kami memastikan bahwa prinsip tata kelola tidak hanya tertuang dalam dokumen formal, tetapi juga terintegrasi dalam praktik organisasi, sistem, serta proses pengambilan keputusan.

Di luar kepatuhan terhadap regulasi, tata kelola di PTVI juga difokuskan pada penguatan manajemen risiko, efektivitas fungsi pengawasan, serta pemberdayaan seluruh fungsi organisasi agar dapat menjalankan perannya secara bertanggung jawab dan efisien. Pendekatan ini mendukung upaya kami dalam meningkatkan kinerja operasional sekaligus memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional serta mendorong terciptanya iklim investasi yang bertanggung jawab.

Melalui penerapan prinsip tata kelola yang konsisten, PTVI berupaya memperkuat akuntabilitas, memitigasi risiko terkait tata kelola, serta mencegah potensi dampak negatif yang dapat timbul akibat praktik tata kelola yang tidak memadai.^[GRI 2-27]

Badan Tata Kelola

Struktur Tata Kelola^{[GRI 2-9][GRI 2-11]}



PTVI telah membangun struktur tata kelola yang mengacu pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta berlandaskan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). Kerangka tata kelola kami terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai organ tertinggi, Dewan Komisaris (BoC), dan Direksi (BoD), yang masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan peraturan yang berlaku serta Anggaran Dasar PTVI.

RUPS merupakan forum utama bagi pemegang saham untuk menjalankan hak dan kewenangannya. Melalui RUPS, pemegang saham menyetujui tindakan-tindakan korporasi yang strategis, menetapkan arah keputusan penting, serta

secara resmi mencalonkan dan mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi. RUPS juga berfungsi sebagai mekanisme akuntabilitas, di mana Dewan Komisaris dan Direksi menyampaikan laporan kinerja serta pelaksanaan tata kelola.

PTVI menerapkan struktur tata kelola dua tingkat (two-tier system), di mana Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan yang dilakukan oleh Direksi. Dewan Komisaris memberikan arahan strategis, nasihat, dan rekomendasi, sekaligus memastikan penerapan prinsip GCG secara konsisten. Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan secara menyeluruh, pelaksanaan operasional, serta pencapaian kinerja. Presiden Komisaris memimpin

Dewan Komisaris dan fungsi pengawasan, sementara Presiden Direktur memimpin Direksi dan fungsi eksekutif. Pemisahan peran yang tegas ini menciptakan mekanisme check and balance yang efektif, memperkuat akuntabilitas, serta memastikan praktik tata kelola yang sehat.

Kedua organ tata kelola tersebut didukung oleh komite dan fungsi manajemen untuk memastikan pelaksanaan tugas secara optimal. Komite di bawah Dewan Komisaris meliputi Komite Audit, Komite Tata Kelola, Nominasi, dan Remunerasi (KTNR), Komite Mitigasi Risiko, serta Komite Kontrak Karya. Sementara itu, Direksi didukung oleh berbagai fungsi manajemen utama, antara lain Human Capital, Legal, Sekretaris Perusahaan, Hubungan Investor, Keuangan, Kepatuhan dan Etika, Enterprise Risk Management, Komunikasi dan External Affairs, Corporate Affairs, Unit Audit Internal, serta Pengendalian Internal.

Kerangka tata kelola kami juga dipandu oleh berbagai instrumen internal, termasuk Kebijakan GCG, Kode Etik, Kebijakan Nominasi dan Remunerasi, serta kebijakan tata kelola lainnya, guna memastikan keselarasan dengan peraturan perundang-undangan, ketentuan regulator, dan praktik terbaik. Melalui instrumen tersebut, kami menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Akses Kebijakan Tata Kelola Perusahaan kami:



Proses Nominasi dan Komposisi Tata Kelola ^[GRI 2-9] ^[GRI 2-10]

Nominasi anggota organ tata kelola beserta komite pendukungnya dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 33/POJK.04/2014 serta Kebijakan Nominasi dan Remunerasi PTVI. Kebijakan ini mensyaratkan bahwa setiap kandidat harus menunjukkan integritas, kompetensi, keahlian dan pengalaman yang relevan, independensi dari benturan kepentingan maupun afiliasi politik, memiliki rekam jejak hukum dan profesional yang bersih, serta tidak memiliki hubungan usaha maupun hubungan keluarga yang dilarang dengan PTVI. Kandidat anggota Dewan Komisaris dan Direksi dapat dicalonkan oleh berbagai pihak, termasuk pemegang saham yang memenuhi persyaratan, Dewan Komisaris, Direksi, Komite Tata Kelola, Nominasi, dan Remunerasi (KTNR), maupun pihak lain seperti penasihat atau konsultan independen eksternal yang ditunjuk oleh KTNR.

Pencalonan komite pendukung Dewan Komisaris juga mengacu pada ketentuan yang berlaku yang diterbitkan oleh OJK. Ketentuan tersebut mengatur persyaratan komposisi komite, termasuk keterlibatan anggota Dewan Komisaris serta keberadaan Komisaris Independen di dalamnya. Rincian lebih lanjut mengenai ketentuan ini, beserta komposisi masing-masing komite, diungkapkan dalam Laporan Tahunan kami.

Pada tahun 2025, PTVI mengalami perubahan signifikan dalam susunan Dewan Komisaris dan Direksi. Perubahan tersebut dibahas dan disetujui melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 14 Januari 2025, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 16 Mei 2025, serta

RUPSLB pada 28 Juli dan 23 September 2025. Perubahan ini terjadi sebagai akibat dari pengunduran diri serta pemberhentian dengan hormat sejumlah anggota dewan. Salah satu perubahan utama adalah pengangkatan Bernardus Irmanto sebagai Presiden Direktur, sebagai tindak lanjut atas pengunduran diri Presiden Direktur sebelumnya. Selain itu, kami juga menunjuk Chief Human Capital Officer, Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer, serta Chief Strategy and Technical Officer yang baru untuk memperkuat kepemimpinan PTVI. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi pada akhir tahun disajikan dalam tabel terlampir.^{[POJK51-C.6][GRI 2-6]}

Dewan Komisaris	
Presiden Komisaris	F. S. Multhazar
Wakil Presiden Komisaris	Emily Olson
Komisaris	Kristina Gauthier
Komisaris	Christopher McCleave
Komisaris	M Jasman Panjaitan
Komisaris	Katherine Angela Oendoen
Komisaris	Shiro Imai
Komisaris Independen	Rudiantara
Komisaris Independen	Retno L.P. Marsudi
Komisaris Independen	Marita Alisjahbana
Direksi	
Presiden Direktur	Bernardus Irmanto
Wakil Presiden Direktur & Chief Operation and Infrastructure Officer	Abu Ashar
Direktur & Chief Human Capital Officer	Heriyanto Agung Putra
Direktur & Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer	Budiawansyah
Direktur & Chief Financial Officer	Rizky Andhika Putra
Direktur & Chief Project Officer	Muhammad Asril
Direktur & Chief Strategy and Technical Officer	Slamet Sugiharto

Komposisi dewan kami telah memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk persyaratan minimal tiga anggota Dewan Komisaris, 30% Komisaris Independen, serta dua anggota Direksi.

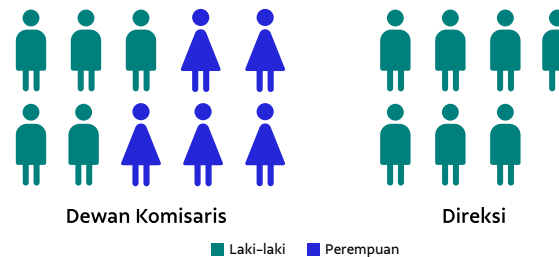
Seiring dengan perubahan komposisi dewan dalam periode pelaporan, Direksi saat ini belum memiliki anggota perempuan. Namun, Dewan Komisaris kini terdiri dari 50% perempuan, meningkat dari 30% pada tahun sebelumnya. Selain itu, keterwakilan perempuan pada komite pendukung juga telah melampaui 30%. Capaian ini mencerminkan komitmen berkelanjutan kami dalam mendorong keberagaman dan inklusi di tingkat tata kelola.

Kami juga mengungkapkan informasi rinci untuk setiap anggota organ tata kelola, termasuk masa jabatan, rangkap jabatan di perusahaan lain, serta kompetensi yang relevan, dalam bagian Profil Direksi, Profil Dewan Komisaris, dan Komite pada Laporan Tahunan kami. Silakan merujuk pada bagian tersebut untuk informasi lebih lanjut.



Statistik Organ Tata Kelola pada tahun 2025

Komposisi Dewan Komisaris (Non-eksekutif) dan Direksi (Ekssekutif))



Perseroan memiliki **10 anggota** Dewan Komisaris dan 7 anggota Direksi.

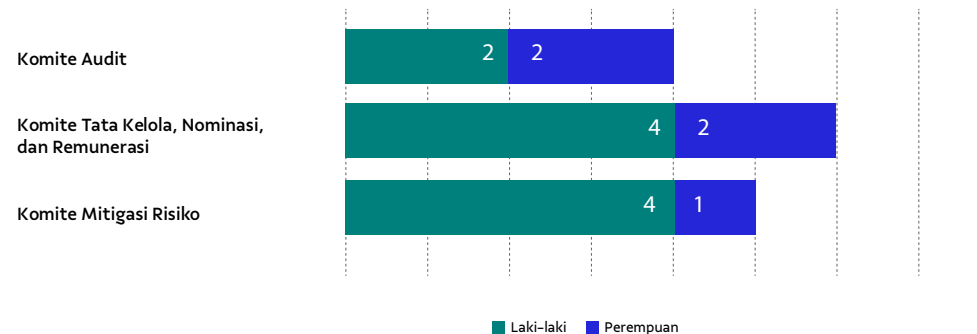
50%

dari Dewan Komisaris adalah perempuan.

30%

dari Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

Jumlah Anggota Komite Pendukung



Kinerja dan Proses Remunerasi Badan Tata Kelola

Proses Komunikasi Isu Strategis kepada Badan Tata Kelola [GRI 2-16]

PTVI memastikan bahwa organ tata kelola tertinggi memiliki akses yang penuh dan tepat waktu terhadap informasi serta isu-isu material yang relevan bagi organisasi. Komitmen ini ditegaskan dalam Piagam Direksi, yang menyatakan bahwa setiap Direktur memiliki akses penuh dan tidak terbatas kepada karyawan serta pihak ketiga, termasuk agen atau konsultan, untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam menjalankan tugasnya. Komite pendukung, seperti Komite Mitigasi Risiko dan Komite Audit, juga diwajibkan oleh piagam masing-masing untuk menyampaikan laporan berkala kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas temuan mereka, termasuk risiko utama, isu kepatuhan, serta aspek pengendalian internal, sehingga isu-isu signifikan dapat diangkat dan ditindaklanjuti secara tepat.

Selain itu, Direksi dan Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat secara triwulanan untuk membahas isu-isu kritis, perkembangan strategis, serta risiko utama yang dihadapi PTVI. Direksi juga melaksanakan townhall secara berkala dengan jajaran manajemen setiap triwulan guna memastikan keselarasan, meningkatkan transparansi, serta mendorong komunikasi dua arah terkait prioritas dan tantangan utama. Rincian pelaksanaan rapat Direksi diungkapkan dalam Laporan Tahunan kami.

Direksi berkoordinasi secara langsung dengan, dan Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap, Komite Keberlanjutan yang mengawasi dampak lingkungan dan sosial kami. Koordinasi dan pengawasan ini memastikan bahwa organ tata kelola tetap memperoleh informasi terkini

mengenai isu-isu lingkungan dan sosial yang krusial, sekaligus memperkuat keselarasan antara fungsi manajemen dan teknis dalam pengelolaannya. Organ tata kelola juga menerima laporan atas isu-isu penting yang disampaikan melalui mekanisme whistleblowing PTVI.

Pengembangan Kompetensi di bidang Keberlanjutan [GRI 2-17]

Badan tata kelola yang kompeten dan terus memperkuat serta memperbarui pemahaman terkait keberlanjutan merupakan elemen penting untuk memastikan efektivitas pengawasan atas misi keberlanjutan PTVI. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris secara berkelanjutan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman kolektif mereka di bidang keberlanjutan melalui program pendidikan dan pelatihan, serta partisipasi dalam dialog, lokakarya, dan konferensi. Dorongan sekaligus kewajiban untuk pengembangan berkelanjutan ini telah diatur secara formal dalam Piagam Direksi dan Piagam Dewan Komisaris.

Selama tahun pelaporan, anggota organ tata kelola berpartisipasi dalam berbagai inisiatif peningkatan kapasitas, baik secara individu maupun bersama, yang mencakup topik seperti implementasi ESG di sektor pertambangan, hilirisasi nikel yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, transisi energi dan dinamika geopolitik mineral kritis, keterlibatan pemangku kepentingan dan pengelolaan risiko ESG, serta ketahanan keuangan dan inovasi digital untuk mendukung praktik bisnis yang berkelanjutan. Rangkuman kegiatan peningkatan kapasitas tersebut disajikan pada tabel berikut.



Peningkatan Kapasitas Badan Tata Kelola dalam Bidang Keberlanjutan pada Tahun 2025^[POJK51-E.2]

Jenis Kegiatan	Topik	Ringkasan	Tanggal	Penyelenggara	Partisipan
Dialog	Implementing ESG in Indonesia's Nickel Mining Industry: Challenges and Opportunities	 Forum ini membahas penerapan prinsip ESG dalam industri pertambangan nikel di Indonesia, termasuk tantangan operasional, teknologi ramah lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat untuk memperkuat praktik pertambangan berkelanjutan.	2 Juni 2025	Indonesian Nickel Miners Association (APNI)	Bernardus Irmanto sebagai Panelis
Konferensi	Building Resilient Foundations – Insights from the Frontlines of Nickel Mining	 Konferensi ini membahas ketahanan industri, termasuk adaptasi PTVI terhadap dinamika industri, peran inovasi dan kepemimpinan, serta posisi Indonesia dalam rantai nilai nikel global.	10 Juni 2025	Indonesia Miner	Vinicius Mendes sebagai Keynote Speaker
Dialog	Jakarta Geopolitical Forum	 Forum ini membahas transisi energi sebagai isu strategis dalam geopolitik dan geoekonomi global, serta menyoroti praktik hilirisasi nikel berkelanjutan yang selaras dengan standar global.	25 Juni 2025	National Resilience Institute	Vinicius Mendes sebagai Panelis

Peningkatan Kapasitas Badan Tata Kelola dalam Bidang Keberlanjutan pada Tahun 2025^[POJK51-E.2]

Jenis Kegiatan	Topik	Ringkasan	Tanggal	Penyelenggara	Partisipan
Penghargaan	Sustainability Leadership: Aligning Business Purpose with Sustainable Development	Diskusi ini berfokus pada implementasi strategi ESG di industri ekstraktif, termasuk upaya mitigasi risiko ESG dan penguatan komunikasi antara perusahaan, masyarakat, dan lingkungan.	10 Juli 2025	Indonesia Social Responsibility Award (ISRA)	Bernardus Irmanto sebagai Panelis
Konferensi	Future CFO Indonesia Conference 2025	Konferensi ini membahas keseimbangan antara ekspektasi pemangku kepentingan dan disiplin keuangan, termasuk keamanan TI dan pemanfaatan AI untuk proyeksi arus kas.	17 Juli 2025	CXociety	Rizky A. Putra sebagai Panelis
Dialog	Driving Energy Transition & Green Mobility	 Sesi ini membahas kolaborasi lintas sektor, inovasi, dan strategi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan transisi energi.	24 Juli 2025	Olah Karsa bersama dengan S&P Global Sustainable	Bernardus Irmanto sebagai Panelis

Peningkatan Kapasitas Badan Tata Kelola dalam Bidang Keberlanjutan pada Tahun 2025^[POJK51-E.2]

Jenis Kegiatan	Topik	Ringkasan	Tanggal	Penyelenggara	Partisipan
Workshop	Mining Goes to Campus	 Program ini melibatkan mahasiswa dalam diskusi mengenai praktik pertambangan berkelanjutan, menyoroti peran nikel dalam transisi energi dan pentingnya partisipasi generasi muda.	1 Oktober 2025	PT Vale Indonesia	Bernardus Irmanto sebagai Panelis
Dialog	Indonesia at the Epicentre of Critical Minerals: Nickel, Copper, and the Global Energy Transition	 Diskusi ini menekankan pentingnya nikel dan tembaga dalam transisi energi global serta posisi strategis Indonesia dalam rantai pasok mineral kritis.	10 Oktober 2025	Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Investasi, Kamar Dagang dan Industri Indonesia	Bernardus Irmanto sebagai Panelis
Dialog	Indonesia Critical Minerals Forum	 Forum ini membahas peluang dan tantangan sektor mineral kritis di Indonesia, memperkuat posisinya di pasar global serta mendorong kolaborasi internasional.	13 Oktober 2025	APNI – PERHAPI	Bernardus Irmanto sebagai Panelis

Peningkatan Kapasitas Badan Tata Kelola dalam Bidang Keberlanjutan pada Tahun 2025^[POJK51-E.2]

Jenis Kegiatan	Topik	Ringkasan	Tanggal	Penyelenggara	Partisipan
Dialog	Maintaining Profitability Amid Fluctuating Global Commodity Prices	Diskusi ini menyoroti peran mineral kritis, hilirisasi industri, dan praktik pertambangan yang bertanggung jawab dalam mendukung industrialisasi berkelanjutan dan transisi energi.	16 Oktober 2025	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Slamet Sugiharto sebagai Panelis
Dialog	Pemanfaatan Lahan Pascatambang untuk Ketahanan Pangan, Peluang dan Tantangan dalam Pemanfaatan Lahan Kritis Pascatambang	Diskusi ini menyoroti pentingnya optimalisasi lahan pascatambang untuk mendukung ketahanan pangan melalui pendekatan berkelanjutan, serta mengatasi tantangan teknis dan sosial dalam rehabilitasi lahan.	16 Oktober 2025	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Budiawansyah sebagai Panelis
Dialog	Biofuel for the Nation: Collaborative Solutions for Green Energy Sustainability	Diskusi ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan biofuel sebagai bagian dari solusi energi hijau untuk mendukung transisi energi berkelanjutan.	2 Desember 2025	PT Pertamina Patra Niaga	Abu Ashar sebagai Panelis

Selain berperan sebagai panelis dan pembicara dalam berbagai forum, PTVI juga berpartisipasi dalam sejumlah sesi diskusi yang berfokus pada percepatan komitmen ESG di Indonesia, transisi energi, pengelolaan sumber daya, serta peran kepemimpinan dan investasi asing dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. Diskusi tersebut juga mencakup integrasi aspek keberlanjutan ke dalam strategi bisnis, operasional, dan proyek pertumbuhan PTVI, sejalan dengan transformasi menuju masa depan rendah karbon.

Evaluasi Kinerja Badan Tata Kelola^[GRI 2-18]

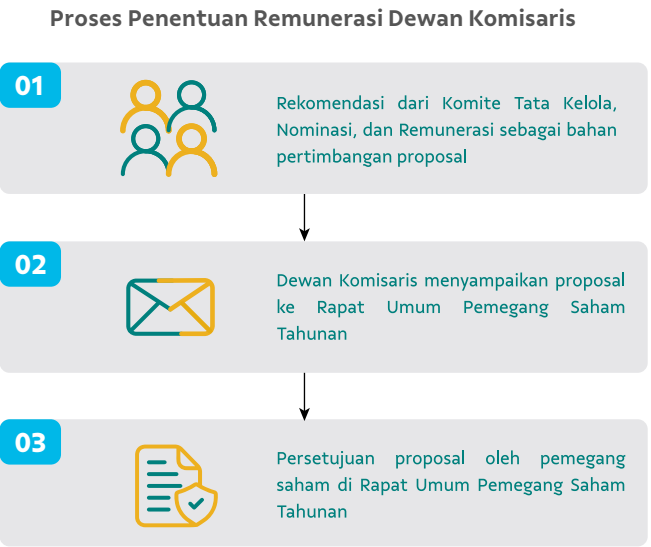
Kinerja Direksi dievaluasi setiap tahun pada awal tahun melalui proses yang terstruktur dan transparan sebagaimana diatur dalam Piagam Direksi. Setiap Direktur melakukan penilaian mandiri atas kinerja, baik secara kolektif sebagai Direksi maupun secara individual, berdasarkan indikator kinerja utama (KPI) yang telah ditetapkan pada awal tahun buku. Hasil penilaian tersebut kemudian dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

KPI tersebut juga mencakup indikator terkait pengelolaan dampak PTVI terhadap aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial, yang mengaitkan kompensasi eksekutif dengan kinerja keberlanjutan serta terintegrasi dalam evaluasi kinerja secara keseluruhan. KPI ditetapkan, dipantau, dan dievaluasi setiap tahun oleh Komite Tata Kelola, Nominasi, dan Remunerasi (KTNR). Selain itu, KTNR juga melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap anggota Direksi pada awal tahun dan menyampaikan hasilnya kepada Dewan Komisaris. Proses evaluasi ini dilaksanakan sesuai dengan Kebijakan Proses Nominasi dan Remunerasi, dan hasil penilaian tersebut menjadi dasar untuk mendorong peningkatan berkelanjutan dalam praktik tata kelola dan organisasi.

Kebijakan Remunerasi dan Rasio Kompensasi^{[GRI 2-19][GRI 2-20][GRI 2-21]}

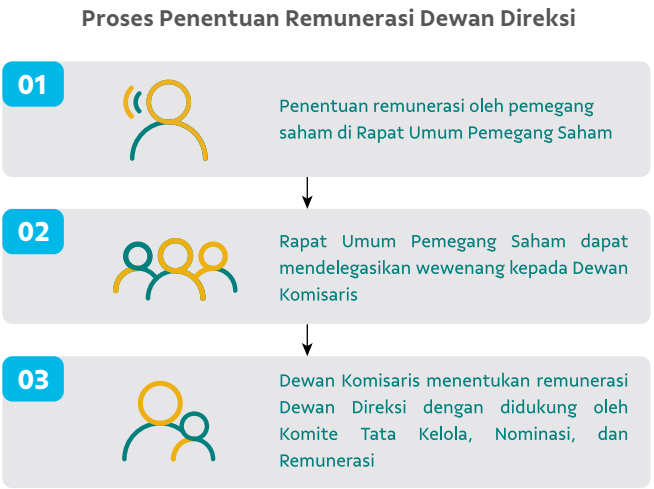
Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi diatur dalam Anggaran Dasar PTVI serta piagam Komite Tata Kelola, Nominasi, dan Remunerasi (KTNR). Kami memberikan remunerasi kepada Komisaris berkewarganegaraan Indonesia berdasarkan rekomendasi KTNR, yang mempertimbangkan perbandingan industri dari fungsi sumber daya manusia PTVI,

perusahaan publik sejenis, serta masukan dari pihak eksternal independen. Dewan Komisaris kemudian mengajukan struktur dan besaran remunerasi tersebut kepada pemegang saham untuk memperoleh persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Proses berikut digunakan dalam penetapan gaji dan manfaat ketenagakerjaan. PTVI tidak memberikan bonus berbasis kinerja, bonus non-kinerja, maupun opsi saham kepada Dewan Komisaris.



Remunerasi Direksi ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kewenangan tersebut dapat didelegasikan kepada Dewan Komisaris dan dalam praktiknya dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dengan dukungan Komite Tata Kelola, Nominasi, dan Remunerasi (KTNR). KTNR mengusulkan remunerasi Direksi dengan mempertimbangkan peran dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi serta kontribusinya terhadap pencapaian tujuan dan kinerja PTVI, kinerja individu dan pencapaian target, perbandingan

dengan perusahaan sejenis, remunerasi pada tahun-tahun sebelumnya, keseimbangan antara komponen tetap dan variabel, serta faktor relevan lainnya yang ditetapkan oleh komite. Proses tersebut berlaku untuk penetapan gaji, manfaat ketenagakerjaan, bonus berbasis kinerja maupun non-kinerja, serta manfaat purna jabatan Direksi. Direksi tidak menerima manfaat lainnya, seperti opsi saham.



Sebagai bagian dari komitmen kami terhadap transparansi, PTVI mengungkapkan informasi mengenai perbandingan antara kompensasi eksekutif dan karyawan. Perhitungan ini menggunakan total kompensasi tahunan, yang mencakup gaji, bonus, penghargaan berbasis saham, opsi saham, insentif non-ekuitas, perubahan nilai manfaat pensiun, serta pendapatan dari kompensasi tangguhan non-kualifikasi.

Sejalan dengan komitmen terhadap transparansi dan penerapan tata kelola yang baik, PTVI Indonesia Tbk juga mengungkapkan perbandingan remunerasi antara manajemen kunci dan karyawan. Remunerasi personel manajemen kunci,

yang terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi, mencakup gaji dan manfaat jangka pendek, manfaat pasca-kerja, serta pembayaran berbasis saham.

Pada tahun 2025, total kompensasi Dewan Komisaris tercatat sebesar US\$2,618 juta, setara dengan 2,6% dari total biaya karyawan. Sementara itu, Direksi menerima total kompensasi sebesar US\$6,317 juta, atau 6,3% dari total biaya karyawan. Secara keseluruhan, total kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi mencapai US\$8,935 juta, yang merepresentasikan 8,9% dari total biaya karyawan PTVI.

Etika Bisnis & Kepatuhan

Di PTVI, komitmen kami terhadap praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab berlandaskan nilai CARES—Compassion, Accountability, Resilience, Excellence, dan Sustainability. Nilai-nilai ini menjadi panduan dalam pengambilan keputusan serta mendorong integritas, transparansi, dan kepatuhan di seluruh kegiatan operasional. Nilai tersebut juga tertanam dalam Kode Etik sebagai pedoman praktis untuk menjalankan bisnis secara bertanggung jawab dan konsisten.

Kode Etik kami menetapkan standar perilaku yang diharapkan dari seluruh karyawan, manajemen, serta anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Di dalamnya mencakup prinsip-prinsip terkait praktik bisnis yang etis, pencegahan korupsi, pengelolaan benturan kepentingan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kode Etik juga mengatur penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk non-diskriminasi, praktik ketenagakerjaan yang adil, kebebasan berserikat, serta larangan pekerja anak dan kerja paksa, sejalan dengan regulasi yang berlaku dan standar

internasional yang diakui.

Kode Etik ini disetujui oleh Direksi dan diawasi oleh Dewan Komisaris, sebagai wujud akuntabilitas pada tingkat tata kelola tertinggi.

Implementasi Kode Etik dilakukan melalui komunikasi internal, pelatihan berkala, serta proses pernyataan kepatuhan oleh karyawan. Prinsip-prinsipnya juga terintegrasi dalam kebijakan perusahaan dan prosedur operasional. Standar ini turut diterapkan kepada mitra usaha melalui Supplier Code of Conduct, yang menetapkan ekspektasi terkait etika, kepatuhan, praktik ketenagakerjaan, serta tanggung jawab lingkungan.

Akses Kode Etik kami:



Antikorupsi [SASB EM-MM-510a.1]

Risiko korupsi kami identifikasi sebagai risiko material yang mencakup seluruh ruang lingkup kegiatan PTVI (100% operasi), mengingat kelemahan dalam penerapan Good Corporate Governance, termasuk pengendalian anti-korupsi, dapat menimbulkan risiko hukum, finansial, maupun reputasi.

PTVI beroperasi di Indonesia, di mana tantangan tata kelola masih menjadi perhatian, sebagaimana tercermin dalam Corruption Perceptions Index oleh Transparency International, meskipun Indonesia tidak termasuk dalam kelompok negara dengan peringkat terendah. Dalam konteks tersebut, kami menerapkan pengendalian internal dan mekanisme tata kelola

yang kuat serta menegakkan pendekatan zero tolerance terhadap segala bentuk korupsi.^{[GRI 205-1][SASB EM-MM-510a.2]}

Komitmen kami dalam pencegahan korupsi diformalkan melalui Kebijakan Anti-Korupsi yang disetujui pada April 2025 dan dijadwalkan untuk ditinjau kembali pada tahun 2027. Kebijakan ini berlaku bagi seluruh organ tata kelola, karyawan, serta mitra usaha PTVI. Kebijakan tersebut memberikan panduan mengenai perilaku yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, termasuk dalam pemberian hadiah dan jamuan, investasi sosial dan lingkungan, interaksi dengan pejabat pemerintah, uji kelayakan pihak ketiga, serta pengungkapan hubungan dengan pejabat pemerintah. Kebijakan ini secara tegas melarang praktik suap, yang kami definisikan sebagai pemberian, penawaran, permintaan, atau penerimaan sesuatu yang bernilai untuk memengaruhi secara tidak semestinya pejabat pemerintah maupun pihak lain. Selain itu, kebijakan ini juga melarang facilitation payments, yaitu pembayaran untuk mempercepat proses administratif rutin. Pemberian hadiah dalam bentuk uang tunai, kontribusi politik yang tidak semestinya, serta penggunaan pihak ketiga untuk melakukan tindakan yang dilarang juga tidak diperkenankan.

Untuk memastikan implementasi yang efektif, kami mengomunikasikan dan memperkuat kebijakan ini melalui berbagai saluran. Pelatihan anti-korupsi tersedia dalam bentuk modul e-learning wajib yang dapat diakses melalui platform intranet internal. Kesadaran juga diperkuat melalui komunikasi internal, termasuk poster dan imbauan berkala, serta melalui ketentuan kontraktual yang memasukkan kewajiban anti-korupsi bagi karyawan maupun pemasok.

Kami memberikan perhatian khusus kepada karyawan yang memiliki peran dengan intensitas interaksi tinggi dengan instansi atau pejabat pemerintah. Ketidakpatuhan terhadap

Kebijakan Anti-Korupsi akan dikenakan sanksi disipliner, termasuk kemungkinan pemutusan hubungan kerja atau penghentian kontrak dengan pihak ketiga.



348

karyawan

telah mengikuti pelatihan anti-korupsi melalui platform pembelajaran digital PTVI. ^[GRI 205-2]

Karyawan yang Mengikuti Pelatihan Anti Korupsi pada Tahun 2025^[GRI 2-18]

Posisi	Total
Manajemen	5
Manajer Umum atau Spesialis	18
Staf Senior atau Manajer	103
Staf	146
Non-staf	76
TOTAL	348

Transparansi merupakan pilar utama dalam komitmen anti-korupsi kami. PTVI mengungkapkan informasi mengenai beneficial ownership, yang disajikan secara ringkas dalam laporan ini dan dijelaskan lebih rinci dalam Laporan Tahunan kami. Pengungkapan ini membantu mencegah penyalahgunaan struktur perusahaan untuk praktik korupsi serta memperkuat akuntabilitas kepada pemangku kepentingan. Kami juga menjaga transparansi dalam hubungan dengan instansi pemerintah, sebagaimana diuraikan lebih lanjut pada bagian berikutnya, guna mempertahankan kepercayaan pemangku

kepentingan terhadap tata kelola dan integritas kami. ^[GRI 14.22.6]

Sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko korupsi di seluruh rantai pasok, seluruh kontrak dengan pihak ketiga memuat klausul anti-korupsi yang melarang segala bentuk praktik korupsi. Selain itu, kami mengoperasikan sistem pengadaan elektronik berbasis web untuk meningkatkan transparansi dalam seluruh proses pengadaan. Sistem ini mencakup seluruh tahapan, mulai dari registrasi vendor, pra-kualifikasi, proses tender barang dan jasa, hingga pengelolaan kontrak. Pembukaan tender diumumkan secara terbuka melalui situs pengadaan kami, sehingga memungkinkan pemangku kepentingan untuk memantau tender yang sedang berlangsung maupun yang telah selesai.

Melalui mekanisme whistleblowing yang dijelaskan lebih lanjut pada bagian berikutnya, kami mencatat tidak terdapat kasus korupsi yang terkonfirmasi di seluruh operasi PTVI yang melibatkan anggota organ tata kelola, karyawan, maupun mitra usaha. Dengan demikian, tidak terdapat kontrak kerja maupun kemitraan yang dihentikan atau tidak diperpanjang akibat kasus korupsi. ^[GRI 205-3]

Hubungan dan Keterlibatan dalam Aktivitas Politik

PTVI menjaga transparansi dengan mengungkapkan informasi terkait interaksi kami dengan Pemerintah melalui Laporan Tahunan dan situs resmi perusahaan. Meskipun IUPK dan beberapa perizinan tertentu tidak dapat diakses secara publik karena ketentuan hukum dan aspek kerahasiaan yang berlaku di sektor pertambangan di Indonesia, kami tetap mengungkapkan ketentuan-ketentuan utama yang relevan dengan operasional, termasuk pembayaran yang dilakukan kepada Pemerintah.

Sebagai pemegang IUPK, PTVI berkewajiban untuk memberikan kontribusi kepada Pemerintah Indonesia dalam bentuk pembayaran bagi hasil sebesar 10% dari laba bersih, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, kami juga tunduk pada kewajiban divestasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewajiban ini menegaskan kontribusi kami kepada negara sekaligus mendukung pembangunan daerah. ^[GRI 14.22.5]

Untuk menjaga independensi dan mencegah pengaruh politik yang tidak semestinya, Kebijakan Anti-Korupsi kami secara tegas melarang karyawan maupun eksekutif untuk memberikan donasi atau kontribusi politik, baik dalam bentuk uang maupun non-uang, secara langsung maupun tidak langsung atas nama PTVI. Larangan ini mencakup kontribusi kepada partai politik, kandidat politik, maupun kegiatan kampanye. Kebijakan ini juga pada prinsipnya melarang pemberian cuti, baik berbayar maupun tidak berbayar, kepada karyawan atau eksekutif untuk tujuan mencalonkan diri dalam jabatan politik atau mendukung partai maupun kandidat politik, kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau perjanjian kerja bersama yang berlaku. ^[GRI 415-1]

Persaingan Usaha yang Sehat

Sejalan dengan nilai utama kami, *Accountability*, PTVI berkomitmen untuk menjunjung tinggi persaingan usaha yang bebas dan adil sebagai fondasi bagi lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Kami menjalankan kegiatan usaha dengan integritas serta mendorong praktik pasar yang bebas dari kecurangan, kolusi, penetapan harga, pengaturan tender, maupun bentuk manipulasi lainnya, baik dalam hubungan dengan pihak sektor publik maupun swasta. Komitmen ini diformalkan dalam Kebijakan Anti-Monopoli PTVI, yang menjadi pedoman dalam menjaga persaingan usaha yang sehat di seluruh aktivitas bisnis kami.

Kebijakan ini secara tegas melarang perwakilan maupun pihak ketiga untuk terlibat dalam segala bentuk kesepakatan, perjanjian—baik secara eksplisit maupun implisit—atau praktik terkoordinasi dengan pesaing untuk memanipulasi harga, membagi pasar atau pelanggan, membatasi pasokan, atau merusak mekanisme persaingan dalam proses tender. Kebijakan ini juga mewajibkan agar seluruh interaksi dengan pihak ketiga menghindari praktik anti-persaingan secara sepihak, penyalahgunaan kekuatan pasar, maupun pembatasan vertikal yang melibatkan pesaing, pelanggan, pemasok, atau pihak lain yang dapat berdampak negatif terhadap persaingan yang sehat, konsumen, maupun masyarakat luas. Selama tahun pelaporan, tidak terdapat kasus perilaku anti-persaingan, pelanggaran anti-monopoli, maupun praktik monopoli di seluruh operasi PTVI. [GRI 206-1]

Pembayaran kepada Pemerintah dan Kepatuhan Pajak

Pembayaran pajak merupakan bagian penting dari upaya kami dalam mewujudkan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mentransformasi masa depan bersama. Pendekatan perpajakan PTVI dipandu oleh kebijakan internal yang memastikan pengelolaan pajak secara bertanggung jawab serta selaras dengan peraturan yang berlaku. Direktorat Keuangan mengawasi strategi dan pengelolaan perpajakan melalui fungsi Keuangan.

PTVI berkomitmen untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami tidak menerapkan praktik perpajakan yang agresif, dan pertimbangan pajak bukan menjadi pendorong utama dalam pengambilan keputusan bisnis. Sebaliknya, pendekatan perpajakan kami mendukung strategi bisnis PTVI, termasuk komitmen dalam menciptakan nilai jangka panjang bagi lingkungan dan sosial. Prinsip-prinsip

berikut menjadi dasar dalam strategi perpajakan tersebut. [GRI 207-1][GRI 207-2]



Komite Audit mengawasi proses identifikasi dan pengelolaan potensi risiko perpajakan, sementara konsultan eksternal memberikan keahlian independen dalam menangani isu perpajakan yang kompleks atau berisiko tinggi. Setiap permasalahan atau perbedaan interpretasi perpajakan ditangani melalui proses penelaahan internal dan eskalasi, serta didukung—apabila diperlukan—oleh penasihat hukum dan pajak eksternal serta mekanisme penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. [GRI 207-2][GRI 207-3]

Keterlibatan dengan otoritas pajak merupakan prinsip utama dalam pendekatan perpajakan kami. Kami secara proaktif berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak setempat untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap kewajiban

perpajakan, baik badan maupun individu. Kami juga terbuka terhadap kegiatan sosialisasi dan kunjungan dari otoritas pajak guna meningkatkan pemahaman atas kewajiban perpajakan. Bersama otoritas terkait, kami turut mendukung penyebaran informasi perpajakan kepada karyawan. [GRI 207-3]

Karena seluruh operasi PTVI berada di Indonesia, laporan ini mencakup pembayaran pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang disetorkan kepada Pemerintah Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pada tahun 2025, kami membayarkan US\$164.345 ribu kepada otoritas pemerintah, turun 18,7% dibandingkan tahun 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh lebih rendahnya pembayaran pajak, khususnya pajak penghasilan badan, sejalan dengan perubahan laba kena pajak dan kinerja usaha secara keseluruhan. Dibandingkan tahun 2023, total pembayaran relatif stabil, menunjukkan normalisasi setelah kontribusi fiskal yang lebih tinggi pada tahun sebelumnya.

Pembayaran pajak mencapai US\$112.283 ribu pada tahun 2025, setara 68,3% dari total pembayaran kepada pemerintah. Nilai ini menurun 35,7% dibandingkan tahun 2024, terutama disebabkan oleh penurunan signifikan pada pajak penghasilan badan yang mencerminkan lebih rendahnya laba kena pajak selama tahun berjalan. Meski demikian, komponen pajak lainnya, termasuk pajak penghasilan karyawan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, pajak daerah, pajak pemotongan, serta bea masuk dan cukai, tetap memberikan kontribusi yang konsisten. Dibandingkan tahun 2023, penurunan ini juga mencerminkan variabilitas pajak berbasis pendapatan yang dipengaruhi oleh kinerja laba.

Dari sisi komposisi, pembayaran kepada pemerintah pusat tetap menjadi porsi terbesar dari total kontribusi,

mencerminkan kewajiban fiskal sesuai regulasi nasional. Sementara itu, pembayaran kepada pemerintah daerah tetap berperan penting dalam mendukung pembangunan lokal, khususnya di Luwu Timur, Morowali, dan Kolaka, wilayah tempat kami beroperasi.

Pembayaran Pajak dan PNBP (US\$ ribu)

Deskripsi	2025	2024	2023
Pembayaran Pajak	112.283	174.503	163.189
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	52.062	27.702	41.392
Total Pembayaran Pajak dan PNBP	164.345	202.205	204.582

Komponen Pajak yang Dibayarkan oleh PTVI (US\$ ribu)

Komponen Pajak	2025	2024	2023
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	15.376	15.030	6.532
Pajak Bumi dan Bangunan (P3)	6.074	3.204	3.121
Kab. Luwu Timur	5.873	2.794	2.723
Kab. Morowali	82	196	190
Kab. Kolaka	119	213	208
Pajak Penghasilan Karyawan	19.816	18.706	14.340
Pajak Penghasilan Badan	19.756	91.430	91.618
Pajak Daerah, Retribusi, dan Hibah	33.845	33.616	30.565
Pajak Pemotongan Pihak Ketiga	12.707	8.209	12.409
Bea Masuk	4.709	4.307	4.603
Total	112.283	174.503	163.189

Komponen PNBP	2025	2024	2023
Royalti Produksi	45.553	19.449	33.990
Kab. Luwu Timur	28.038	19.449	33.990
Kab. Morowali	15.644	–	–
Kab. Kolaka	1.870	–	–
Iuran Tetap Wilayah Kontrak Karya	437	459	455
Kab. Luwu Timur	261	275	272
Kab. Morowali	84	88	87
Kab. Kolaka	92	96	95
PNBP Lainnya	6.073	7.794	6.948
Total	52.062	27.702	41.392

Kredibilitas pengungkapan perpajakan kami diperkuat melalui audit eksternal atas laporan keuangan yang dilakukan secara berkala oleh kantor akuntan publik independen. Ruang lingkup, proses, dan hasil audit tersebut diungkapkan dalam Laporan Tahunan PTVI, yang memberikan keyakinan atas akurasi, kelengkapan, serta kepatuhan pelaporan keuangan dan perpajakan kami.

Selain itu, kami juga memperkuat integritas tata kelola perpajakan dengan menyediakan saluran yang mudah diakses dan bersifat rahasia untuk menyampaikan kekhawatiran terkait perilaku bisnis, termasuk isu perpajakan, melalui mekanisme whistleblowing. Mekanisme ini dijelaskan lebih lanjut pada bagian berikutnya dalam bab ini.^[GRI 207-2]



Kolaborasi untuk Kemudahan Kepatuhan Pajak



Pada Desember 2025, PTVI bekerja sama dengan KP2KP Malili di bawah KPP Pratama Palopo untuk menyelenggarakan inisiatif Pojok Pajak selama empat hari, pada 9–12 Desember, di tiga lokasi strategis: Kantin Plant Site Siloku, Kantor Mining Harapan, dan Area Enggano.

Melalui program pendampingan langsung ini, karyawan memperoleh dukungan dalam aktivasi akun Coretax Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pembuatan kode otorisasi DJP, konsultasi perpajakan, serta pembaruan data wajib pajak. Inisiatif ini merupakan bagian dari persiapan menghadapi tahun pajak berikutnya, di mana pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) akan sepenuhnya dilakukan melalui platform Coretax DJP.

Pendekatan sosialisasi secara langsung ini membantu meningkatkan pemahaman karyawan terhadap sistem perpajakan yang baru sekaligus memastikan kelancaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan seiring dengan perkembangan regulasi. Mengingat jumlah tenaga kerja kami yang besar, kolaborasi ini mencerminkan keterlibatan proaktif kami dengan otoritas pajak dalam memperkuat kesadaran dan kesiapan kepatuhan perpajakan.

Kami mengapresiasi dukungan yang diberikan melalui inisiatif Pojok Pajak. Pendampingan langsung di tempat kerja membantu karyawan memahami sistem Coretax dengan lebih baik serta mempersiapkan pelaporan SPT Tahunan yang akan datang.

– Elma Layuk, Payroll Supervisor PTVI

Benturan Kepentingan [GRI 2-15]

Benturan kepentingan terjadi ketika kepentingan pribadi seseorang, atau kepentingan anggota keluarga, pihak terdekat, pemegang saham, maupun pejabat pemerintah, dapat memengaruhi pengambilan keputusan, terlepas dari apakah transaksi tersebut menguntungkan PTVI atau tidak. Kami menyadari bahwa pencegahan dan pengelolaan benturan kepentingan—terutama pada tingkat tata kelola—merupakan hal yang mendasar dalam menjaga integritas.

Untuk menjunjung prinsip tersebut, kami telah menetapkan kebijakan yang komprehensif serta langkah-langkah yang kuat untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mengelola potensi benturan kepentingan, termasuk yang melibatkan anggota organ tata kelola. Pendekatan ini dijelaskan lebih lanjut pada bagian berikut.



Pendekatan dalam Pencegahan dan Pengelolaan Konflik Kepentingan

Uji Kelayakan dan Keputusan dalam Proses Nominasi

KTNR melakukan penilaian untuk memastikan bahwa calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi memenuhi seluruh persyaratan kelayakan. Kandidat wajib mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, serta kriteria seleksi internal kami, termasuk ketentuan bahwa kandidat tidak memiliki dan tidak akan memiliki jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan PTVI.

Pengawasan terhadap Potensi Benturan Kepentingan

Dewan Komisaris mengawasi dan mengelola potensi benturan kepentingan yang melibatkan manajemen, Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan transaksi dengan pihak berelasi. Anggota Direksi yang memiliki rangkap jabatan di luar PTVI wajib memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris. Seluruh anggota Dewan Komisaris diwajibkan untuk menghindari situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Apabila potensi benturan kepentingan muncul, anggota wajib mengungkapkannya dan tidak diperkenankan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang dapat merugikan PTVI atau kepentingannya.

Komisaris Independen

Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 30% Komisaris Independen untuk memastikan pengawasan yang objektif dan pemberian nasihat yang independen kepada Direksi, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan potensi benturan kepentingan. Komisaris Independen wajib mematuhi Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 dan tidak diperkenankan memiliki jabatan yang dapat mengganggu independensi atau menimbulkan benturan kepentingan.

Deklarasi Tahunan mengenai Independensi dan Benturan Kepentingan

Setiap tahun, anggota Dewan Komisaris beserta komite pendukungnya, serta Direksi, menyampaikan pernyataan benturan kepentingan. Selain itu, setiap Komisaris yang akan diangkat kembali setelah menjabat selama dua periode berturut-turut wajib menyatakan independensinya kepada RUPS serta menyampaikan pernyataan tertulis untuk diungkapkan dalam Laporan Tahunan kami.

Mekanisme Pelaporan Konflik Kepentingan

Kami telah menetapkan mekanisme untuk pelaporan dan penanganan potensi benturan kepentingan serta pelanggaran terkait, yang dijelaskan lebih lanjut pada bagian berikutnya dalam bab ini.

Kami mengungkapkan potensi benturan kepentingan kepada pemangku kepentingan melalui Laporan Tahunan kami. Pengungkapan ini mencakup area-area utama yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, termasuk rangkap jabatan yang dimiliki oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris (lihat bagian Profil Direksi dan Profil Dewan Komisaris), struktur pemegang saham pengendali (lihat bagian Pemegang Saham Mayoritas dan Pengendali), serta hubungan dengan pihak berelasi, transaksi, dan saldo yang masih berjalan (lihat bagian Informasi Material—Investasi, Ekspansi, Divestasi, Merger, Akuisisi, Restrukturisasi Utang/Modal, Transaksi Afiliasi, dan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan). Pada tahun 2025, PTVI tidak memiliki entitas anak dan tidak melakukan kepemilikan silang (*cross-shareholding*) dengan pemasok maupun pemangku kepentingan lainnya.



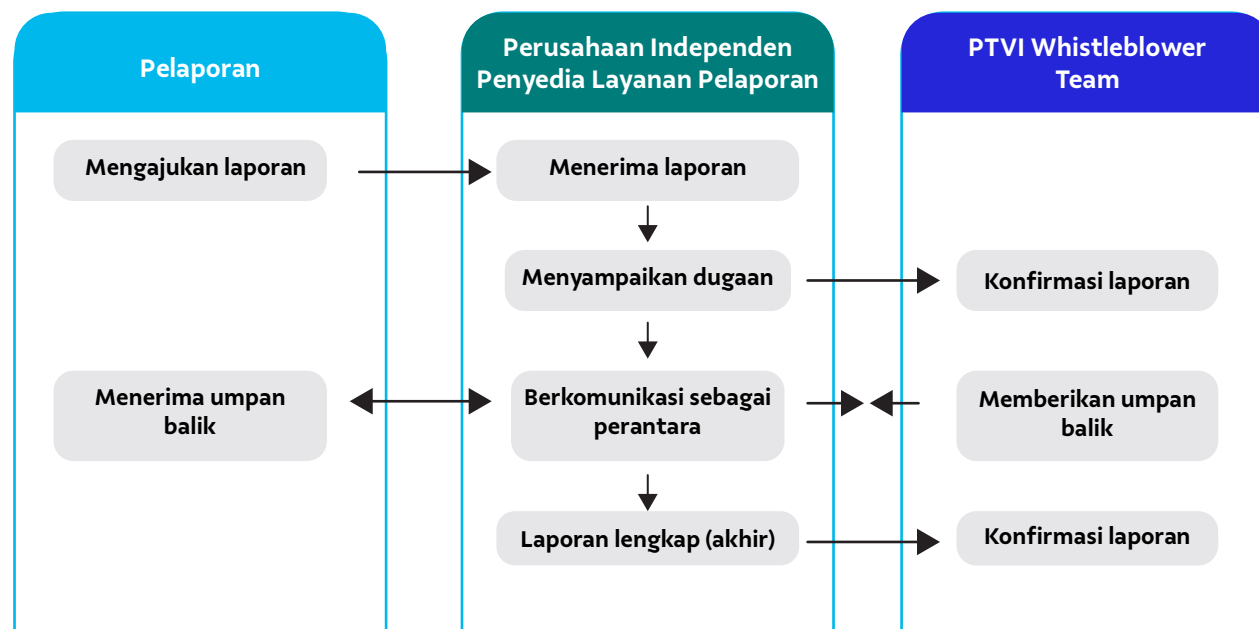
Program Pelaporan Pelanggaran^{[GRI 2-25][GRI 2-26]}

Proses dan Saluran Pelaporan

Sebagai wujud komitmen PTVI dalam menjunjung standar etika bisnis tertinggi, kami menyediakan mekanisme whistleblowing yang kuat untuk memungkinkan deteksi dini dan penanganan atas potensi pelanggaran etika, sehingga integritas dapat terjaga di seluruh operasional.

Platform *whistleblowing* kami, Vale Whistleblower Channel (VWC), telah beroperasi selama lebih dari satu dekade dan dikelola secara independen oleh Deloitte Indonesia sebagai pihak konsultan terpercaya. Keterlibatan pihak independen ini memastikan bahwa mekanisme *whistleblowing* dikelola secara profesional dan tidak memihak, sekaligus melindungi identitas pelapor melalui proses penyaringan laporan sebelum diteruskan kepada Tim Whistleblower PTVI. Alur pemrosesan laporan disajikan pada grafik terlampir.

Alur Pelaporan Pelanggaran di PTVI



VWC memungkinkan karyawan, tenaga kerja non-karyawan, pelanggan, masyarakat, serta pihak ketiga lainnya untuk melaporkan dugaan pelanggaran etika bisnis. Platform ini menyediakan berbagai kanal pelaporan, baik secara daring maupun luring, serta beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dalam Bahasa Indonesia (sebagai bahasa lokal dan bahasa kerja) dan Bahasa Inggris, sehingga menjamin aksesibilitas dan fleksibilitas yang luas.

Kami secara proaktif mensosialisasikan keberadaan VWC kepada seluruh pemangku kepentingan melalui pelatihan, media sosial, penyebaran informasi, dan poster. Sistem VWC juga memungkinkan pelapor untuk tetap anonim saat menyampaikan laporan, sebagaimana dijelaskan pada grafik di bawah ini. Hal ini mendukung kerahasiaan yang ketat serta membantu mencegah intimidasi atau tindakan balasan terhadap pelapor, yang secara tegas dilarang dalam Kode Etik PTVI.

Saluran Pelaporan Pelanggaran di PTVI



Telepon
0 800 100 2233

Saluran telepon bebas pulsa.
Pelapor tidak diwajibkan untuk
mengungkapkan identitasnya.



Email
vwc@tipoffs.info

Alamat email pelapor tidak akan
dibagikan kepada Tim Whistleblower
PTVI tanpa persetujuan pelapor.



Website
**[https://idn.deloitte-halo.com/
valewhistleblowerchannel/?Pg=4](https://idn.deloitte-halo.com/valewhistleblowerchannel/?Pg=4)**



Faksimile
+62 21 2993 8456



SMS/WhatsApp
+62 812 80400622



Surat
**Vale Whistleblower Channel
PO Box 3035 JKP 10030**

Scan this QR code
to access the
VWC Website



<https://idn.deloitte-halo.com/valewhistleblowerchannel/>

Platform ini memungkinkan pelapor untuk memilih apakah akan mengungkapkan identitasnya kepada pihak independen dan tim internal, hanya kepada pihak independen, atau tetap sepenuhnya anonim.

Sepanjang tahun pelaporan, kami menerima 60 laporan dugaan pelanggaran melalui Vale Whistleblower Channel (VWC), yang mencakup isu lingkungan, kesehatan dan keselamatan (EHS), pelecehan, serta diskriminasi. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (data berkala tersedia pada bab Tabel Data).

Setelah melalui proses penyaringan awal, sebanyak 30 laporan dinyatakan valid dan dilanjutkan ke tahap investigasi. Dari jumlah tersebut, 25 kasus tidak dapat diverifikasi karena keterbatasan informasi, tidak terdapat kasus yang dinyatakan tidak terbukti, dan 1 kasus terkonfirmasi. Kasus yang terkonfirmasi tersebut telah ditindaklanjuti melalui langkah perbaikan yang sesuai dengan prosedur internal kami.

Berdasarkan kategori pengungkapan, sebagian besar laporan yang diterima melalui VWC berkaitan dengan isu lingkungan, kesehatan, dan keselamatan (EHS), diikuti oleh pelecehan dan diskriminasi.



Pada tahun 2025, PTVI menerima

60	Laporan dugaan pelanggan	0	Tidak terbukti
30	Laporan dinyatakan valid dan diinvestigasi	1	Terbukti dan ditindaklanjuti
25	Tidak dapat dipastikan kebenarannya		

Tindakan Disiplin terhadap Pelanggaran

PTVI memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku kami dikenakan pertanggungjawaban yang jelas. Kami menangani pelanggaran tersebut melalui penerapan sanksi disipliner secara bertahap, mulai dari teguran lisan atau tertulis, penangguhan, hingga pemutusan hubungan kerja. Laporan yang diterima melalui Vale Whistleblower Channel (VWC), bersama dengan temuan dari investigasi internal dan mekanisme pemantauan lainnya, menjadi dasar utama dalam proses penilaian dan penyelesaian kasus.

Tahapan Tindakan	2025		2024		2023	
	Safety	Non-Safety	Safety	Non-Safety	Safety	Non-Safety
Langkah I: Pengarahan Tertulis	19	8	23	22	19	15
Langkah II: Peringatan Tertulis I	32	23	46	17	15	28
Langkah III: Peringatan Tertulis II	3	2	12	4	5	1
Langkah IV: Peringatan Terakhir	11	2	5	3	8	-
Langkah V: Pemutusan Hubungan Kerja	3	1	1	1	1	1
Total	68	36	87	47	48	45

Privasi Data dan Keamanan Siber^{[GRI 3-3][GRI 418-1]}



Di era digital, perlindungan data dan informasi menjadi hal yang krusial untuk menjaga integritas operasional serta kepercayaan pemangku kepentingan. PTVI menyadari bahwa tata kelola data yang efektif mendukung keberlangsungan bisnis, melindungi hak individu, serta memitigasi risiko siber yang dapat berdampak pada operasional dan reputasi perusahaan. Oleh karena itu, keamanan siber dan perlindungan data pribadi menjadi aspek material dalam pengelolaan keberlanjutan kami.

PTVI berkomitmen untuk melindungi privasi dan data pribadi individu yang informasinya kami kelola, termasuk karyawan, pelanggan, penyedia jasa, dan pemangku kepentingan lainnya. Komitmen ini diimplementasikan melalui Kebijakan Perlindungan Data Pribadi dan Privasi yang mengatur pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan penghapusan data secara bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kami mengumpulkan data pribadi hanya untuk tujuan yang sah dan jelas, antara lain untuk pengelolaan hubungan kerja, administrasi kontrak, serta pemenuhan kewajiban regulasi seperti perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja karyawan. Data pribadi juga dapat diproses untuk mendukung hubungan dengan pelanggan, pemasok, dan mitra usaha guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan kontraktual dan hukum. Pemrosesan data dilakukan berdasarkan dasar hukum yang sah, termasuk persetujuan pemilik data, kebutuhan kontraktual, kewajiban hukum, atau kepentingan sah kami. Untuk data pribadi yang bersifat sensitif, seperti informasi kesehatan, agama, atau data biometrik, pemrosesan hanya dilakukan dengan persetujuan eksplisit dan untuk tujuan yang spesifik serta dapat dipertanggungjawabkan.

Langkah Keamanan Siber dan Manajemen Risiko

Untuk mengelola risiko keamanan siber dan melindungi data pribadi, PTVI menerapkan berbagai pengendalian teknis dan organisasi yang selaras dengan standar keamanan informasi internal serta regulasi yang berlaku. Kami memastikan bahwa data pribadi hanya dibagikan kepada pihak ketiga yang berwenang dan diwajibkan untuk memproses data secara aman serta hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Untuk transfer data lintas negara, kami menerapkan mekanisme perlindungan yang memadai, termasuk klausul kontraktual standar atau mekanisme lain yang diakui secara hukum guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perlindungan data.

Sebagai bagian dari kerangka tata kelola, kami mendokumentasikan aktivitas pemrosesan data pribadi dalam Record of Processing Activities (ROPA). Untuk aktivitas pemrosesan yang berpotensi menimbulkan risiko tinggi terhadap hak dan kebebasan subjek data, kami melakukan Data Protection Impact Assessment untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko sebelum implementasi.

Untuk mencegah akses tidak sah, kehilangan, atau penyalahgunaan data, kami menerapkan berbagai langkah pengamanan, termasuk enkripsi, autentikasi multi-faktor, perlindungan firewall, serta pemantauan keamanan secara berkelanjutan. Akses terhadap data sensitif dibatasi hanya kepada pihak yang berwenang berdasarkan hak akses yang telah ditetapkan. Kami juga memiliki sistem pencadangan dan pemulihan data untuk menjaga integritas data dan kesinambungan operasional. Dalam hal terjadi potensi pelanggaran data, kami mengikuti prosedur penanganan insiden yang telah ditetapkan, termasuk eskalasi internal, pelaporan kepada Data Protection Officer, serta langkah

mitigasi untuk meminimalkan dampak.

Sepanjang tahun pelaporan, PTVI mencatat empat peringatan keamanan siber yang terkait dengan upaya penghapusan file. Seluruh insiden tersebut segera ditindaklanjuti melalui proses manajemen insiden internal, dan berhasil diselesaikan tanpa adanya pelanggaran data yang terkonfirmasi, kehilangan data, maupun pengungkapan informasi pribadi atau pemangku kepentingan secara tidak sah.

Pada periode yang sama, PTVI tidak menerima pengaduan yang terbukti dari karyawan, pelanggan, maupun pemangku kepentingan lainnya terkait kerusakan, perubahan, atau kebocoran data dan informasi digital.

Edukasi dan Kesadaran Karyawan

Kami menyadari bahwa keamanan siber juga sangat bergantung pada kesadaran individu. Oleh karena itu, PTVI secara berkelanjutan meningkatkan pemahaman karyawan mengenai pentingnya perlindungan data dan privasi. Edukasi dilakukan melalui berbagai inisiatif internal, seperti kampanye kesadaran, banner informasi, penyebaran informasi melalui WhatsApp, serta media digital di area operasional. Materi terkait keamanan siber juga diintegrasikan dalam program onboarding bagi karyawan baru dan kontraktor. Melalui berbagai inisiatif tersebut, kami memastikan bahwa karyawan dan kontraktor memahami peran mereka dalam melindungi data serta menjaga keamanan informasi di seluruh operasional PTVI.





Lingkungan

Pendekatan PTVI terhadap Lingkungan

PTVI berkomitmen menghormati dan melindungi lingkungan tempat kami beroperasi. Sistem Manajemen Lingkungan (*Environmental Management System/EMS*) kami di operasi Sorowako telah diverifikasi secara independen dan tersertifikasi ISO 14001:2015 (Cert. No. ID005666), serta secara berkala melalui audit *surveillance*. Implementasi EMS juga didukung melalui pemantauan kepatuhan lingkungan nasional berdasarkan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL). Sistem ini mencerminkan komitmen kami terhadap perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Keberlanjutan kami.

Pendekatan kami dalam pengelolaan lingkungan mempertimbangkan tingkat risiko dan berfokus pada pengelolaan dampak. Kami mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko lingkungan sejak tahap perencanaan paling awal melalui Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Melalui pendekatan ini, kami berupaya meminimalkan pelepasan polutan lingkungan serta mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab di seluruh wilayah operasi kami di Sorowako, IGP Morowali, dan IGP Pomalaa. Dalam praktiknya, kami juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, otoritas pemerintah, dan mitra usaha, melalui mekanisme konsultasi yang terstruktur untuk mendukung pengambilan keputusan lingkungan yang transparan dan matang.

Kebijakan Keberlanjutan kami mengurai serangkaian komitmen lingkungan yang menjadi pedoman dalam mengelola dampak operasional. Melalui kebijakan ini, PTVI berkomitmen mengurangi jejak lingkungan kami melalui:

- Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan sesuai ISO 14001 dan peraturan serta standar yang berlaku;
- Pengembangan strategi adaptasi perubahan iklim dan penerapan langkah-langkah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca;
- Meningkatkan efisiensi energi dan memperluas pemanfaatan energi terbarukan;
- Menerapkan strategi pengelolaan air untuk mengurangi pengambilan air tawar dan peningkatan daur ulang air;
- Memperkuat pengelolaan limbah melalui pengendalian berbasis risiko serta *prinsip reduce, reuse, recycle*;
- Melindungi keanekaragaman hayati melalui penerapan *mitigation hierarchy* dan praktik reklamasi progresif yang diarahkan untuk mencapai no net loss; dan
- Melaksanakan perencanaan penutupan tambang serta rehabilitasi lahan secara berkelanjutan sepanjang siklus hidup pertambangan guna memastikan stabilitas lingkungan dan pemanfaatan lahan pascatambang yang berkelanjutan

Kami mengungkapkan kinerja lingkungan melalui Laporan Keberlanjutan, Laporan Tahunan, situs web perusahaan, serta pelaporan berkala kepada otoritas terkait sebagai bagian dari komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Komitmen kami terhadap pengelolaan lingkungan juga terwujud melalui anggaran pengelolaan lingkungan yang dialokasikan untuk mendukung program lingkungan,

mitigasi dampak, rehabilitasi lahan, sistem pemantauan, kepatuhan regulasi, dan penguatan kapasitas di seluruh wilayah operasional.

Biaya Pengelolaan Lingkungan (US\$)^[POJK51-F.4]

Lokasi	2025	2024	2023
Sorowako	33.806.894	25.542.883	66.168.330
IGP Morowali	457.692	2.325.011	805.547
IGP Pomalaa	9.527.482	505.338	366.765
Total	43.792.068	28.373.232	67.340.642

Pada tahun 2025, total biaya pengelolaan lingkungan PTVI mencapai US\$43,8 juta, meningkat 54% dari US\$28,4 juta pada 2024, mencerminkan penguatan pengendalian lingkungan dan upaya kepatuhan di operasi maupun proyek pertumbuhan kami. Realisasi tahun 2025 lebih rendah dibandingkan tahun 2023, yang dipengaruhi oleh investasi signifikan bersifat satu kali (*one-off investments*) pada tahun tersebut. Namun demikian, peningkatan pada 2025 menunjukkan pertumbuhan kembali yang didorong oleh kebutuhan operasional dan perkembangan proyek.

Sebagian besar realisasi anggaran tetap terkonsentrasi di Sorowako, yaitu sebesar US\$33,8 juta atau sekitar 77% dari total biaya pengelolaan lingkungan. Jumlah ini meningkat 32% dibandingkan 2024, terutama untuk mendukung program pengelolaan lingkungan tahunan, termasuk pemantauan air, pengendalian emisi udara, pengelolaan limbah, dan aktivitas kewajiban rutin lainnya yang sejalan dengan skala dan kematangan operasi penambangan dan pengolahan kami.



Peningkatan paling signifikan terjadi di IGP Pomalaa, di mana biaya pengelolaan lingkungan meningkat menjadi US\$9,5 juta dibandingkan US\$0,5 juta pada 2024. Kenaikan ini terutama didorong oleh pembangunan infrastruktur lingkungan, khususnya konstruksi *sediment pond* untuk memperkuat pengendalian pengelolaan air selama pengembangan proyek, disertai investasi yang lebih luas untuk mendukung sistem pengelolaan lingkungan dan kepatuhan terhadap regulasi nasional.

Sebaliknya, biaya di IGP Morowali menurun menjadi US\$457.692 dibandingkan dengan US\$2,3 juta pada tahun sebelumnya dikarenakan selesainya sejumlah aktivitas awal penyiapan lingkungan serta pergeseran menuju langkah pengelolaan lingkungan yang lebih terarah seiring perkembangan bertahap proyek.

Ke depan, biaya pengelolaan lingkungan diperkirakan meningkat sejalan dengan perkembangan operasi IGP, khususnya di Pomalaa dan Morowali, seiring kedua proyek bertransisi dari fase konstruksi menuju tahap kesiapan operasional awal. Perkembangan ini diperkirakan akan memperluas cakupan dan intensitas aktivitas pengelolaan lingkungan, termasuk pemantauan, pelaporan, dan kewajiban kepatuhan yang semakin komprehensif sesuai dengan persyaratan regulasi nasional.

Mendekati *mechanical completion* di proyek Pomalaa serta berlanjutnya pengembangan operasi terintegrasi di Morowali, semakin komprehensif kewajiban kepatuhan lingkungan—seperti pemantauan kualitas air, pengendalian emisi udara, pengelolaan limbah, dan perlindungan keanekaragaman hayati—yang mulai beroperasi penuh. Hal ini termasuk penerapan sistem pemantauan berkelanjutan untuk mengelola potensi dampak yang terkait dengan operasi HPAL oleh ventura bersama kami, PT Kolaka Nickel Indonesia.

Pengembangan Kompetensi dan Kesadaran Lingkungan di Seluruh Operasi

Sejalan dengan investasi berkelanjutan kami dalam pengelolaan lingkungan, kami menyadari bahwa komitmen finansial saja tidak cukup untuk memastikan implementasi yang efektif. Keberhasilan program lingkungan kami bergantung pada kompetensi, kesadaran, dan akuntabilitas para pihak yang menjalankannya di seluruh operasi kami. Oleh karena itu, kami terus berinvestasi dalam pengembangan kapasitas melalui program pelatihan dan sertifikasi yang terstruktur. Inisiatif ini dirancang untuk membekali karyawan dan kontraktor kami dengan pengetahuan serta kompetensi teknis yang diperlukan untuk menerapkan EMS secara efektif dan menjaga standar lingkungan kami dalam kegiatan operasional sehari-hari.

Pada tahun 2025, PTVI menyelenggarakan program pelatihan lingkungan bagi total 2.304 peserta, yang terdiri dari 338 karyawan dan 1.966 kontraktor. Tingginya partisipasi tenaga non-karyawan menggambarkan peran signifikan kontraktor dalam mendukung aktivitas operasional, sekaligus pentingnya memastikan seluruh personel yang bekerja di wilayah operasional kami mematuhi standar dan praktik lingkungan yang sama.

Selain itu, sebanyak 66 orang, yang terdiri dari 60 karyawan dan 6 kontraktor, memperoleh sertifikasi profesional terkait pengelolaan lingkungan. Pencapaian ini semakin memperkuat keahlian internal dalam pengelolaan lingkungan, pengendalian pencemaran, dan pengelolaan limbah di seluruh operasi kami.

	Total Peserta		
	Karyawan	Kontraktor	Total
Pelatihan	338	1.966	2.304
Sertifikasi	60	6	66





Adaptasi dan Ketahanan terhadap Perubahan Iklim

PTVI menyadari bahwa perubahan iklim merupakan risiko fisik dan risiko transisi yang dapat memengaruhi operasi kami, masyarakat sekitar, serta ekosistem tempat kami beroperasi. Sebagai respons, kami terus memperkuat strategi adaptasi iklim dan dekarbonisasi untuk mendukung ketahanan operasional jangka panjang serta menyelaraskan langkah kami dengan agenda iklim global dan nasional, termasuk *Paris Agreement* dan *Nationally Determined Contribution* (NDC) Indonesia.

Selama tahun pelaporan, kami memulai pemetaan risiko iklim untuk memahami potensi paparan risiko terkait iklim di seluruh wilayah operasional kami. Kajian ini mengevaluasi potensi dampak finansial perubahan iklim terhadap operasi kami, serta dampak aktivitas kami terhadap lingkungan.

Melalui proses ini, kami tengah mengidentifikasi berbagai risiko fisik, termasuk curah hujan ekstrem, banjir, longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan, serta risiko transisi yang berkaitan dengan perkembangan regulasi iklim, kemungkinan penetapan mekanisme Nilai Ekonomi Karbon (NEK), perkembangan teknologi, dan pergeseran permintaan pasar menuju produk rendah karbon.

Untuk memahami lebih lanjut potensi dampak dari waktu ke waktu, kami juga melakukan analisis skenario iklim menggunakan *Shared Socioeconomic Pathways* (SSPs) yang dikembangkan oleh *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC), dan berorientasi pada skenario SSP2 (*Middle of the Road*) dan SSP5 (*Fossil-Fuel Development*). Skenario ini mendukung evaluasi risiko iklim dalam horizon perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang, yang saat ini masih

dalam proses perancangan.

PTVI telah menetapkan peta jalan dekarbonisasi untuk operasi Sorowako yang memuat berbagai inisiatif untuk meningkatkan efisiensi energi dan menurunkan emisi operasional. Melalui peta jalan ini, PTVI berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca absolut Cakupan 1 dan Cakupan 2 sebesar 33% pada tahun 2030 dibandingkan dengan *baseline* tahun 2017. Pencapaian kami saat ini menunjukkan progres yang sejalan dengan pencapaian target tersebut.

Saat ini kami berada dalam tahap pengembangan peta jalan dekarbonisasi untuk proyek IGP Morowali dan Pomalaa. Pendekatan bertahap ini memungkinkan kami menilai karakteristik operasional spesifik tiap lokasi, kebutuhan energi, serta jalur teknologi rendah karbon yang tersedia, sebelum menetapkan strategi penurunan emisi jangka panjang.

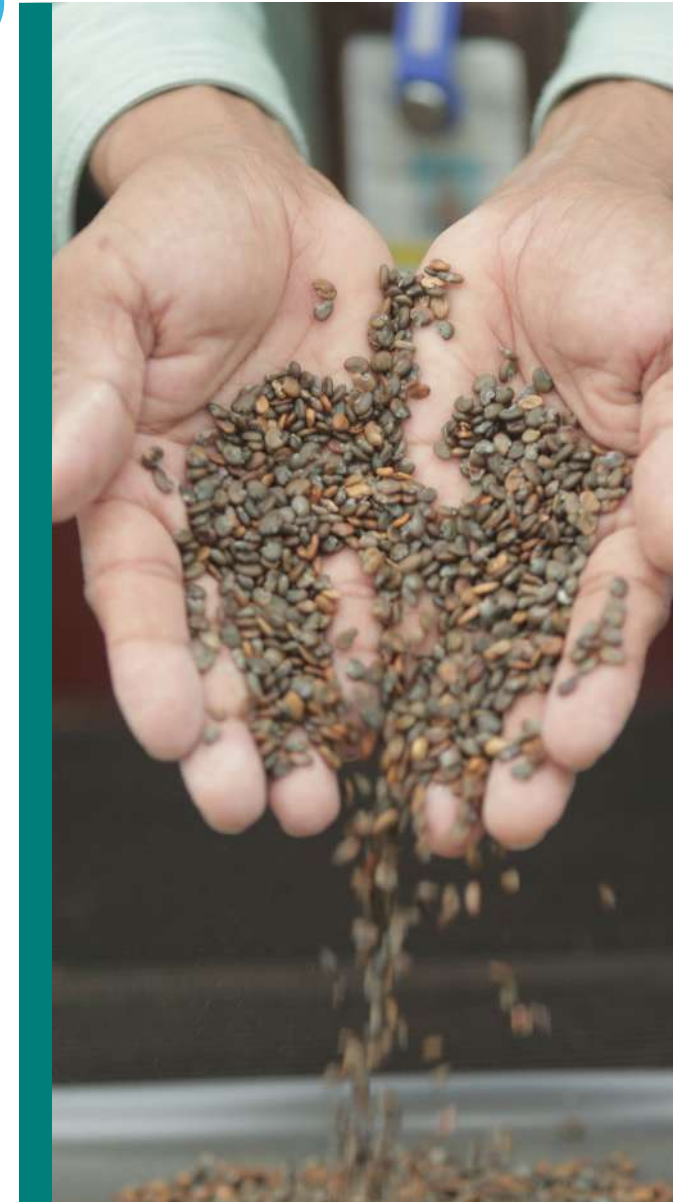
Sejalan dengan itu, kami juga sedang meninjau peta jalan dekarbonisasi jangka panjang untuk memastikan keselarasannya dengan portofolio operasional dan konteks tata kelola yang terus berkembang. Melalui upaya ini, PTVI memiliki tujuan untuk secara bertahap menurunkan emisi, meningkatkan efisiensi energi, serta memperkuat ketahanan operasional seiring transisi menuju model operasi rendah karbon. Rincian lebih lanjut mengenai implementasi inisiatif penurunan emisi disajikan pada bagian Pengelolaan Energi, Emisi GRK, dan Polutan Udara dalam laporan ini.

Melibatkan Generasi Muda dalam Aksi Iklim melalui Program ProKlim



Pada 18 Juni 2025, PTVI melibatkan siswa sekolah menengah atas dari empat kecamatan di wilayah pemberdayaan kami—Nuha, Wasuponda, Towuti, dan Malili—melalui sesi edukasi iklim yang diselenggarakan di SMA 5 Luwu Timur, Wasuponda. Kegiatan ini memperkenalkan Program Kampung Iklim (ProKlim) dan bertujuan meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap dampak perubahan iklim, termasuk banjir, kekeringan, gagal panen, dan penyakit terkait iklim. Melalui inisiatif ini, kami mendorong para siswa untuk memahami sumber emisi gas rumah kaca serta pentingnya aksi individu dan kolektif dalam menghadapi tantangan iklim.

Melalui inisiatif ProKlim, PTVI mendorong aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berbasis masyarakat, termasuk pemanenan air hujan, pembangunan biopori, penyediaan *reservoir* air, penanaman pohon dan *mangrove*, praktik pertanian berkelanjutan, serta pengelolaan limbah yang bertanggung jawab melalui prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Inisiatif-inisiatif ini bertujuan meningkatkan ketahanan masyarakat sekaligus mendukung perlindungan lingkungan dan mata pencaharian berkelanjutan.



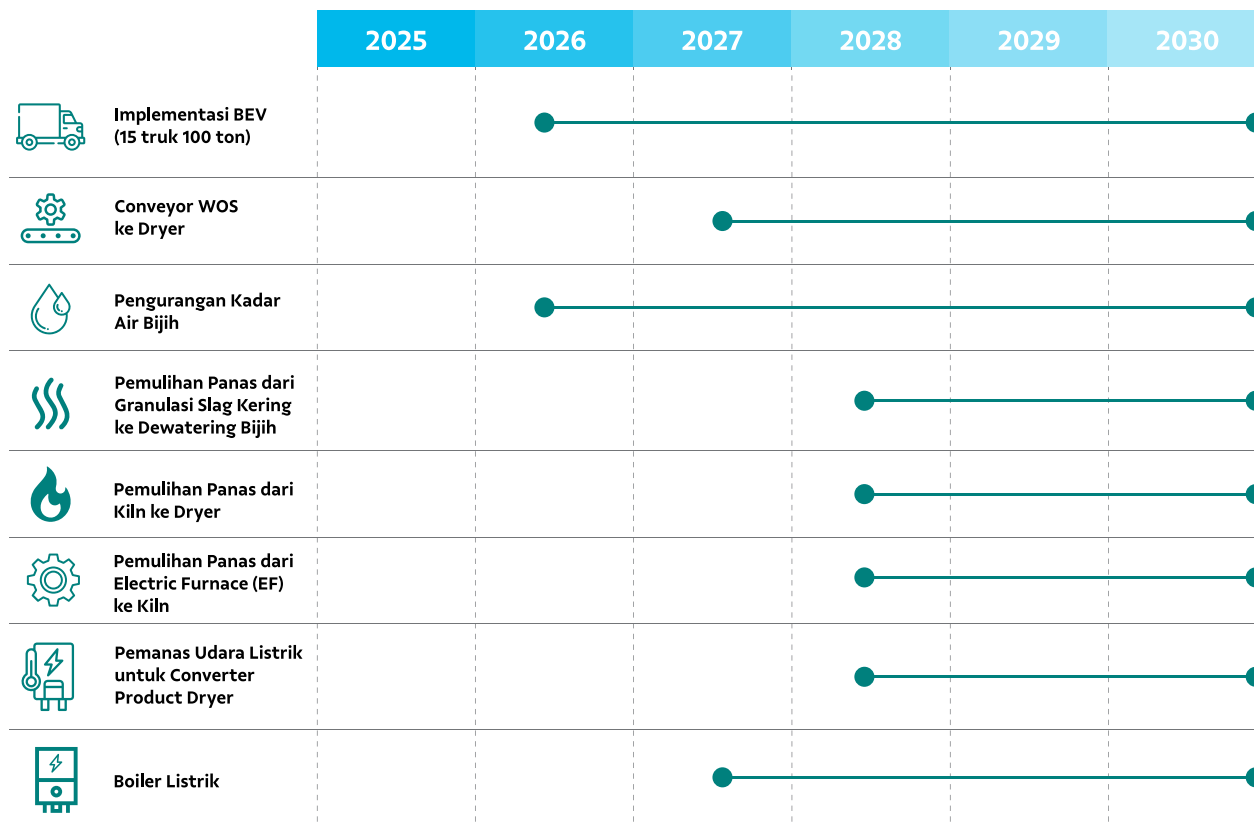
Pengelolaan Energi dan Emisi

Pengelolaan konsumsi energi dan emisi merupakan komponen penting dalam pendekatan pengelolaan lingkungan PTVI. Penggunaan energi merupakan salah satu sumber utama emisi gas rumah kaca (GRK) dalam operasi kami, sementara proses industri dan pembakaran bahan bakar juga dapat menghasilkan emisi udara non-GRK. Untuk mengelola dampak tersebut, kami menerapkan praktik pengelolaan energi dan emisi yang terintegrasi guna meningkatkan efisiensi energi, menurunkan emisi operasional, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan yang berlaku.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, PTVI telah menyusun Peta Jalan Dekarbonisasi untuk operasi Sorowako. Peta jalan ini mencakup portofolio inisiatif yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi energi dan menurunkan emisi di seluruh aktivitas pertambangan dan pengolahan melalui elektrifikasi, optimasi proses, pemulihan energi, serta peningkatan efisiensi operasional. Secara keseluruhan, inisiatif-inisiatif ini mendukung transisi kami menuju operasi rendah karbon dengan tetap menjaga kinerja operasional.

Peta jalan ini mendukung target kami untuk menurunkan emisi gas rumah kaca absolut Cakupan 1 dan Cakupan 2 sebesar 33% pada tahun 2030 dibandingkan dengan *baseline* tahun 2017. Operasi Sorowako memiliki profil energi rendah karbon, karena sebagian besar kebutuhannya dipasok oleh pembangkit listrik tenaga air terbarukan yang kami hasilkan sendiri. Dengan keunggulan ini, kami terus melaksanakan berbagai inisiatif untuk mengurangi konsumsi diesel, mengoptimalkan penggunaan energi dalam operasi pengolahan, serta memanfaatkan panas buangan yang dihasilkan dari proses produksi.

Peta Jalan Dekarbonisasi – Operasional Sorowako



Pada tahun 2025, operasi Sorowako tetap berada pada jalur yang sesuai untuk mencapai target 2030 kami. Kami terus melanjutkan implementasi inisiatif-inisiatif utama sejalan dengan peta jalan tersebut.

Sejalan dengan itu, kami juga sedang meninjau jalur dekarbonisasi jangka panjang kami untuk memastikan tetap selaras dengan portofolio operasional dan konteks tata kelola yang terus berkembang.

Untuk proyek pertumbuhan kami di Pomalaa dan Bahodopi, peta jalan dekarbonisasi saat ini sedang dalam pengembangan dan ditargetkan selesai pada 2026. Pendekatan bertahap ini memungkinkan kami menilai karakteristik operasional spesifik tiap lokasi, kebutuhan energi, dan jalur teknologi rendah karbon yang tersedia sebelum menetapkan strategi penurunan emisi jangka panjang.

Rincian lebih lanjut mengenai implementasi inisiatif penurunan emisi dan kinerja terkait disajikan pada bagian Pengelolaan Energi, Emisi GRK, dan Polusi Udara dalam laporan ini. ^[SASB EM-MM-110a.2]

Pengelolaan Energi

PTVI memantau dan mengevaluasi konsumsi energi di seluruh operasi kami sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi energi dan mengelola emisi yang terkait dengan penggunaan energi. Pelaporan kami saat ini berfokus pada energi yang dikonsumsi dalam organisasi di bawah kendali operasional kami. Konsumsi energi di luar organisasi, termasuk energi yang digunakan dalam rantai pasok hulu dan transportasi produk hilir, belum termasuk dalam batas pelaporan saat ini. Kami terus mengevaluasi metodologi dan ketersediaan data untuk memperluas pengungkapan ini pada periode pelaporan mendatang. ^[GRI 302-2]

Konsumsi energi dan intensitas energi kami dihitung menggunakan metodologi yang selaras dengan pedoman IPCC dan prinsip Sistem Manajemen Energi ISO 50001. Total konsumsi energi ditentukan berdasarkan input energi dari berbagai sumber, termasuk energi yang dibeli dan energi yang dihasilkan secara internal untuk kebutuhan operasional. Karena PTVI tidak menjual listrik, pemanas, pendingin, maupun uap, angka yang dilaporkan merepresentasikan energi yang dikonsumsi dalam operasi kami.

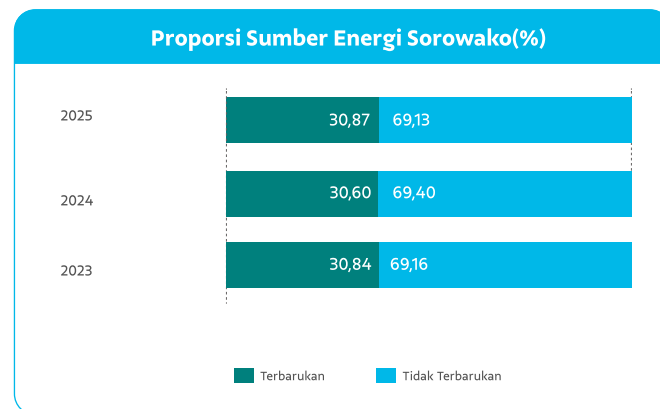
Penggunaan Energi Sorowako

Energy Source	Unit	2025	2024	2023
Energi Tidak Terbarukan				
Batubara	GJ	11.938.379,55	11.255.340,33	9.638.512,00
High Speed Diesel (HSD) (atau Solar/HSD kalau mau lokalisasi)	GJ	1.391.579,42	1.466.353,78	1.483.815,83
Marine Fuel Oil (MFO)	GJ	8.503.013,34	9.330.935,02	10,295,322,00
Bensin	GJ	3.037,27	7.367,19	5.784,00
Total Energi Tidak Terbarukan	GJ	21.836.009,58	22.059.996,32	
Energi Terbarukan				
Pembangkit Listrik Tenaga Air	GJ	8.858.749,14	8.935.798,81	8.791.124,00
Biodiesel B30	GJ	N/A	N/A	150.766,00
Biodiesel B35	GJ	140.514,30	789.575,11	609.554,00
Biodiesel B40	GJ	753.749,50	N/A	N/A
Total Energi Terbarukan	GJ	9.753.012,94	9.725.373,92	9.551.444,00
Total Energi Tidak Terbarukan dan Terbarukan	GJ	31.589.022,52	31.785.370,24	30.974.877,83
Produksi Nikel Matte	Ton	72.027,00	71.310,68	70.728,00
Intensitas Penggunaan Energi	GJ/Ton	438,57	445,73	437,94

Catatan: Biodiesel B30 terakhir digunakan pada tahun 2023, sedangkan Biodiesel B40 diperkenalkan pada tahun 2025.

Pada 2025, PTVI mencatat total konsumsi energi sebesar 31.589.022,52 GJ di operasi Sorowako, menurun sekitar 196.348 GJ atau 0,62% dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun konsumsi energi total sedikit menurun, produksi nikel matte meningkat menjadi 72.027 ton, yang menunjukkan peningkatan kinerja energi selama tahun pelaporan. *Decoupling* antara pertumbuhan produksi dan konsumsi energi ini berkontribusi pada penurunan intensitas energi menjadi 438,57 GJ per ton nikel matte, turun 1,61% dari 2024. Pencapaian ini merupakan wujud dari upaya berkelanjutan untuk mengoptimalkan penggunaan energi di seluruh aktivitas pertambangan dan pengolahan melalui efisiensi operasional dan perbaikan proses.

[POJK51-F.6][GRI 302-1][GRI 302-3][SASB EM-MM-130a.1]



Pada saat yang sama, porsi energi terbarukan dalam bauran energi kami meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Energi terbarukan—yang terutama dipasok dari fasilitas pembangkit listrik tenaga air yang kami hasilkan sendiri—mencapai 9.753.012,94 GJ pada 2025, setara 30,87% dari total konsumsi energi, meningkat dari 30,60% pada 2024. Peningkatan ini didukung oleh tambahan penggunaan energi terbarukan sebesar 27.639 GJ dan mencerminkan optimasi berkelanjutan atas sumber energi rendah karbon

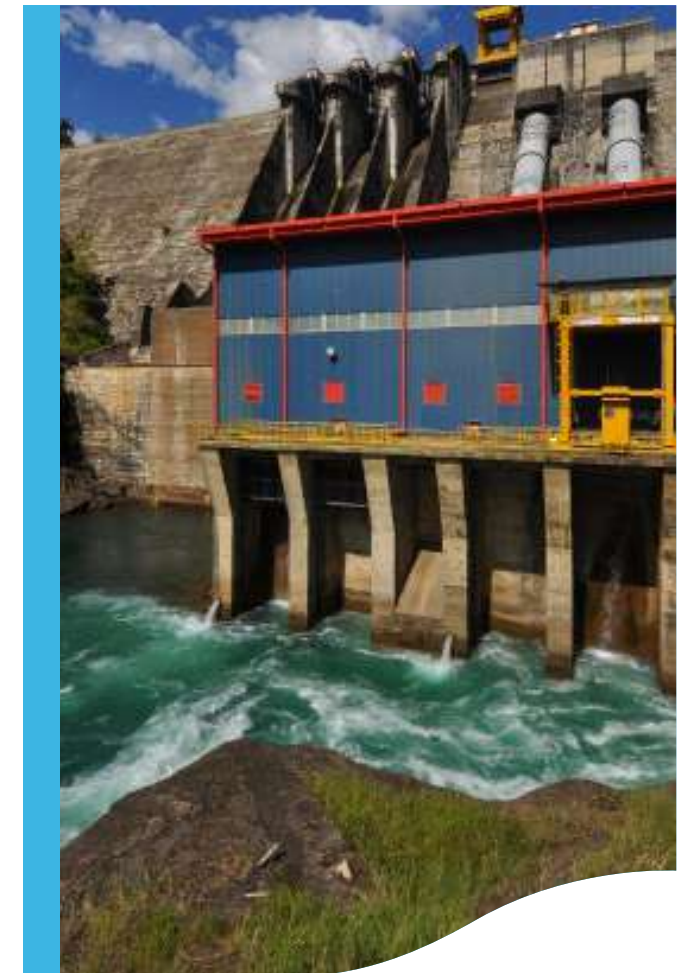
di seluruh operasi kami. Penurunan konsumsi *marine fuel oil* dan *high-speed diesel* juga semakin mendukung optimalisasi bauran bahan bakar kami serta mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil konvensional.^[POJK51-F.5]

Peningkatan ini juga didukung oleh pengenalan dan pemanfaatan Biodiesel B40, yang berkontribusi sebesar 753.749,50 GJ pada 2025 dan menjadi langkah penting dalam memperkuat transisi kami menuju bahan bakar yang lebih rendah karbon. Secara keseluruhan, perkembangan ini menggambarkan kemajuan berkelanjutan dalam meningkatkan efisiensi energi sekaligus mempertahankan porsi energi rendah karbon yang stabil dan tangguh dalam operasi kami.^[POJK51-F.7]

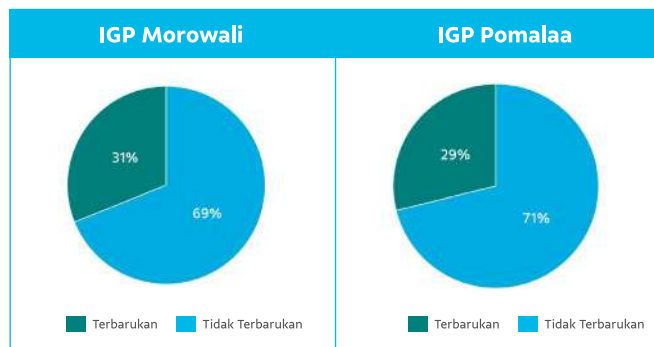
Peningkatan operasional yang berkontribusi pada penurunan intensitas energi selama tahun berjalan meliputi pengelolaan *ore stockpile* yang lebih baik, kadar air bijih yang lebih rendah sehingga mengurangi kebutuhan energi untuk pengeringan, serta penggunaan energi yang lebih efisien dalam proses pengeringan di lokasi Sorowako. PTVI juga terus melaksanakan inisiatif efisiensi energi yang lebih luas serta program bahan bakar alternatif, termasuk campuran biodiesel dan uji coba biomassa, sebagai bagian dari peta jalan dekarbonisasi kami. Perbaikan-perbaikan ini berkontribusi pada penurunan energi yang dibutuhkan per ton nikel matte yang diproduksi, sebagaimana terlihat dalam penurunan intensitas energi selama tahun pelaporan.^{[GRI 302-4][GRI 302-5]}

Pada area operasional kami yang lebih baru, energi terbarukan membentuk porsi yang cukup signifikan dalam bauran energi. Di IGP Pomalaa, total konsumsi energi internal mencapai 8.421,99 GJ pada tahun 2025, dengan energi terbarukan berkontribusi sebesar 2.427,20 GJ atau sekitar 28,82% dari total penggunaan energi. Sementara itu, di IGP Morowali,

total konsumsi energi mencapai 13.498,42 GJ, dengan 4.192,35 GJ atau sekitar 31,06% berasal dari sumber energi terbarukan. Hal ini mencerminkan integrasi bertahap energi terbarukan pada tahap awal operasional proyek serta mendukung strategi jangka panjang kami untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan di seluruh portofolio kami.^[POJK51-F.7]



Konsumsi Energi Terbarukan dan Tidak Terbarukan untuk Indonesia Growth Project



PTVI terus menerapkan peningkatan operasional yang ditujukan untuk menurunkan konsumsi energi secara keseluruhan sekaligus memperluas penggunaan energi terbarukan dan energi rendah karbon. Upaya ini mendukung jalur dekarbonisasi kami secara lebih luas dan berkontribusi pada peningkatan efisiensi energi di seluruh rantai nilai produksi.



Penafian:

Intensitas energi saat ini hanya dilaporkan untuk operasi Sorowako. IGP Morowali dan IGP Pomalaa masih berada pada tahap pengembangan dan konstruksi, di mana volume produksi belum mencapai tingkat yang memungkinkan perhitungan indikator berbasis output seperti intensitas energi. Pelaporan untuk kedua lokasi ini akan diintegrasikan setelah tingkat produksi yang stabil telah tercapai.

Rincian lebih lanjut mengenai konsumsi energi berdasarkan sumber di seluruh wilayah operasional PTVI disajikan dalam Tabel Data pada laporan ini, termasuk rincian sumber energi terbarukan dan non-terbarukan untuk Sorowako, IGP Morowali, dan IGP Pomalaa.

Emisi Gas Rumah Kaca

PTVI melakukan inventarisasi emisi GRK secara berkala sesuai dengan kerangka GHG Protocol, yang mencakup Cakupan 1 (emisi langsung) dari pembakaran bahan bakar dan aktivitas operasional serta Cakupan 2 (emisi tidak langsung) dari konsumsi listrik. Emisi yang berasal dari pembakaran atau biodegradasi biomassa dikecualikan dari perhitungan sebagai emisi biogenik. Inventarisasi kami mencakup emisi CO₂, CH₄, N₂O, dan HFC yang seluruhnya dinyatakan dalam CO₂ ekuivalen (CO₂e) menggunakan metodologi yang selaras dengan pedoman IPCC. Kajian untuk mengkuantifikasi emisi Cakupan 3 telah berjalan sejak tahun sebelumnya, dan kami berencana mengungkapkan emisi tersebut pada periode pelaporan mendatang.

PTVI menggunakan tahun 2017 sebagai tahun dasar (*baseline*) untuk target penurunan emisi di operasi Sorowako. Tahun ini menandai saat kami memformalkan komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan mendukung masa depan rendah karbon. Pada tahun 2017, total emisi Cakupan 1 dan Cakupan 2 di Sorowako tercatat sebesar 2.145.198 ton CO₂e.

Berdasarkan *baseline* tersebut, kami menetapkan target untuk menurunkan emisi absolut sebesar 33% pada tahun 2030, sehingga total emisi menjadi sekitar 1.437.283 ton CO₂e. Saat ini, kami berada pada jalur yang sesuai untuk mencapai target tersebut.



Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca dan Intensitas Emisi Sorowako

Deskripsi	Satuan	2025	2024	2023
Cakupan 1	Ton CO ₂ eq	2.072.143	2.048.411	2.029.486
Pembakaran Bergerak (HSD & Bensin)	Ton CO ₂ eq	119.674	134.462	124.845
Pembakaran Stasioner (Batubara, HSD, & MFO)	Ton CO ₂ eq	1.503.081	1.415.786	1.386.405
Bahan Peledak	Ton CO ₂ eq	108	43	101
Freon	Ton CO ₂ eq	1	2	1,769
Emisi Proses	Ton CO ₂ eq	378.759	365.959	383.674
AFOLU	Ton CO ₂ eq	70.520	132.159	132.692
Cakupan 2	Ton CO₂eq	2.481	2.580	2.827
Cakupan 3	Ton CO₂eq	N/A	N/A	N/A
Total Cakupan 1-3	Ton CO₂eq	2.074.624	2.050.990	2.032.313
Produksi Nikel Matte	Ton	72.027	71.310	70.728
Intensitas	Ton CO₂eq/Ton	28,80	28,76	28,73

*Restated: Emisi Scope 1 dan Scope 2 tahun 2024 dari 2.135.742 menjadi 2.050.990 tCO₂e setelah audit independen yang dilakukan pada 2026 oleh tekMIRA sesuai dengan ISO 14064-1:2018 untuk operasi Sorowako.

Pada 2025, total emisi Cakupan 1 dan Cakupan 2 di Sorowako mencapai 2.074.624 ton CO₂eq, meningkat sebesar 23.633 ton CO₂eq, atau sekitar 1,15%, dibandingkan tahun sebelumnya. Emisi Cakupan 1 mencakup mayoritas emisi, yaitu sebesar 2.072.143 ton CO₂eq, sementara emisi Cakupan 2 tercatat sebesar 2.481 ton CO₂eq, menurun 99 ton CO₂eq, atau sekitar 3,84%, dibandingkan tahun sebelumnya. Kontribusi Cakupan 2 yang relatif kecil mencerminkan ketergantungan kami yang berkelanjutan pada pembangkit listrik tenaga air terbarukan sebagai sumber listrik utama yang mendukung operasi di Sorowako. Dari sisi intensitas emisi, Sorowako mencatat 28,80 ton CO₂eq per ton nikel yang diproduksi pada 2025, meningkat 0,04 ton CO₂eq per ton, atau sekitar 0,15%, dibandingkan tahun sebelumnya. [POJK51-F.11][GRI 305-1][GRI 305-2][GRI 305-4][GRI 305-5][SASB EM-MM-110a.1]

Untuk wilayah operasional baru kami, perhitungan emisi GRK dilakukan untuk pertama kalinya pada tahun pelaporan. Di IGP Morowali, total emisi Cakupan 1 mencapai 4.553,14 ton CO₂e. Sementara itu, di IGP Pomalaa, total emisi Cakupan 1 pada tahun 2025 tercatat sebesar 419 ton CO₂e. [GRI 305-1][GRI 305-2][GRI 305-5][EM-MM-110a.1][POJK51-F.11]

IGP Morowali

4.553,14 ton CO₂eq
total emisi

IGP Pomalaa

419 ton CO₂eq
total emisi

Karena IGP Morowali dan IGP Pomalaa masih berada pada tahap awal operasional dan pengembangan, *baseline* historis emisi untuk kedua lokasi tersebut belum ditetapkan. Selama tahun pelaporan, inventarisasi emisi untuk lokasi-lokasi ini terutama mencakup emisi Cakupan 1 yang berasal dari pembakaran bahan bakar langsung dalam aktivitas operasional.

Emisi Cakupan 2 belum dilaporkan untuk IGP Pomalaa karena konsumsi listrik untuk operasi tersebut dipenuhi melalui pembelian *Renewable Energy Certificates* (REC) yang diterbitkan oleh penyedia listrik nasional, yang merepresentasikan listrik yang dihasilkan dari sumber energi terbarukan. Dengan demikian, konsumsi listrik terkait dianggap memiliki emisi berbasis pasar (*market-based emissions*) sebesar nol.

Emisi Cakupan 3 juga belum dimasukkan dalam inventarisasi, karena saat ini kami masih mengkaji sumber emisi yang relevan serta ketersediaan data di seluruh rantai nilai. Pemantauan dan pelaporan emisi untuk wilayah operasional ini akan terus diperluas seiring perkembangan aktivitas dan semakin matangnya sistem pemantauan yang diterapkan. [GRI 305-3]

Emisi yang Mengandung Bahan Perusak Ozon (ODS)^[GRI 305-6]

PTVI tidak menggunakan freon HCF-22 (CHF₂Cl) dan telah beralih ke refrigeran yang lebih ramah lingkungan. Sebagian besar refrigeran yang saat ini digunakan adalah R32, yang memiliki nilai *Ozone Depletion Potential* (ODP) sebesar 0. Kami secara rutin memantau penggunaan refrigeran dan memasukkannya ke dalam inventarisasi emisi gas rumah kaca kami.

Untuk mengendalikan sumber emisi dan mendukung target iklim jangka panjang, PTVI terus menerapkan langkah-langkah mitigasi di seluruh wilayah operasional kami, termasuk Sorowako serta operasi yang berkembang di IGP Morowali dan IGP Pomalaa. Upaya ini berfokus pada peningkatan efisiensi operasional, optimalisasi konsumsi bahan bakar dalam aktivitas pengolahan, dan integrasi bertahap solusi energi rendah karbon sejalan dengan peta jalan dekarbonisasi kami.

Inisiatif ini mencakup peningkatan peralatan dan optimasi proses pada operasi *furnace* dan *converter*, penyempurnaan sistem distribusi bahan bakar dan udara, optimalisasi proses material handling dan screening, serta penguatan pemantauan konsumsi bahan bakar pada peralatan bergerak. Kami juga terus mendorong substitusi bertahap bahan bakar fosil dengan sumber energi alternatif—termasuk campuran biodiesel dan biomassa—serta peningkatan efisiensi energi yang lebih luas di fasilitas pengolahan. Melalui upaya-upaya ini, kami bertujuan secara bertahap menurunkan intensitas emisi sekaligus memperkuat efisiensi operasional seiring ekspansi operasi kami. ^{[POJK51-F.12][GRI 305-5]}

Pemanfaatan Biodiesel (B35 dan B40) serta Biomassa^{[POJK51-F.7][GRI 302-4][GRI 302-5]}

Pada tahun 2025, PTVI memperluas penggunaan campuran biodiesel (B35 dan B40) serta memulai uji coba pemanfaatan biomassa sebagai bagian dari upaya meningkatkan porsi energi terbarukan dalam bauran energi operasional dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.

Di operasi Sorowako, penggunaan biodiesel mencapai 894.264 GJ, yang terdiri dari 140.514 GJ B35 dan 753.750 GJ B40, atau sekitar 2,8% dari total konsumsi energi di lokasi tersebut.

Di IGP Morowali, penggunaan biodiesel mencapai 4.192 GJ, yang terdiri dari 406 GJ B35 dan 3.786 GJ B40, atau sekitar 31% dari total konsumsi energi lokasi. Sementara itu, di IGP Pomalaa, konsumsi biodiesel mencapai 2.427 GJ, yang terdiri dari 412 GJ B35 dan 2.016 GJ B40, atau sekitar 29% dari total penggunaan energi pada tahap awal operasional.

Inisiatif ini mendukung substitusi bertahap bahan bakar fosil dengan sumber energi berbasis terbarukan, sehingga berkontribusi pada penurunan intensitas karbon dalam penggunaan energi operasional serta mendukung upaya PTVI dalam mengelola dan mengurangi emisi gas rumah kaca sejalan dengan peta jalan dekarbonisasi kami.

Automatic Granulation Operational Node (AUTO-GRON)^{[POJK51-F.7][GRI 302-4][GRI 302-5]}

PTVI memperkenalkan Automatic Granulation Operational Node (AUTO-GRON) untuk meningkatkan efisiensi energi dalam proses granulasi nikel matte pada unit *converter*. Sebelumnya, suhu burner dan kecepatan conveyor diatur secara manual oleh operator, yang sering menyebabkan suhu tidak stabil, kualitas produk yang tidak konsisten, dan konsumsi bahan bakar yang lebih tinggi selama proses granulasi.

Melalui AUTO-GRON, PTVI menerapkan sistem kendali otomatis yang mengintegrasikan sensor suhu dengan pengendalian *burner* dan *conveyor*. Sistem ini memungkinkan pengelolaan suhu yang lebih presisi dan meningkatkan stabilitas proses selama granulasi.

Melalui optimalisasi proses granulasi, inisiatif ini membantu mengurangi konsumsi bahan bakar dan meningkatkan efisiensi energi secara keseluruhan di unit *converter*. Program ini juga mendukung upaya PTVI yang lebih luas dalam mengelola penggunaan energi dan menurunkan emisi operasional sebagai bagian dari perjalanan dekarbonisasi Perseroan.

Polutan Udara

PTVI secara berkelanjutan mengelola emisi udara konvensional (non-GRK) melalui pemantauan dan pengukuran berkala sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Kegiatan Pertambangan. Pemantauan kami saat ini berfokus pada polutan yang dinilai paling material bagi operasi pengolahan kami, khususnya sulfur oksida (SOx) dan partikulat (*particulate matter/PM*).^{[POJK51-F.11][GRI 305-7][SASB EM-MM-120a.1]}

Sulfur Dioksida Ekuivalen (SO₂eq)

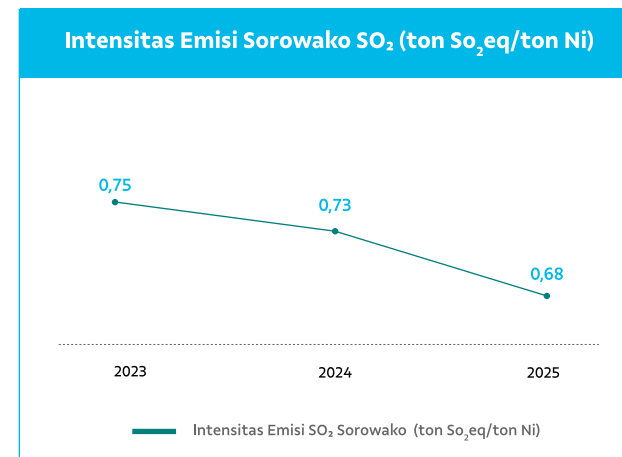
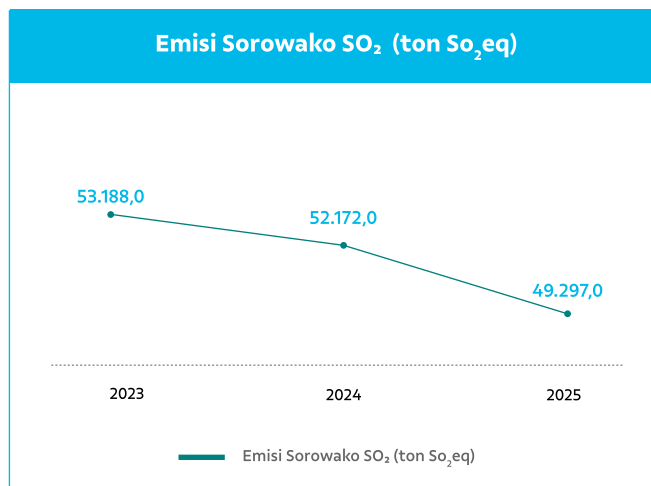
Pemantauan emisi sulfur dioksida ekuivalen (SO₂eq) saat ini diterapkan pada operasi Sorowako, tempat pengolahan nikel matte dilakukan. Lokasi Sorowako mengoperasikan pabrik pengolahan yang menggunakan sulfur dalam proses sulfidasi, yang menghasilkan emisi terkait sulfur. Wilayah operasional kami lainnya, IGP Morowali dan IGP Pomalaa, masih berada pada tahap awal operasional dan belum mengoperasikan fasilitas pengolahan sejenis yang menghasilkan emisi SO₂.

Di Sorowako, emisi SO₂eq terutama berasal dari penggunaan sulfur dalam proses pengolahan nikel serta dari pembakaran *marine fuel oil* dan batubara yang digunakan dalam aktivitas pengolahan.

Pada tahun 2025, Sorowako mencatat emisi SO₂eq sebesar 49.297 ton, menurun sebesar 2.875 ton atau sekitar 5,5% dibandingkan tahun 2024. Penurunan ini melanjutkan tren penurunan yang terlihat dalam tiga tahun terakhir dan sejalan dengan target kami untuk mengurangi emisi SO₂eq absolut sebesar 500 ton per tahun.

Perbaikan ini juga tercermin pada intensitas emisi SO₂eq, yang menurun menjadi 0,68 ton SO₂eq per ton metrik nikel matte yang diproduksi pada tahun 2025, atau turun sekitar 6,8% dibandingkan tahun 2024. Tingkat ini tetap jauh di bawah ambang batas regulasi yang berlaku sebesar 0,80 ton SO₂eq per ton nikel matte yang diproduksi.

Hasil ini mencerminkan efektivitas berbagai proyek inovasi yang bertujuan mengurangi penggunaan sulfur dalam proses pengolahan kami, serta perbaikan operasional berkelanjutan yang meningkatkan efisiensi penggunaan sulfur, memperkuat stabilitas proses, dan menjaga konsistensi kinerja emisi di seluruh aktivitas pengolahan.^{[POJK51-F.11][GRI 305-7][SASB EM-MM-120a.1]}

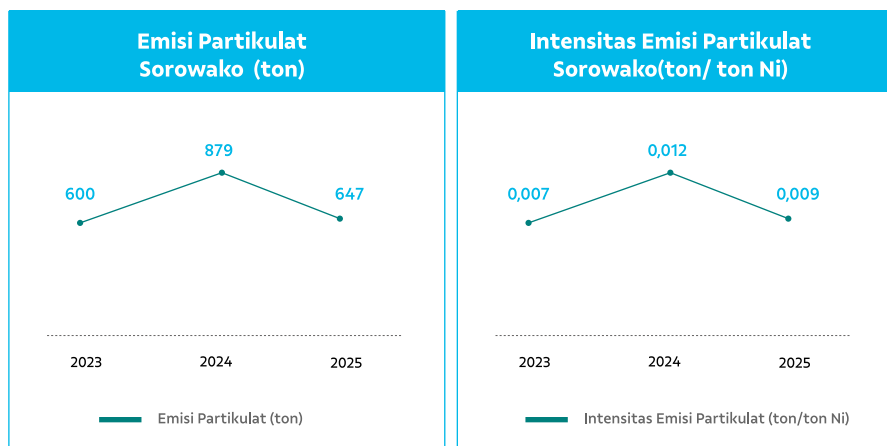


Partikulat

Emisi partikulat dalam operasi kami terutama dihasilkan dari pengoperasian *dryer kiln*, *reduction kiln*, *electric furnace*, dan *product dryer* di fasilitas pengolahan. Emisi ini merupakan emisi cerobong (*stack emissions*) yang berasal dari fasilitas pengolahan kami.

Pada 2025, Sorowako mencatat emisi partikulat sebesar 647 ton, menurun 232 ton atau sekitar 26,4% dibandingkan 2024. Peningkatan ini mencerminkan penguatan pengendalian operasional dan optimalisasi sistem penanganan debu di fasilitas pengolahan.

Intensitas emisi partikulat juga membaik menjadi 0,009 ton partikulat per ton nikel yang diproduksi, atau turun 25% dibandingkan 2024. Untuk semakin memperkuat pengelolaan emisi, PTVI terus mengevaluasi langkah-langkah peningkatan tambahan, termasuk rencana implementasi program aglomerasi debu (*dust agglomeration*), yang saat ini masih dalam evaluasi teknis.^{[GRI 305-7][SASB EM-MM-120a.1][POJK51-F.11]}



Untuk IGP Morowali dan IGP Pomalaa, emisi partikulat dari cerobong (*stack particulate emissions*) saat ini belum relevan karena fasilitas pengolahan yang menghasilkan emisi cerobong belum beroperasi di kedua lokasi tersebut. Oleh karena itu, pemantauan emisi udara di wilayah operasional ini saat ini difokuskan pada kualitas udara ambien. Pemantauan partikulat telah dilakukan di IGP Pomalaa sebagai bagian dari pemantauan udara ambien, sementara pengambilan sampel partikulat di IGP Morowali belum dilakukan, seiring persyaratan pemantauan lingkungan yang masih berkembang mengikuti tahapan pengembangan proyek.

Air dan Efluen

Air memegang peranan penting dalam mendukung operasi PTVI dan ekosistem di sekitarnya. Air digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air, pengolahan mineral, pembersihan peralatan, pengelolaan lingkungan, dan sanitasi di seluruh wilayah operasional kami. Di luar kebutuhan operasional, air juga menopang masyarakat dan ekosistem lokal yang berbagi sumber air yang sama. ^[GRI 303-1]

Menyadari pentingnya hal tersebut, kami berkomitmen mengelola air secara bertanggung jawab sepanjang siklusnya, mulai dari pengambilan hingga pembuangan. Pendekatan kami didasarkan pada pemahaman bahwa badan air yang kami gunakan merupakan sumber daya bersama yang dimanfaatkan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, kami berupaya memastikan

penggunaan air kami tidak mengganggu ketersediaan, kualitas, maupun aksesibilitas air bagi pengguna lain, sekaligus bekerja sama untuk melindungi sumber daya bersama tersebut.

Pengambilan dan Konsumsi Air ^{[GRI 303-3][GRI 303-5][SASB EM-MM-140a.1][POJK51-F.8]}

Sumber air utama operasi Sorowako adalah Danau Matano yang berada di sekitar wilayah operasi kami. Pengambilan air dari danau ini dikelola secara hati-hati untuk mendukung kebutuhan operasional sekaligus menjaga ketersediaan sumber daya bersama tersebut. Pendekatan ini juga selaras dengan status konservasi danau sebagai Kawasan Taman Wisata Alam sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian No. 274/Kpts/Um/4/1979 tanggal 24 April 1979.

Untuk proyek pertumbuhan kami, pengambilan air terutama bersumber dari sistem sungai. Di seluruh wilayah operasional kami, air tawar bersumber dari badan air permukaan yang tidak diklasifikasikan mengalami tekanan air dasar tinggi atau sangat tinggi (*high or extremely high baseline water stress*). Kami mendefinisikan air tawar sebagai air dengan total padatan terlarut (*total dissolved solids*) maksimum 1.000 mg/L. Untuk tujuan pelaporan, volume air tawar yang diambil dianggap setara dengan volume air yang dikonsumsi dalam operasi kami.

Pada 2025, pengambilan air untuk operasi Sorowako mencapai 15.079.167 m³ yang seluruhnya bersumber dari Danau Matano, dengan intensitas pengambilan air sebesar 209,35 m³ per ton nikel yang diproduksi. Volume pengambilan air yang dilaporkan lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya terutama mencerminkan peningkatan akurasi pengukuran setelah penyesuaian sistem pengambilan air serta pemasangan dan kalibrasi flow meter yang diperbarui bekerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah Luwu Timur, bukan akibat peningkatan kebutuhan air operasional yang sebanding. Kebutuhan air operasional secara umum relatif konsisten, sementara angka tahun-tahun sebelumnya mungkin belum sepenuhnya mencerminkan volume pengambilan aktual akibat keterbatasan pengukuran sebelumnya dan karenanya tidak sepenuhnya dapat dibandingkan. Perbaikan ini memperkuat akurasi dan keandalan pemantauan serta pelaporan air ke depan.



Pengambilan Air Operasional Sorowako dan Intensitas

	Unit	2023	2024	2025
Total Pengambilan Air	m ³	9,442,313	11,748,150	15,079,167
Intensitas	m ³ /ton matte	113.50	164.75	209.35

Untuk IGP Morowali, total pengambilan air mencapai 20.612 m³ pada tahun 2025, yang bersumber dari air permukaan dan air tanah. Jumlah ini meningkat sekitar 2.577 m³ atau 14,3% dibandingkan tahun 2024, seiring dengan meningkatnya aktivitas operasional di lokasi tersebut.

Di IGP Pomalaa, total pengambilan air pada tahun 2025 mencapai 9.969 m³ yang bersumber dari air sungai permukaan, meningkat sekitar 1.066 m³ atau 12,0% dibandingkan tahun sebelumnya, mencerminkan peningkatan bertahap aktivitas operasional seiring perkembangan proyek.

IGP Morowali

20.612 m³

Pengambilan dan Konsumsi Air

IGP Pomalaa

9.969 m³

Pengambilan dan Konsumsi Air

Efisiensi Air dan Daur Ulang^{[GRI 303-1][POJK51-F.8]}

Untuk mendukung pengelolaan air yang bertanggung jawab, PTVI menerapkan berbagai langkah efisiensi air di seluruh wilayah operasional, termasuk pabrik pengolahan, area tambang, perkantoran, dan fasilitas pendukung. Upaya ini mencakup pemantauan penggunaan air melalui sistem daring *Steam, Water, Air, and Power* (SWAP), pencegahan kehilangan air melalui pengendalian kebocoran dan limpasan, serta optimalisasi efisiensi melalui daur ulang dan penggunaan kembali air di operasi pabrik dan pertambangan.

Air daur ulang dimanfaatkan untuk berbagai proses industri, termasuk sistem pendingin, pendinginan slag, persiapan bahan kimia, penyiraman jalan, dan pendinginan peralatan. Distribusi air juga dikelola secara hati-hati untuk menjaga integritas sistem, sementara inovasi berkelanjutan terus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi air di seluruh operasi kami.

Pengelolaan Efluen dan Pembuangan Air^{[GRI 303-2][GRI 303-4][POJK51-F.8][POJK51-F.13]}

Efluen yang dihasilkan dari operasi kami terutama berasal dari proses industri, air tambang, dan penggunaan air domestik. Untuk mencegah potensi dampak terhadap badan air sekitar, PTVI menerapkan sistem pengolahan dan pemantauan air limbah di seluruh wilayah operasional guna memastikan air yang dibuang memenuhi standar mutu lingkungan dan persyaratan regulasi yang berlaku.

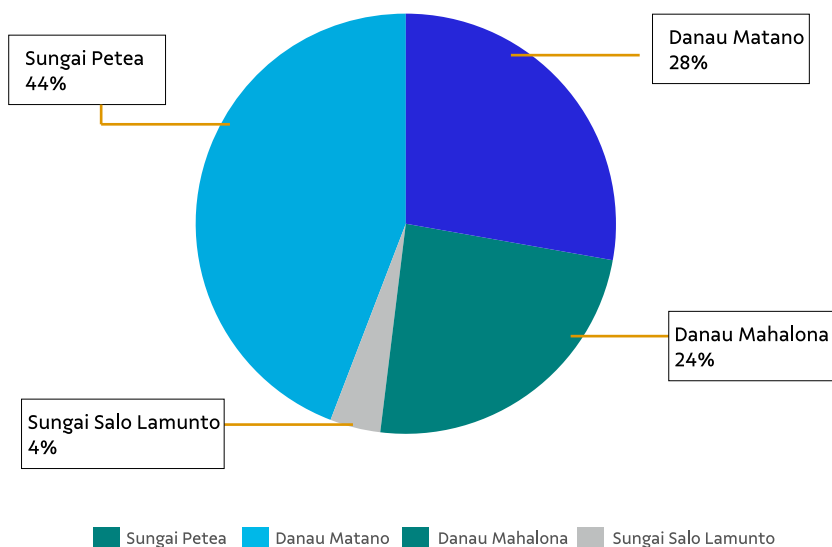
Di operasi Sorowako, efluen dari aktivitas pertambangan dan pengolahan dikelola melalui jaringan lebih dari 100 kolam pengendapan, didukung fasilitas pengolahan khusus seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah Pakalangkai dan unit Lamella Gravity Settler (LGS). Sistem pengolahan ini menghilangkan padatan tersuspensi dan kontaminan lainnya sebelum pembuangan serta mendukung kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 9 Tahun 2006 tentang baku mutu air limbah kegiatan pertambangan nikel.

Setelah diolah, air dibuang ke badan air permukaan sekitar yang tidak tergolong mengalami tekanan air, termasuk Danau Matano, Danau Mahalona, Sungai Salo Lamunto, dan Sungai Petea. Pada 2025, total air olahan yang dibuang dari operasi Sorowako mencapai 89.697,94 megaliter, menurun sekitar 11.008,88 megaliter atau sekitar 10,9% dibandingkan 2024. Penurunan ini mencerminkan peningkatan praktik pengelolaan air, termasuk peningkatan penggunaan kembali dan daur ulang air dalam proses operasional. Sebagian besar air buangan dialirkan ke Sungai Petea dan Danau Matano, yang secara bersama mencakup mayoritas volume pembuangan.

Pembuangan Air Operasi Sorowako berdasarkan Badan Penerima Air

Tujuan Pembuangan Air	Unit	2025	2024	2023
Air Permukaan (Danau Matano)	m ³	25.372.487	25.639.690	18.045.493
Air Permukaan (Danau Mahalona)	m ³	21.221.547	20.648.522	11.370.115
Air permukaan (Sungai Salo Lamunto)	m ³	3.898.304	3.705.430	–
Air Permukaan (Sungai Petea)	m ³	39.203.071	50.716.129	21.472.522
Total	m³	89.695.408,20	100.709.771,00	50.226.716

Pembuangan Air Sorowako 2025 (m³)



Untuk proyek IGP Pomalaa, pembuangan air limbah industri belum terjadi selama tahun pelaporan karena lokasi masih berada dalam tahap konstruksi *Smelter Development Project* (SDP), dengan operasi ditargetkan dimulai pada triwulan I 2026. Selama konstruksi, limpasan permukaan dikelola melalui kolam penampungan (*pocket pond*) dengan kualitas air dipantau untuk parameter seperti TSS, Kromium (Cr), Nikel (Ni), dan Besi (Fe). Volume pembuangan tidak diukur karena tidak terdapat pembuangan terkendali dari kolam tersebut.

Sementara itu, di IGP Morowali, pembuangan air limbah dalam jumlah terbatas terjadi selama aktivitas operasional awal. Pada 2025, total air yang dibuang mencapai 113.251,39 m³, terdiri atas pembuangan ke sungai permukaan (100.228,32 m³) dan laut (13.023,07 m³). Seiring berkembangnya aktivitas operasional, PTVI akan terus memperkuat sistem pemantauan dan pelaporan air limbah di lokasi ini untuk memastikan kepatuhan berkelanjutan terhadap standar lingkungan yang berlaku.

Pemantauan Kualitas Efluen

Di seluruh wilayah operasional, kami melakukan pemantauan dan analisis rutin untuk memastikan kualitas efluen kami memenuhi standar air limbah yang berlaku. Analisis efluen dilakukan oleh laboratorium independen terakreditasi menggunakan metode analitik berdasarkan SNI 6989.59:2008 tentang Air dan Air Limbah, serta metode internasional yang diakui yang diterbitkan oleh American Public Health Association (APHA).

Pemantauan mencakup parameter utama seperti *total suspended solids* (TSS), kromium (Cr), kromium heksavalen (Cr⁶⁺), besi (Fe), dan nikel (Ni) pada sampel efluen yang dikumpulkan dari sedikitnya 11 titik observasi, yang mencakup fasilitas pengolahan air limbah dan titik pembuangan di operasi Sorowako. Selama beberapa tahun terakhir, konsentrasi parameter-parameter tersebut secara konsisten berada dalam batas regulasi yang berlaku, mencerminkan efektivitas sistem pengolahan air limbah kami.

Beberapa lokasi pemantauan mencatat volume air limbah terolah terbesar selama tahun pelaporan, termasuk Petea East (23.146.907 m³), Petea Far East (16.056.164 m³), dan Petea West (13.744.808 m³). Di lokasi-lokasi tersebut, konsentrasi total suspended solids (TSS) berada pada kisaran 10,00 hingga 13,50 mg/L, jauh di bawah ambang batas regulasi yang berlaku sebesar 200 mg/L, sementara konsentrasi total kromium (Cr), kromium heksavalen (Cr⁶⁺), besi (Fe), dan nikel (Ni) juga tetap berada dalam batas regulasi masing-masing. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem sedimentasi dan klarifikasi, termasuk kolam pengendapan dan unit Lamella Gravity Settler (LGS), terus efektif dalam mengelola kualitas efluen sebelum pembuangan.

Hasil pemantauan tahun 2025 konsisten menunjukkan kepatuhan terhadap ambang batas regulasi untuk seluruh parameter yang dipantau. Pengukuran yang disajikan merupakan nilai median yang diperoleh dari berbagai titik pemantauan yang terkait dengan fasilitas pengolahan air limbah pertambangan, pengolahan, dan domestik.

Rincian hasil pemantauan untuk setiap titik observasi, termasuk nilai parameter, ambang batas regulasi, dan volume pembuangan berdasarkan badan air penerima di seluruh wilayah operasional kami, disajikan pada bagian Tabel Data dalam laporan ini.

Sebuah studi yang dilakukan pada 2023 di area tambang PTVI di Sorowako, yang hasilnya masih berlaku hingga saat ini, menunjukkan bahwa tidak terdapat risiko terbentuknya air asam tambang (*acid mine drainage* / AMD) di lokasi tersebut. Hal ini dikonfirmasi oleh tidak ditemukannya batuan yang berpotensi menghasilkan AMD di area pertambangan. AMD merupakan salah satu isu utama dalam industri pertambangan karena berpotensi merusak ekosistem dan sumber air seperti sungai, danau, dan air tanah. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab, khususnya terkait limbah cair, menjadi sangat penting.^[SASB EM-MM-160a.2]

Substitusi Pendinginan Berbasis Air dengan Pendinginan Udara di Super Furnace 4

Dalam proses pirometalurgi untuk memproduksi nikel matte, dinding *furnace* umumnya memerlukan pendinginan untuk mengendalikan suhu tinggi yang dihasilkan selama operasi. Sebelumnya, pendinginan di *Furnace 4* (*Super Furnace 4*) mengandalkan air daur ulang yang disemprotkan ke dinding *furnace*. Proses ini sering menyebabkan kehilangan air melalui evaporasi dan memerlukan tambahan pasokan air untuk menjaga tingkat operasional.

Untuk meningkatkan efisiensi air, PTVI memperkenalkan sistem pendinginan udara ambien yang didukung teknologi blower untuk menggantikan mekanisme pendinginan berbasis air di bagian bawah *Furnace 4*. Dengan menggantikan pendinginan air dengan pendinginan udara, operasi berhasil menghilangkan penggunaan air untuk proses ini.

Melalui inisiatif ini, PTVI menurunkan konsumsi air sebesar 12.290 m³ pada 2025, sekaligus mengurangi penggunaan energi melalui eliminasi kebutuhan sistem pompa yang sebelumnya digunakan dalam pendinginan berbasis air.

Peningkatan Efisiensi Sirkulasi Air dalam Granulasi Converter melalui Integrasi Paddle Classifier

PTVI juga melakukan peningkatan otomatisasi sirkulasi air dalam proses granulasi *converter* melalui integrasi sistem *Paddle Classifier* (PADLE POP). Dalam proses ini, air yang digunakan selama granulasi dipisahkan dari partikel nikel matte melalui paddle classifier dan disirkulasikan kembali untuk digunakan ulang di dalam proses.

Sistem yang ditingkatkan ini dilengkapi sensor pemantauan real-time yang terhubung dengan basis data operasional, memungkinkan pengendalian otomatis operasi pompa berdasarkan level air di *granulation pit*. Otomatisasi ini meningkatkan efisiensi proses sekaligus mencegah insiden limpasan (*overflow*).

Sebagai hasilnya, inisiatif ini menurunkan konsumsi air di operasi *converter* sebesar 112.203 m³ pada 2025 sekaligus meningkatkan pengendalian operasional. Setelah implementasi sistem ini, tidak terdapat insiden yang tercatat selama tahun pelaporan.





Towuti Oil Leakage Recovery^{[GRI 306-3][POJK F.15][SASB EM-MM-150a.9][SASB EM-MM-140a.2]}

Pada 23 Agustus 2025, terjadi kebocoran pipa minyak di Desa Lioka, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Setelah menerima laporan, PTVI segera mengaktifkan Emergency Response Group (ERG) dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, perwakilan masyarakat, serta instansi terkait untuk membentuk tim tanggap darurat bersama. Kolaborasi ini memungkinkan tindakan penanggulangan, mitigasi, dan pemulihan dilakukan secara cepat guna meminimalkan dampak lingkungan dan sosial.

Langkah-langkah pengendalian teknis segera diterapkan, termasuk mengamankan area pipa terdampak serta memasang oil boom, oil trap, dan kolam penahan (*containment pond*) untuk mencegah penyebaran minyak lebih lanjut. Kegiatan pemantauan lingkungan dilakukan melalui pengujian kualitas air dan tanah, serta penialain ekologis terhadap flora dan fauna di area sekitar. Minyak yang berhasil dipulihkan dan material terkontaminasi dikelola sesuai regulasi lingkungan yang berlaku dan ditangani melalui fasilitas pengelolaan limbah B3 berizin milik PTVI. Jika diperlukan, langkah remediasi lahan dan bioremediasi juga diterapkan untuk memulihkan kondisi tanah dan fungsi lingkungan.

PTVI juga memperhatikan kekhawatiran yang disampaikan masyarakat Desa Lioka dan mendukung komunitas terdampak melalui berbagai bentuk bantuan. Aspirasi dan umpan balik masyarakat diterima melalui *Grievance and Information Center* di Kantor Kecamatan Towuti serta hotline khusus. Berdasarkan masukan tersebut dan asesmen lapangan, PTVI melaksanakan

sejumlah langkah respons, termasuk dukungan bagi sawah terdampak melalui pemulihan tanah dan bantuan penanaman kembali, penyediaan air bersih bagi warga dan ternak, perbaikan infrastruktur publik yang terdampak, serta dukungan pemulihan lahan pertanian dengan tetap menjaga akses terhadap fasilitas penting masyarakat.

Sepanjang proses tanggap darurat dan pemulihan, PTVI menjaga transparansi dan komunikasi aktif dengan para pemangku kepentingan, termasuk melalui pengungkapan perkembangan mitigasi dan pemulihan melalui saluran komunikasi resmi dan situs web Perseroan.

MFO Pipe Leak – Crisis Management Phase





Dampak Lingkungan dari Kebocoran

Insiden ini memerlukan berbagai tindakan pengelolaan lingkungan di sejumlah area operasional, meliputi:

- **Pengelolaan Limbah**

Material yang terkontaminasi minyak dan minyak hasil pemulihan dikumpulkan dan dikelola sebagai limbah B3 sesuai regulasi yang berlaku. Sekitar 5 ton minyak hasil pemulihan diproses melalui perlakuan termal (*dryer/thermal unit*) selama tiga hari, yang untuk sementara memengaruhi operasi pengolahan dan meningkatkan penggunaan energi operasional serta emisi. Tanah tambahan yang terkontaminasi memerlukan perlakuan bioremediasi yang dapat berlanjut hingga satu tahun tergantung perkembangan pemulihan.

- **Kualitas Tanah dan Lahan**

Area tanah yang terkontaminasi menjalani proses remediasi dan bioremediasi untuk memulihkan kualitas tanah dan fungsi lingkungan. Pemantauan terus dilakukan untuk memastikan efektivitas langkah-langkah pemulihan tersebut.

- **Kualitas Air**

Sistem pengendalian preventif, termasuk *oil boom* dan *oil trap*, dipasang untuk mencegah penyebaran minyak ke badan air sekitar. Pemantauan kualitas air secara rutin dilakukan untuk memastikan kondisi lingkungan kembali ke tingkat yang dapat diterima.

Melalui langkah mitigasi dan pemulihan tersebut, PTVI terus bekerja sama dengan para pemangku kepentingan untuk

memulihkan kondisi lingkungan dan mendukung pemulihan masyarakat terdampak.

PTVI tetap berkomitmen terhadap transparansi dan keterlibatan pemangku kepentingan sepanjang proses tanggap darurat dan pemulihan. Informasi terbaru mengenai mitigasi, remediasi, dan dukungan bagi masyarakat secara berkala diungkapkan melalui saluran komunikasi resmi kami. Untuk



Pengelolaan Limbah

Pengelolaan limbah yang bertanggung jawab merupakan bagian integral dari pengelolaan lingkungan dan keberlanjutan operasional PTVI. Operasi kami menghasilkan berbagai aliran limbah (*waste streams*) yang berasal dari aktivitas pertambangan, pengolahan mineral, pekerjaan pemeliharaan, dan fasilitas pendukung. Tanpa pengelolaan yang tepat, aliran limbah ini berpotensi menimbulkan dampak lingkungan terkait penggunaan lahan, kualitas air, dan kesehatan ekosistem. Oleh karena itu, kami menerapkan praktik pengelolaan limbah yang terstruktur untuk meminimalkan risiko lingkungan, mencegah pencemaran, dan mendorong penggunaan sumber daya yang bertanggung jawab di seluruh wilayah operasional kami.^[GRI 306-1]

Pendekatan pengelolaan limbah kami dipandu oleh prinsip *reduce, reuse, recycle*, dan *recovery* (4R). Prinsip-prinsip ini diterapkan melalui pemilahan limbah, inisiatif daur ulang, praktik pemulihan material, dan pembuangan akhir yang bertanggung jawab untuk mengurangi jumlah limbah yang memerlukan pembuangan, sekaligus mendorong penggunaan sumber daya secara sirkular sedapat mungkin.^[GRI 306-2]

Praktik pengelolaan limbah di PTVI diterapkan di seluruh wilayah operasional, termasuk operasi Sorowako serta area proyek yang berkembang di IGP Morowali dan IGP Pomalaa, serta mencakup aliran limbah operasional maupun limbah terkait masyarakat di lokasi yang menjalankan program kolaboratif.

Mekanisme Pengelolaan Limbah

Kami mengelola limbah melalui sistem terstruktur yang mencakup pemilahan, penyimpanan, pengangkutan, pengolahan, daur ulang, dan pembuangan, sehingga setiap jenis limbah ditangani sesuai karakteristik dan profil risiko lingkungannya. Limbah yang dihasilkan dari aktivitas operasional pertama-tama dipilah di sumber menjadi

limbah B3, limbah non-B3, dan aliran limbah terkait pertambangan, sehingga memungkinkan pengelolaan dan pengolahan yang sesuai berdasarkan karakteristik material dan persyaratan regulasi.

Limbah B3 disimpan sementara di fasilitas penyimpanan berizin yang ditetapkan sebelum diangkut oleh pihak ketiga berwenang ke fasilitas pengolahan atau pembuangan berizin sesuai regulasi yang berlaku. Limbah non-B3 dikelola melalui daur ulang, penggunaan kembali, atau pembuangan terkendali sesuai karakteristik materialnya.^{[GRI 306-2][POJK51-F.14]}

Material terkait pertambangan seperti *overburden*, *topsoil*, dan *slag* dikelola sebagai bagian dari siklus operasional tambang dan program pengelolaan lingkungan, termasuk rehabilitasi lahan dan penggunaan kembali material jika memungkinkan. Praktik ini membantu memastikan material tambang dimanfaatkan secara bertanggung jawab sekaligus meminimalkan dampak lingkungan sepanjang siklus operasional.

PTVI mengawasi pengelolaan limbah dan bahan berbahaya melalui prosedur internal pengelolaan lingkungan dan mekanisme pemantauan kepatuhan. Hal ini mencakup pengawasan terhadap pengangkutan limbah, dokumentasi, dan proses pengolahan untuk memastikan limbah B3 hanya ditangani oleh operator berizin dan dikelola sesuai persyaratan regulasi yang berlaku. Prosedur ini diterapkan di seluruh wilayah operasional aktif kami, dan juga akan menjadi acuan praktik pengelolaan limbah untuk lokasi tidak aktif apabila kondisi tersebut terjadi. Melalui pengendalian ini, kami menjaga ketertelusuran (*traceability*) dan kepatuhan regulasi di seluruh rantai pengelolaan limbah pada wilayah operasional kami.^{[GRI 306-4][SASB EM-MM-150a.10]}

Limbah yang dihasilkan dari operasi kami pada umumnya terbagi ke dalam tiga kategori utama, yaitu limbah B3, limbah non-B3, dan limbah pertambangan, sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut.

Jenis Limbah	Deskripsi
B3	Filter bekas, oli bekas, lumpur minyak (<i>oil sludge</i>), baterai bekas, material yang terkontaminasi limbah B3, lampu, <i>cartridge</i> , pelumas bekas, selang bekas, limbah laboratorium, <i>sludge</i> , limbah elektronik, asbes, kemasan bekas limbah B3, residu pembersihan radiator, limbah terkontaminasi bahan berbahaya, pakaian bekas terkontaminasi, limbah medis, dan botol kemasan bahan kimia.
Non-B3	Limbah <i>belt conveyor</i> , <i>roller conveyor</i> , <i>track plate</i> , <i>bucket</i> , <i>belt frame</i> , <i>rel</i> , <i>rantai</i> , <i>wearing plate</i> , <i>drum</i> , <i>shaft</i> , <i>roller AF</i> , lembaran besi, baja konstruksi, plastik, kaca, kaleng, sisa makanan, kertas, daun, kayu, batang bambu, rumput, ban bekas, dan FABA (<i>fly ash and bottom ash</i>).
Limbah Tambang	<i>Topsoil</i> , <i>overburden</i> , dan <i>slag</i> .

Dalam bagian ini, data kinerja limbah berfokus pada aliran limbah industri dan operasional, termasuk limbah B3 dan non-B3 yang dihasilkan dari aktivitas pemeliharaan, operasi pendukung pengolahan, dan pengelolaan fasilitas. Material terkait pertambangan seperti *overburden*, *topsoil*, dan *slag* tidak termasuk dalam angka timbulan limbah yang disajikan pada subbagian ini, karena material tersebut dikelola sebagai bagian dari siklus produksi pertambangan dan dilaporkan secara terpisah pada bagian Efisiensi Mineral dalam laporan ini.

Pengelolaan Tailing dalam Operasi Kami^{[SASB}

EM-MM-150a.5][SASB EM-MM-540a.1][SASB EM-MM-540a.2][SASB

EM-MM-540a.3][GRI 14.6.2][GRI 14.6.3]

Operasi pengolahan nikel PTVI menggunakan teknologi *Reduction Kiln Electric Furnace* (RKEF), yaitu proses pirometalurgi yang tidak menghasilkan *tailing* sebagaimana umumnya dihasilkan pada pengolahan mineral secara hidrometalurgi. Dengan demikian, tidak terdapat *tailing* yang dihasilkan dari operasi PTVI.

Namun demikian, sebagai bagian dari rantai nilai hilir nikel yang lebih luas untuk mendukung material baterai, fasilitas pengolahan operasi HPAL dengan ventura bersama kami menghasilkan residu pengolahan mineral seperti *tailing* atau lumpur proses. PTVI menyadari potensi dampak yang terkait dengan aktivitas ini dan bekerja sama dengan para mitra untuk mendorong praktik pengelolaan residu yang bertanggung jawab, sesuai dengan standar lingkungan yang berlaku serta praktik terbaik yang diakui secara internasional.

Kinerja Timbulan dan Pengelolaan Limbah

Selama tahun pelaporan, PTVI menghasilkan limbah dari aktivitas operasional, pemeliharaan, dan kegiatan pendukung di seluruh area operasional kami. Aliran limbah dikategorikan menjadi limbah B3 dan non-B3 serta dikelola melalui daur ulang, penggunaan kembali, pemulihan, pembuangan terkendali, atau pengolahan oleh pihak ketiga berizin sesuai dengan peraturan lingkungan yang berlaku.

Pada tahun 2025, total limbah yang dihasilkan di seluruh area operasional PTVI mencapai sekitar 8.296,66 ton, tidak termasuk limbah domestik yang dikelola dari masyarakat sekitar. Dari jumlah tersebut, sekitar 70% merupakan limbah non-B3 dan 30% limbah B3. Timbulan limbah masih sangat terkonsentrasi pada operasi Sorowako, yang menyumbang lebih dari 92% dari total jejak limbah operasional PTVI, mencerminkan skala dan kematangan Sorowako sebagai operasi penambangan dan pengolahan terintegrasi utama PTVI. Sebagai perbandingan, volume limbah di IGP Morowali dan IGP Pomalaa masih relatif terbatas dan sebagian besar terkait dengan aktivitas konstruksi dan awal operasi.^{[POJK51-F.13][GRI 306-3]}

Pada operasi Sorowako, total limbah non-B3 yang dihasilkan mencapai 5.349 ton pada tahun 2025, menurun 9,4% dibandingkan 5.906 ton pada tahun 2024. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.609 ton atau sekitar 30% dipilah untuk kegiatan daur ulang, penggunaan kembali, dan pemanfaatan ulang, sementara 3.740 ton atau sekitar 70% dikirim ke fasilitas landfill terkendali. Peningkatan fasilitas pemilahan limbah turut meningkatkan kapasitas dan efisiensi pengolahan, dengan tingkat pemilahan meningkat dari 17% pada tahun 2024 menjadi 30% pada tahun 2025, sehingga lebih banyak material dapat dipulihkan dan dimanfaatkan kembali dibandingkan dibuang.

Untuk limbah B3, Sorowako menghasilkan 2.353 ton selama tahun pelaporan, menurun 12,7% dibandingkan tahun 2024. Seluruh limbah B3 dikelola melalui fasilitas pihak ketiga berizin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PTVI sebelumnya menetapkan target zero waste to landfill pada tahun 2025 yang didasarkan pada rencana penyelesaian fasilitas *refuse-derived fuel* (RDF). Namun, karena tantangan teknis, proyek tersebut belum dapat diselesaikan pada tahun pelaporan. Meskipun target tersebut belum tercapai, PTVI tetap berkomitmen untuk mengurangi pembuangan limbah ke landfill. Untuk mendukung upaya tersebut, praktik pemilahan limbah terus diperkuat melalui pemisahan limbah organik dan non-organik. Limbah organik diolah melalui budidaya maggot dan dimanfaatkan kembali sebagai bahan pakan, sementara material non-organik seperti plastik, kertas, kaca, dan aluminium dikirim kepada mitra pihak ketiga untuk didaur ulang dan digunakan kembali. Inisiatif ini berkontribusi terhadap penurunan bertahap volume limbah ke landfill serta mendukung pendekatan ekonomi sirkular dalam pengelolaan limbah.

Di IGP Morowali, timbulan limbah meningkat seiring dengan perluasan aktivitas operasional. Pada tahun 2025, total limbah non-B3 yang dihasilkan mencapai 76 ton, sementara limbah B3 meningkat signifikan menjadi 85,24 ton dari 7,22 ton pada tahun 2024. Limbah B3 yang dihasilkan di IGP Morowali dikirim ke fasilitas pengelolaan limbah B3 pihak ketiga berizin untuk pengolahan dan pembuangan sesuai dengan persyaratan peraturan yang berlaku.

Timbulan limbah di IGP Pomalaa juga meningkat seiring perkembangan aktivitas proyek dan operasional selama tahun pelaporan. Pada tahun 2025, IGP Pomalaa menghasilkan 375 ton limbah non-B3. Timbulan limbah B3 juga meningkat signifikan menjadi 58,42 ton pada tahun 2025 dibandingkan

5,71 ton pada tahun 2024, mencerminkan meningkatnya aktivitas konstruksi dan awal operasi. Seiring dengan terus berkembangnya aktivitas operasional di IGP Morowali dan IGP Pomalaa, sistem pengelolaan limbah dan praktik pemantauan akan terus diperkuat untuk memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan yang berlaku.^{[GRI 306-3][GRI 306-5][SASB EM-MM-150a.7]}
[SASB EM-MM-150a.8]

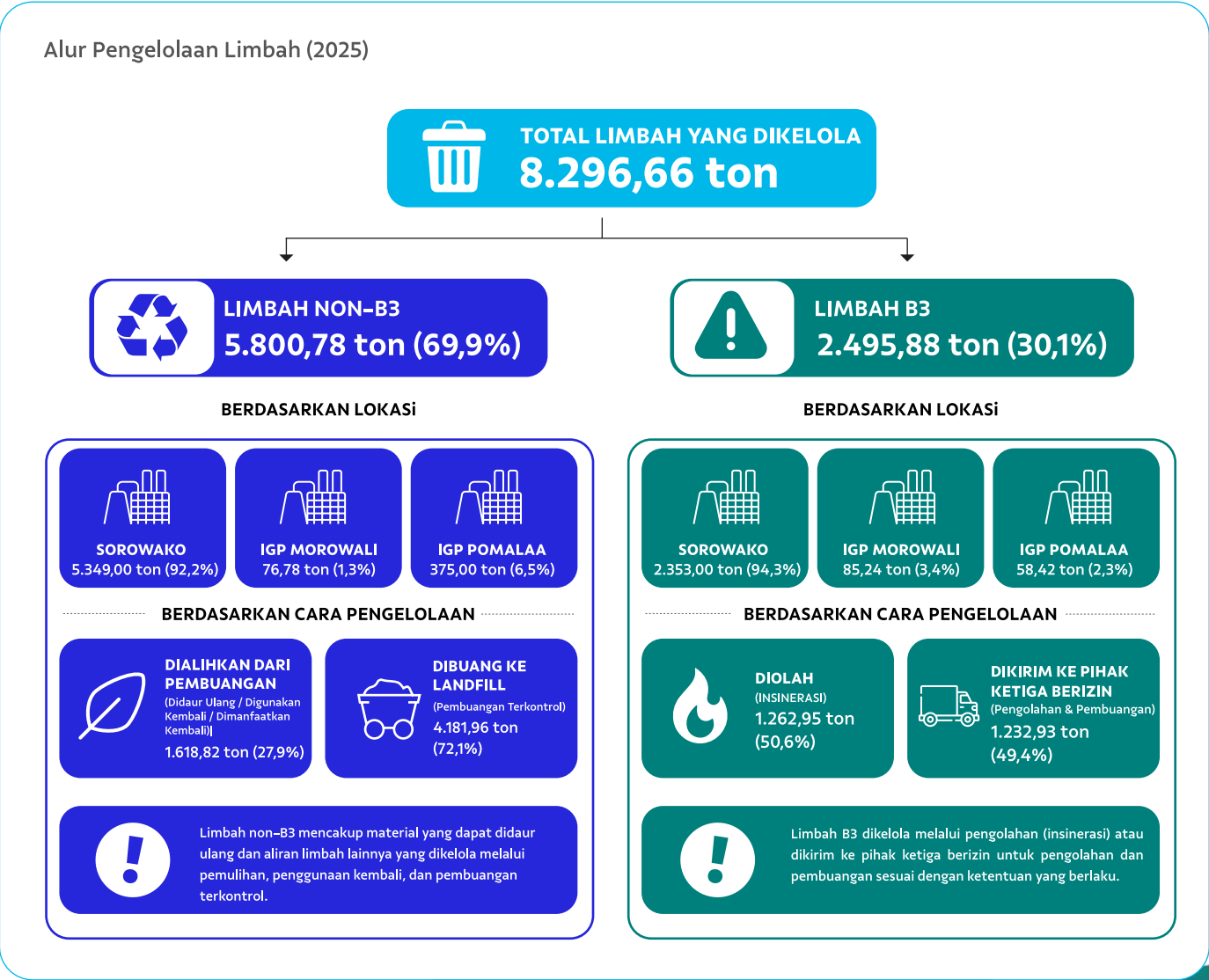
Pengolahan Limbah Organik melalui Black Soldier Fly (BSF)

PTVI terus mendukung pengelolaan limbah organik melalui program *Black Soldier Fly* (BSF), yang mengubah limbah organik menjadi produk bernilai seperti *maggot* dan kompos.

Selama periode pelaporan, sekitar 213,36 ton limbah organik diolah melalui sistem BSF, menghasilkan 11,81 ton *maggot* dan 29,42 ton kompos. *Maggot* tersebut disalurkan kepada Kelompok Tani Woliko Berkembang dan dimanfaatkan sebagai sumber pakan alternatif untuk mendukung kegiatan peternakan lokal. Sementara itu, kompos dimanfaatkan oleh Kelompok Wanita Tani serta digunakan dalam kegiatan reklamasi lahan PTVI untuk meningkatkan kualitas tanah dan mendukung pertumbuhan vegetasi.

Melalui inisiatif ini, limbah organik diubah menjadi sumber daya yang bermanfaat sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan limbah berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya secara sirkular.

Alur Pengelolaan Limbah (2025)



Daur Ulang Berbasis Masyarakat melalui Bank Sampah

Untuk memperkuat sistem daur ulang berbasis masyarakat, PTVI berkolaborasi dengan bank sampah di Sorowako, Wawondula, dan Wasuponda. Melalui inisiatif ini, material yang dapat didaur ulang dikumpulkan dan disalurkan untuk mendukung upaya daur ulang lokal serta memberikan peluang ekonomi tambahan bagi masyarakat.

Selama periode pelaporan, material yang disalurkan meliputi 3,38 ton botol plastik, 0,96 ton kaleng aluminium, dan 1,15 ton botol kaca.

Pemanfaatan Kembali Material untuk Masyarakat dan Lingkungan

PTVI juga mendorong penggunaan kembali material melalui pemanfaatan ulang limbah operasional. Sekitar 126,97 ton limbah kayu dimanfaatkan kembali, sementara 24,65 ton ban bekas digunakan kembali untuk mendukung penguatan lereng di area agroforestri nanas PTVI serta diolah menjadi sekitar 100 pot tanaman yang didistribusikan kepada masyarakat setempat.



Pendidikan Kesadaran Lingkungan bagi Siswa Sekolah Dasar



Pada 13 Agustus hingga 17 September 2025, PTVI melalui IGP Morowali melaksanakan program edukasi lingkungan bertajuk “Murid Cinta Lingkungan: Kelola Sampah dengan Bijak” sebagai bagian dari inisiatif pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Program ini menjangkau 12 sekolah dasar di 13 desa binaan, dengan memperkenalkan praktik pengelolaan sampah yang bertanggung jawab dan memperkuat kesadaran lingkungan sejak dini.

Melalui sesi edukasi interaktif, kami memperkenalkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) bersama nilai-nilai 5K: kebersihan, kesehatan, keselamatan, ketertiban, dan keindahan, guna mendorong siswa membangun kebiasaan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui diskusi, kuis, dan kegiatan pembelajaran praktis, program ini dirancang agar edukasi lingkungan menjadi menarik dan mudah diterapkan. Melalui inisiatif ini, PTVI bertujuan menumbuhkan budaya tanggung jawab lingkungan di kalangan generasi muda sekaligus mendukung terwujudnya komunitas yang lebih bersih dan berkelanjutan di wilayah operasional kami.



Aksi Pemuda untuk Menjaga Danau Matano



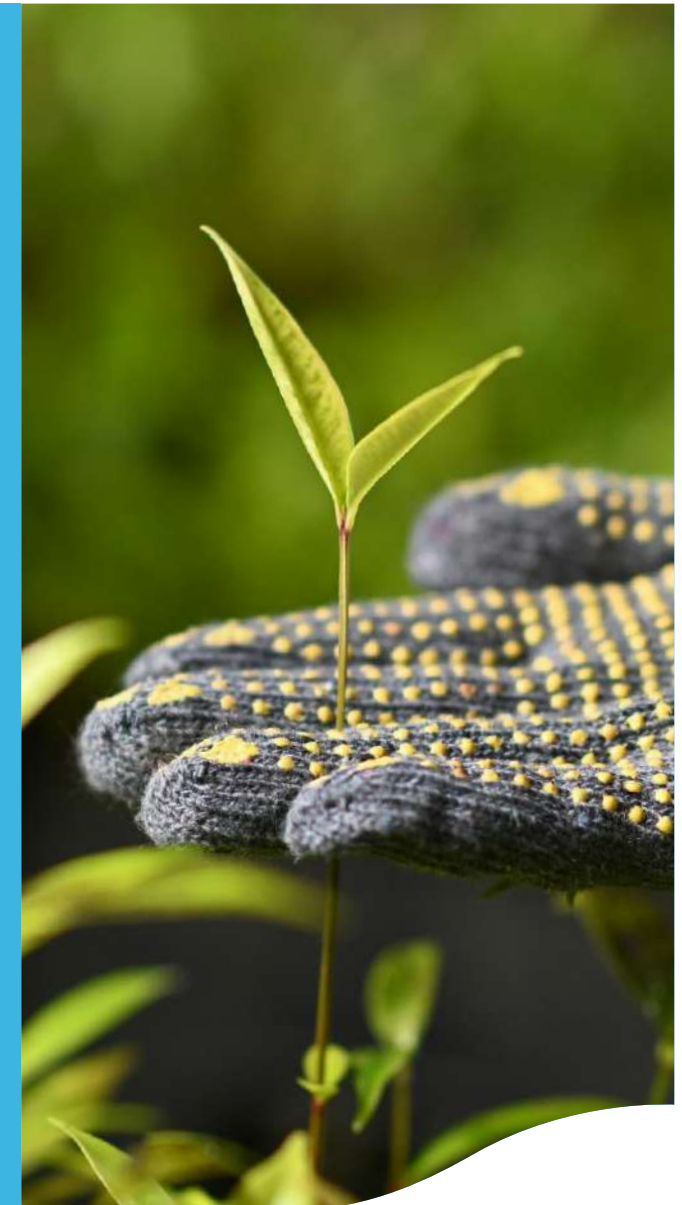
Pada 31 Oktober 2025, PTVI bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan berbagai organisasi masyarakat mendukung inisiatif lingkungan yang dipimpin pemuda bertajuk “Bersih Itu Keren: Pemuda Ambil Peran Jaga Danau” di area Dermaga Sorowako.

Kegiatan ini melibatkan pelajar, organisasi kepemudaan, masyarakat lokal, dan perwakilan pemerintah dalam aksi bersih-bersih bersama untuk mengurangi sampah di sepanjang tepian Danau Matano, salah satu danau purba terdalam di dunia dan aset ekologis penting bagi kawasan ini.

Inisiatif ini juga menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab dan pengelolaan lingkungan (*environmental stewardship*). Melalui upaya kolaboratif ini, PTVI mendorong partisipasi yang lebih besar dalam melindungi ekosistem alami sekaligus menjaga kualitas lingkungan Danau Matano, yang menopang penghidupan masyarakat lokal dan berperan penting dalam ekosistem operasional kami.

“Melalui kolaborasi ini, kami berharap dapat memperkuat kesadaran generasi muda terhadap pengelolaan sampah dan konservasi danau. Inisiatif ini mencerminkan komitmen kami untuk bekerja bersama masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam menjaga keberlanjutan Danau Matano.”

— Sainab Husain Paragay, Senior Coordinator PTPM Livelihood Social Development PTVI



Keanekaragaman Hayati

Kegiatan pertambangan dapat menimbulkan tekanan terhadap ekosistem melalui gangguan lahan, pembukaan vegetasi, fragmentasi habitat, perubahan hidrologi, dan meningkatnya aktivitas manusia di wilayah operasional. Menyadari potensi dampak tersebut, PTVI menerapkan pendekatan pengelolaan keanekaragaman hayati yang terstruktur di sepanjang siklus hidup pertambangan, mulai dari perencanaan tambang hingga pascatambang.^{[GRI 101-6][GRI 304-2]}

Pendekatan pengelolaan keanekaragaman hayati kami dipandu oleh regulasi nasional dan kerangka kerja yang diakui secara internasional, termasuk *Convention on Biological Diversity* (1992), *IFC Performance Standard 6 on Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources* (2012), *ICMM Good Practice Guidance for Mining and Biodiversity*, serta standar *Initiative for Responsible Mining Assurance* (IRMA).

Tujuan kami adalah mencapai *No Net Loss* keanekaragaman hayati di seluruh wilayah operasional. Komitmen ini selaras dengan tujuan jangka panjang yang ditetapkan dalam *Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework*, termasuk ambisi menghentikan dan membalikkan kehilangan keanekaragaman hayati pada 2030 serta mendukung pemulihan ekosistem pada 2050.^{[GRI 101-1][SASB EM-MM-160a.1]}

Asesmen Risiko Keanekaragaman Hayati dan Pendekatan Pengelolaan

Pendekatan pengelolaan keanekaragaman hayati kami berfokus pada tiga aspek yang saling terkait: spesies, habitat, dan dampak terhadap ekosistem. Untuk mengidentifikasi

dan mengelola risiko terkait keanekaragaman hayati, pada 2025 PTVI menyelesaikan *Critical Habitat Assessments* (CHA) dan *Ecosystem Services Assessments* (ESA) di seluruh wilayah operasional sesuai dengan ekspektasi IFC PS6, IRMA, dan ICMM. Asesmen ini memperkuat pemahaman kami terhadap risiko keanekaragaman hayati, ketergantungan pada jasa ekosistem, dan prioritas konservasi, sekaligus mendukung peta jalan kami menuju pencapaian *No Net Loss* dan *Net Gain*.

Asesmen tersebut mengonfirmasi bahwa sebagian bentang alam operasional kami memenuhi kriteria habitat kritis karena keberadaan spesies terancam dan endemik, serta ekosistem unik seperti sistem Danau Malili dan bentang alam karst. Di Sorowako, IGP Morowali, dan IGP Pomalaa, teridentifikasi total 56 spesies pemicu habitat kritis (*critical habitat trigger species*), yang terdiri dari 34 spesies di Sorowako serta masing-masing 11 spesies di IGP Morowali dan IGP Pomalaa.

Proses ESA juga mengidentifikasi jasa ekosistem yang bernilai tinggi bagi masyarakat sekitar, termasuk jasa penyediaan seperti perikanan dan hasil hutan, jasa pengaturan seperti pengendalian erosi dan perlindungan daerah aliran sungai, serta jasa budaya yang terkait dengan ekowisata dan lokasi bernilai spiritual.

Pelibatan pemangku kepentingan merupakan bagian integral dari asesmen ini, melalui konsultasi dengan masyarakat lokal di 55 desa di sekitar wilayah operasional kami, tim lingkungan PTVI, serta para ahli keanekaragaman hayati. Masukan dari proses pelibatan ini memperkuat pemahaman mengenai kondisi keanekaragaman hayati, ketergantungan terhadap ekosistem, dan perspektif masyarakat terhadap pemanfaatan sumber daya alam.

56

Spesies pemicu habitat kritis yang teridentifikasi di seluruh lokasi operasi

55

Desa yang dikonsultasikan selama proses ESA

Temuan asesmen menjadi dasar penyusunan Biodiversity Management Plans (BMP) di tingkat lokasi serta mendukung pengembangan berkelanjutan *Biodiversity Action Plans* (BAP) dan *Biodiversity Offset Plans* (BOP) untuk menangani dampak residual dan semakin mendukung ambisi *No Net Loss* kami.



Profil Habitat Kritis Spesifik per Lokasi

Sorowako

Di Sorowako, *Critical Habitat Assessment* mengonfirmasi keberadaan habitat kritis yang dipicu oleh 34 spesies, termasuk flora dan fauna terancam serta spesies endemik air tawar yang terkait dengan sistem Danau Malili. Spesies pemicu (*trigger species*) mencakup spesies endemik Sulawesi yang menjadi prioritas konservasi seperti anoa, babi rusa, kuskus beruang (*bear cuscus*), maleo, serta spesies akuatik endemik dalam kelompok Telmatherina dan Caridina.

Ecosystem Services Assessment Sorowako mengidentifikasi jasa penyediaan penting seperti perikanan air tawar dan hasil hutan, jasa pengaturan termasuk pengaturan aliran air dan pengendalian erosi, serta jasa ekosistem budaya yang terkait dengan lokasi ekowisata dan bentang alam bernilai spiritual di sekitar Danau Matano.

Biodiversity Management Plan Sorowako disusun berdasarkan lima tema utama:

1. Pengelolaan Habitat Terestrial
2. Perlindungan dan Konservasi Spesies
3. Pengelolaan Sistem Danau Malili
4. Pengelolaan Spesies Asing Invasif
5. Pengelolaan Ekosistem Karst

IGP Morowali

Di Morowali, *Critical Habitat Assessment* mengidentifikasi 11 spesies pemicu habitat kritis, termasuk spesies endemik air tawar dan nilai keanekaragaman hayati yang terkait dengan kawasan karst. Asesmen ini juga menyoroti ekosistem karst sebagai karakteristik ekologis khas yang memerlukan pengelolaan khusus.

Ecosystem Services Assessment mengidentifikasi jasa ekosistem penyediaan, pengaturan, dan budaya yang bernilai bagi masyarakat, termasuk sumber pangan liar, tanaman obat, sistem air tawar, dan bentang alam yang memiliki nilai budaya.

Biodiversity Management Plan Bahodopi disusun berdasarkan enam tema utama:

6. Pengelolaan Habitat Terestrial
7. Perlindungan dan Konservasi Spesies
8. Pengelolaan Habitat Air Tawar
9. Pengelolaan Habitat Laut
10. Pengelolaan Spesies Asing Invasif
11. Pengelolaan Karst

IGP Pomalaa

Di Pomalaa, *Critical Habitat Assessment* mengidentifikasi 11 spesies pemicu habitat kritis, termasuk mamalia darat, burung, reptil, dan spesies endemik air tawar, beberapa di antaranya telah dikonfirmasi melalui pemantauan keanekaragaman hayati. Temuan ini mendukung pengelolaan ekosistem darat, air tawar, dan pesisir yang sensitif di sekitar area proyek.

Ecosystem Services Assessment mengidentifikasi jasa penyediaan yang terkait dengan perikanan dan hasil hutan, jasa pengaturan yang berkaitan dengan fungsi daerah aliran sungai dan iklim, serta jasa budaya yang terkait dengan ekowisata dan lokasi bernilai spiritual.

Biodiversity Management Plan Pomalaa mencakup lima tema utama:

1. Pengelolaan Habitat Terestrial
2. Perlindungan dan Konservasi Spesies
3. Pengelolaan Habitat Air Tawar
4. Pengelolaan Spesies Asing Invasif
5. Pengelolaan Habitat Laut



Mengelola Dampak Keanekaragaman Hayati melalui Hierarki Mitigasi^[GRI 101-2]

Untuk mengelola risiko keanekaragaman hayati yang terkait dengan aktivitas kami, kami menerapkan hierarki mitigasi, yang memprioritaskan penghindaran, minimisasi, pemulihan, dan pengimbangan dampak.

Tindakan pada Setiap Tahapan Hierarki Mitigasi^[GRI 101-2]

Penghindaran	Memilih lokasi dan teknologi yang meminimalkan dampak terhadap keanekaragaman hayati sejak tahap perencanaan.
Minimalisasi	Mengurangi dampak selama tahap desain dan konstruksi melalui praktik terbaik dan inovasi teknologi.
Pemulihan	Melaksanakan reklamasi dan rehabilitasi pada lingkungan terdampak untuk memulihkan fungsi ekosistem.
Pengimbangan	Mengompensasi kehilangan ekologis melalui program kompensasi yang sesuai.

Sebagai bagian dari penguatan implementasi hierarki ini, PTVI terus mengembangkan *Biodiversity Action Plans* dan *Biodiversity Offset Plans* yang ditujukan untuk mendukung hasil keanekaragaman hayati yang terukur serta berkontribusi pada pencapaian *No Net Loss* maupun *Net Gain* sesuai ekspektasi internasional.

Jasa Ekosistem dan Pelibatan Pemangku Kepentingan

Sebagai bagian dari proses *Ecosystem Services Assessment* (ESA), pelibatan pemangku kepentingan dilakukan untuk membangun pemahaman yang lebih luas mengenai keanekaragaman hayati dan ketergantungan terhadap ekosistem dari berbagai perspektif. Proses ini melibatkan konsultasi di 55 desa, terdiri dari 22 desa di Sorowako, 20 desa di Pomalaa, dan 13 desa di Bahodopi, serta dilengkapi dengan pelibatan para ahli keanekaragaman hayati.

Konsultasi masyarakat dan diskusi kelompok terarah memberikan informasi berharga terkait perjumpaan satwa liar, spesies yang memiliki nilai budaya, pemanfaatan sumber daya alam, dan jasa ekosistem yang menopang penghidupan masyarakat.

Jasa Ekosistem Utama yang diidentifikasi melalui Proses Penilaian

Kategori Jasa Ekosistem	Contoh yang Diidentifikasi
Penyediaan	Perikanan, hasil hutan, tanaman obat, pangan liar
Pengaturan	Pengaturan aliran air, pengendalian erosi, regulasi iklim
Budaya	Kawasan ekowisata, bentang alam sakral dan bernilai budaya

Temuan ini mendukung perencanaan pengelolaan keanekaragaman hayati sekaligus memperkuat pemahaman mengenai keterkaitan antara integritas ekosistem dan kesejahteraan masyarakat.

Pemantauan Keanekaragaman Hayati dan Jasa Ekosistem^{[GRI 101-4][GRI 101-8]}

Langkah-langkah tersebut selanjutnya diimplementasikan melalui *Biodiversity Management Plan* kami, yang menguraikan prosedur operasional, inisiatif konservasi, langkah pengelolaan habitat, dan program pemantauan keanekaragaman hayati di seluruh wilayah operasional.

Selain rencana pengelolaan tersebut, PTVI juga melaksanakan asesmen keanekaragaman hayati dan program pemantauan berkala untuk mengidentifikasi kondisi ekologis, potensi dampak terkait operasi, serta memantau populasi spesies. Asesmen ini mencakup survei dasar (baseline biodiversity surveys), pemantauan ekologis periodik, serta kolaborasi dengan para ahli eksternal seperti universitas dan lembaga riset lingkungan.^[GRI 101-4]

Kegiatan pemantauan berfokus pada:

distribusi spesies flora dan fauna
keberadaan spesies dilindungi atau endemik
kondisi habitat dan kesehatan ekosistem
potensi gangguan yang terkait dengan aktivitas operasional

Temuan dari pemantauan ini mendukung langkah pengelolaan adaptif dan menjadi dasar pelaksanaan inisiatif konservasi keanekaragaman hayati di seluruh wilayah operasional.

Area Operasional di Sekitar Kawasan Lindung^{[GRI 304-1][POJK F.9][GRI 101-5][SASB EM-MM-160a.3][GRI 14.12.3]}

Kami beroperasi dalam wilayah konsesi seluas lebih dari 110.000 hektare. Sebagian kecil dari area konsesi tersebut tumpang tindih dengan kawasan lindung yang ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam (TWA), khususnya di Sorowako dan Tanamalia. Area-area tersebut dipertahankan sesuai regulasi nasional dan tidak menjadi lokasi kegiatan pertambangan maupun operasi aktif sehingga nilai ekologis dan fungsi konservasinya tetap terjaga.

Indonesia juga merupakan pihak pada berbagai konvensi lingkungan internasional penting, termasuk Konvensi Ramsar, CITES, World Heritage Convention, UNESCO Man and the Biosphere Programme, dan Convention on Biological Diversity. Berdasarkan asesmen saat ini, kawasan lindung dan kawasan sensitif yang diakui secara internasional tersebut tidak tumpang tindih dengan jejak operasional kami.

Secara keseluruhan, area yang berada dalam perlindungan berdasarkan regulasi nasional hanya mencakup proporsi kecil dari total wilayah konsesi kami, yaitu sekitar 1.52% di Sorowako dan 0.98% di Tanamalia, sementara IGP Pomalaa tidak memiliki tumpang tindih dengan kawasan lindung dan IGP Morowali memiliki area perlindungan dalam konsesi namun tidak mencakup kawasan TWA sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Melalui pendekatan ini, kami memastikan operasi dijalankan secara bertanggung jawab, dengan menghormati kawasan lindung yang dilindungi secara hukum serta selaras dengan regulasi nasional dan kerangka konservasi yang diakui secara internasional.

Kawasan Lindung dalam Konsesi Operasional Berdasarkan Regulasi Nasional (ha)^{[POJK51-F.9][EM-MM-210a.1]}

Lokasi	Total Area KK (ha)	Taman Wisata Alam (TWA) (ha)	% terhadap Total Area KK
Sorowako	60,882.40	297.99	1.52%
Tanamalia	15,889.71	156.02	0.98%
IGP Morowali	16,586.31	–	0.97%
IGP Pomalaa	20,287.86	–	0.00%

Spesies Dilindungi di Wilayah Operasional^[GRI 304-4]

Wilayah operasional PTVI mendukung keanekaragaman spesies darat dan akuatik yang tinggi, termasuk sejumlah spesies yang terdaftar dalam *IUCN Red List of Threatened Species* dan daftar konservasi nasional Indonesia. Pemantauan keanekaragaman hayati yang dilakukan di wilayah operasional kami di Sorowako, IGP Morowali, dan IGP Pomalaa mencatat total 120 spesies fauna dan 110 spesies flora yang terdaftar dalam *IUCN Red List*. Spesies-spesies tersebut mencakup kategori Critically Endangered, Endangered, Vulnerable, Near Threatened, dan Least Concern, yang mencerminkan keragaman ekologis ekosistem di sekitar operasi kami.

Di antara spesies yang teridentifikasi terdapat sejumlah spesies endemik Sulawesi dan spesies prioritas konservasi, termasuk anoa dataran rendah (*Bubalus depressicornis*), anoa pegunungan (*Bubalus quarlesi*), kuskus beruang Sulawesi (*Ailurops ursinus*), babirusa (*Babirusa celebensis*), dan maleo (*Macrocephalon maleo*), yang dikategorikan sebagai

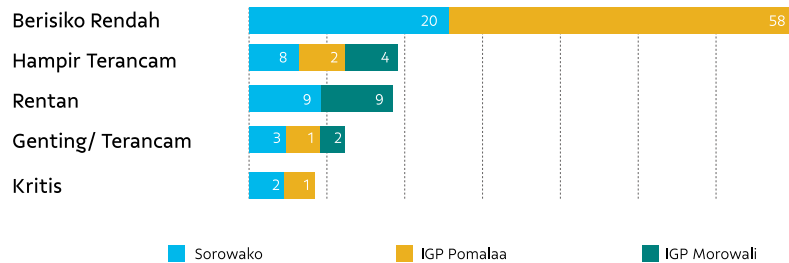
Terancam Punah atau Rentan dalam *IUCN Red List*. Spesies penting lainnya yang tercatat di wilayah operasional kami meliputi rangkong Sulawesi (*Rhyticeros cassidix*), tarsius Sulawesi (*Tarsius tarsier*), dan Rusa Timor (*Rusa timorensis*).

Ekosistem air tawar dalam bentang alam operasional, khususnya di sekitar sistem Danau Malili, juga mendukung sejumlah spesies akuatik endemik, termasuk udang air tawar dari genus Caridina dan spesies ikan dari kelompok Telmatherina, beberapa di antaranya dikategorikan sebagai *Critically Endangered* atau *Endangered* karena habitatnya yang terbatas.

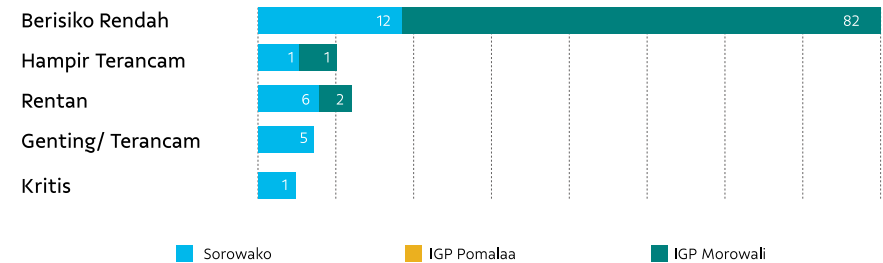
Survei flora juga mengidentifikasi berbagai spesies tumbuhan yang tercantum dalam *IUCN Red List*, termasuk *Manilkara celebica*, *Pterocarpus indicus*, *Dillenia celebica*, *Diospyros celebica*, serta beberapa spesies *Nepenthes* yang diakui sebagai flora prioritas konservasi di Sulawesi.

Daftar lengkap spesies fauna dan flora yang teridentifikasi di wilayah operasional PTVI, termasuk status konservasinya berdasarkan *IUCN Red List*, disajikan pada bab Tabel Data dalam laporan ini.

Daftar Spesies Fauna IUCN Red List di Area Operasional



Daftar Spesies Flora IUCN Red List di Area Operasional



Inisiatif Konservasi Keanekaragaman Hayati^{[GRI 304-4][POJK F.10][GRI 101-7]}

Pada 2025, PTVI melanjutkan berbagai inisiatif konservasi keanekaragaman hayati dan restorasi ekosistem di seluruh wilayah operasional sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan ekologis dan mendukung perlindungan spesies asli.

Selama tahun berjalan, kami melakukan konservasi dan penanaman kembali 72.296 pohon lokal, endemik, dan dilindungi, meningkat sekitar 6% dibandingkan 2024. Upaya ini mendukung pemulihan habitat, meningkatkan tutupan vegetasi di area yang direhabilitasi, serta berkontribusi pada pemulihan fungsi ekosistem di bentang alam yang terdampak.

Upaya konservasi satwa liar juga berlanjut melalui pengelolaan spesies dalam program konservasi kami, yang mencatat 18 rusa Timor (*Cervus timorensis*) dan 1 anoa dataran rendah (*Bubalus depressicornis*) dalam pengelolaan konservasi, mencerminkan upaya berkelanjutan kami untuk melindungi spesies prioritas konservasi dan mendukung populasi fauna asli yang lestari.

Inisiatif-inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen kami yang lebih luas untuk meminimalkan dampak ekologis dari kegiatan pertambangan sekaligus mendukung keberlanjutan ekosistem jangka panjang melalui pemantauan berkelanjutan, program konservasi, restorasi habitat, dan langkah perlindungan spesies.

Selain kegiatan konservasi di lokasi, hasil pemantauan keanekaragaman hayati, *Critical Habitat Assessments*, dan *Ecosystem Services Assessments* terus menjadi dasar langkah pengelolaan adaptif dan memperkuat implementasi Biodiversity Management Plans di tingkat lokasi. Hal ini mencakup upaya terkait perlindungan habitat, pengelolaan spesies invasif, pengelolaan ekosistem air tawar dan karst, serta konservasi bentang alam sensitif secara ekologis seperti sistem Danau Malili.

Sebagai bagian dari penguatan hasil keanekaragaman hayati jangka panjang, PTVI juga terus mengembangkan *Biodiversity Action Plans* dan *Biodiversity Offset Plans* untuk menangani dampak residual dan mendukung kemajuan menuju *No Net Loss*, dan apabila memungkinkan, *Net Gain* keanekaragaman hayati. Inisiatif-inisiatif ini memperkuat komitmen kami untuk

mengintegrasikan konservasi keanekaragaman hayati ke dalam praktik pertambangan yang bertanggung jawab serta berkontribusi pada ketangguhan jangka panjang ekosistem di sekitar operasi kami.

Konservasi Keanekaragaman Hayati Tahun 2025^[POJK51-F.10]

- 72.296 pohon lokal, endemik, dan dilindungi dikonservasi serta ditanam kembali di area tambang meningkat 6% dibandingkan 2024
- 18 Rusa Timor (*Rusa timorensis*) dikonservasi
- 1 anoa dataran rendah (*Bubalus depressicornis*) dikonservasi





Restorasi Ekosistem Laut di Pulau Bulupoloe



Pada 27 Juli 2025, PTVI melaksanakan inisiatif restorasi ekosistem laut di Pulau Bulupoloe, Sulawesi Selatan. Melalui inisiatif ini, kami memasang 25 struktur terumbu karang buatan (*spider reef*) dan mengangkat lebih dari 200 kilogram sampah pesisir untuk membantu memulihkan habitat laut dan memperbaiki kondisi pesisir. Dengan pemasangan ini, PTVI telah menempatkan total 150 unit terumbu buatan di perairan sekitar untuk mendukung pemulihan ekosistem terumbu karang.

Selain memulihkan habitat laut, struktur terumbu buatan ini diharapkan dapat menarik populasi ikan lokal, meningkatkan kualitas perairan, dan mendukung penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat nelayan sekitar. Untuk memastikan efektivitas jangka panjang, PTVI melakukan pemantauan rutin terhadap terumbu tersebut bekerja sama dengan *Sorowako Diving Club* (SDC), termasuk pengamatan pertumbuhan karang, pemantauan spesies laut, dan pencitraan bawah air. Kegiatan transplantasi ini melibatkan 11 penyelam profesional dari SDC, mencerminkan pendekatan kolaboratif kami dalam pengelolaan ekosistem laut (*marine ecosystem stewardship*).

“Restorasi laut tidak berhenti pada pemasangan. Kami memastikan pemantauan berkelanjutan dilakukan agar ekosistem dapat pulih dan berkembang secara bertahap.”— Suharpiyu Wijaya, Head of IGP Sorowako Limonite PTVI

Reklamasi dan Rehabilitasi

PTVI berkomitmen melaksanakan reklamasi dan rehabilitasi progresif sebagai bagian dari pendekatan pertambangan yang bertanggung jawab, yang terintegrasi dalam kerangka rehabilitasi dan penutupan tambang kami. Reklamasi mencakup pembentukan kontur (*contouring*), stabilisasi bentanglahan, pengelolaan tanah, penyesuaian revegetasi, dan remediasi yang dirancang untuk memulihkan lahan terganggu, mendukung pemulihan ekosistem, serta mengurangi risiko lingkungan seperti erosi, sedimentasi, pelindian logam berat, dan degradasi ekosistem sepanjang siklus hidup tambang. PTVI melaksanakan kegiatan reklamasi sesuai dengan Rencana Reklamasi yang telah disetujui (No. 01599/CEOS/XI/2022), yang terakhir diperbarui

dan disampaikan kepada Pemerintah pada 2025. Sebagai bagian dari periode reklamasi 2021–2025, PTVI sebelumnya menargetkan reklamasi sebesar 70% dari lahan tambang di wilayah konsesi Sorowako pada 2025. Meskipun target aspiratif ini belum tercapai dalam jangka waktu awal, target tersebut telah direvisi, disetujui oleh kementerian dan diperpanjang seiring transisi menuju IUPK. ^{[GRI 14.8.4][GRI 14.8.5][GRI 14.8.7]}

Reklamasi Lahan Progresif

Pada akhir 2025, reklamasi di wilayah konsesi Sorowako mencapai 65,09% dari total kumulatif area tambang terbuka, sementara tingkat keberhasilan rehabilitasi dalam konsesi mencapai 86%, di atas persyaratan minimum regulasi sebesar 70%. Hasil ini mencerminkan kemajuan berkelanjutan

dalam implementasi reklamasi sambil mengakomodasi pengembangan tambang yang masih berlangsung.

Pada awal 2025, total area tambang terganggu yang belum direklamasi di seluruh wilayah operasional PTVI tercatat 3.222,13 hektare. Selama tahun pelaporan, terdapat 967,56 hektare lahan baru yang terganggu. Sebagian besar kegiatan reklamasi selama tahun pelaporan dilaksanakan di Sorowako, sementara gangguan lahan terutama didorong oleh pengembangan proyek pertumbuhan di IGP Pomalaa. Reklamasi yang masih terbatas di dalam konsesi proyek pertumbuhan mencerminkan statusnya yang masih berada pada tahap pengembangan. PTVI tetap berkomitmen melaksanakan reklamasi progresif sepanjang siklus hidup tambang dan membawa kewajiban yang tersisa ke periode perencanaan berikutnya. ^[GRI 14.8.6]

Luas Area Tambang Terganggu dan Direhabilitasi – Sorowako (Hektare) ^[GRI 14.8.6]

Deskripsi	2025	2024	2023
Luas lahan terganggu (ha) Tahunan	418.25	269.16	230.16
Total luas lahan terganggu (ha) Akumulatif	7,689.00	7,356.01	7,178.29
Fasilitas (Kantor + Perumahan + Lainnya)	1,754.80	1,460.61	1,460.61
Lahan terganggu yang belum direklamasi (Stockpile + Disposal)	2,071.64	2,104.27	2,014.10
Luas lahan direklamasi (ha) Akumulatif	3,862.56	3,791.13	3,703.58
Luas lahan direklamasi (ha) Tahunan	156.67	178.98	224.44
% lahan tambang yang direklamasi (e/d+e)	65.09%	64.31%	64.77%

Luas Area Tambang Terganggu dan Direhabilitasi – IGP Morowali (Hektare)

Deskripsi	2025	2024	2023
Total Akumulatif Luas Lahan Terganggu (ha)	342.73	236.43	95.70
Luas Lahan Terganggu Tahunan (ha)	106.30	140.73	95.68
Total Akumulatif Luas Lahan Direklamasi (ha)	1.42	–	–
Luas Lahan Direklamasi Tahunan (ha)	1.42	–	–

Luas Area Tambang Terganggu dan Direhabilitasi – IGP Pomalaa (Hektare)

Deskripsi	2025	2024	2023
Total Akumulatif Luas Lahan Terganggu (ha)	807.76	364.75	65.20
Luas Lahan Terganggu Tahunan (ha)	443.01	299.55	30.10
Total Akumulatif Luas Lahan Direklamasi (ha)	–	–	–
Luas Lahan Direklamasi Tahunan (ha)	–	–	–

Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai

Sebagian wilayah operasional kami berada dalam kawasan hutan tempat kami beroperasi berdasarkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). Sebagai pemegang PPKH, PTVI mematuhi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 59 Tahun 2019 yang mewajibkan pemegang izin melaksanakan rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) di luar area izin sebagai kompensasi atas penggunaan kawasan hutan.

Melalui program ini, PTVI berkontribusi memulihkan lahan terdegradasi dan meningkatkan fungsi ekosistem DAS di area yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hingga tahun pelaporan, area rehabilitasi DAS kumulatif mencapai 17.877 hektare yang tersebar di lima provinsi—Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Jawa Barat, dan Bali. Luasan tersebut terdiri dari 14.879 hektare terkait Sorowako, 1.953 hektare terkait IGP Pomalaa, dan 1.045 hektare terkait IGP Morowali.

Deskripsi	2025	2024	2023
Total Akumulatif Luas Rehabilitasi DAS (ha)	14,879.00	14,879.00	10,435.00
Luas Rehabilitasi DAS Tahunan (ha)	0.00	4,444.00	435.00

Kegiatan rehabilitasi DAS yang terasosiasi dengan IGP Morowali dan IGP Pomalaa menunjukkan implementasi kewajiban rehabilitasi DAS yang spesifik per proyek. Di Sorowako, tidak terdapat tambahan area rehabilitasi DAS tahunan pada tahun berjalan, sementara luas rehabilitasi kumulatif tetap 14.879 hektare. Setiap lokasi rehabilitasi menjalani tahapan penyiapan lahan, penanaman, dan pemeliharaan untuk mendukung pertumbuhan vegetasi dan pemulihan ekosistem.

pertumbuhan vegetasi dan pemulihan ekosistem. Penetapan lokasi rehabilitasi di luar Sulawesi, termasuk di Jawa Barat dan Bali, mengikuti lokasi yang ditentukan melalui keputusan menteri, sekaligus mendukung upaya pemerintah yang lebih luas untuk mengurangi lahan terdegradasi di berbagai wilayah Indonesia. Melalui kegiatan ini, PTVI berkontribusi meningkatkan stabilitas tanah, mengurangi risiko erosi, dan mendukung kesehatan ekosistem DAS dalam jangka panjang.

Perencanaan Penutupan Tambang

Status Perencanaan Penutupan Tambang menurut Area Operasional

Area Operasional	Status Operasional	Estimasi Umur Tambang	Revisi Terakhir Rencana Penutupan	Persetujuan ESDM
Sorowako	Operasi aktif dengan rehabilitasi progresif	2045	Oktober 2022	November 2023
IGP Morowali	Operasi aktif dengan rehabilitasi progresif	2044	Agustus 2024	November 2024
IGP Pomalaa	Operasi aktif dengan rehabilitasi progresif	2045	Rencana dalam pengembangan	Rencana dalam pengembangan

PTVI beroperasi di tiga lokasi tambang—Operasi Sorowako, IGP Morowali, dan IGP Pomalaa—yang seluruhnya masih aktif dan belum memasuki tahap penutupan. Estimasi Life of Mine (LOM) untuk masing-masing lokasi adalah hingga 2045, 2045, dan 2044 dengan kegiatan penutupan dan rehabilitasi diperkirakan berlanjut hingga 2060. Sejalan dengan praktik pertambangan yang baik, perencanaan penutupan diintegrasikan dengan rehabilitasi progresif yang dilakukan selama operasi untuk mengurangi area terganggu secara bertahap dan mendukung transisi yang lebih lancar menuju penutupan akhir.^[GRI 14.8.9]

Rencana Penutupan Tambang telah tersedia untuk Operasi Sorowako dan IGP Morowali, sementara rencana untuk IGP Pomalaa masih dalam pengembangan, mencerminkan tahap perkembangan proyek serta progres menuju perencanaan penutupan formal sesuai persyaratan regulasi. Rencana penutupan ini dirancang untuk mendukung dekomisioning dan rehabilitasi yang aman, meminimalkan dampak lingkungan, serta meninggalkan warisan positif yang berkelanjutan pascatambang.^{[GRI 14.8.4][GRI 14.8.7]}

Rencana Penutupan Tambang disusun untuk mendukung dekomisioning dan rehabilitasi lokasi tambang secara aman, meminimalkan dampak lingkungan, serta meninggalkan warisan positif yang berkelanjutan pascatambang. Rencana tersebut diperbarui secara berkala untuk mencerminkan perkembangan operasional dan persyaratan regulasi. Revisi terbaru diajukan pada Oktober 2022 untuk Sorowako dan Agustus 2024 untuk IGP Morowali, dan keduanya telah melalui proses tinjauan formal serta memperoleh persetujuan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masing-masing pada November 2023 dan November 2024.^[GRI 14.8.5]

Pengelolaan Lingkungan Pascapenutupan

Setelah kegiatan pertambangan berakhir, PTVI berkomitmen memastikan area bekas tambang tetap stabil secara lingkungan dan aman bagi ekosistem serta masyarakat sekitar. Oleh karena itu, perencanaan penutupan tambang kami mencakup kerangka pengelolaan lingkungan yang komprehensif untuk menangani potensi risiko lingkungan selama fase pascapenutupan.

Potensi dampak lingkungan yang dapat muncul setelah penutupan tambang meliputi perubahan stabilitas bentang lahan, keberhasilan pembentukan vegetasi, pengelolaan air permukaan, dan stabilitas jangka panjang area yang direklamasi. Untuk mengatasi risiko tersebut, rencana penutupan kami memasukkan berbagai langkah pengelolaan lingkungan, termasuk stabilisasi bentang lahan, revegetasi menggunakan spesies tanaman yang sesuai, pengendalian erosi, serta pemantauan berkelanjutan terhadap kondisi tanah dan air.

Pemantauan lingkungan pascapenutupan akan dilakukan untuk memverifikasi bahwa area yang direklamasi tetap stabil dan pemulihan ekosistem berlangsung sesuai harapan. Program pemantauan mencakup indikator utama seperti pertumbuhan vegetasi, stabilitas lahan, dan kualitas air di area bekas operasi. Langkah-langkah ini dimaksudkan untuk mendukung transisi area bekas tambang menjadi bentang lahan yang stabil, mampu menopang fungsi ekologis, dan bila sesuai, mendukung pemanfaatan lahan masa depan yang disepakati bersama pemangku kepentingan dan regulator.

Komitmen Finansial untuk Penutupan Lokasi yang Akuntabel

Estimasi biaya penutupan tambang merupakan bagian integral dari Rencana Penutupan Tambang kami. Kami menilai kebutuhan penutupan berdasarkan dua skenario:

1. Skenario penutupan dasar, di mana aktivitas penambangan dan pengolahan berakhir pada 2045
2. Skenario penutupan mendadak, yang memodelkan penghentian operasi lebih awal yang tidak terduga.

Skenario penutupan mendadak mencerminkan asumsi dan kondisi lokasi yang tercakup dalam rencana penutupan terbaru yang disetujui, dan akan diperbarui dalam revisi rencana berikutnya.

Perhitungan biaya penutupan mencakup seluruh rangkaian aktivitas yang diperlukan sepanjang proses penutupan, termasuk pelaksanaan, pemeliharaan, pemantauan pascapenutupan, dan risiko terkait penutupan yang telah diidentifikasi. Estimasi ini didasarkan pada asumsi utama termasuk proyeksi penggunaan lahan, progres reklamasi, sisa area terganggu, dan pendekatan implementasi yang ditetapkan dalam rencana penutupan. Dalam menentukan biaya penutupan bersih, pendapatan yang diharapkan dari material scrap yang dapat dipulihkan dikurangkan dari total estimasi biaya.^[GRI 14.8.8]

PTVI berkomitmen menyediakan dana penutupan tambang sesuai Peraturan Pemerintah No. 78/2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, yang mewajibkan perusahaan tambang menyediakan jaminan finansial melalui instrumen seperti

rekening bersama, deposito berjangka, garansi bank, atau dalam kondisi tertentu cadangan akuntansi.

Berdasarkan Rencana Penutupan Tambang terbaru yang disetujui, estimasi biaya penutupan untuk Blok Sorowako mencapai US\$70,6 juta dan secara bertahap telah ditempatkan dalam deposito berjangka sejak 2017 hingga 2023. Untuk Blok Bahodopi, estimasi biaya penutupan mencapai US\$2,7 juta, yang seluruhnya telah ditempatkan dalam deposito berjangka pada 2023. Provisi ini dicatat dalam laporan keuangan kami dan ditinjau secara berkala untuk mencerminkan pembaruan asumsi, kondisi operasional, dan persyaratan regulasi.^[GRI 14.8.8]

Melalui perencanaan penutupan yang terintegrasi, rehabilitasi progresif, pemantauan lingkungan jangka panjang, dan penyediaan dana khusus, PTVI berupaya memastikan penutupan tambang dikelola secara bertanggung jawab dan transparan, sekaligus mendukung ketahanan lingkungan dan hasil pascatambang yang berkelanjutan.

US\$70.6M

Estimasi biaya penutupan untuk Blok Sorowako, ditempatkan dalam deposito berjangka 2017–2023

US\$2.7M

Estimasi biaya penutupan untuk Blok Bahodopi, sepenuhnya ditempatkan dalam deposito berjangka pada tahun 2023





Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pembaruan Perencanaan



Pada 25 November 2025, PTVI memulai konsultasi dini dengan pemangku kepentingan sebagai bagian dari rencana pembaruan dokumen pascatambang untuk Operasi Sorowako, menyusul perpanjangan izin tambang Perseroan hingga 2035 dan transisi dari Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Diselenggarakan di Malili, Luwu Timur, konsultasi ini menjadi tahap awal yang penting dalam penyusunan pembaruan rencana pascatambang guna memastikan keselarasan dengan perkembangan operasional, persyaratan regulasi, dan ekspektasi pemangku kepentingan.

Konsultasi ini melibatkan perwakilan pemerintah daerah, pemerintah kecamatan dan desa, perwakilan masyarakat, serta pemangku kepentingan teknis lainnya di wilayah pemberdayaan PTVI. Diskusi mencakup usulan pembaruan terkait rehabilitasi lahan, pengelolaan lingkungan, dekomisioning fasilitas, kegiatan pemantauan, dan pertimbangan pemanfaatan lahan pascatambang.

Forum ini juga menjadi wadah bagi pemangku kepentingan untuk memberikan masukan mengenai isu-isu seperti pemulihan ekosistem, transparansi lingkungan, program sosial, dan peluang ekonomi masyarakat dalam konteks pascatambang. Masukan yang diperoleh melalui konsultasi ini didokumentasikan untuk menjadi bahan penyempurnaan dokumen pascatambang sebelum diajukan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Konsultasi ini mencerminkan pendekatan PTVI dalam mengintegrasikan pelibatan pemangku kepentingan ke dalam perencanaan penutupan serta mendukung transparansi dalam pengembangan pengaturan pengelolaan pascatambang jangka panjang.



Tenaga Kerja Kami

Pendekatan PTVI terkait Sumber Daya Manusia



Di PTVI, kami meyakini bahwa karyawan merupakan fondasi sekaligus aset strategis yang mendukung keberhasilan dan keberlanjutan perusahaan. Oleh karena itu, kami menempatkan kesejahteraan, pengembangan kompetensi, serta perlindungan hak karyawan sebagai prioritas utama. Komitmen ini diwujudkan melalui upaya membangun tenaga kerja yang produktif, beragam, inklusif, dan memiliki motivasi tinggi, guna menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan. Kami juga mendorong penguatan tenaga kerja lokal dengan membuka kesempatan kerja serta mendukung pengembangan keterampilan masyarakat di sekitar wilayah operasi, sehingga mereka dapat berpartisipasi

dan memperoleh manfaat dari kegiatan PTVI.

Pendekatan kami dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM) didasarkan pada sejumlah kebijakan utama yang menjadi panduan dalam pengelolaan tenaga kerja secara bertanggung jawab. Kebijakan tersebut mencakup Kebijakan Keberlanjutan, yang menguraikan komitmen kami terhadap kesejahteraan karyawan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta praktik ketenagakerjaan yang adil; Kebijakan Hak Asasi Manusia, yang menegaskan komitmen kami untuk menghormati hak asasi manusia yang diakui secara internasional serta melindungi hak-hak pekerja di seluruh operasi dan rantai

nilai; serta Kebijakan Keberagaman, Kesetaraan, dan Inklusi, yang mendorong terciptanya lingkungan kerja yang inklusif di mana keberagaman dihargai dan kesempatan yang setara diberikan kepada seluruh individu, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas. Kebijakan-kebijakan ini berlaku bagi karyawan, kontraktor, dan mitra usaha, serta bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil, aman, dan suportif, yang mendorong pengembangan profesional dan kolaborasi.

Kami mengimplementasikan komitmen tersebut melalui sistem manajemen yang selaras dengan standar nasional dan internasional, termasuk ISO 45001 dan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP), serta mengacu pada prinsip-prinsip inti International Labour Organization (ILO).

Dalam pengelolaan SDM, kami mengidentifikasi sejumlah risiko utama, seperti kecelakaan kerja, pelanggaran hak tenaga kerja, ketidaksetaraan kesempatan kerja, serta menurunnya keterlibatan dan motivasi karyawan. Untuk mengantisipasi dan memitigasi risiko tersebut, kami secara konsisten melaksanakan pelatihan keselamatan, memperkuat budaya kerja yang inklusif, serta menyediakan mekanisme pengaduan dan pelaporan yang mudah diakses agar setiap aspirasi dapat ditindaklanjuti secara tepat.

Efektivitas pengelolaan SDM dipantau melalui berbagai mekanisme internal, termasuk audit internal, survei kepuasan karyawan, serta dialog berkelanjutan dengan serikat pekerja. Melalui proses ini, kami terus mengevaluasi kondisi kerja dan meningkatkan upaya dalam menciptakan lingkungan kerja yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan. Kami juga menetapkan target dan indikator kinerja yang terukur untuk memastikan pengelolaan isu-isu material terkait SDM berjalan secara efektif.

Statistik Karyawan^{[POJK51-C.3] [SASB EM-MM-000.B]}

Pada akhir tahun 2025, PTVI mempekerjakan total 2.985 karyawan, sedikit menurun dibandingkan 3.038 karyawan pada tahun sebelumnya.

Kami terus menunjukkan kemajuan dalam membangun tenaga kerja yang lebih beragam dan inklusif. Perempuan kini merepresentasikan 12% dari total karyawan, mencerminkan peningkatan yang konsisten dibandingkan tahun lalu. Kami juga bangga bahwa 83% tenaga kerja kami berasal dari masyarakat lokal, yang menunjukkan komitmen dalam mendukung penyerapan tenaga kerja dan pembangunan ekonomi daerah.

Selain itu, kami juga membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas, dengan mengakui kontribusi berharga mereka dalam operasional kami. Melalui berbagai upaya ini, kami berupaya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, setara, dan suportif bagi seluruh karyawan.

Total tenaga kerja kami terdiri dari 2.886 karyawan tetap (97%) dan 99 karyawan kontrak (3%), dengan kelompok usia 30–50 tahun sebagai proporsi terbesar. Konsentrasi karyawan terbesar berada di Sorowako sebagai pusat kegiatan operasional utama kami. Karyawan PTVI berasal dari berbagai latar belakang pendidikan, menciptakan keberagaman keterampilan, perspektif, dan pengalaman. Keberagaman ini memperkuat budaya organisasi serta meningkatkan kemampuan kami untuk berinovasi, berkolaborasi, dan menciptakan nilai jangka panjang.

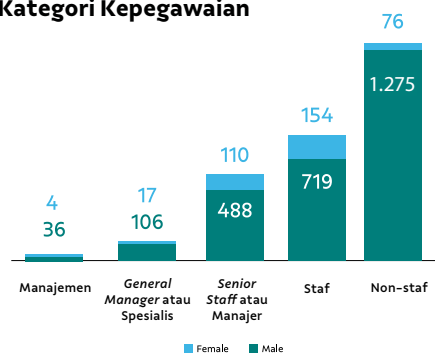
Gambaran Karyawan Tahun 2025^[GRI 2-7]

PTVI mempekerjakan
2.985 karyawan

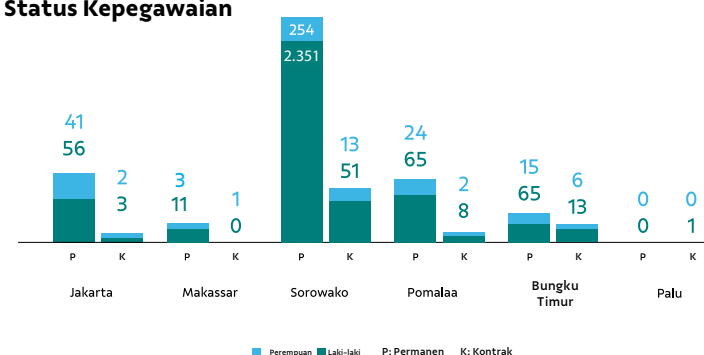
 **Laki-laki**
88%

 **Perempuan**
12%

Jumlah Karyawan berdasarkan
Kategori Kepegawaian



Jumlah Karyawan berdasarkan
Status Kepegawaian

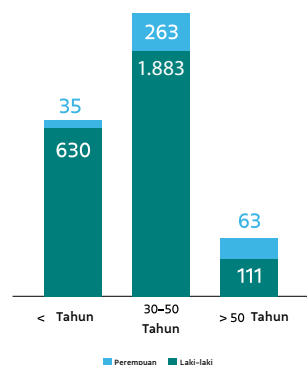


Karyawan Lokal
83%

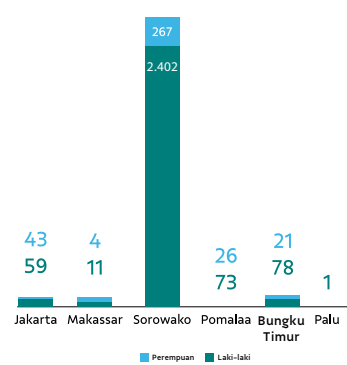


74 Karyawan Penyandang Disabilitas

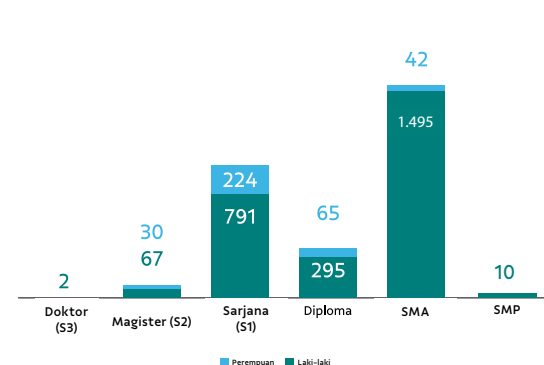
Jumlah Karyawan berdasarkan
Usia^[405-1]



Jumlah Karyawan berdasarkan
Lokasi Penempatan



Jumlah Karyawan berdasarkan
Tingkat Pendidikan

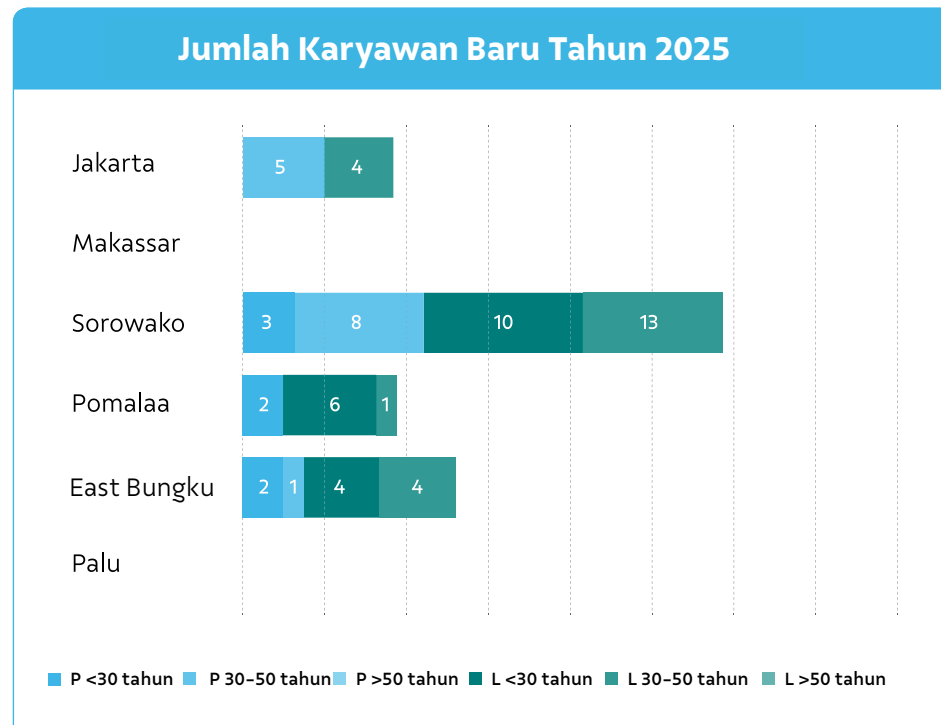


Karyawan Baru [GRI 401-1]

Perluasan tenaga kerja kami tetap sejalan dengan komitmen untuk menciptakan manfaat ekonomi yang positif bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional. Sejalan dengan tahapan rekrutmen yang telah dijelaskan sebelumnya, peluang kerja kami sampaikan secara terbuka melalui proses seleksi yang transparan dan dapat diakses oleh publik.

Pada tahun ini, sebanyak 63 karyawan baru bergabung dengan PTVI, dengan mayoritas penempatan berada di operasi Sorowako sebagai wilayah operasional terbesar kami. Dari total tersebut, 21 karyawan merupakan perempuan dan 42 karyawan merupakan laki-laki.

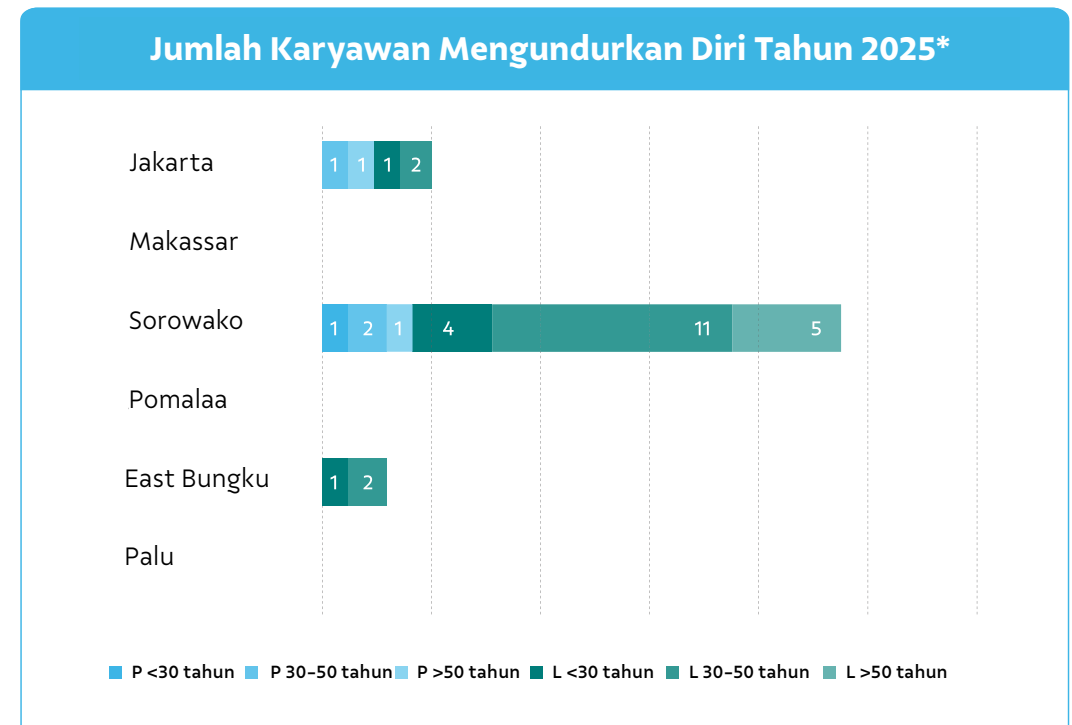
Berdasarkan kelompok usia, 27 karyawan berusia di bawah 30 tahun, 36 karyawan berada pada rentang usia 30–50 tahun, dan tidak terdapat karyawan baru berusia di atas 50 tahun.



Tingkat Pergantian Karyawan [GRI 401-1]

Kami memastikan bahwa seluruh karyawan memperoleh manfaat dan fasilitas yang layak sebagai bagian dari komitmen kami dalam menghargai tenaga kerja. Komitmen ini tercermin dari tingkat retensi karyawan yang secara konsisten tinggi di seluruh wilayah operasional kami. Salah satu indikator utama yang menggambarkan hal tersebut adalah tingkat pergantian karyawan (employee turnover rate). Dalam beberapa tahun terakhir, tingkat turnover kami tetap berada di bawah rata-rata industri, dan pada tahun ini tren tersebut terus berlanjut.

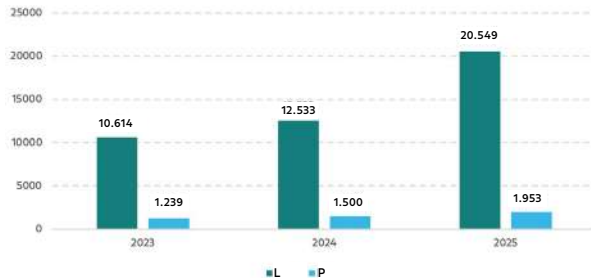
Pada tahun 2025, sebanyak 31 karyawan mengakhiri masa kerjanya di PTVI, yang merepresentasikan tingkat pergantian karyawan sebesar 1,04%, sedikit berbeda dibandingkan dengan 0,92% pada tahun sebelumnya. Tingkat pergantian karyawan bervariasi di setiap area operasional, dengan jumlah tertinggi tercatat di Sorowako dan terendah di Makassar, Pomalaa, dan Palu. Berdasarkan kelompok demografis, tingkat pergantian karyawan tertinggi terjadi pada karyawan laki-laki dalam rentang usia 30–50 tahun.



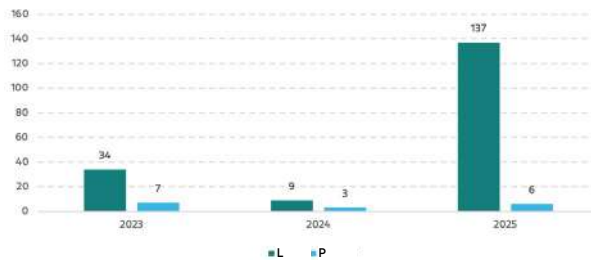
**Data mencakup karyawan yang mengundurkan diri secara sukarela selama periode pelaporan

Data Kontraktor

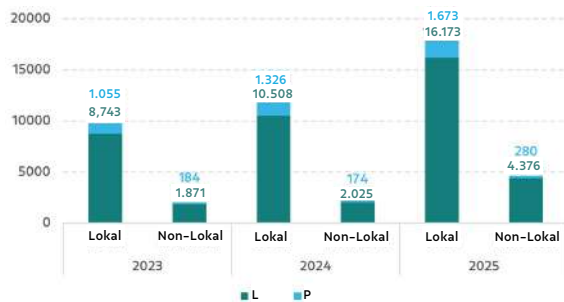
Jumlah Kontraktor Warga Negara Indonesia (WNI) berdasarkan Jenis Kelamin (2023 – 2025)



Jumlah Kontraktor Warga Negara Asing (WNA) berdasarkan Jenis Kelamin (2023 – 2025)



Jumlah Kontraktor Warga Negara Indonesia (WNI) berdasarkan Lokalitas (2023 – 2025)



Tenaga Kerja Non-Karyawan^[GRI 2-8]

PTVI melibatkan berbagai pemasok dan mitra usaha, di mana tenaga kerja mereka—selanjutnya disebut sebagai kontraktor—melaksanakan pekerjaan di bawah pengendalian kami. Para kontraktor ini mendukung beragam aktivitas, mulai dari fungsi administratif dan teknis hingga operasional lapangan, serta berperan penting dalam menjaga keberlangsungan operasi.

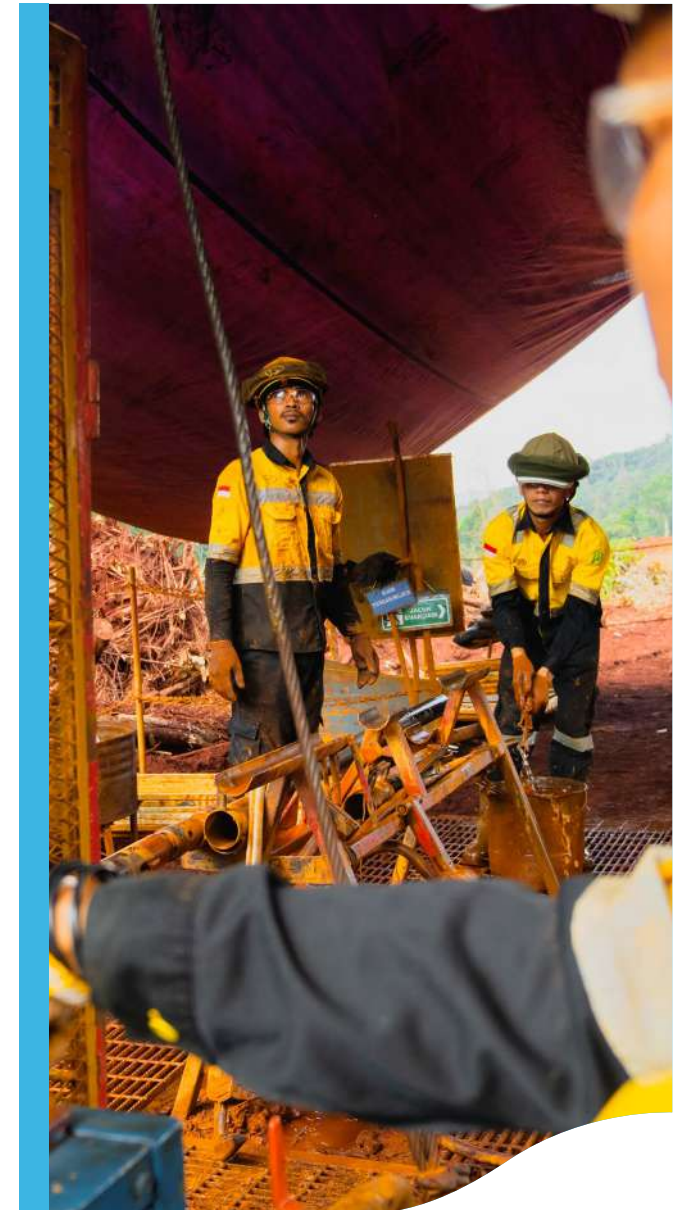
Pada akhir tahun 2025, jumlah kontraktor tercatat sebanyak 22.645 orang berdasarkan pendekatan *headcount*. Angka ini meningkat sebesar 8.595 kontraktor atau 61,2% dibandingkan tahun 2024, yang terutama didorong oleh peningkatan skala aktivitas operasional, termasuk proyek *furnace rebuild* yang membutuhkan tenaga kerja kontraktor dalam jumlah signifikan.

Berdasarkan kewarganegaraan, tenaga kerja kontraktor kami didominasi oleh Warga Negara Indonesia (WNI) sebanyak 22.502 orang atau 99,4%, sementara Warga Negara Asing (WNA) berjumlah 143 orang atau 0,6%. Komposisi ini mencerminkan prioritas kami dalam mendorong partisipasi tenaga kerja nasional.

Kami juga mendukung partisipasi tenaga kerja yang inklusif. Pada tahun 2025, jumlah kontraktor perempuan mencapai 1.953 orang atau 8,6% dari total tenaga kerja kontraktor, yang berkontribusi dalam berbagai peran operasional maupun fungsi pendukung.

Dari sisi regional, sebanyak 17.846 kontraktor atau 78,8% dikategorikan sebagai tenaga kerja lokal, termasuk 1.673 perempuan, sementara 4.656 kontraktor atau 20,6% merupakan tenaga kerja non-lokal. Distribusi ini menunjukkan kontribusi kami dalam mendukung penyerapan tenaga kerja lokal dan pengembangan ekonomi regional, khususnya di wilayah operasional seperti Sorowako.

Jumlah kontraktor dihitung menggunakan pendekatan *headcount* dan merepresentasikan jumlah individu yang tercatat pada akhir tahun pelaporan.





Menghargai Hak Ketenagakerjaan dan Hak Asasi Manusia

Serikat Pekerja dan Perjanjian Kerja Bersama

PTVI menjunjung tinggi pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan. Kebebasan berserikat dijamin sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, serta Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan semakin diperkuat melalui Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Dokumen PKB ini berfungsi sebagai lapisan perlindungan tambahan untuk memitigasi risiko ketidakpatuhan terhadap hak tersebut. PKB juga mendukung hak pekerja untuk berserikat dengan menyediakan akses bagi serikat pekerja terhadap fasilitas, sarana digital, dukungan administratif, serta dukungan finansial, sehingga mereka dapat menjalankan aktivitasnya secara efektif.

Pada tahun pelaporan, sebanyak 2.685 dari 2.985 karyawan aktif (sekitar 89,9%) tercatat sebagai anggota serikat pekerja yang tergabung dalam beberapa serikat berikut, yang seluruhnya telah terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi setempat:

1. Federasi Serikat Pekerja Buruh Indonesia (FSPBI)
2. Pengurus Komisariat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (PK SBSI)
3. Serikat Staf Vale Indonesia (SSVI)
4. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)
5. Federasi Pertambangan dan Energi – Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FPE-KSBSI)
6. Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Unit Kerja PT Vale Indonesia Tbk
7. Serikat Pekerja Bersatu Vale Indonesia (SPBVI)

PTVI secara rutin menyelenggarakan pertemuan dengan serikat pekerja setidaknya setiap satu hingga dua bulan, serta

melibatkan mereka dalam proses peninjauan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dilakukan setiap dua tahun. Melalui proses ini, serikat pekerja memiliki ruang untuk menyampaikan dan memperjuangkan kepentingannya, serta memastikan bahwa PKB disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan tenaga kerja. Pembaruan PKB terbaru telah diselesaikan pada Juli tahun ini dengan partisipasi aktif dari perwakilan serikat pekerja yang telah disebutkan sebelumnya. PKB tersebut memuat ketentuan utama terkait hubungan kerja, hak dan kewajiban pekerja, serta tata kelola hubungan industrial secara keseluruhan. Selain itu, PKB juga menetapkan mekanisme yang jelas untuk penyelesaian perselisihan dan keluhan antara PTVI dan karyawan.

Kami memandang karyawan sebagai mitra strategis dalam operasional perusahaan, sehingga kami berkomitmen untuk menjaga komunikasi yang transparan dan tepat waktu. Melalui PKB, PTVI menjamin bahwa setiap perubahan operasional yang signifikan dan berpotensi memengaruhi status ketenagakerjaan akan diinformasikan kepada karyawan paling lambat satu bulan sebelumnya. Hal ini memberikan waktu yang memadai bagi karyawan untuk memahami, mempersiapkan diri, dan merespons perubahan yang mungkin terjadi, sekaligus memperkuat budaya kepercayaan, saling menghormati, dan pengelolaan tenaga kerja yang bertanggung jawab. ^[GRI 402-1]

PKB berlaku bagi seluruh karyawan PTVI (100%), tanpa memandang keanggotaan dalam serikat pekerja. Di seluruh wilayah operasional, kami tidak mencatat adanya kasus maupun potensi pelanggaran terkait kebebasan berserikat maupun perundingan bersama. ^{[GRI 2-30][GRI 407-1][SASB EM-MM-310a.1]}



89.9% dari total tenaga kerja aktif kami merupakan anggota serikat pekerja

Mogok Kerja Karyawan^{[GRI 14.20.3][SASB EM-MM-310a.2]}

Sepanjang tahun pelaporan, kami tidak mencatat adanya aksi mogok kerja karyawan (nihil), yang mencerminkan kuatnya hubungan industrial serta komitmen kami terhadap komunikasi yang terbuka dan transparan. Kami terus menjaga lingkungan kerja yang memungkinkan setiap aspirasi dan kekhawatiran disampaikan secara bebas serta ditangani secara konstruktif melalui dialog berkelanjutan antara karyawan, serikat pekerja, dan manajemen.



Pencegahan Kerja Paksa dan Pekerja Anak^{[POJK51-F.19][GRI 408-1][GRI 409-1]}

Sebagai bagian dari komitmen kami untuk menjalankan usaha secara bertanggung jawab, PTVI memandang perlindungan hak asasi manusia sebagai prinsip fundamental dalam pengelolaan ketenagakerjaan. Komitmen ini berlandaskan kepatuhan terhadap peraturan nasional, termasuk Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta selaras dengan prinsip-prinsip internasional yang ditetapkan oleh International Labour Organization (ILO), sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Hak Asasi Manusia kami. Kebijakan tersebut menegaskan posisi kami yang tegas terhadap segala praktik yang menempatkan pekerja dalam kondisi rentan atau mengabaikan martabat, keadilan, dan rasa hormat.

Sejalan dengan itu, PTVI secara tegas menolak praktik pekerja anak serta segala bentuk kerja paksa maupun perbudakan modern di seluruh kegiatan operasional. Sepanjang tahun pelaporan, tidak terdapat kasus pelanggaran terkait hal tersebut.

Komitmen ini juga kami terapkan di seluruh rantai pasok. Kami melakukan penilaian risiko terkait pekerja anak, kerja paksa, dan perdagangan manusia pada operasional pemasok, termasuk mengidentifikasi area berisiko tinggi serta memprioritaskan pemasok di wilayah tersebut untuk pemantauan yang lebih intensif. Selain itu, seluruh pemasok diwajibkan, melalui klausul kontraktual yang mengikat, untuk melarang secara tegas segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan ketenagakerjaan sebagaimana diuraikan dalam bagian ini. Kami juga mengharapkan pelanggan dan mitra usaha untuk menjunjung nilai yang sama serta menerapkan langkah perbaikan yang memadai apabila terjadi ketidakpatuhan.

Kami juga memandang penting untuk menanamkan nilai-nilai ini kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional. Program peningkatan kesadaran mengenai hak asasi manusia secara rutin dilaksanakan, dengan fokus khusus pada pencegahan kerja paksa, perbudakan modern, dan pekerja anak. Upaya ini turut mencakup promosi perlindungan hak anak dan remaja, termasuk melalui inisiatif untuk mencegah dan menanggulangi eksploitasi seksual terhadap anak di wilayah yang berpotensi memiliki risiko tersebut.



Komitmen Terhadap Keberagaman, Kesetaraan, dan Inklusi^[POJK51-F.18]

Tim yang beragam dan inklusif memperkuat inovasi, kualitas pengambilan keputusan, keterlibatan karyawan, kinerja keuangan, serta reputasi kami sebagai tempat kerja pilihan. Hal ini juga meningkatkan kemampuan kami untuk memahami dan berkolaborasi dengan masyarakat serta pemangku kepentingan yang kami layani. Keberagaman kami pandang sebagai keunggulan kompetitif yang terintegrasi dalam Kebijakan Keberagaman dan Inklusi, Kebijakan Keberlanjutan, Kebijakan SDM, Kode Etik, serta Perjanjian Kerja Bersama.

Kami berkomitmen untuk menyediakan kesempatan kerja yang setara bagi seluruh karyawan dan pelamar kerja. Setiap keputusan ketenagakerjaan, termasuk rekrutmen, penempatan, promosi, pelatihan, pengembangan karier, kompensasi, hingga pemutusan hubungan kerja, didasarkan pada kualifikasi, kinerja, dan kebutuhan bisnis, tanpa diskriminasi berdasarkan gender, etnis, agama, disabilitas, usia, kewarganegaraan, maupun karakteristik pribadi lainnya.

Pendekatan kami dalam mewujudkan keberagaman dan inklusi dijabarkan lebih lanjut dalam Diversity and Inclusion Charter, yang memuat delapan komitmen utama.

Piagam Keberagaman dan Inklusi – Komitmen

1. Budaya Tempat Kerja

Menciptakan lingkungan kerja yang aman, inklusif, dan suportif, di mana setiap karyawan dapat berkontribusi secara maksimal

2. Indikator Kinerja & Akuntabilitas

Mengintegrasikan prinsip DEI ke dalam indikator kinerja organisasi, serta memastikan akuntabilitas di seluruh Direktorat

3. Pengembangan Karier

Menyediakan jalur karier yang transparan dan berbasis merit, serta peluang pengembangan yang dapat diakses oleh seluruh karyawan

4. Jaringan Afinitas

Mendukung kelompok sumber daya karyawan seperti Vale Women Network dan kelompok afinitas budaya untuk memperkuat inklusi dan representasi

5. Rekrutmen Inklusif

Menerapkan strategi untuk menarik talenta beragam dari berbagai gender, etnis, dan kelompok yang kurang terwakili

6. Penghargaan yang Adil

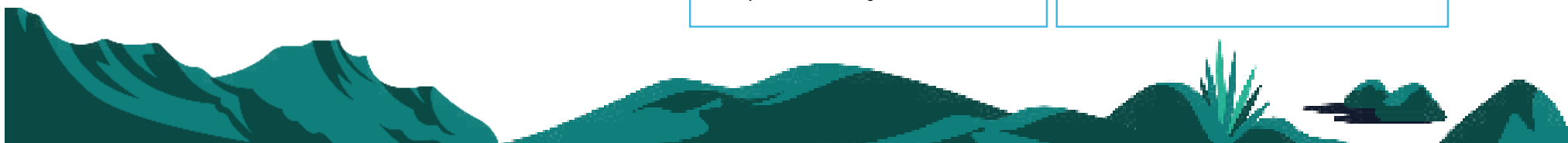
Menjamin kesetaraan dalam pemberian gaji dan manfaat, serta mengatasi potensi kesenjangan upah berdasarkan gender dan keadilan

7. Pelatihan dan Kesadaran

Menyediakan pelatihan DEI wajib bagi seluruh karyawan, mencakup bias tidak sadar, praktik inklusif, dan kompetensi budaya, yang diperbarui secara berkala sesuai praktik terbaik global

8. Kemitraan dan Keterlibatan

Berkolaborasi dengan mitra, komunitas lokal, dan pemangku kepentingan untuk mendorong nilai-nilai DEI di luar lingkungan kerja



Mengatasi Bias dan Mecegah Pelecehan: Memperkuat DEI di PTVI



Pada 28–29 November 2025, PTVI menyelenggarakan program pelatihan *Diversity, Equity, and Inclusion* (DEI) dengan fokus pada *Unconscious Bias* dan pencegahan pelecehan. Pelatihan ini dilaksanakan secara hybrid di beberapa lokasi, termasuk CO Wekoila Meeting Room, Almek Padamarang Meeting Room, serta Ground Training Classroom di IGP Pomalaa, dan diikuti oleh karyawan, tenaga penugasan (*seconded personnel*), serta kontraktor.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai keberagaman, kesetaraan, dan inklusi, sekaligus membantu peserta mengenali bias tidak sadar yang dapat memengaruhi perilaku dan pengambilan keputusan di tempat kerja. Melalui diskusi interaktif, studi kasus, dan simulasi (*role-play*), peserta

mengeksplorasi pendekatan praktis dalam mencegah diskriminasi dan pelecehan yang didasarkan pada gender, ras, etnis, agama, orientasi seksual, maupun disabilitas.

Komitmen PTVI terhadap DEI juga tercermin dalam capaian dan target yang telah ditetapkan. PTVI memperoleh skor kesetaraan gender tertinggi di sektor pertambangan dalam Katadata ESG Index 2025 (88,33) serta menargetkan peningkatan proporsi karyawan perempuan menjadi 18% pada tahun 2030, dengan tetap mempertahankan rasio upah 1:1 untuk peran yang setara.

Melalui inisiatif ini, PTVI terus mendorong terciptanya budaya kerja yang inklusif, di mana keberagaman dihargai dan setiap karyawan memiliki kesempatan yang setara untuk berkontribusi terhadap keberlanjutan jangka panjang perusahaan.



Dalam konteks saat ini, PTVI memberikan penekanan kuat pada inklusi tenaga kerja lokal, pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, serta inklusi penyandang disabilitas. Penjelasan lebih lanjut mengenai berbagai inisiatif untuk masing-masing kelompok prioritas tersebut disajikan pada bagian berikutnya.



Insiden Diskriminasi [GRI 406-1]

Pada tahun 2025, terdapat tiga insiden diskriminasi yang dilaporkan melalui mekanisme pengaduan resmi perusahaan. Seluruh kasus yang dilaporkan telah ditinjau dan diselidiki sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hingga akhir periode pelaporan, dua kasus masih dalam tahap pemulihan dengan rencana tindakan yang sedang dijalankan, sementara satu kasus telah menyelesaikan proses pemulihan, dengan hasil yang tetap berada dalam pemantauan rutin manajemen internal. Selain itu, satu kasus telah ditutup dan tidak memerlukan tindak lanjut lebih lanjut.

Jumlah Insiden Diskriminasi	2025
Jumlah total insiden diskriminasi	3
Jumlah insiden yang ditinjau oleh organisasi	3
Jumlah insiden dengan rencana pemulihan yang sedang dijalankan	2
Jumlah insiden dengan rencana pemulihan yang telah dilaksanakan dan dalam pemantauan manajemen	1
Jumlah insiden yang telah ditutup (tidak memerlukan tindak lanjut)	1

Perlindungan Tenaga Kerja Lokal ^[GRI 202-2]

Proses rekrutmen kami mencerminkan komitmen berkelanjutan untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal. Proses ini dilaksanakan secara bertahap dalam beberapa siklus, dimulai dari cakupan wilayah terkecil dan terdekat dengan area operasional. Setiap siklus kemudian diperluas secara bertahap, baik dari sisi cakupan maupun jarak, guna memastikan proses yang adil, transparan, serta tetap mengutamakan masyarakat lokal sebagai prioritas utama. Tahapan proses tersebut digambarkan dalam ilustrasi berikut.

Tahapan Rekrutmen PTVI

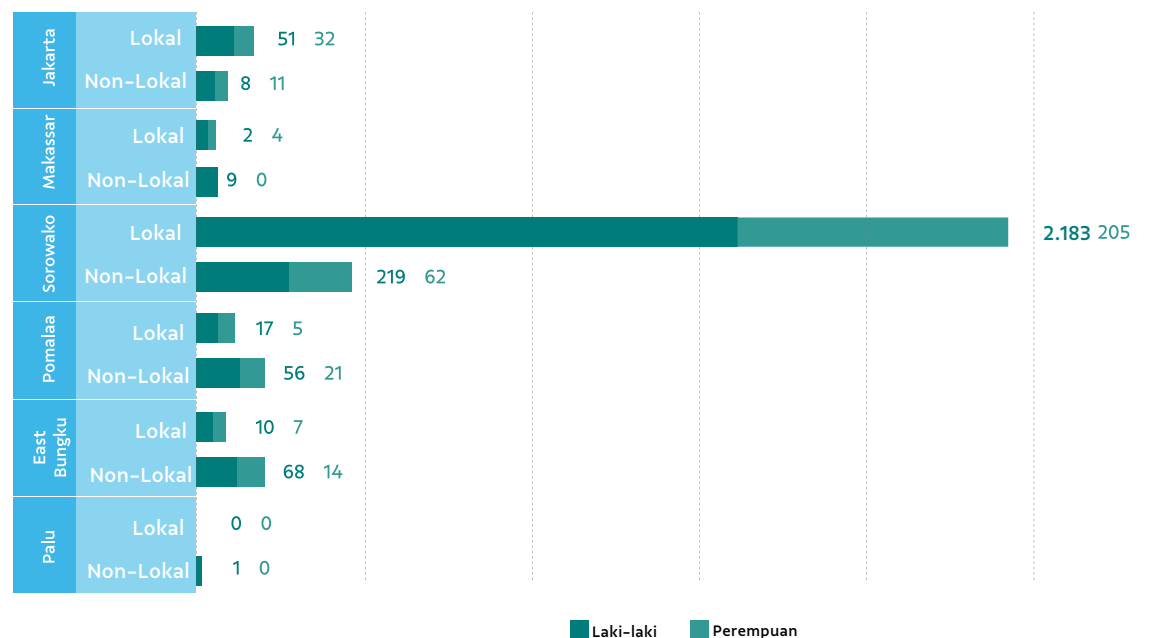
Rekrutmen Internal	Terbuka bagi karyawan aktif PTVI
Rekrutmen Lokal	Ditujukan bagi kandidat dari komunitas di sekitar wilayah operasional kami, meliputi: • Sorowako (empat wilayah pengembangan di Luwu Timur) • IGP Pomalaa (Kabupaten Kolaka) • IGP Morowali (Kabupaten Morowali)
Rekrutmen Regional	Terbuka bagi kandidat dari wilayah provinsi yang lebih luas, di luar area lokal yang telah ditetapkan: • Sulawesi Selatan (untuk Sorowako) • Sulawesi Tenggara (untuk Pomalaa) • Sulawesi Tengah (untuk Bahodopi)
Rekrutmen Nasional	Terbuka bagi kandidat dari seluruh Indonesia di luar tiga wilayah provinsi tersebut, untuk seluruh lokasi operasional.

Karyawan lokal didefinisikan sebagai individu yang domisili resminya, sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), berada di kabupaten yang sama dengan lokasi operasional tempat mereka ditugaskan, sesuai dengan ketentuan pada tahap Rekrutmen Lokal. Pada tahun 2025, PTVI mempekerjakan sebanyak 2.486 karyawan lokal, yang merepresentasikan 83,3% dari total tenaga kerja berdasarkan definisi tersebut. Dari jumlah tersebut, 366 orang menduduki posisi manajerial, atau setara dengan 48,1% dari seluruh posisi manajerial di perusahaan. Capaian ini mencerminkan komitmen kami untuk memastikan bahwa masyarakat di sekitar wilayah operasional memiliki partisipasi yang bermakna serta peran dalam pengambilan keputusan yang berdampak langsung terhadap kehidupan mereka.



48.1% dari seluruh posisi manajerial PTVI diduduki oleh karyawan lokal

Komposisi Karyawan PTVI berdasarkan Area Penempatan dan Status Karyawan Lokal Tahun 2025 ^[GRI 14.9.6]



Catatan: Karyawan lokal didefinisikan sebagai individu yang domisili resminya, sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), berada di kabupaten yang sama dengan lokasi operasional tempat mereka ditugaskan. Karyawan lainnya dikategorikan sebagai non-lokal.

Upaya untuk mempertahankan proporsi karyawan lokal yang tinggi didukung melalui investasi dalam pendidikan dan pengembangan keterampilan. Kami bekerja sama dengan sekolah serta lembaga pendidikan vokasi untuk membuka peluang kerja sekaligus membangun jalur pengembangan tenaga kerja lokal yang kompeten. Melalui kemitraan ini, kami memperkuat proses rekrutmen dan retensi talenta lokal, sehingga masyarakat sekitar memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari kegiatan operasional kami.



Memperkuat Kesiapan Tenaga Kerja Lokal melalui Pelatihan Vokasi bersama Poliwako



Untuk mendukung agenda hilirisasi industri di Indonesia serta kebutuhan tenaga kerja di masa depan, PTVI meluncurkan program Vocational Short-Term Training (VST) bekerja sama dengan Politeknik Sorowako (Poliwako) pada Agustus 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing talenta lokal sekaligus mempersiapkan masyarakat di sekitar wilayah operasional dalam menghadapi peluang industri yang terus berkembang.

Melalui proses seleksi yang kompetitif dengan total 140 pendaftar, sebanyak 45 peserta terpilih untuk mengikuti pelatihan di tiga bidang yang relevan dengan kebutuhan industri, yaitu pengelasan (*welding*), kelistrikan (*electrical*), dan administrasi bisnis. Program pelatihan teknis berlangsung selama tiga bulan, yang kemudian dilanjutkan dengan magang selama tiga bulan bersama kontraktor nasional mitra PTVI,



sehingga peserta dapat mengaplikasikan keterampilan yang diperoleh secara langsung di lingkungan kerja nyata.

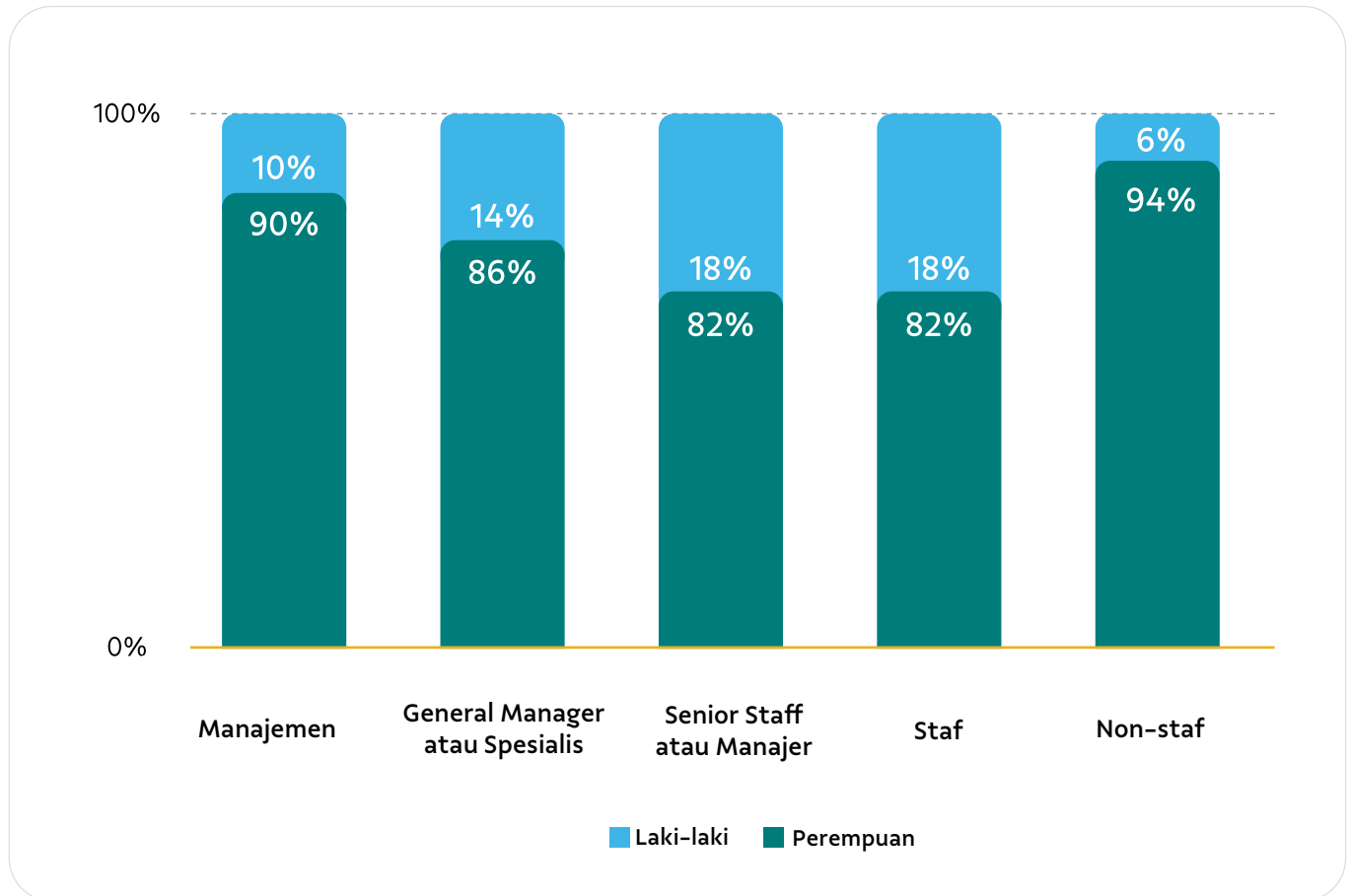
Melalui kolaborasi antara industri dan institusi pendidikan ini, PTVI berupaya membangun pipeline talenta lokal yang berkelanjutan dan selaras dengan kebutuhan operasional. Dengan membekali masyarakat lokal dengan keterampilan praktis yang siap pakai di industri, program ini turut berkontribusi pada pengembangan sumber daya manusia jangka panjang serta memperkuat partisipasi ekonomi yang inklusif di Luwu Timur.

Dukungan bagi Karyawan Perempuan

Perempuan masih merupakan kelompok minoritas di PTVI, dan kami tetap berkomitmen kuat untuk meningkatkan keterwakilan serta pengalaman kerja mereka secara keseluruhan. Pada tahun pelaporan, 12% dari total tenaga kerja dan 17,2% dari posisi kepemimpinan diisi oleh perempuan, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Tren positif ini menunjukkan bahwa kami berada pada jalur yang tepat untuk mencapai target internal, yaitu meningkatkan partisipasi perempuan hingga 16% dari total tenaga kerja.



Komposisi Karyawan PTVI berdasarkan Gender dan Kategori Pekerjaan Tahun 2023–2025^[GRI 405-1]



Pencapaian target tersebut tidak hanya bergantung pada proses rekrutmen, tetapi juga menuntut terciptanya lingkungan kerja di mana perempuan merasa aman, didukung, dan inklusif—terutama dalam industri yang secara tradisional didominasi oleh laki-laki. Untuk itu, PTVI menerapkan berbagai inisiatif yang dirancang agar perempuan merasa diterima, dihargai, dan mampu berkembang secara optimal, sebagaimana ditunjukkan dalam ilustrasi yang menyertainya.

Dukungan di Tempat Kerja bagi Karyawan Perempuan



Kesetaraan Gender

PTVI memastikan bahwa karyawan tidak kehilangan kesempatan untuk bekerja, berkembang, dan memajukan karier ketika mereka memilih untuk membangun keluarga. Kami memahami bahwa tanggung jawab keluarga, khususnya terkait kehamilan dan persalinan, dapat berdampak lebih besar terhadap perjalanan karier perempuan. Oleh karena itu, kami menyediakan manfaat cuti melahirkan yang komprehensif serta kebijakan yang berorientasi pada keluarga untuk mendukung kebutuhan orang tua. Hal ini merupakan bagian penting dari komitmen kami dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat, suportif, dan setara.

Untuk mendukung karyawan perempuan selama masa kehamilan, kami memberikan penyesuaian pekerjaan menjadi lebih ringan serta membebaskan karyawan hamil dari jadwal kerja malam, sehingga mereka dapat mem-

prioritaskan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Kami juga memberikan cuti melahirkan minimal selama empat bulan, yang dapat diperpanjang sesuai rekomendasi medis. Kebijakan ini dirancang sebagai langkah sistematis untuk memastikan perempuan dapat tetap berpartisipasi secara penuh dan aman dalam dunia kerja. Selain itu, karyawan laki-laki memperoleh cuti ayah selama tiga hari untuk mendampingi pasangan saat proses persalinan. Kebijakan ini tidak hanya memungkinkan peran ayah dalam pengasuhan awal, tetapi juga memperkuat dukungan keluarga serta mendorong pembagian peran yang lebih seimbang dalam rumah tangga.

Pada tahun 2025, sebanyak 79 karyawan perempuan dan 2.450 karyawan laki-laki berhak atas cuti orang tua, sementara 87 karyawan laki-laki dan 13 karyawan perempuan memanfaatkan hak tersebut. Efektivitas kebijakan ini tercermin dari tingkat kembali bekerja (*return-to-work rate*) sebesar 100% bagi karyawan perempuan setelah cuti melahirkan, di mana seluruhnya tetap melanjutkan pekerjaan mereka setelah kembali bekerja. Rincian lebih lanjut mengenai data cuti orang tua disajikan pada Bab Tabel Data.

Karyawan yang Berhak dan Mengambil Cuti Melahirkan 2025 [GRI 401-3]

	Laki-laki	Perempuan
Karyawan yang berhak atas cuti melahirkan	2.450	79
Karyawan yang mengambil cuti melahirkan	87	13

Selain itu, PTVI menyediakan berbagai manfaat yang mendukung kebutuhan keluarga, mulai dari penanggungan hingga 100% biaya persalinan hingga dukungan pendidikan dan layanan kesehatan bagi anak karyawan hingga tingkat tertentu. Selain itu, karyawan juga berhak atas cuti berbayar untuk keperluan keluarga atau kondisi darurat, termasuk ketika anggota keluarga sakit. Melalui berbagai inisiatif tersebut, kami berupaya mendorong kesetaraan gender, meningkatkan kesejahteraan karyawan, serta berkontribusi dalam membangun keluarga yang lebih kuat dan tangguh.

Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

PTVI berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dengan memberikan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas. Proses rekrutmen kami terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak, dengan memastikan bahwa setiap kandidat dinilai berdasarkan kemampuan, potensi, serta kesesuaian dengan posisi yang dilamar. Penyandang disabilitas didorong untuk berpartisipasi dalam proses rekrutmen, sejalan dengan keyakinan kami bahwa keberagaman kemampuan akan memperkuat organisasi. Pada tahun 2025, sekitar 2,5% atau 74 karyawan merupakan penyandang disabilitas, dengan 15 di antaranya menduduki posisi kepemimpinan.

Untuk mendukung partisipasi penuh, kami menyediakan fasilitas dan akomodasi kerja yang aksesibel. Fasilitas tersebut meliputi jalur kerja yang ramah kursi roda di area operasional, toilet khusus yang dapat diakses, serta tempat duduk prioritas pada bus karyawan. Melalui berbagai upaya ini, kami berupaya menciptakan lingkungan kerja yang memungkinkan karyawan penyandang disabilitas bekerja dengan nyaman dan aman, serta berkontribusi secara optimal dalam operasional kami.

Remunerasi dan Tunjangan Karyawan

Pemberian Tunjangan [GRI 401-2]

Kami menempatkan penciptaan lingkungan kerja di mana setiap karyawan merasa dihargai sebagai prioritas utama, karena mereka merupakan inti, pemikiran, dan kekuatan di balik operasional kami. Oleh karena itu, kami berkomitmen tidak hanya untuk memberikan kompensasi yang kompetitif, tetapi juga menyediakan berbagai manfaat karyawan secara komprehensif sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku serta Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Tabel pada bagian ini menyajikan kompensasi dan tunjangan yang kami berikan kepada karyawan tetap dan tidak tetap di seluruh wilayah operasional, termasuk Jakarta, Makassar, Sorowako, Wawondula, Wasuponda, Malili, Bahodopi, dan Pomalaa.

Paket manfaat kami mencakup kompensasi dan insentif finansial yang kompetitif untuk mendukung kesejahteraan, keseimbangan kehidupan kerja, serta kebutuhan keluarga; perlindungan kesehatan dan ketenagakerjaan melalui jaminan kesehatan dan program jaminan sosial; berbagai skema cuti berbayar; serta dukungan operasional dan kebutuhan hidup, seperti fasilitas transportasi dan bantuan perumahan. Cakupan, durasi, serta mekanisme perhitungan manfaat tersebut diatur secara rinci dalam PKB.

Sesuai dengan ketentuan dalam PKB, kami juga menyediakan skema insentif berbasis kinerja melalui Annual Incentive Program (AIP), yang mempertimbangkan kinerja PTVI secara keseluruhan, serta kontribusi tim dan individu. Besaran insentif ditentukan berdasarkan kinerja perusahaan, kontribusi tim, dan pencapaian individu.

Kompensasi dan Tunjangan Karyawan	Karyawan Tetap	Karyawan Tidak Tetap
Gaji Pokok	✓	✓
Fasilitas Kesehatan	✓	✓
Asuransi Jiwa	✓	✓
Program BPJS Kesehatan	✓	✓
Program BPJS Ketenagakerjaan	✓	✓
Perlindungan disabilitas dan ketidakmampuan bekerja	✓	✓
Dukungan Perumahan	✓	✓
Bonus Tahunan	✓	✓
Fasilitas Makan	✓	✓
Program Insentif Tahunan (AIP)	✓	✗
Bantuan Pendidikan Anak Karyawan	✓	✗
Cuti Melahirkan	✓	✓
Tunjangan Transportasi	✓	✓
Tunjangan Cuti	✓	✓
Tunjangan Lembur	✓	✓
Tunjangan Pernikahan	✓	✓
Tunjangan Hari Raya	✓	✓
Santunan Duka	✓	✓
Imbalan Masa Kerja	✓	✗
Tunjangan Masa Kerja 25 Tahun	✓	✗

Remunerasi yang Patuh dan Berkeadilan [POJK51-F.20] [GRI 202-1][GRI 405-2]

PTVI memberikan remunerasi yang adil dan kompetitif kepada karyawan tanpa diskriminasi berdasarkan gender maupun karakteristik pribadi lainnya. Kami memastikan rasio upah 1:1 antara karyawan laki-laki dan perempuan untuk peran yang sama dengan kualifikasi serta tanggung jawab yang setara. Prinsip ini diterapkan secara konsisten di seluruh posisi.

Struktur remunerasi kami juga mencakup berbagai manfaat tambahan seperti tunjangan, bonus, serta insentif penempatan, termasuk fasilitas perumahan di area operasional tambang seperti Sorowako, Morowali, dan Pomalaa. Selain itu, karyawan juga memperoleh hak cuti sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Remunerasi dasar yang kami berikan berada di atas upah minimum regional di seluruh wilayah operasional. Remunerasi terendah bagi karyawan PTVI tercatat 8% lebih tinggi dibandingkan upah minimum regional yang berlaku di Kabupaten Luwu Timur, lokasi operasi Sorowako kami. Hal ini mencerminkan komitmen kami untuk memastikan bahwa remunerasi tingkat awal tetap kompetitif dan melampaui ketentuan upah minimum yang berlaku.

Manfaat Pensiun [GRI 201-3]

PTVI menyediakan manfaat pensiun yang komprehensif bagi karyawan, mencakup aspek finansial, asuransi, serta penghargaan melalui berbagai skema. Program utama kami adalah Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), yang wajib diikuti oleh seluruh karyawan tetap dengan masa kerja minimal dua tahun. Dalam program ini, PTVI berkontribusi sebesar 10% dari gaji karyawan, sementara karyawan berkontribusi sebesar 2%.



176 karyawan mengikuti program pelatihan pra-pensiun pada 2025 (239 termasuk pasangan)

Selain skema iuran pasti tersebut, kami juga mengakui kewajiban imbalan pascakerja sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Kewajiban ini dihitung berdasarkan masa kerja serta tingkat kompensasi karyawan pada saat pemutusan hubungan kerja atau pensiun.

Liabilitas imbalan pascakerja jangka panjang kami terdiri dari manfaat pensiun dan ketenagakerjaan, penghargaan masa kerja, serta manfaat kesehatan pascapensiun. Pada tahun 2025, total liabilitas tersebut mencapai US\$49.042 ribu, meningkat dari US\$43.613 ribu pada tahun 2024 atau naik sebesar 12,4% secara tahunan.

Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh kenaikan kewajiban atas manfaat pensiun dan ketenagakerjaan serta penghargaan masa kerja, seiring dengan dinamika tenaga kerja dan akumulasi masa kerja karyawan, yang sebagian diimbangi oleh penurunan manfaat kesehatan pascapensiun.

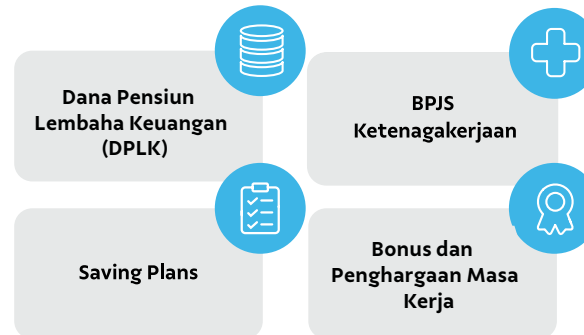
Seluruh liabilitas dihitung oleh aktuaris independen untuk memastikan akurasi dan kesesuaian dengan standar yang berlaku.

Selain itu, karyawan kami juga terlindungi melalui program BPJS Ketenagakerjaan sebagai program jaminan sosial wajib yang mencakup perlindungan kecelakaan kerja, santunan kematian, jaminan hari tua, pensiun, serta risiko cedera kerja.

Kami juga menyediakan manfaat tambahan melalui program internal Saving Plan, yang memberikan manfaat tunai serta

perlindungan asuransi jiwa. Dalam skema ini, PTVI berkontribusi sebesar 4% dari gaji pokok untuk karyawan staf, dengan kontribusi karyawan sebesar 2%. Untuk karyawan non-staff, PTVI berkontribusi sebesar 10% dari gaji pokok.

Skema Manfaat Pensiun



Pelatihan dan Pengembangan Karyawan [POJK51-F.22]

Pengembangan karyawan tetap menjadi fondasi penting dalam mencapai keunggulan organisasi jangka panjang. Untuk mendukung hal tersebut, PTVI secara berkelanjutan menyelenggarakan berbagai program pelatihan dan pengembangan kapabilitas yang mencakup beragam tujuan, antara lain memperkuat kemampuan kepemimpinan, meningkatkan kompetensi teknis, serta memperdalam pemahaman terkait praktik keberlanjutan dan keselamatan kerja. Selain program tersebut, kami juga menyediakan pelatihan khusus bagi karyawan yang akan memasuki masa pensiun serta bagi karyawan yang kembali bekerja setelah menjalani cuti dalam jangka waktu panjang.

Peserta program pelatihan tetap menerima upah penuh serta dukungan logistik selama mengikuti pelatihan. Karyawan tetap mendapatkan gaji penuh, serta fasilitas konsumsi seperti makan dan coffee break. Untuk pelatihan yang dilaksanakan di luar area kerja, kegiatan tersebut diperlakukan sebagai perjalanan dinas, sehingga karyawan berhak atas tunjangan yang sesuai. Selain itu, PTVI juga memberikan dukungan administratif dan logistik bagi karyawan yang melanjutkan pendidikan tinggi secara paruh waktu, termasuk memfasilitasi sesi perkuliahan di lokasi kerja apabila memungkinkan. Karyawan yang ingin mengambil sabbatical leave untuk melanjutkan studi penuh waktu juga diberikan kesempatan, dengan dukungan administratif dari perusahaan guna menunjang kelancaran proses pendidikan mereka.



Program Pengembangan Karyawan^[GRI 404-2]

Program	Total Peserta	Topik
Program Sertifikasi Profesional	274 karyawan	1. Pelatihan dan Sertifikasi Manajer Energi 2. Pembaruan Sertifikasi Pilot Drone (Remote Pilot) 3. Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Energi 4. Pelatihan Personel Keamanan – Kualifikasi Gada Utama 5. Pelatihan dan Sertifikasi Life Cycle Assessment (LCA) 6. Sertifikasi Pengawas Operasional Madya (POM) 7. Sertifikasi Pengawas Operasional Pertama (POP) 8. Rigging Dasar 9. Scaffolding Dasar 10. Inspektur Scaffolding 11. Pelatihan dan Sertifikasi Asesor Kompetensi 12. Sertifikasi Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara 13. Sertifikasi Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air 14. Sertifikasi Penanggung Jawab Pengelolaan Limbah B3 15. Sertifikasi Penanggung Jawab Pengelolaan Limbah Padat Non-B3 16. Sertifikasi Operator Sarana Pengendalian Pencemaran Udara 17. Sertifikasi Ahli Pelaporan Eksplorasi Rinci 18. Sertifikasi Pengawas Operasional Utama (POU) 19. Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Keahlian Bendungan Besar 20. Kursus Juru Ledak Level II 21. Sertifikasi Loading Master 22. Recognition of Current Competency (RCC)

Program Pelatihan Pra-Pensiun — Mempersiapkan Karyawan Menghadapi Masa Pensiun^[GRI 404-2]



Sebagai bagian dari komitmen untuk mendukung karyawan sepanjang siklus kariernya, PTVI menyelenggarakan Program Pelatihan Pra-Pensiun tahun 2025 bagi karyawan yang akan memasuki masa pensiun. Program ini dilaksanakan dalam dua gelombang pada Februari 2025 di Learning Centre dan beberapa lokasi bisnis terpilih, dengan melibatkan 55 peserta.

Program yang berlangsung selama tiga hari ini berfokus pada penguatan kesiapan mental, perencanaan keuangan, kesadaran kesehatan, serta peluang pascapensiun. Para peserta memperoleh pemahaman mengenai strategi menjaga kesehatan fisik dan mental, pengelolaan aset secara bertanggung jawab, serta penemuan kembali tujuan hidup di luar peran profesional. Kunjungan lapangan ke usaha lokal juga memberikan wawasan praktis terkait kewirausahaan dan alternatif sumber penghasilan setelah pensiun.

Melalui program transisi yang terstruktur ini, PTVI berupaya memastikan bahwa masa pensiun tidak dipandang sebagai akhir, melainkan sebagai fase baru yang didukung oleh kesiapan, kepercayaan diri, dan stabilitas. Dengan membekali karyawan dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan, PTVI menegaskan komitmen jangka panjang terhadap kesejahteraan karyawan dan pengelolaan tenaga kerja yang berkelanjutan.

Jam Pelatihan^[GRI 404-1]

Program pelatihan yang dilaksanakan sepanjang tahun menghasilkan total 70.656 jam pelatihan dengan melibatkan 2.553 peserta dari seluruh kategori karyawan, mulai dari manajemen senior hingga non-staf. Secara rata-rata, setiap karyawan mengikuti pelatihan selama 27,68 jam. Kelompok non-staf mencatat rata-rata jam pelatihan tertinggi, diikuti oleh kelompok Senior Staff atau Manajer. Berdasarkan gender, karyawan perempuan rata-rata mengikuti pelatihan selama 31,34 jam, lebih tinggi dibandingkan karyawan laki-laki yang rata-rata 27,14 jam, dengan selisih sekitar empat jam. Data periodik sejak tahun 2023 disajikan lebih lanjut dalam Bab Tabel Data.

Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karier^[GRI 404-3]

Pemantauan kinerja secara berkala merupakan hal yang penting untuk memastikan karyawan memperoleh arahan, umpan balik, serta dukungan pengembangan yang dibutuhkan dalam perjalanan karier mereka. Proses evaluasi yang terstruktur memungkinkan PTVI untuk mengidentifikasi kekuatan, mengatasi kesenjangan kompetensi, serta membangun talent pipeline yang kuat guna mendukung keberlanjutan organisasi dalam jangka panjang. Kinerja seluruh karyawan tetap dievaluasi setiap tahun, sementara karyawan tidak tetap mengikuti jalur evaluasi tersendiri yang disesuaikan dengan status kepegawaianya. Pada tahun 2025, 100% karyawan telah menjalani proses penilaian kinerja.

Karyawan yang Mengikuti Pelatihan dan Jam Pelatihan Tahun 2025

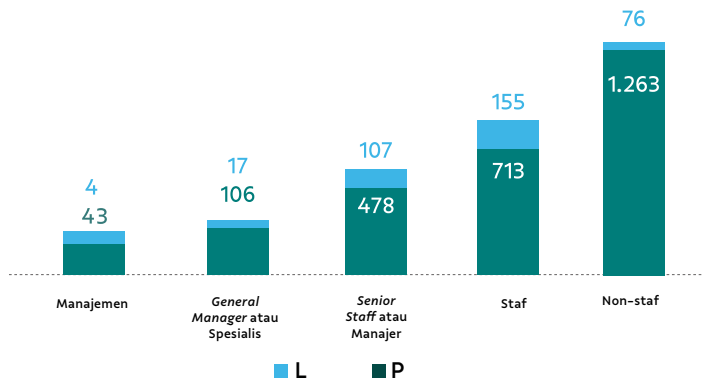
Kategori Pekerjaan	Total Peserta Pelatihan			Total Jam Pelatihan		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
Manajemen	27	2	29	473	35	508
<i>General Manager</i> atau <i>Spesialis</i>	91	16	107	1.979	452	2.431
<i>Senior Staff</i> atau Manajer	393	95	488	12.228	2.710	14.938
Staf	628	136	764	15.880	4.044	19.924
Non-staf	1.041	64	1.105	29.880	2.975	32.855
TOTAL	2.180	313	2.493	60.440	10.216	70.656

Rata-rata Jam Pelatihan Tahun 2025

Kategori Pekerjaan	Rata-rata Jam Pelatihan (<i>Total Jam Pelatihan / Total Jumlah Karyawan</i>)		
	Laki-laki	Perempuan	Total
Manajemen	13,14	8,75	12,70
<i>General Manager</i> atau <i>Spesialis</i>	18,67	26,59	19,76
<i>Senior Staff</i> atau Manajer	25,06	24,64	24,98
Staf	22,09	26,26	22,82
Non-staf	23,44	39,14	24,32
TOTAL	23,03	28,30	23,67



Karyawan yang Menerima Penilaian Kinerja 2025



Karyawan pada level staf dan di atasnya dievaluasi melalui sistem Career & Succession Planning (CSP), yang menyediakan penilaian kinerja secara berkelanjutan, mendukung pengembangan talenta, serta memfasilitasi perencanaan suksesi untuk memastikan keberlanjutan kepemimpinan. Sementara itu, karyawan non-staf dievaluasi melalui sistem Personal Performance Effectiveness Appraisal (PPEA). Melalui penilaian kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan, kami memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai potensi karyawan serta mengidentifikasi peluang pengembangan karier yang dapat meningkatkan efektivitas organisasi.



Sertifikasi Great Place to Work®

Pada tahun 2025, PTVI memperoleh sertifikasi dari Great Place to Work® sebagai salah satu Best Companies to Work For™ di Asia Tenggara, dengan 88% karyawan menyatakan bahwa PTVI merupakan tempat kerja yang baik—jauh di atas rata-rata global sebesar 59%.



Peluncuran IMPACT: Membangun Budaya Kinerja yang Transparan dan Berorientasi pada Pengembangan



Pada Juli 2025, PTVI memperkenalkan IMPACT (Initiate, Measure, Perform, Align, Collaborate, Transform) sebagai sistem manajemen kinerja yang diperbarui, yang dirancang untuk mendukung pengembangan karyawan serta memperkuat keselarasan antara kontribusi individu dan tujuan perusahaan. Sistem ini menggantikan kerangka sebelumnya dan dikembangkan untuk mencerminkan dinamika organisasi yang terus berkembang, termasuk dalam proses *carve-out*.

IMPACT menyediakan struktur yang lebih jelas dalam penetapan tujuan, pengukuran kinerja, serta pemberian umpan balik secara berkelanjutan, sehingga karyawan dapat memahami ekspektasi dengan lebih baik, memantau progres, serta merencanakan pengembangan karier mereka. Pendekatan ini menekankan aspek keadilan, kolaborasi, dan hasil yang terukur, sehingga memperkuat budaya kerja yang mengakui kinerja dan kontribusi secara transparan.

Didukung oleh platform digital dengan kemampuan analitik yang lebih canggih, sistem ini memungkinkan proses evaluasi kinerja yang lebih terstruktur serta mendukung pengambilan keputusan pengembangan talenta berbasis data. Implementasi IMPACT dimulai pada siklus penetapan tujuan tahun 2025 dan akan terus disempurnakan melalui keterlibatan aktif karyawan dan pimpinan.

Melalui IMPACT, PTVI bertujuan untuk membangun budaya kinerja yang memberdayakan karyawan, mendorong perbaikan berkelanjutan, serta mendukung pengembangan karier jangka panjang.

Kesehatan dan Keselamatan Karyawan^[POJK51-F.21]

Komitmen terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja

PTVI menyadari bahwa industri pertambangan memiliki risiko dan bahaya yang melekat, sehingga kami berkomitmen untuk mengelola risiko tersebut secara proaktif, khususnya untuk mencapai nihil fatalitas kerja dan nihil penyakit akibat kerja. Komitmen ini menjadi landasan utama yang mendukung keberlangsungan operasional kami, melalui penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) sebagai mekanisme pencegahan utama dalam setiap pengambilan keputusan operasional untuk menurunkan risiko. Komitmen ini juga mencerminkan kepatuhan kami terhadap Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 26 Tahun 2018 yang mewajibkan perusahaan pertambangan untuk memastikan operasional yang aman dan sehat. ^[GRI 403-1]

SMK3 kami mencakup berbagai aspek, antara lain program pelatihan dan induksi, pedoman manajemen, penilaian risiko, sistem perizinan dan otorisasi kerja, serta kegiatan audit dan inspeksi. Sistem ini juga telah diselaraskan dengan Keputusan Menteri ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik, termasuk penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP). Implementasi SMKP dipantau melalui audit tahunan, yang pada tahun ini menunjukkan tingkat kepatuhan sebesar 75,5%. Selain itu, pada tahun pelaporan, PTVI berhasil memperoleh sertifikasi ISO 45001, yang menegaskan keselarasan kami dengan praktik manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang diakui secara internasional. ^[GRI 403-1]

Pendekatan K3 kami berlaku untuk seluruh karyawan (100%), termasuk tenaga kontraktor dan vendor, serta mencakup seluruh pihak yang melakukan aktivitas atau berkunjung ke area operasional kami, seperti Sorowako, Bahodopi, dan Pomalaa. Kami meyakini bahwa sistem K3 yang efektif harus dibangun berdasarkan pengalaman para pihak tersebut yang menjalankannya setiap hari. Masukan mereka menjadi dasar untuk menjaga relevansi sistem dengan kondisi di lapangan serta mendorong perbaikan berkelanjutan.

Kerangka Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja^{[GRI 403-1] [GRI 403-2]}

Jenis Program	Program	Frekuensi
Program Pelatihan dan Induksi	Contractor Safety Management System (CSMS)	Bulanan
	General Induction Program (GIP)	Untuk karyawan baru, pembaruan setiap 2 tahun
	Site-Specific Induction Program (SSIP)	Sesuai kebutuhan untuk akses area tertentu
	<i>Safety Talks</i>	Dilaksanakan sebelum memulai pekerjaan
Pedoman Manajemen	Pedoman Program Pencegahan Fatalitas	Disosialisasikan secara berkelanjutan
	Pedoman Pencegahan Kelelahan (<i>Fatigue</i>)	Disosialisasikan secara berkelanjutan
Penilaian Risiko	Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA)	Bulanan
	Health Risk Assessment (HRA)	Tahunan
	Risk Assessment (RA)	Sebelum pekerjaan baru dimulai atau saat terjadi perubahan kondisi risiko
	Job Safety Analysis (JSA)	Sebelum pekerjaan baru dimulai atau saat terjadi perubahan kondisi risiko
Perizinan & Otorisasi Kerja	Safe Working Permit (SWP)	Wajib untuk seluruh pekerjaan berbasis proyek
	Critical Activity Requirements (CAR)	Audit bulanan untuk seluruh aktivitas berisiko tinggi
Audit & Inspeksi	Heavy Equipment Inspection (Pengecekan dan Pemeriksaan Harian, or P2H)	Harian
	Audit/Inspeksi	Minimal 8 audit per orang per bulan

Setiap tahun, karyawan, kontraktor, dan vendor berpartisipasi dalam pertemuan dengan Komite Keselamatan Pertambangan (KKP) untuk membahas isu-isu K3. Untuk memastikan setiap masukan ditindaklanjuti secara tepat, kami telah menetapkan mekanisme yang jelas dalam meninjau dan merespons aspirasi karyawan dalam kerangka SMK3 kami. [GRI 403-4][GRI 403-8]



100% karyawan dan tenaga kerja non-karyawan tercover dalam SMK3 kami, dengan data yang telah diverifikasi melalui audit internal dan eksternal [GRI 403-8]

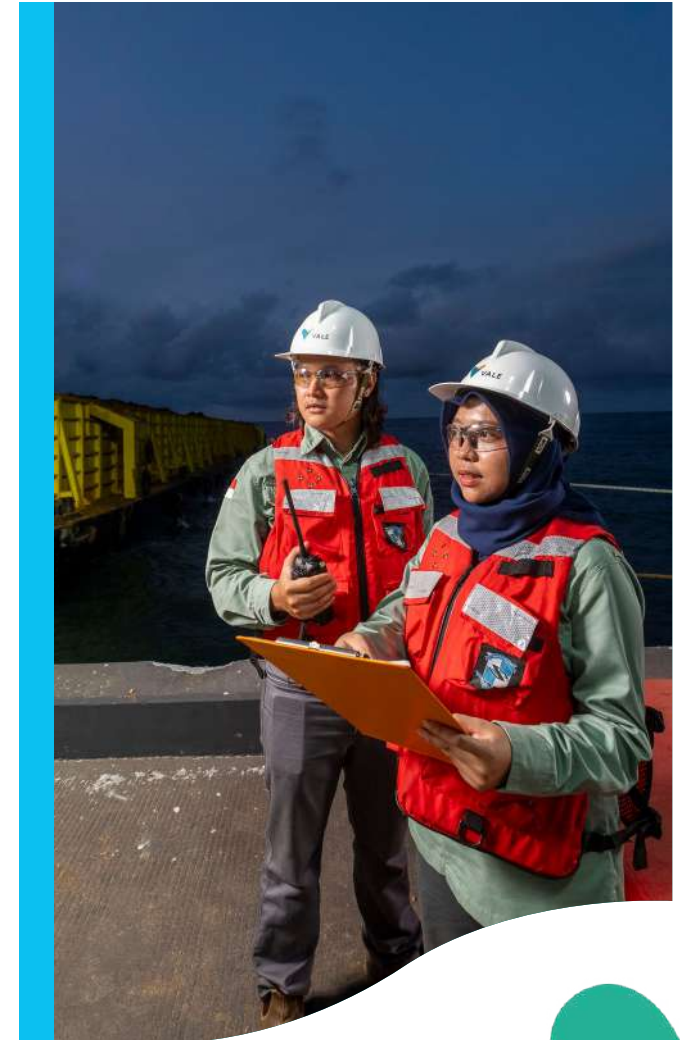
PTVI memastikan bahwa seluruh mitra usaha, termasuk kontraktor dan subkontraktor, mematuhi persyaratan SMK3 yang kami terapkan. Kami menyediakan pedoman HSE yang komprehensif dan selaras dengan standar operasional kami, yang wajib ditinjau oleh seluruh pemasok serta menjadi bagian dari proses registrasi dan persetujuan sebelum mereka dapat berpartisipasi dalam proses pengadaan maupun kontrak. Pemasok yang tidak memenuhi kriteria wajib HSE, termasuk yang tercantum dalam daftar pelanggaran ketenagakerjaan nasional (Dirty List), tidak memenuhi syarat untuk bekerja sama dengan kami. PTVI juga berhak untuk menangguhkan atau menghentikan pekerjaan kontraktor, baik sebagian maupun seluruhnya, apabila ditemukan risiko HSE yang serius atau bersifat segera (imminent), maupun apabila terjadi pelanggaran terhadap persyaratan keselamatan internal maupun ketentuan hukum yang berlaku. [GRI 403-7]

Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, dan Strategi Mitigasi

Salah satu tahapan terpenting dalam SMK3 kami adalah proses identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Proses ini memungkinkan PTVI untuk mengidentifikasi bahaya kerja yang berpotensi menimbulkan cedera berat maupun penyakit akibat kerja, sehingga kami dapat merancang langkah-langkah yang paling tepat dan efektif dalam meningkatkan kinerja K3. Penilaian dilakukan melalui kerangka Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA), yang dilaksanakan setiap bulan atau ketika terdapat risiko baru. Proses ini dilakukan oleh tenaga profesional internal yang telah tersertifikasi sebagai Pengawas Operasional Pertama (POP) oleh Kementerian ESDM, serta mengikuti pelatihan HIRA secara berkala setiap dua tahun. [GRI 403-2]

Berdasarkan hasil penilaian HIRA terbaru, kami mengidentifikasi berbagai potensi bahaya, antara lain pengoperasian alat berat, pekerjaan di ketinggian, aktivitas peledakan, pekerjaan di area dengan potensi paparan gas berbahaya, lingkungan dengan paparan panas tinggi, lingkungan dengan tingkat kebisingan tinggi, serta aktivitas terkait lainnya. Risiko yang ditimbulkan mencakup cedera dan fatalitas, keracunan gas, stres panas (*heat stress*), gangguan pendengaran, serta gangguan muskuloskeletal.

Hasil penilaian ini menjadi dasar dalam penerapan berbagai langkah pengendalian untuk meningkatkan K3. Tindakan tersebut mengacu pada hierarki pengendalian risiko, yang dimulai dari eliminasi bahaya, substitusi dengan proses atau material yang lebih aman, penerapan pengendalian teknis dan administratif untuk mengurangi paparan, serta sebagai langkah terakhir penggunaan alat pelindung diri (APD) yang sesuai. [GRI 403-2][GRI 403-9][GRI 403-10]



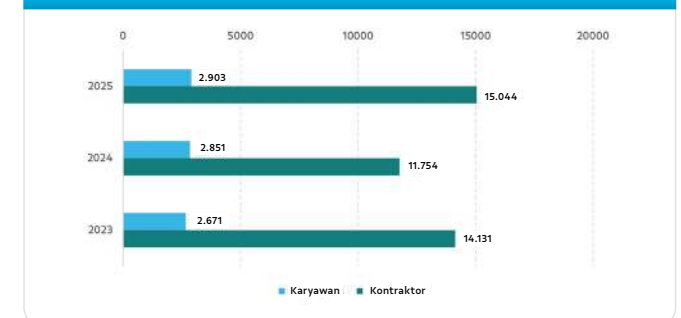
Bahaya Terkait Pekerjaan dan Mitigasi Risiko^{[GRI 403-9][GRI 403-10]}

Bahaya	Risiko Cedera Berat & Gangguan Kesehatan	Tindakan Pengendalian Risiko
Pengoperasian alat berat	Cedera serius / fatalitas	- Pengembangan standar CAR/MHS-03 - Pelatihan dan audit keselamatan pengoperasian kendaraan
Pekerjaan di ketinggian	Cedera serius / fatalitas	- Penerapan standar CAR/MHS-09 - Pelatihan dan audit terkait bahaya kerja di ketinggian
Aktivitas peledakan	Cedera serius / fatalitas	- Penerapan standar CAR/MHS-09 - Sertifikasi juru ledak - Audit keselamatan terkait operasi peledakan
Bekerja di area dengan potensi paparan gas berbahaya	Keracunan gas	- Penilaian risiko higiene industri di seluruh area operasional - Pemantauan langsung dan daring - Penyusunan dan penerapan prosedur kerja aman - Penggunaan APD wajib sesuai kebutuhan
Bekerja di lingkungan dengan paparan panas	Stres panas (heat stress)	- Penilaian risiko higiene industri di seluruh area operasional - Pemantauan langsung dan daring - Penyusunan dan penerapan prosedur kerja aman - Penggunaan APD wajib sesuai kebutuhan
Bekerja di lingkungan dengan tingkat kebisingan tinggi	Gangguan pendengaran	- Penilaian risiko higiene industri di seluruh area operasional - Pemantauan langsung dan daring - Penyusunan dan penerapan prosedur kerja aman - Penggunaan APD wajib sesuai kebutuhan
Jenis pekerjaan lain yang diidentifikasi melalui analisis kebutuhan pekerjaan proyek, termasuk: - Pengoperasian peralatan tambang - Penanganan material secara manual	Gangguan muskulo-skeletal (nyeri punggung bawah, hernia, <i>nucleus pulposus</i> , dan lainnya)	- Penerapan pengendalian teknis pada peralatan tambang dengan risiko ergonomi tinggi - Pengendalian administratif untuk meningkatkan kesadaran operator terhadap risiko ergonomi - Pengendalian administratif untuk aktivitas penanganan material secara manual

Selain HIRA, PTVI juga melaksanakan Health Risk Assessment (HRA) setiap tahun untuk mengidentifikasi potensi penyakit akibat kerja yang terkait dengan aktivitas operasional. Berdasarkan penilaian terbaru, beberapa penyakit akibat kerja yang teridentifikasi dengan tingkat risiko tertinggi meliputi bronkitis, Carpal Tunnel Syndrome (CTS), Noise-Induced Hearing Loss (NIHL), dermatitis kontak alergi, serta radial styloid tenosynovitis. Selama tahun pelaporan, kami mengidentifikasi bahwa sejumlah bahaya dan risiko yang terdeteksi melalui proses HIRA dan HRA menjadi kontributor utama terhadap cedera kerja dan gangguan kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan paparan debu dan partikel udara, tingkat kebisingan tinggi, tekanan ergonomi akibat pekerjaan berulang, serta paparan bahan kimia atau zat berbahaya lainnya. Untuk memitigasi risiko tersebut, kami menerapkan berbagai langkah pencegahan, termasuk pelaksanaan Medical Check-Up (MCU) secara berkala untuk memantau kondisi kesehatan pekerja, Job Safety Analysis (JSA) untuk mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya di tempat kerja, serta penerapan pengendalian teknis, administratif, dan penggunaan alat pelindung diri (APD) guna mengurangi paparan terhadap risiko kesehatan kerja. ^{[GRI 403-9][GRI 403-10]}

Pada tahun 2025, sebanyak 2.903 karyawan dan 15.044 kontraktor telah menjalani pemeriksaan kesehatan rutin di seluruh wilayah operasional kami. ^[GRI 403-6]

Jumlah Peserta Medical Checkup 2023-2025^[GRI 403-6]



Audit Internal ISO 45001 untuk Memperkuat Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja



Pada Juni 2025, PTPI melaksanakan audit internal secara komprehensif sebagai bagian dari persiapan penerapan ISO 45001:2018. Audit ini mengevaluasi efektivitas Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) di seluruh fungsi operasional dan pendukung, termasuk kegiatan pertambangan, pengolahan, logistik, dan proyek.

Hasil penilaian mengidentifikasi sejumlah peluang untuk memperkuat implementasi sistem, khususnya pada aspek pengendalian dokumen, manajemen perubahan, proses tindakan korektif, serta integrasi respons darurat. Di sisi lain, audit juga menegaskan kuatnya komitmen pimpinan terhadap tata kelola keselamatan, keberadaan pengendalian risiko kritis yang terstruktur, serta pencapaian nihil insiden fatal dalam dua tahun terakhir.

Melalui proses ini, PTPI terus memperkuat praktik manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, guna memastikan sistem yang diterapkan tetap andal, akuntabel, serta selaras dengan standar internasional dan praktik pertambangan yang bertanggung jawab.

Salah satu langkah utama dalam mitigasi risiko adalah memastikan seluruh personel memiliki kesiapsiagaan yang memadai melalui prosedur Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat. Setiap departemen melaksanakan simulasi keadaan darurat setidaknya satu kali dalam setahun, dengan partisipasi yang wajib bagi seluruh karyawan. Skenario yang dipersiapkan dalam simulasi tersebut meliputi kebakaran, gempa bumi, benda jatuh, kecelakaan kendaraan, keracunan, paparan bahan kimia, tumpahan hidrokarbon, tabrakan atau tergulingnya kendaraan, gigitan hewan berbisa, hingga potensi kegagalan bendungan. Dalam situasi darurat yang berpotensi berdampak pada masyarakat, seperti kegagalan bendungan, masyarakat sekitar juga dilibatkan dalam pelaksanaan simulasi. [GRI 14,15.4]

Peningkatan Kesiapsiagaan Tanggap Darurat di Area Produksi



Pada November 2025, PTPI melaksanakan simulasi tanggap darurat yang terfokus di area Process Plant (Reduction Kiln – CC3) untuk memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi skenario operasional berisiko tinggi. Simulasi ini mencakup kejadian kegagalan rem kontainer saat proses pengangkatan (*hoisting*) yang mengakibatkan skenario cedera serius, serta menguji koordinasi antara tim operasional, personel keselamatan, Fire Emergency Services (FES), tim medis, dan keamanan.

Pelaksanaan simulasi menunjukkan koordinasi lintas fungsi yang kuat serta kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku, sekaligus mengidentifikasi adanya kendala akses yang memengaruhi waktu respons. Temuan tersebut telah dimasukkan ke dalam rencana tindakan perbaikan untuk semakin meningkatkan kesiapsiagaan di lokasi.

Melalui pelaksanaan simulasi berbasis skenario secara rutin, PTPI terus memperkuat budaya keselamatan yang proaktif serta memastikan karyawan dan kontraktor selalu siap untuk merespons situasi darurat secara cepat dan efektif.

Selain kesiapsiagaan darurat, PTVI juga secara rutin menyelenggarakan pelatihan kesehatan, keselamatan, dan tanggap darurat (HSE) bagi karyawan. Program pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terhadap bahaya di tempat kerja serta memperkuat kesiapan pekerja dalam menghadapi potensi situasi darurat.

Pada tahun 2025, pelatihan HSE dilaksanakan di berbagai lokasi operasional. Di lokasi Sorowako, total jam pelatihan mencapai 1.460 jam untuk karyawan dan 6.789 jam untuk kontraktor, sementara di lokasi Pomalaa mencapai 262 jam untuk karyawan dan 5.244 jam untuk kontraktor. Materi pelatihan mencakup identifikasi bahaya di tempat kerja, prosedur operasi yang aman, kesiapsiagaan tanggap darurat, serta penggunaan alat pelindung diri (APD).

Seluruh sesi pelatihan dipandu oleh instruktur yang tersertifikasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), sehingga menjamin kualitas pelatihan yang diberikan. Untuk memastikan efektivitas pembelajaran, setiap pelatihan dilengkapi dengan post-test guna mengukur tingkat pemahaman peserta. ^[GRI 403-5]

Bulan K3 Nasional 2025 — Memperkuat Budaya Keselamatan di Operasi Sorowako

PTVI menutup rangkaian Bulan K3 Nasional 2025 di operasi Sorowako pada Februari 2025 sebagai bentuk penegasan komitmen dalam menjaga lingkungan kerja yang aman dan sehat. Program ini menekankan bahwa keselamatan bukan sekadar kepatuhan terhadap prosedur, melainkan budaya bersama yang tertanam di seluruh tingkat operasional.

Sepanjang pelaksanaan, berbagai kegiatan bertema keselamatan melibatkan karyawan, kontraktor, serta pemangku kepentingan lokal. Inisiatif yang dilakukan antara lain Dojo Safety Challenge, CrossFit Challenge, serta kompetisi olahraga antar departemen yang dirancang untuk mendorong kerja sama tim, kewaspadaan, dan perilaku keselamatan yang proaktif.

Tidak hanya di area operasional, PTVI juga memperluas edukasi keselamatan ke lima sekolah di Luwu Timur, melalui penyuluhan mengenai kesehatan kerja, keselamatan lingkungan (HSE), keselamatan berkendara, serta pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Program ini menjadi pengingat bersama bahwa keselamatan merupakan tanggung jawab kolektif. Melalui keterlibatan pimpinan, partisipasi tenaga kerja, serta kolaborasi dengan masyarakat, PTVI terus memperkuat budaya keselamatan guna menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, sehat, dan produktif.

Seluruh karyawan dan pekerja memiliki akses terhadap mekanisme pelaporan yang transparan dan efisien untuk melaporkan bahaya kerja maupun kondisi berbahaya melalui aplikasi CRM (Critical Risk Management) berbasis smartphone. Selain itu, supervisor dapat melaporkan insiden atau kecelakaan melalui aplikasi khusus IRIS. Setiap laporan yang masuk ditindaklanjuti dengan investigasi menyeluruh untuk mengidentifikasi akar penyebab. Hasil investigasi digunakan untuk menyempurnakan prosedur K3 guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang, dan setiap perubahan dikomunikasikan kepada karyawan melalui pelatihan K3. Dalam kondisi berbahaya, penghentian pekerjaan dan evakuasi dari area kerja wajib dilakukan. Ketentuan ini secara konsisten disosialisasikan kepada seluruh karyawan melalui poster, kegiatan sosialisasi, serta safety share rutin. ^[GRI 403-2]

Layanan Kesehatan Kerja dan Non-Kerja

PTVI berkomitmen untuk menyediakan layanan kesehatan kerja dan non-kerja yang berkualitas bagi seluruh pekerja guna melindungi kesejahteraan mereka di seluruh area operasional. Layanan kesehatan kerja berfokus pada pencegahan, deteksi, dan pengelolaan risiko kesehatan yang timbul dari kondisi kerja, sementara layanan kesehatan non-kerja mendukung kesejahteraan secara menyeluruh melalui program yang mendorong gaya hidup sehat serta pencegahan penyakit di luar faktor pekerjaan.

Didukung oleh tenaga kesehatan profesional serta tim kesehatan kerja yang terus mendapatkan pelatihan, kami menjalankan berbagai program layanan kesehatan kerja, antara lain: ^[GRI 403-3]

- Penilaian Risiko Kesehatan di Tempat Kerja
- Penerapan ergonomi kerja
- Surveilans dan analisis penyakit akibat kerja serta penyakit umum lainnya
- Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)
- Pengelolaan kelelahan kerja

Selain itu, kami juga memberikan perhatian besar pada kebutuhan kesehatan non-kerja. Seluruh karyawan beserta keluarga mereka tercakup dalam berbagai manfaat kesehatan yang disediakan perusahaan, termasuk kepesertaan dalam program jaminan kesehatan nasional (BPJS), perlindungan biaya pengobatan dan rawat inap, serta akses terhadap layanan kesehatan melalui fasilitas rumah sakit INCO di lokasi operasional. Cakupan layanan ini diatur dalam PKB, termasuk komitmen kami dalam menjaga kerahasiaan data medis karyawan. Informasi kesehatan dikelola secara ketat dan hanya dapat diakses oleh personel yang berwenang yang telah menandatangani Integrity Pact. ^{[GRI 403-3][GRI 403-6]}

Sebagai pelengkap, PTVI juga secara proaktif menyelenggarakan berbagai program promotif, preventif, dan suportif yang mendorong gaya hidup sehat dan kesejahteraan menyeluruh. Program ini mencakup kegiatan kebugaran, pemeriksaan kesehatan berkala (tahunan atau dua tahunan), vaksinasi, serta dukungan nutrisi, higiene, dan sanitasi. Kami juga menyediakan program khusus yang berfokus pada kesehatan mental, penyakit tidak menular, penyalahgunaan zat, penyakit menular, serta risiko ergonomi dan gangguan muskuloskeletal. Seluruh program ini didukung sepenuhnya oleh perusahaan. Meskipun partisipasi bersifat sukarela, kami memastikan seluruh pekerja dapat dengan mudah mengakses program maupun informasinya melalui media sosial, pesan langsung, siaran informasi, serta papan informasi di area kerja.^[GRI 403-6]

Kesadaran Kesehatan Mental Karyawan — Program Deteksi Dini di IGP Morowali



Sebagai bagian dari komitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan suportif, PTVI melalui IGP Morowali menyelenggarakan program peningkatan kesadaran kesehatan mental dan deteksi dini bagi karyawan dan kontraktor pada Januari 2025. Inisiatif ini dilatarbelakangi oleh kondisi operasional di mana lebih dari 70% karyawan bekerja jauh dari keluarga, yang berpotensi meningkatkan tekanan emosional dan kelelahan mental.

Sesi yang dilaksanakan secara hybrid ini menghadirkan psikiater berlisensi yang memberikan pemahaman mengenai tanda-tanda awal gangguan psikologis, faktor pemicu stres di tempat kerja, serta strategi membangun mekanisme koping yang sehat. Peserta juga didorong untuk memandang kesehatan mental sebagai aspek yang sama pentingnya dengan keselamatan fisik dalam menjaga kesejahteraan dan produktivitas.

Sebagai tindak lanjut, PTVI menyediakan layanan skrining kesehatan mental secara sukarela untuk membantu mengidentifikasi potensi risiko sejak dini serta memastikan dukungan yang tepat dapat diberikan secara cepat. Inisiatif ini turut memperkuat budaya kerja yang mendorong karyawan dan kontraktor untuk merasa aman dalam menyampaikan kondisi dan kebutuhan terkait kesehatan mental mereka.

Statistik Cedera dan Penyakit Akibat Kerja

Di PTVI, keselamatan merupakan prioritas utama di seluruh kegiatan operasional. Untuk memantau kinerja serta mendorong perbaikan berkelanjutan, kami melacak berbagai indikator kesehatan dan keselamatan kerja bagi karyawan maupun kontraktor yang berada di bawah kendali operasional kami. Indikator tersebut tidak hanya mencakup jumlah cedera akibat kerja, tetapi juga insiden kehilangan waktu kerja (lost-time incidents), yang membantu kami memahami risiko secara lebih komprehensif dan memperkuat langkah pencegahan.

Pada tahun 2025, kami mencatat nihil fatalitas di seluruh area operasional. Terdapat tiga cedera dengan konsekuensi tinggi dan 22 kasus cedera tercatat, seluruhnya melibatkan kontraktor, dibandingkan dengan 10 kasus pada tahun 2024. Kami juga mencatat satu insiden kehilangan waktu kerja pada karyawan dan lima pada kontraktor. Selama tahun tersebut, total jam kerja meningkat signifikan dari sekitar 32 juta jam menjadi 49 juta jam, yang terutama didorong oleh aktivitas besar di Sorowako, termasuk pembangunan ulang furnace dan ekspansi proyek seiring mendekati kapasitas operasi penuh. [GRI 14,15,3]

Sebagai bagian dari pendekatan proaktif terhadap keselamatan, kami juga memantau insiden near miss. Insiden ini mencakup baik karyawan maupun kontraktor, dan seluruhnya dicatat secara terintegrasi untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai potensi risiko di seluruh operasi. Pada tahun 2025, tingkat frekuensi near miss tercatat sebesar 1,55, menunjukkan peningkatan sebesar 16% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1,84. Hal ini mencerminkan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kesadaran terhadap bahaya serta mencegah

insiden sebelum terjadi. Untuk mendukung hal tersebut, kami secara rutin menjalankan kampanye keselamatan dengan fokus kuat pada pengelolaan kelelahan (fatigue management), yang diakui sebagai salah satu faktor utama penyebab insiden kerja. Inisiatif ini mencakup penyampaian pesan keselamatan melalui berbagai media, seperti banner dan materi komunikasi visual di area operasional, guna memperkuat perilaku aman dan menjaga kesadaran keselamatan di seluruh tenaga kerja.

Seiring dengan pertumbuhan tenaga kerja, khususnya dari sisi kontraktor, kami menyadari pentingnya menjaga pengendalian keselamatan yang kuat. Oleh karena itu, kami terus memperkuat Contractor Safety Management System (CSMS). Sistem ini memastikan bahwa seluruh kontraktor memenuhi standar keselamatan PTVI melalui proses yang terstruktur, mulai dari pra-kualifikasi, pelatihan keselamatan, penilaian risiko, pengawasan, hingga pemantauan kinerja secara berkelanjutan. Melalui kolaborasi erat dengan kontraktor, kami berupaya mencegah insiden, meningkatkan budaya keselamatan, serta mempertahankan komitmen terhadap nihil fatalitas kerja.



Statistik Cedera Akibat Kerja

Total Jam Kerja 2023–2025

Tingkat Pendidikan	Satuan	2025				2024				2023
		Sorowako	IGP Morowali	IGP Pomalaa	Total	Sorowako	IGP Morowali	IGP Pomalaa	Total	
Karyawan	Jam	6.127.468	239.952	197.540	6.564.960	6.280.560	176.040	184.680	6.641.280	6.379.740
Kontraktor	Jam	26.239.164	7.099.302	9.285.380	42.623.846	23.291.155	3.493.111	2.400.986	29.185.252	23.036.374
Total		32.366.632	7.339.254	9.482.920	49.188.806	29.571.715	3.669.151	2.585.666	35.826.532	29.416.114

Statistik Cedera Akibat Kerja Karyawan dan Pekerja Non-Karyawan 2023–2025^{[GRI 403–9][SASB EM-MM-320a.1]}

Level of Education		2025				2024				2023
		Sorowako	IGP Morowali	IGP Pomalaa	Total	Sorowako	IGP Morowali	IGP Pomalaa	Total	
Karyawan										
Total Loss Time Injury	#	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Loss Time Injury Frequency Rate (LTIFR)	#	0,16	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Total Recordable Injury	#	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Recordable Injury Frequency Rate (TRIFR)	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kontraktor										
Total Loss Time Injury	#	5	0	0	5	1	0	0	1	4
Loss Time Injury Frequency Rate (LTIFR)	#	0,19	0	0	0,12	0,04	0	0	0,03	0,17
Total Recordable Injury	#	16	3	3	22	9	1	0	10	10
Total Recordable Injury Frequency Rate (TRIFR)	#	0,61	0,42	0,32	0,52	0,39	0,29	0	0,34	0,43
Karyawan dan Kontraktor										
Near Miss Incidents	#	53	10	13	76	59	6	1	66	62
Near Miss Frequency Rate	#	1,64	1,36	1,37	1,55	2,00	1,64	0,39	1,84	2,11

Mekanisme Pelaporan dan Penyelesaian Keluhan Karyawan

PTVI berkomitmen untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman dan suportif bagi seluruh karyawan, termasuk melalui mekanisme yang jelas dan mudah diakses sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) untuk menangani baik keluhan (terkait pelanggaran PKB) maupun pengaduan (isu lain di tempat kerja). Seluruh laporan ditangani dengan menjaga kerahasiaan secara ketat, sehingga karyawan merasa aman dan nyaman dalam menyampaikan permasalahan. Keterlibatan aktif karyawan juga memungkinkan identifikasi kesenjangan sistem serta mendorong perbaikan berkelanjutan di lingkungan kerja.

PTVI menerapkan mekanisme yang terstruktur dan bertahap dalam pelaporan serta penyelesaian permasalahan. Karyawan dapat meneruskan permasalahan ke tingkat berikutnya hanya apabila belum terselesaikan pada tingkat sebelumnya. Mekanisme ini terdiri dari empat tingkat yang dirancang untuk memastikan penyelesaian yang adil, transparan, dan tepat waktu.

Tingkat Eskalasi Keluhan

01



Pelaporan kepada Atasan Langsung

Karyawan menyampaikan keluhan secara tertulis kepada atasan langsung dengan tembusan kepada atasan yang lebih tinggi. Atasan langsung wajib memberikan tanggapan dalam waktu maksimal tujuh hari sejak laporan diterima. Kegagalan dalam merespons dapat dikenakan sanksi.

Jika masalah masih belum terselesaikan

02



Eskalasi kepada Atasan yang Lebih Tinggi

Karyawan menyampaikan keluhan kepada atasan tingkat berikutnya atau Manager once Removed (MoR) dengan mengacu pada dokumen yang dihasilkan pada Level I. Apabila tercapai penyelesaian, dokumentasi disampaikan kepada Human Resources dan Business Partner–Industrial Relations (HRBP–IR). Ketidakpatuhan terhadap prosedur dapat dikenakan sanksi kepada pihak terkait.

Jika masalah masih belum terselesaikan

03



Peninjauan oleh Human Resource dan Business Partner–Industrial Relations (HRBP–IR)

Karyawan dapat meminta HRBP–IR untuk meninjau keputusan pada tingkat sebelumnya berdasarkan ketentuan dalam PKB. Apabila permasalahan masih belum terselesaikan, karyawan dapat melanjutkan ke Level IV.

Jika masalah masih belum terselesaikan

04



Penyelesaian Bipartit

Apabila Level I hingga III belum menghasilkan kesepakatan atau penyelesaian, permasalahan dapat dibahas dalam pertemuan bipartit, di mana karyawan diwakili oleh serikat pekerja.





Masyarakat

Pendekatan Kami terhadap Pelibatan Komunitas yang Bertanggung Jawab

Pada tahun 2025, PTVI melanjutkan pendekatan pengelolaan hak asasi manusia yang diterapkan sejak 2024 karena tetap relevan dengan konteks operasional dan dinamika sosial di sekitar wilayah operasi. Pendekatan ini berlandaskan Kebijakan Keberlanjutan dan kebijakan hak asasi manusia yang mengacu pada standar internasional, termasuk IFC Performance Standards, ISO 26000, ICMM, dan Voluntary Principles on Security and Human Rights. Kami memiliki komitmen kebijakan untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia dalam seluruh kegiatan operasional, yang disetujui dan didukung oleh Direksi serta dipantau melalui mekanisme pengawasan internal.

Topik material yang dikelola mencakup hak asasi manusia dan komunitas, keterlibatan dan hubungan dengan masyarakat, dampak ekonomi lokal, akses air bersih, serta permukiman kembali. Pengelolaan dilakukan secara terintegrasi untuk mencegah dan memitigasi dampak negatif sekaligus mendorong dampak sosial yang positif dan berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat dilaksanakan secara terbuka dan partisipatif sejak tahap perencanaan, didukung studi sosial dan lingkungan untuk mengidentifikasi potensi dampak serta penerapan hierarki mitigasi apabila diperlukan.

PTVI juga menyediakan mekanisme pengaduan yang terstruktur dan dapat diakses. Pengaduan yang relevan dengan isu hak asasi manusia ditangani melalui proses uji tuntas (HRDD), termasuk penilaian, tindak lanjut, dan langkah korektif. Tindak lanjut atas pengaduan sebelumnya

diwujudkan melalui penguatan kebijakan, perbaikan mekanisme pengaduan, dan implementasi rencana aksi HAM. Efektivitas pengelolaan topik material dievaluasi secara berkala melalui pemantauan program, kinerja mekanisme pengaduan, serta umpan balik pemangku kepentingan, sebagai bagian dari komitmen kami menjalankan operasional yang transparan, inklusif, dan selaras dengan kepentingan masyarakat.



Penghormatan pada Hak Asasi Manusia

PTVI berkomitmen untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk hak-hak komunitas lokal, sebagai bagian dari penerapan prinsip keberlanjutan dan tata kelola yang bertanggung jawab. Pengelolaan risiko dan dampak HAM dilakukan melalui proses HRDD yang terintegrasi dalam kegiatan operasional, sejalan dengan pendekatan penilaian dampak sosial dan keterlibatan masyarakat.

PTVI juga memastikan mitra bisnis, termasuk pemasok dan kontraktor, menjalankan kegiatan usaha dengan menghormati hak asasi manusia melalui pelatihan berkelanjutan, identifikasi risiko secara transparan, serta penerapan hierarki mitigasi, dengan mengacu pada standar internasional seperti IFC Performance Standards dan Voluntary Principles on Security and Human Rights (VPSHR).

Kebijakan Hak Asasi Manusia kami menjadi landasan dalam memastikan penghormatan, perlindungan, dan pemulihan hak-hak individu dalam seluruh aktivitas operasional.

Hak Asasi Manusia kami:



Dokumen Laporan Investigasi Publik Hak Asasi Manusia:



Pembaruan Implementasi Rencana Aksi Uji Tuntas Hak Asasi Manusia [SASB EM-MM-210a.3]

Menindaklanjuti investigasi independen Human Rights Due Diligence (HRDD) pada 2023, PTVI menyusun Komitmen dan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia untuk merespons temuan serta memperkuat pendekatan pengelolaan HAM. Sepanjang 2025, kami melanjutkan implementasi rencana aksi tersebut pada sejumlah area prioritas, meliputi keterlibatan masyarakat, akses air bersih, perlindungan mata pencaharian, pengelolaan lahan, serta tata kelola keamanan.

Topik	Progres 2025	Langkah Selanjutnya (2026)
Manajemen Lingkungan dan Sosial	PTVI memperkuat mekanisme keterlibatan masyarakat dan penanganan pengaduan yang selaras dengan IFC Performance Standard 5 (IFC-PS). Penguatan ini mencakup peningkatan kapasitas staf, pelaporan rutin kepada manajemen, serta penyempurnaan sistem pelacakan isu melalui <i>Stakeholder Demands and Issues</i> (SDI).	Perangkat pemantauan akan terus ditingkatkan melalui penetapan indikator keberhasilan yang jelas serta penguatan kapasitas internal untuk penanganan isu dan pelaporan yang lebih sistematis. Selain itu, program peningkatan kapasitas akan dilaksanakan bagi unit hubungan pemangku kepentingan guna mendukung keterlibatan yang lebih efektif dan bermakna.
Sorowako: Kompensasi dan Isu Lahan	Melanjutkan penyusunan <i>Land Acquisition--access and Resettlement Framework</i> (LARF) sebagai pedoman proses pengadaan lahan di seluruh wilayah operasional guna memastikan konsistensi implementasi, mencakup penilaian kompensasi, praktik relokasi, serta rencana pemulihan mata pencaharian yang selaras dengan regulasi nasional dan standar internasional. Selain itu, kami telah menyelesaikan kajian diagnostik dan penyusunan <i>corrective action plan</i> (CAP) untuk pengadaan lahan sebelumnya.	Implementasi <i>corrective action plan</i> (CAP) akan mengacu pada LARF yang telah ditetapkan dan diintegrasikan ke dalam perencanaan proyek serta pengelolaan lahan. Upaya ini mencakup pelaksanaan studi sosial-ekonomi terhadap masyarakat terdampak proyek (<i>project affected people/ PAP</i>) dan penyusunan rencana pemulihan mata pencaharian berdasarkan hasil studi tersebut. Seluruh proses akan dilakukan melalui konsultasi dengan PAP.
Asuli: Akses untuk Air Bersih	PTVI melakukan penilaian berbasis hak asasi manusia terkait akses air serta melanjutkan pemantauan kualitas air dengan melibatkan masyarakat terdampak guna mendukung transparansi. Melalui proses ini, kesenjangan yang ada diidentifikasi untuk penyusunan rencana aksi perbaikan yang diperlukan	Perusahaan melaksanakan rencana aksi perbaikan melalui konsultasi dengan masyarakat untuk memastikan akses air yang aman dan berkelanjutan. Upaya ini dilanjutkan dengan penyusunan prosedur standar bagi inisiatif pemantauan air berbasis masyarakat (<i>community-based monitoring/CBM</i>), dengan mengacu pada kerangka Interlaken Group guna memperkuat mekanisme kolaboratif bersama pemangku kepentingan terdampak dalam mengelola dampak HAM terkait kegiatan pertambangan.



Topik	Progres 2025	Langkah Selanjutnya (2026)
Tanamalia: Mata Pencaharian & Konsultasi	Keterlibatan pemangku kepentingan yang terstruktur dan selaras dengan IFC telah dikembangkan, dengan pesan kunci yang jelas untuk menjangkau berbagai kelompok masyarakat. Mekanisme serta saluran pengaduan juga telah dibangun dan disosialisasikan. Rencana akses lahan dan kerangka Tanamalia <i>Coexistence Framework</i> (TCF), di dalamnya termasuk rencana pemulihan mata pencaharian dan manfaat bagi masyarakat lokal, pada dasarnya telah disusun mengacu pada LARF. Konsultasi dengan masyarakat terus dilakukan guna memperoleh dukungan yang luas.	Konsultasi luas dengan masyarakat terkait TCF terus dilanjutkan, dengan fasilitasi Pemerintah Daerah dan Direktorat Konflik Tenurial Kementerian Kehutanan sebagai pihak tepercaya, guna mencapai kesepakatan sebelum dimulainya kembali kegiatan eksplorasi.
Pendekatan Keamanan dan Kebebasan Berekspresi	Pengaturan keamanan untuk kegiatan pengeboran telah diperkuat melalui penyusunan Security Management Plan, prosedur operasional, serta pembaruan penilaian risiko keamanan yang selaras dengan VPSHR dan IFC PS4, dengan turut mempertimbangkan aspek keamanan masyarakat. Pelatihan VPSHR juga telah diberikan kepada personel keamanan di seluruh area operasional dengan dukungan tenaga ahli internasional. Selain itu, Perusahaan tengah mengembangkan Security Management Plan tingkat korporat serta menerapkan prosedur pencegahan perambahan yang selaras dengan IFC PS4 dan PS5 untuk mengelola risiko di kawasan hutan negara.	Tata kelola keamanan akan terus diperkuat melalui pengembangan Security Management Plan tingkat korporat yang selaras dengan Voluntary Principles on Security and Human Rights (VPs) dan IFC Performance Standard 4. Upaya ini mencakup penjaminan kepatuhan dalam pengaturan keamanan, baik oleh pihak swasta maupun publik, melalui peninjauan perjanjian, pelatihan yang terarah, serta penerapan Encroachment Prevention Procedures (EPP) secara efektif, dengan tetap menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia masyarakat.



Pelatihan Hak Asasi Manusia untuk Petugas Keamanan^[GRI 410-1]

PTVI memastikan bahwa pengelolaan keamanan dilaksanakan dengan menghormati hak asasi manusia dan sejalan dengan kebijakan internal, ketentuan nasional, serta prinsip internasional yang relevan, termasuk Voluntary Principles on Security and Human Rights (VPSHR). Seluruh personel keamanan, baik karyawan tetap maupun tenaga alih daya dari Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP), terdaftar dan memiliki kualifikasi resmi sesuai Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa (Gada Pratama dan Gada Madya). Pada tahun pelaporan, total personel keamanan yang terlibat dalam operasional Perseroan berjumlah 668 orang, terdiri dari 41 personel in-house dan 627 personel dari BUJP. Dari jumlah tersebut, sebanyak 33 personel telah mengikuti pelatihan khusus terkait hak asasi manusia yang terintegrasi dalam pelatihan VPSHR.

Pelatihan dilaksanakan dalam pada 3–5 Juni 2025 di Sorowako, dengan cakupan materi meliputi:

- Prinsip-prinsip utama VPSHR, termasuk asesmen risiko, hubungan dengan keamanan publik dan swasta;
- Tanggung jawab perlindungan, penghormatan, dan pemulihan atas dugaan pelanggaran HAM;
- Analisis risiko keamanan dari perspektif dampak terhadap masyarakat dan perusahaan;
- Penerapan skala penggunaan kekuatan (*use of force continuum*) secara proporsional;
- Identifikasi potensi risiko pelanggaran HAM dalam operasi keamanan, termasuk dalam situasi protes atau konflik sosial.

Pelatihan ini bertujuan memperkuat kapasitas personel dalam mengidentifikasi risiko HAM sejak dini, menerapkan pendekatan yang proporsional dalam penggunaan kekuatan, serta memastikan koordinasi yang bertanggung jawab dengan aparat keamanan publik apabila diperlukan.

Relokasi dan Hak atas Tanah serta Sumber Daya^[GRI 14.12.2]

PTVI menyadari bahwa kegiatan operasional perusahaan membutuhkan akses terhadap lahan yang juga dimanfaatkan oleh masyarakat. Itu sebab, kami menerapkan prinsip penghindaran relokasi sebagai pendekatan utama. Apabila relokasi tidak dapat dihindari, PTVI berkomitmen untuk memastikan proses dilaksanakan secara adil, transparan, dan dengan menghormati hak, martabat, serta kesejahteraan masyarakat terdampak.

Pendekatan kami mengacu pada prinsip-prinsip IFC Performance Standard 5 (PS5) tentang Pengadaan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Tidak Sukarela. PTVI bekerja sama dengan masyarakat untuk mengidentifikasi dan memitigasi potensi dampak, dengan menempatkan perlindungan hak atas tanah, pemulihan mata pencaharian, dan perlakuan setara bagi seluruh pihak terdampak sebagai prinsip utama.

Sebagai bagian dari penguatan tata kelola dan memastikan keselarasan dengan praktik terbaik internasional, PTVI telah memulai proses diagnostik terhadap praktik kompensasi dan relokasi pada periode sebelumnya di seluruh wilayah operasional, termasuk di wilayah Sorowako, Bahodopi, dan Pomalaa. Kajian ini bertujuan untuk menilai kesesuaian praktik masa lalu dengan standar yang berlaku, mengidentifikasi kebutuhan tindakan korektif—khususnya terkait penguasaan lahan secara tidak sukarela—agar lebih selaras dengan regulasi dan standar internasional, serta mengidentifikasi area yang

masih perlu ditingkatkan.

Kerangka *Land Acquisition and Resettlement Framework* (LARF) telah disusun sebagai panduan terstruktur dan konsisten dalam pengelolaan proses terkait lahan di seluruh area operasional. Kerangka ini bertujuan memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi pemangku kepentingan, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap regulasi nasional dan standar internasional yang relevan.

Elemen utama dalam kerangka ini meliputi:

1. Penetapan skema kompensasi yang jelas dan konsisten
2. Peninjauan praktik kompensasi masa lalu beserta potensi dampak sosialnya
3. Penguatan transparansi dalam penyampaian temuan kepada pemangku kepentingan
4. Pelaksanaan tindakan perbaikan yang diperlukan
5. Kejelasan pemisahan antara langkah mitigasi dampak dan program investasi sosial
6. Pendorongan proses konsultasi yang inklusif dan terdokumentasi dengan baik

Melalui penerapan kerangka tersebut, PTVI berupaya memastikan bahwa seluruh proses akuisisi lahan dan relokasi dikelola secara bertanggung jawab, selaras dengan prinsip hak asasi manusia, keadilan sosial, dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Keterlibatan Masyarakat

PTVI mengelola keterlibatan dan hubungan dengan komunitas termasuk dalam konteks pasca-relokasi, sebagai bagian dari pengelolaan dampak sosial yang terintegrasi dalam kebijakan keberlanjutan perusahaan. Pendekatan ini dilakukan secara terbuka, bermakna, dan berkelanjutan untuk mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan memulihkan dampak terhadap masyarakat. Pelaksanaannya mencakup kajian sosial, konsultasi dengan masyarakat, serta Program Pemulihan dan Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan yang dirancang untuk mendukung pemulihan mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakat terdampak.

Sebagai bagian dari pengelolaan dampak terhadap masyarakat, kami menyediakan rencana pelibatan pemangku kepentingan serta mekanisme pengaduan yang terstruktur, mudah diakses, dan responsif di seluruh wilayah operasional, yang terintegrasi dengan proses Uji Tuntas Hak Asasi Manusia (Human Rights Due Diligence/HRDD) kami. Setiap pengaduan dicatat, diverifikasi, dan ditindaklanjuti melalui dialog serta tindakan korektif yang proporsional. Efektivitas mekanisme ini dievaluasi secara berkala melalui pemantauan jumlah dan jenis pengaduan, tingkat penyelesaian, serta umpan balik masyarakat, yang menjadi dasar untuk perbaikan berkelanjutan dan penguatan hubungan dengan masyarakat.



Mekanisme Pengaduan Masyarakat^[GRI 2-25]

Untuk mendukung keterlibatan pemangku kepentingan yang bertanggung jawab, PTVI menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya sebagai sarana penyampaian pengaduan, kekhawatiran, maupun dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Mekanisme ini menjadi bagian dari sistem akuntabilitas perusahaan dalam mengelola dampak sosial dan menjaga hubungan yang saling menghormati.^{[GRI 14.10.4][POJK51-F.24]}

Saluran pengaduan tersedia melalui berbagai media, termasuk telepon, kotak pengaduan, surat elektronik dan tertulis, serta

pertemuan koordinasi rutin di tingkat kecamatan. Seluruh pengaduan dicatat dalam Sistem *Stakeholder Demands and Issues* (SDI), ditelaah oleh *Departemen External Relations*, dan ditindaklanjuti sesuai prosedur dengan melibatkan fungsi terkait. Hasil penanganannya lalu dikomunikasikan kembali kepada pelapor sebagai bentuk transparansi, sementara data pengaduan dilaporkan secara berkala kepada Direksi untuk memastikan dukungan manajerial terhadap penyelesaian isu strategis.^[GRI 14.10.4]

Apabila dalam proses penanganan pengaduan ditemukan dampak terhadap hak asasi manusia, PTVI berkomitmen untuk

melakukan langkah pemulihan dan mitigasi secara adil dan efektif, dengan merujuk pada Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia serta panduan ICMM. Pendekatan ini menegaskan komitmen kami terhadap legitimasi, aksesibilitas, keadilan, transparansi, dan pembelajaran berkelanjutan dalam pengelolaan mekanisme pengaduan.^{[GRI 14.10.4][POJK51-F.24]}

Proses Penanganan Pengaduan



Penerima Pengaduan

Pengaduan diterima melalui berbagai saluran dan dicatat untuk proses selanjutnya



Penelaahan Pengeaduan

Pengaduan ditelaah oleh tim terkait untuk menentukan kelayakan tindak lanjut



Tindak Lanjut

Pengaduan yang layak ditangani melalui pendekatan yang sesuai, termasuk dialog atau pelibatan pihak ketiga



Penyelesaian & Verifikasi

Penyelesaian diverifikasi berdasarkan kesepakatan; kasus dinyatakan selesai atau diproses ulang jika muncul pengaduan baru

Pengelolaan Dampak terhadap Masyarakat^{[GRI 413-1][POJK51-F.23]}

PTVI meyakini bahwa keterlibatan yang konstruktif dengan masyarakat sekitar merupakan fondasi keberlanjutan operasional. Kami menerapkan standar dan pedoman internal untuk memastikan keterlibatan dilakukan secara konsisten, inklusif, dan bertanggung jawab sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan. Pendekatan ini bersifat adaptif

sesuai karakteristik sosial, politik, dan lingkungan di setiap wilayah operasi, dengan tetap menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Melalui proses partisipatif, PTVI merancang dan melaksanakan program pengembangan komunitas yang selaras dengan

kebutuhan lokal, termasuk dukungan infrastruktur dasar, akses layanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini memastikan aspirasi masyarakat menjadi bagian dari pertimbangan operasional perusahaan serta mendukung terpeliharanya hubungan jangka panjang dan upaya menjaga *social license to operate* (SLO)

Ringkasan mengenai proses keterlibatan dan asesmen sosial di tiga wilayah operasional disajikan pada tabel berikut. ^{[POJK51-F.23][GRI 413-2][SASB EM-MM-210b.1]}

WILAYAH	JUMLAH DESA TERDAMPAK	PRESENTASE DESA DI WILAYAH OPERASI	PENGELOLAAN DAMPAK DAN BENTUK INVESTASI SOSIAL
SOROWAKO			
Kecamatan Nuha	5	13%	Pengelolaan Pencemaran Udara: Penggunaan filter udara, penerapan teknologi pengurangan emisi karbon, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Pengelolaan Pencemaran Air: Penggunaan kolam sedimentasi limpasan, instalasi pengolahan air limbah, daur ulang limbah cair dan padat, serta pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Pengelolaan Pencemaran Tanah: Reklamasi lahan bekas tambang, daur ulang limbah padat, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Kesempatan Kerja: Peningkatan pendapatan riil masyarakat, pembangunan infrastruktur, serta program ketahanan pangan. Pertumbuhan Penduduk: Pengembangan infrastruktur, program ketahanan pangan, serta pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Perubahan Sosial Budaya: Penguatan nilai sosial dan budaya lokal serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
Kecamatan Wasuponda	6	15%	Program ketahanan pangan, peningkatan pendapatan riil, pembangunan infrastruktur, penguatan nilai sosial dan budaya lokal, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan
Kecamatan Towuti	18	47%	Pengelolaan Pencemaran Udara: Use of air filters; carbon emission reduction technologies; sustainable environmental management. Pengelolaan Pencemaran Air: Pembangunan kolam sedimentasi untuk limpasan air, instalasi pengolahan air limbah, daur ulang limbah cair, serta pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Pengelolaan Pencemaran Lahan: Reklamasi lahan bekas tambang, daur ulang limbah padat, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Kesempatan Kerja: Program ketahanan pangan, peningkatan pendapatan riil, serta pembangunan infrastruktur.

WILAYAH	JUMLAH DESA TERDAMPAK	PRESENTASE DESA DI WILAYAH OPERASI	PENGELOLAAN DAMPAK DAN BENTUK INVESTASI SOSIALA
			Pertumbuhan Penduduk: Pembangunan infrastruktur, program ketahanan pangan, serta pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Perubahan Budaya Lokal: Program penguatan ketahanan sosial dan budaya lokal serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
Kecamatan Malili	9	23%	Pencemaran Udara (debu dari kendaraan operasional): Perbaikan jalan, pembatasan kecepatan kendaraan, pemeliharaan jalan secara rutin, serta penyiraman jalan. Pencemaran Air (potensi kontaminasi): Pengelolaan lingkungan untuk menjaga kualitas air. Kesempatan Kerja: Program ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan riil. Pertumbuhan Penduduk: Pengembangan infrastruktur pendukung, penataan ruang, serta penyediaan layanan dasar Perubahan Budaya: Program penguatan ketahanan sosial dan budaya lokal.
IGP POMALAA			
Kecamatan Pomalaa	12	55%	Pertumbuhan Penduduk dan Perubahan Budaya: Program peningkatan pendapatan riil serta pelestarian nilai sosial dan budaya. Debu dari Kendaraan Operasional: Pemeliharaan jalan secara rutin dan penyiraman jalan. Pengadaan Lahan dari Perkebunan Masyarakat Rentan: Penyusunan dan pelaksanaan <i>Livelihood Restoration Program</i> (LRP).
Kecamatan Baula	10	43%	Pertumbuhan Penduduk dan Perubahan Budaya: Program peningkatan pendapatan riil serta pelestarian nilai sosial dan budaya. Debu dari Kendaraan Operasional: Pemeliharaan jalan secara rutin dan penyiraman jalan. Pengadaan Lahan dari Perkebunan Masyarakat Rentan: Penyusunan dan pelaksanaan <i>Livelihood Restoration Program</i> (LRP).
IGP MOROWALI			
Kecamatan Bungku Timur	10	77%	Pertumbuhan Penduduk dan Perubahan Budaya: Program peningkatan pendapatan riil serta penguatan keberlanjutan sosial dan budaya. Akumulasi Limbah: Inisiatif pengelolaan sampah rumah tangga. Debu dari Kendaraan Operasional: Pemeliharaan jalan secara rutin dan penyiraman jalan.
Kecamatan Bahodopi	3	23%	Pertumbuhan Penduduk dan Perubahan Budaya: Program peningkatan pendapatan riil serta penguatan keberlanjutan sosial dan budaya. Akumulasi Limbah: Program pengelolaan sampah rumah tangga Debu dari Kendaraan Operasional: Pemeliharaan jalan secara rutin dan penyiraman jalan.

Berdasarkan pemantauan kegiatan operasional dan masukan yang diterima melalui mekanisme pengaduan, PTVI mengidentifikasi adanya dampak aktual dan potensi dampak negatif terhadap masyarakat lokal di sekitar wilayah operasi. Dampak tersebut terutama berkaitan dengan aktivitas operasional pertambangan, penggunaan lahan, akses terhadap sumber daya dan mata pencaharian, serta pelaksanaan program sosial dan pasca-relokasi.^[GRI 413-2]

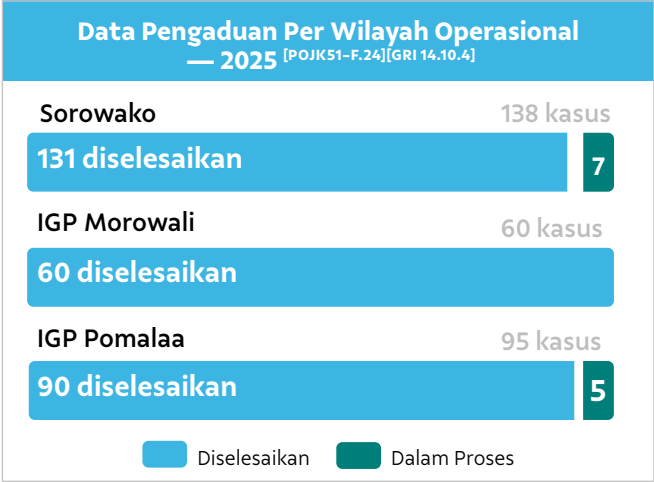
Sepanjang tahun 2025, PTVI menerima total 295 pengaduan dari masyarakat dan pemangku kepentingan terkait berbagai aspek sosial, operasional, dan lingkungan. Dari jumlah tersebut, 138 kasus berasal dari Sorowako, 95 dari IGP Pomalaa, dan 62 dari IGP Morowali.

Di Sorowako, pengaduan didominasi oleh isu sengketa lahan, dampak terhadap properti, ketidakpuasan terhadap kontraktor dan pemasok, serta peluang kerja dan isu lingkungan serta kesehatan. Dari 138 kasus yang diterima, sebanyak 131 kasus telah diselesaikan, dengan tingkat penyelesaian mencapai 95%.

Di IGP Pomalaa, pengaduan terutama berkaitan dengan peluang kerja, sengketa lahan, dampak lingkungan, isu sosial, serta kompensasi. Dari 95 kasus yang diterima, 90 kasus berhasil diselesaikan, mencerminkan tingkat penyelesaian sekitar 95%.

Sementara itu, di IGP Morowali, pengaduan umumnya terkait dengan akses jalan dan air, dampak lingkungan, peluang kerja, serta isu terkait lahan. Seluruh 62 kasus yang dilaporkan telah diselesaikan, dengan tingkat penyelesaian mencapai 100%.

Seluruh pengaduan dikelola melalui mekanisme pengaduan PTVI sebagai saluran komunikasi dua arah yang transparan, untuk memastikan setiap permasalahan ditangani secara tepat waktu dan akuntabel. Setiap kasus ditangani dengan mempertimbangkan konteks spesifiknya melalui komunikasi yang terbuka dan penuh penghormatan dengan para pengadu. Proses penyelesaian senantiasa dievaluasi untuk memastikan keselarasan dengan prinsip hak asasi manusia dan transparansi, sekaligus menghasilkan pembelajaran yang mendukung perbaikan berkelanjutan serta pencegahan terulangnya isu serupa di masa mendatang.^{[POJK51 F-16][GRI 413-2]}



	Sorowako	IGP Morowali	IGP Pomalaa
Dalam Proses	7	0	5
Diselesaikan	131	60	90
Total	138	60	95
Tingkat Resolusi	95%	100%	95%



Pengelolaan Pengaduan Terkait Kebocoran Pipa Minyak Towuti Leak^[POJK51-F.16]



Menindaklanjuti insiden kebocoran pipa minyak yang berdampak pada wilayah Towuti, PTVI menyediakan saluran pengaduan khusus untuk menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari pemangku kepentingan dan masyarakat terdampak.

Melalui mekanisme ini, tercatat sekitar 395 pengaduan yang mencakup berbagai topik, termasuk:

- Akses air bersih dan sumur
- Dampak lingkungan dan keanekaragaman hayati
- Dampak pada sektor pertanian, perikanan, dan peternakan
- Penggunaan lahan dan proses kompensasi
- Isu kesehatan
- Kerusakan jalan, akses, dan infrastruktur
- Kerusakan atau kehilangan properti dan aset
- Gangguan logistik dan operasional
- Koordinasi masyarakat dan aspek keamanan

Setiap pengaduan dicatat, diverifikasi, dan dinilai berdasarkan tingkat urgensinya, kemudian ditindaklanjuti melalui koordinasi antara tim PTVI, instansi pemerintah daerah, dan perwakilan masyarakat. Hingga Desember 2025, status penanganan pengaduan yang diterima adalah 238 selesai, 121 dalam proses, dan 36 belum ditindaklanjuti, dengan rencana tindak lanjut pada awal tahun berikutnya.

Pemantauan Berkelanjutan: PTVI terus melakukan pemantauan kondisi lingkungan, pemulihan kualitas tanah, penyelesaian proses kompensasi, serta keterlibatan dengan masyarakat terdampak guna memastikan seluruh upaya pemulihan berjalan secara transparan dan bertanggung jawab.

Respons dan Upaya Pemulihan Utama

PTVI melaksanakan berbagai langkah respons untuk menangani insiden dan mendukung masyarakat terdampak, meliputi:

Penanganan awal dan pembersihan

- Sumber kebocoran berhasil ditutup
- Kegiatan pembersihan dilakukan di sungai, lahan pertanian, dan area terdampak lainnya
- Upaya pengendalian dilanjanu melalui pemasangan oil boom dan bahan penyerap untuk mencegah penyebaran lebih lanjut

Pemantauan Lingkungan

- Sampel air dari sungai dan Danau Towuti diambil dan diuji oleh laboratorium independen
- Pengukuran kualitas udara dilakukan di permukiman terdampak
- Hasil pengujian menunjukkan bahwa kualitas air dan udara tetap berada dalam baku mutu lingkungan yang berlaku dan aman digunakan

Dukungan Masyarakat dan Respons Kesehatan

- Tim medis melakukan pemeriksaan kesehatan dan memberikan penanganan sesuai kebutuhan
- Masker dan alat pelindung didistribusikan kepada masyarakat terdampak
- Pasokan air bersih sementara disediakan melalui tangki dan fasilitas penyimpanan
- Bantuan pangan dan kebutuhan pokok disalurkan selama masa tanggap darurat

Perbaikan Infrastruktur dan Pemulihan Akses

- Perbaikan dilakukan pada jalan, jembatan, sistem drainase, serta akses menuju lahan pertanian yang terdampak
- Perbaikan infrastruktur sementara dilakukan untuk mendukung mobilitas masyarakat dan kelancaran proses pemulihan

Dukungan Mata Pencarian dan Kompensasi

- PTVI melakukan asesmen lapangan terhadap dampak pada sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan sumber penghidupan lainnya
- Skema kompensasi disusun melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan perwakilan masyarakat
- Pembayaran kompensasi diberikan kepada pihak terdampak yang memenuhi kriteria melalui proses verifikasi dan kesepakatan

Pelibatan dan Koordinasi Pemangku Kepentingan

- Berbagai pertemuan koordinasi dilakukan dengan pemerintah daerah, tokoh desa, kelompok masyarakat, dan instansi teknis
- Konsultasi publik dan sesi informasi diselenggarakan untuk menyampaikan hasil pemantauan, langkah pemulihan, serta mekanisme kompensasi
- Posko pengaduan dan layanan hotline tetap dioperasikan untuk memastikan akses berkelanjutan bagi masyarakat dalam menyampaikan masukan

Program Pemberdayaan Masyarakat^{[POJK51-F.25][GRI 203-1][GRI 203-2]}

PTVI menjalankan inisiatif sosial secara terpadu untuk menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi. Inisiatif ini dirancang tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat ini, tetapi juga untuk mempersiapkan ketahanan ekonomi dan sosial pascatambang. Pelaksanaannya dilakukan melalui kemitraan antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan sebagai fondasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM), PTVI berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi lokal dan kreatif, pengembangan infrastruktur dasar, serta peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Program-program ini ditujukan untuk membuka peluang kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan publik yang esensial.

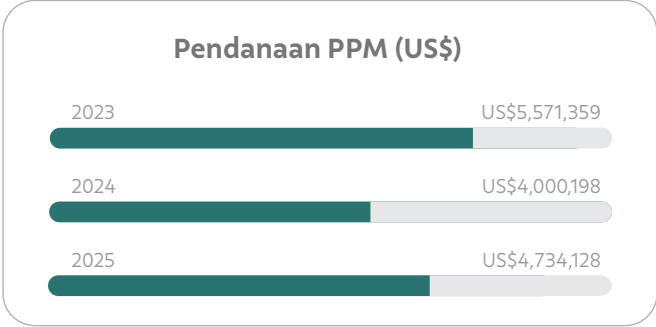
Komitmen PTVI terhadap masyarakat melampaui masa aktif penambangan. Program PPM dirancang untuk mendorong kemandirian masyarakat melalui pengelolaan sumber daya lokal secara berkelanjutan, sehingga masyarakat tetap dapat tumbuh dan berkembang tanpa bergantung pada aktivitas pertambangan di masa depan. Pendekatan ini mencerminkan upaya perusahaan dalam mendukung transisi sosial dan ekonomi yang adil.

Sebagai wujud nyata komitmen tersebut, pada tahun 2025 PTVI mengalokasikan dana sebesar AS\$4.734.128 untuk pelaksanaan PPM di seluruh wilayah operasional. Jumlah ini meningkat 18% dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencerminkan penguatan berkelanjutan terhadap investasi kami dalam pengembangan masyarakat.

Dari sisi alokasi, pendanaan terutama difokuskan pada program pengembangan infrastruktur pendukung PPM sebagai komponen terbesar dari total belanja. Selanjutnya, alokasi juga diarahkan pada program kemandirian ekonomi dan pengembangan sosial budaya, yang menunjukkan pendekatan kami yang seimbang antara pembangunan infrastruktur pendukung dan penguatan keberlanjutan mata pencaharian masyarakat.

Secara geografis, sebagian besar pendanaan masih terkonsentrasi di Sorowako, dengan kontribusi yang mulai berkembang dari IGP Morowali, sementara alokasi di IGP Pomalaa relatif masih terbatas. Distribusi ini mencerminkan perbedaan tahapan pengembangan operasional serta intensitas keterlibatan masyarakat di masing-masing wilayah.

Distribusi Dana PPM (dalam US\$)				
PROGRAM DAN AKTIVITAS	SOROWAKO	IGP POMALAA	IGP MOROWALI	TOTAL
Pendidikan	100.121		236.925	337.046
Kesehatan	261.953		20.594	282.547
Tingkat Pendapatan Riil dan Pekerjaan	329.041	137.850	21.946	350.987
Kemandirian Ekonomi	790.652		9.392	800.044
Sosial Budaya	451.859		91.523	543.382
Sosial Lingkungan	229.722		138.401	368.123
Kelembagaan Komunitas	345.756		2.580	348.336
Pembangunan Infrastruktur	1.473.998		229.665	1.703.663
Total	3.983.102	137.850	751.027	4.734.128



 **US\$4,734M**
naik 18% dari 2024

Realisasi PPM Sorowako

Sepanjang tahun 2025, realisasi investasi Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) PTVI di Sorowako mencapai sebesar US\$3.983.012. Program ini mencakup berbagai bidang, antara lain pendidikan, kesehatan, peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja, kemandirian ekonomi, sosial budaya, pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat, penguatan kelembagaan, serta pembangunan infrastruktur dasar.

Pendidikan

Pada tahun 2025, PPM PTVI di Sorowako pada bidang pendidikan difokuskan pada peningkatan akses dan mutu pembelajaran di wilayah pemberdayaan, dengan total investasi mencapai US\$100.121 atau sekitar 2,5% dari total investasi PPM di Sorowako. Untuk memperluas akses, PTVI menyediakan layanan transportasi sekolah bagi siswa SMP dan SMA di lima desa, yaitu Balambano, Laskap, Pongkeru, Pasi-pasi, dan Harapan, guna mengatasi kendala geografis.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui pemberian beasiswa komunitas bagi 3 penerima jenjang S2 dan 2 penerima jenjang S3, serta program pendidikan vokasional jangka pendek yang diikuti oleh 57 peserta dalam dua batch. Upaya peningkatan mutu pembelajaran juga diperkuat melalui pelatihan bagi 45 guru PAUD se-Kabupaten Luwu Timur, kegiatan edukasi pengelolaan sampah plastik bagi siswa SD dan SMP, serta dukungan sarana pendidikan berupa 15 unit laptop dan bantuan kendaraan praktik bagi SMKN 1 Luwu Timur.

Selain itu, PTVI memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi melalui program KKN Tematik yang melibatkan 155 mahasiswa dari Universitas Hasanuddin dan 192 mahasiswa dari Universitas Andi Djemma (UNANDA) Palopo. Program-program ini diharapkan mempermudah akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran dan relevansi keterampilan masyarakat

Kesehatan

Pada tahun 2025, PPM PTVI di Sorowako pada bidang kesehatan difokuskan pada peningkatan akses layanan kuratif, promotif, dan preventif di wilayah pemberdayaan, dengan total investasi mencapai US\$261.953 atau sekitar 6,6% dari total investasi PPM di Sorowako. Layanan kesehatan bagi masyarakat lokal terus diberikan melalui RS INCO, dengan sekitar 1.263 kunjungan rawat jalan serta dukungan layanan rawat inap dan rujukan. Upaya promotif dan preventif dilakukan melalui berbagai inisiatif, termasuk Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS), skrining penyakit tidak menular, senam jantung sehat, donor darah, serta pengendalian demam berdarah melalui PSN 3M Plus di empat wilayah pemberdayaan.

Intervensi kesehatan juga difokuskan pada peningkatan kualitas layanan dan kapasitas sistem kesehatan, termasuk melalui peningkatan kapasitas pada 9 puskesmas di wilayah pemberdayaan, serta penguatan kesehatan ibu dan anak, khususnya dalam pencegahan stunting dan penanganan ibu hamil dengan kondisi kekurangan energi kronis (KEK). Upaya ini dilakukan melalui pelatihan tenaga kesehatan dan kader posyandu bekerja sama dengan RS Primaya Sorowako dan Dinas Kesehatan Luwu Timur. Selain itu, PTVI mendukung penguatan upaya kesehatan berbasis masyarakat melalui pengembangan UKBM Herbal dan HIPHO (Himpunan Penggiat Herbal Organik), serta program edukatif seperti Sekolah Bersinar bagi siswa tingkat SMA.

Program-program ini dirancang untuk memperkuat akses layanan kesehatan sekaligus mendorong perubahan perilaku hidup sehat di masyarakat, dengan pelaksanaan yang terus dipantau dan disesuaikan berdasarkan kebutuhan di wilayah pemberdayaan monitored and adapted to local needs.

Tingkat Pendapatan Riil dan Pekerjaan

Pada tahun 2025, PPM PTVI di Sorowako pada aspek tingkat pendapatan riil dan pekerjaan difokuskan pada penguatan agribisnis dan UMKM di wilayah pemberdayaan, dengan total investasi mencapai US\$329.041 atau sekitar 8,3% dari total investasi PPM di Sorowako. Program ini dilaksanakan melalui pendekatan terintegrasi, termasuk Program Fasilitasi Kemandirian Masyarakat (agribisnis), P3SRLB, serta PKPM Terfokus di Kecamatan Nuha, Wasuponda, Towuti, dan Malili, dengan pendampingan berupa sekolah lapang pertanian organik, peningkatan kapasitas teknis, penguatan kelembagaan, serta fasilitasi pemasaran.

Di sektor peternakan, penguatan dilakukan pada kelompok sapi di Desa Kawata dan Parumpanai serta ayam kampung Woliko yang melibatkan kelompok disabilitas, melalui dukungan sarana, pelatihan, dan penyusunan SOP bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin. Pengembangan UMKM mencakup pelatihan manajemen produksi, legalitas usaha, dan pemasaran digital, serta partisipasi pameran. Inisiatif lain juga mencakup program konservasi pesisir dan pengolahan hasil laut di Malili bersama YKCLI dan masyarakat setempat. Program-program ini dirancang untuk memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat melalui peningkatan produktivitas dan akses pasar, dengan implementasi yang terus disesuaikan dengan kebutuhan lokal.



Kemandirian Ekonomi

Pada tahun 2025, PPM PTVI di Sorowako pada bidang kemandirian ekonomi difokuskan pada penguatan kapasitas dan daya saing UMKM, dengan total investasi mencapai US\$790.652 atau sekitar 19,9% dari total investasi PPM di Sorowako. Program ini mencakup pelatihan manajemen usaha, keuangan, digital marketing, produksi, dan desain promosi, serta pendampingan legalitas, digitalisasi pembukuan, penguatan kelembagaan, dan akses pemasaran maupun perbankan. Tercatat sebanyak 133 UMKM binaan yang terfasilitasi melalui program ini. Pengembangan ekonomi kreatif juga dilakukan melalui pelatihan anyaman Teduhu dan Sampa Konao di Desa Nuha dan Matano sebagai upaya pelestarian budaya sekaligus peningkatan nilai ekonomi produk lokal.

Melalui Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Mandiri (PKPM) Terfokus, PTVI mendukung pengembangan potensi lokal seperti Wisata Lumbung Padi di Desa Nikkel, Kampung Singkong di Desa Nuha, dan Penangkaran Benih Padi di Desa Tole, yang mencakup studi kelayakan, penguatan BUMDes, infrastruktur pendukung, serta pelatihan teknis. Secara khusus, inisiatif Kampung Singkong difokuskan pada penguatan kapasitas BUMDes agar mampu mengelola program secara berkelanjutan pada masa handover, sekaligus membekali masyarakat dengan keterampilan untuk mengoptimalkan pemanfaatan singkong guna meningkatkan nilai ekonominya.

Dukungan terhadap SDGs Desa juga diberikan di 38 desa melalui berbagai kegiatan ekonomi produktif dan layanan dasar. Selain itu, pengembangan Kawasan Agrowisata Nanas di Desa Tabarano dilakukan melalui penyediaan sarana produksi, nursery, rumah kompos dan maggot, pelatihan budidaya dan pengolahan, serta penguatan legalitas kelompok Pondata. Program-program ini dirancang untuk memperkuat ekosistem ekonomi lokal melalui peningkatan kapasitas, diversifikasi usaha, dan pemanfaatan potensi wilayah

Sosial Budaya

Pada tahun 2025, PPM PTVI di Sorowako pada bidang sosial budaya difokuskan pada penguatan kerukunan antarumat beragama, pelestarian budaya lokal, pengembangan kepemudaan dan olahraga, serta respons sosial kemanusiaan, dengan total investasi mencapai US\$451.859 atau sekitar 11,3% dari total investasi PPM di Sorowako. Dukungan diberikan melalui renovasi dan pembangunan sarana ibadah, serta partisipasi dalam berbagai kegiatan keagamaan seperti Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi, Natal, dan Tahun Baru, termasuk kegiatan Safari Ramadan bersama pemerintah daerah di empat kecamatan dan dukungan pengamanan hari raya. Kegiatan sosial juga mencakup bakti sosial dan penyaluran bantuan kebutuhan dasar bagi masyarakat.

Di sisi budaya dan kepemudaan, PTVI mendukung berbagai kegiatan seperti Hari Jadi dan Hari Perlawanan Rakyat Luwu, pameran budaya Pompessi Luwu, Pesta Panen (Padungku), serta Festival Gau Maraja Leang-Leang. Penguatan kapasitas masyarakat juga dilakukan melalui pelatihan kelembagaan lokal, serta dukungan terhadap berbagai kegiatan olahraga, termasuk Nickel Cup, turnamen sepak bola, voli, dan taekwondo. Selain itu, bantuan tanggap darurat diberikan untuk berbagai kejadian bencana, termasuk banjir, puting beliung, dan kebakaran di wilayah pemberdayaan. Program-program ini dirancang untuk memperkuat kohesi sosial dan identitas budaya masyarakat secara inklusif, dengan pelaksanaan yang terus disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan lokal.

Pemberian Kesempatan kepada Masyarakat untuk Pengelolaan Lingkungan

Pada tahun 2025, PPM PTVI di Sorowako dalam pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk pengelolaan lingkungan difokuskan pada penguatan ekonomi sirkular berbasis masyarakat, dengan total investasi mencapai US\$229.722 atau sekitar 5,8% dari total investasi PPM di Sorowako. Program ini dilaksanakan melalui pendampingan Bank Sampah Unit (18 unit) dan Bank Sampah Sekolah (11 unit) di empat kecamatan, yang mencakup penguatan kelembagaan, pelatihan pemilahan dan daur ulang, pembenahan administrasi, penyediaan sarana termasuk ATM sampah, serta monitoring rutin. Berbagai inovasi seperti kompos, pupuk organik cair (POC), ecobrick, dan optimalisasi biodigester turut dikembangkan untuk meningkatkan nilai ekonomi sampah dan partisipasi masyarakat.

Selain itu, PTVI mendorong penguatan Program Kampung Iklim (ProKlim) melalui pendampingan di 10 desa yang berfokus pada upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, termasuk penguatan kelompok petani dan ketahanan pangan masyarakat. Pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah juga dilakukan melalui TPS3R Baruga di Towuti bekerja sama dengan pemerintah desa dan Bumdesma, serta dukungan pengangkutan sampah masyarakat. Upaya pelestarian lingkungan pesisir di Malili turut dilakukan melalui konservasi terumbu karang, mangrove, dan lamun, serta penguatan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS). Program-program ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan sekaligus mendorong praktik ekonomi sirkular yang berkelanjutan.

Pembentukan Kelembagaan Komunitas

Pada tahun 2025, PPM PTVI di Sorowako pada bidang pembentukan kelembagaan komunitas difokuskan pada penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan desa melalui pendampingan reguler bersama Commit Foundation, dengan total investasi mencapai US\$345.756 atau sekitar 8,7% dari total investasi PPM di Sorowako. Pendampingan ini mencakup pemerintah desa, BUMDes, BUMDesma, serta pelaksana kegiatan SDGs Desa dan program sosial lainnya, dengan fokus pada peningkatan koordinasi, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan program. Penguatan juga dilakukan pada BUMDesma Anatowa dan Wute Monuwo melalui pembenahan AD/ART, penyusunan SOP, standarisasi tarif, perbaikan tata kelola administrasi dan keuangan, serta optimalisasi pengelolaan aset, guna memperkuat kapasitas kelembagaan secara berkelanjutan.

Pembangunan Infrastruktur untuk Mendukung PPM

Sepanjang tahun 2025, PPM PTVI di Sorowako pada bidang infrastruktur difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, dengan total investasi mencapai sekitar US\$1.473.998 atau sekitar 37,0% dari total investasi PPM di Sorowako, menjadikannya sebagai porsi alokasi terbesar. Alokasi ini terutama digunakan untuk distribusi listrik bagi masyarakat lokal Sorowako melalui dukungan terhadap layanan PLN, pembiayaan listrik untuk sekitar 21 fasilitas umum, serta penyediaan sistem distribusi air bersih di delapan desa di Kecamatan Towuti—Timampu, Pekaloa, Matompi, Wawondula, Lioka, Baruga, Asuli, dan Langkea Raya—melalui jaringan terintegrasi berbasis gravitasi dari Danau Towuti. PTVI juga melanjutkan pengembangan kawasan Dongi Ledu-Ledu melalui pendekatan partisipatif, termasuk asesmen sosial, social mapping, dan penyusunan baseline sosial-ekonomi sebagai dasar perencanaan program bersama yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal.



Realisasi PPM IGP Morowali

Sepanjang tahun 2025, total investasi PPM PTVI di IGP Morowali mencapai sebesar US\$751.027. Program ini mencakup berbagai bidang, antara lain pendidikan, kesehatan, tingkat pendapatan riil dan pekerjaan, kemandirian ekonomi, sosial budaya, pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk pengelolaan lingkungan, pembentukan kelembagaan komunitas, serta pembangunan infrastruktur pendukung.

118 ton

Sampah yang dikelola melalui TPS 3R pada tahun 2025

267

Rumah tangga yang dilayani oleh fasilitas sampah TPS 3R

80

Petani yang dijangkau melalui pertanian organik PSRLB (musim tanam ke-8)

Pendidikan

Pada tahun 2025, PPM PTVI di IGP Morowali pada bidang pendidikan difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia di wilayah pemberdayaan, dengan total investasi mencapai US\$236.925 atau sekitar 31,5% dari total investasi PPM di IGP Morowali. Program ini mencakup fasilitasi penelitian dan magang bagi 20 pelajar dan mahasiswa di berbagai departemen, bimbingan Bahasa Inggris bekerja sama dengan Universitas Tadulako bagi 95 peserta dari desa binaan, serta seminar edukatif terkait pencegahan penyalahgunaan zat adiktif bagi pelajar, guru, dan orang tua. Di bidang vokasi, pembangunan Welding Academy bersama Yayasan Al-Khairaat telah diselesaikan dan dipersiapkan untuk diserahkan sepenuhnya kepada pihak yayasan untuk operasional. Selain itu, PTVI telah memfinalisasi kebijakan beasiswa yang selaras dengan pemerintah daerah, dengan implementasi program "Beasiswa Motau" yang direncanakan mulai dijalankan pada tahun 2026. Program ini dirancang untuk memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kesiapan dan kompetensi tenaga kerja lokal.

Kesehatan

Pada tahun 2025, PPM PTVI di IGP Morowali pada bidang kesehatan difokuskan pada pencegahan stunting, peningkatan gizi ibu hamil dan balita, serta penguatan layanan kesehatan dasar di 13 desa pemberdayaan, dengan total investasi mencapai US\$20.594 atau sekitar 2,7% dari total investasi PPM di IGP Morowali. Program ini dilaksanakan melalui kolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali, Puskesmas Bahodopi, Bungku Timur, dan Bahomotefe, serta melibatkan kader kesehatan dan PKK kecamatan. Dukungan juga diberikan melalui penyediaan sarana kesehatan seperti alat ukur bayi dan dewasa serta fetal doppler untuk Poskesdes, Polindes, dan Pustu guna meningkatkan mutu dan jangkauan layanan kesehatan desa. Upaya promotif dan preventif dilakukan melalui Program Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) dan Gerak Sehat yang menjangkau berbagai kelompok masyarakat. Program ini dirancang untuk memperkuat layanan kesehatan dasar sekaligus mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat.

Tingkat Pendapatan Riil dan Pekerjaan

Pada tahun 2025, PPM PTVI di IGP Morowali pada aspek tingkat pendapatan riil dan pekerjaan difokuskan pada penguatan sektor agribisnis melalui Program Pertanian Sehat Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan (PSRLB), dengan total investasi mencapai US\$21.946 atau sekitar 2,9% dari total investasi PPM di IGP Morowali. Program ini mencakup budidaya padi organik metode SRI yang telah memasuki musim tanam ke-7 hingga ke-8, menjangkau 43 penerima manfaat di lahan lebih dari 12 hektar di Ululere, Kolono, Bahomoahi, dan One Pute Jaya, serta pendampingan sayur organik bagi 37 penerima manfaat di hampir 5 hektar lahan di tujuh desa.

Penguatan kapasitas dilakukan melalui skema Training of Trainers (ToT), di mana petani yang telah mengikuti pelatihan

berperan sebagai mentor bagi petani lainnya. PTVI juga mendukung produktivitas melalui penyediaan alat pertanian serta pembenahan saluran irigasi yang meningkatkan efisiensi aktivitas pertanian dan memperluas manfaat bagi masyarakat, bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tengah dan didukung oleh Dinas Pertanian Kabupaten Morowali. Selain itu, dilakukan penguatan kemasan produk beras organik, dan pada Oktober 2025 dilaksanakan re-sertifikasi organik oleh lembaga independen untuk menjaga standar dan daya saing produk. Program ini dirancang untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat ekosistem agribisnis lokal yang berkelanjutan.



Kemandirian Ekonomi

Pada tahun 2025, PPM PTVI di IGP Morowali pada bidang kemandirian ekonomi difokuskan pada penguatan kapasitas dan daya saing UMKM, dengan total investasi mencapai US\$9.392 atau sekitar 1,3% dari total investasi PPM di IGP Morowali. Program ini mencakup pendampingan berkelanjutan bagi UMKM binaan untuk meningkatkan efisiensi, kapasitas produksi, dan strategi usaha, termasuk relokasi rumah produksi serta penguatan perhitungan harga pokok produksi (HPP) di Desa Laroue. Selain itu, dilakukan pendampingan sertifikasi halal untuk produk herbal di Desa Unsongi, seperti VCO, kopi, abon, dan olahan pala, guna memperluas akses pasar dan meningkatkan nilai tambah produk lokal. PTVI juga mendorong inovasi produk seperti Sambal Lumako, memfasilitasi sharing session antar pelaku UKBM herbal, serta membuka akses pelatihan dan jejaring kewirausahaan, termasuk bimbingan teknis hortikultura. Program ini dirancang untuk memperkuat ekosistem usaha lokal yang mandiri, inklusif, dan berkelanjutan.

Sosial Budaya

Pada tahun 2025, PPM PTVI di IGP Morowali pada bidang sosial budaya difokuskan pada penguatan kohesi sosial, karakter generasi muda, dan solidaritas masyarakat, dengan total investasi mencapai US\$91.523 atau sekitar 12,2% dari total investasi PPM di IGP Morowali. Program ini mencakup dukungan terhadap berbagai kegiatan olahraga dan kepemudaan seperti Karang Taruna Cup II, Mateantina Cup 2025, Pekan Olahraga Desa Le-Le & Dampala, Turnamen Bulutangkis Pelajar se-Sulawesi Tengah, serta Glora Taekwondo Indonesia Championship 2025, serta rencana penyelenggaraan Vale Cup sebagai ruang kolaborasi antar desa dan komunitas pemuda. Di bidang keagamaan dan budaya, dukungan diberikan melalui renovasi Masjid Nurul Falah di Desa Onepute Jaya, bantuan tanggap darurat kebakaran di Desa Bahomoteffe, dialog lintas agama bersama FKUB Morowali, serta kegiatan kepemimpinan

pemuda dan festival budaya seperti tari Luminda dan lomba Mehule. Program ini dirancang untuk memperkuat toleransi, kebersamaan, dan keberlanjutan nilai budaya di wilayah pemberdayaan.

Pemberian Kesempatan kepada Masyarakat untuk Pengelolaan Lingkungan

Pada tahun 2025, PPM PTVI di IGP Morowali dalam pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk pengelolaan lingkungan difokuskan pada penguatan pengelolaan sampah berbasis komunitas melalui program TPS 3R di Desa Onepute Jaya yang dikelola oleh LPM Valone Jaya, dengan total investasi mencapai US\$138.401 atau sekitar 18,4% dari total investasi PPM di IGP Morowali.

Program ini mencakup sosialisasi di sekolah, pelatihan pengolahan sampah, penguatan operasional dan regulasi, serta perluasan jejaring multipihak, yang juga didukung oleh pendanaan desa sebesar Rp400 juta dan bantuan sarana dari pemerintah daerah. Pada tahun 2025, sebanyak 118 ton sampah telah dikelola melalui fasilitas TPS 3R dengan jumlah pelanggan mencapai 267 kepala keluarga, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Program ini juga mencakup kunjungan edukatif dari sekolah ke fasilitas TPS 3R untuk memberikan pembelajaran langsung mengenai pengelolaan sampah. Program ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan sekaligus mendorong praktik ekonomi sirkular yang berkelanjutan.

Pembentukan Kelembagaan Komunitas

Pada tahun 2025, PPM PTVI di IGP Morowali pada bidang pembentukan kelembagaan komunitas difokuskan pada penguatan kapasitas organisasi dan tata kelola kelembagaan lokal, dengan total investasi mencapai US\$2.580 atau sekitar 0,3% dari total investasi PPM di IGP Morowali. Program ini mencakup partisipasi dalam Jambore PKK di

Kecamatan Bungku Timur dan Bahodopi sebagai forum konsolidasi dan pengembangan kapasitas kader, sekaligus memperkuat peran kelembagaan perempuan sebagai mitra strategis pembangunan sosial. Selain itu, PTVI memfasilitasi pendampingan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan Program Partisipasi Desa, dengan fokus pada manajemen kegiatan, transparansi keuangan, dokumentasi, dan pelibatan masyarakat. Program ini dirancang untuk mendorong tata kelola kelembagaan yang partisipatif dan akuntabel di tingkat desa.



Pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM

Pada tahun 2025, PPM PTVI di IGP Morowali pada bidang pembangunan infrastruktur difokuskan pada peningkatan layanan dasar dan fasilitas publik melalui pendekatan partisipatif, dengan total investasi mencapai US\$229.665 atau sekitar 30,6% dari total investasi PPM di IGP Morowali. Program ini mencakup realisasi lanjutan anggaran tahun 2024 (US\$38.278), antara lain pembangunan pagar desa sepanjang 225 meter di Desa Kolono, pemasangan 14 lampu jalan tenaga surya di Desa Bahomotefe, serta penyelesaian hall TPS 3R di Desa Dampala sebagai pusat pengelolaan sampah dan edukasi lingkungan berbasis masyarakat.

Melalui Program Partisipasi Desa tahun 2025 di 13 desa dan 2 kecamatan, PTVI bekerja sama dengan Bappeda Morowali dalam melakukan monitoring dan asistensi teknis atas berbagai proyek infrastruktur, antara lain:

- Pembangunan jalan tani di Desa Bahomotefe
- Pembangunan pagar desa di Desa Ululere, Kolono, Bahomoahi, Laroue, dan Nambo dengan progres fisik 3% hingga 22%, terutama pada tahap pondasi dan kolom
- Pembangunan pasar desa di Desa Lele yang saat ini berada pada tahap pemasangan pondasi.
- Pengembangan sarana wisata desa di Desa Unsongi, termasuk penyediaan 10 booth UMKM dan tanggul penahan banjir.
- Pembangunan lapangan futsal di Desa Geresia yang saat ini dalam tahap pengadaan material.
- Pembangunan tanggul sungai dan fasilitas bermain di TK Desa Lahaufu.
- Pembangunan pagar Kantor Camat Bungku Timur.
- Pengadaan sarana dan prasarana kantor pelayanan kecamatan serta lanjutan pengembangan fasilitas kebencanaan di Kecamatan Bahodopi.



Program-program ini dirancang untuk meningkatkan akses layanan dasar sekaligus mendukung pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.

Realisasi PPM di Pomalaa

Sepanjang tahun 2025, PPM PTVI di Blok Pomalaa difokuskan pada penguatan sektor pertanian kakao melalui monitoring alumni Sekolah Lapang (SL) Kakao, dengan total investasi mencapai US\$137.850. Secara umum, petani telah mulai menerapkan teknik budidaya yang diperoleh, khususnya pemangkasan, meskipun sebagian masih memerlukan pendampingan lanjutan untuk memastikan konsistensi praktik. Rumah Pembibitan Kakao di pusat belajar pertanian terpadu Kelurahan Silea, Kecamatan Wundulako, telah rampung dengan sekitar 4.600 benih tertanam. Fasilitas ini dikelola oleh FORKAMA, gabungan lima kelompok tani peserta Sekolah Lapang, yang juga didukung dengan sarana pengendalian hama. Hasil monitoring menunjukkan pertumbuhan bibit berjalan dengan baik.

Sebagai bagian dari persiapan menuju sertifikasi internasional produk kakao, PTVI memfasilitasi pembentukan kelembagaan Internal Control System (ICS) serta pelatihan manajemen pengawasan internal. Tim ICS dibentuk dari anggota FORKAMA yang juga mengelola rumah pembibitan, dengan target sekitar 100 petani di Kelurahan Silea dan desa sekitarnya sebagai calon produsen bersertifikasi. Program ini dirancang untuk memperkuat praktik budidaya berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya saing produk kakao lokal.

Bersama Masyarakat Merawat Ekosistem Pesisir Malili

Kami melaksanakan Program Konservasi Pesisir Laut Malili secara bertahap sebagai bagian dari komitmen menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut. Pelaksanaan program difokuskan pada penguatan koordinasi multipihak, persiapan teknis, serta implementasi awal kegiatan restorasi yang melibatkan masyarakat pesisir, sehingga upaya konservasi tidak hanya berbasis intervensi teknis tetapi juga didukung tata kelola kolaboratif dan partisipasi komunitas.

Salah satu kegiatan utama pada periode ini adalah monitoring transplantasi terumbu karang untuk menilai kondisi media tanam, tingkat kelangsungan hidup fragmen, serta stabilitas struktur transplantasi. Hasil pemantauan menjadi dasar evaluasi teknis guna memastikan metode yang digunakan sesuai dengan karakteristik perairan pesisir Malili dan mendukung keberhasilan rehabilitasi terumbu karang secara berkelanjutan.

Program ini juga disertai sosialisasi kepada masyarakat pesisir guna meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya perlindungan mangrove, lamun, dan terumbu karang, sekaligus mendorong keterlibatan aktif dalam menjaga ekosistem pesisir. Koordinasi dengan Yayasan Konservasi Laut Cendrawasih Indonesia (YKCLI) dilakukan untuk memastikan kesiapan implementasi dan pendampingan kelompok masyarakat.

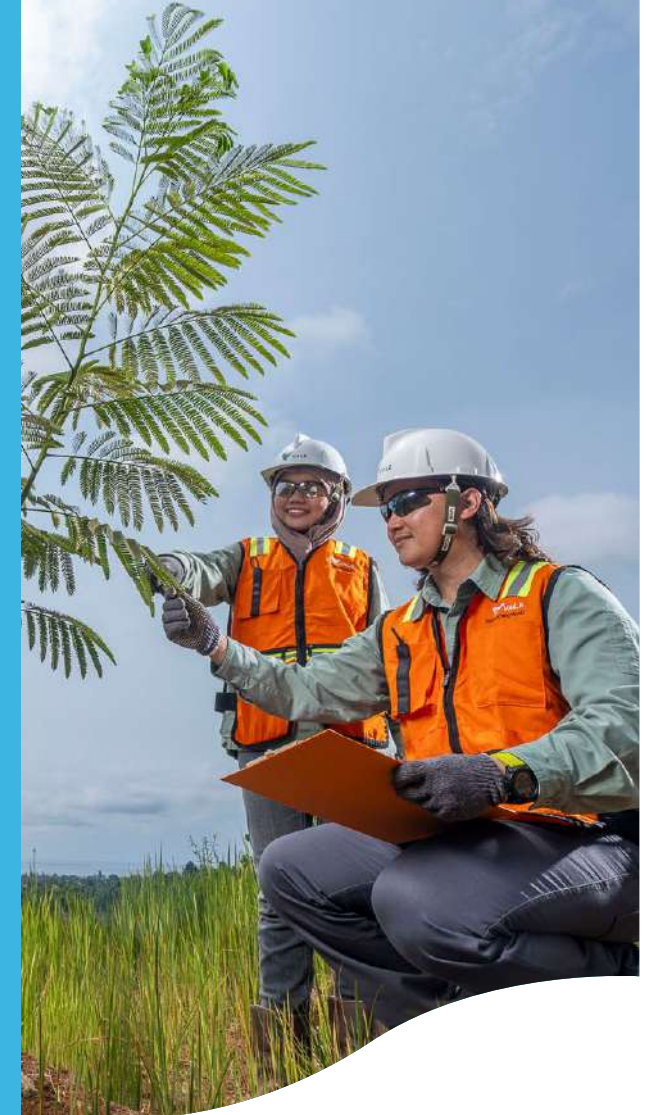
Secara keseluruhan, program mencakup rehabilitasi mangrove, lamun, dan terumbu karang melalui pembibitan, penanaman, pembangunan nursery, serta monitoring berkala, yang diperkuat dengan peningkatan kapasitas masyarakat, pembentukan POKMASWAS, dan kajian oseanografi sebagai dasar pengelolaan pesisir yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Menguatkan Ketahanan Pangan melalui Pertanian Organik

Perjalanan program pertanian organik PTVI Indonesia IGP Morowali telah memasuki musim tanam ke-8 pada tahun 2025. Melalui Program Pertanian Sehat Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan (PSRLB), kami berupaya meningkatkan pendapatan riil dan kesempatan kerja masyarakat di wilayah pemberdayaan. Program ini mendorong praktik pertanian organik melalui metode System of Rice Intensification (SRI) yang menjangkau sekitar 80 petani melalui budidaya padi dan sayuran organik.

Melalui PSRLB, PTVI tidak hanya mendorong praktik budidaya, tetapi juga menyiapkan ekosistem pendukung yang komprehensif. Penguatan kapasitas petani dilakukan secara berkelanjutan melalui pendekatan Training of Trainer (ToT), sehingga alumni pelatihan dapat menjadi tutor sebaya bagi petani lain. Pendekatan ini mendorong transfer pengetahuan secara horizontal di tingkat komunitas, sekaligus memperkuat kemandirian petani dan memperluas penerapan praktik pertanian berkelanjutan di desa-desa binaan.

Kami juga mendukung pengadaan saluran drainase, mesin pemotong rumput, mesin pencacah, pompa air, serta penguatan kemasan produk beras organik untuk meningkatkan nilai tambah dan akses pasar. Pada Oktober 2025 dilakukan proses re-sertifikasi organik oleh lembaga sertifikasi independent untuk memperkuat fondasi ekosistem agribisnis lokal yang lebih kredibel sekaligus memastikan produk pertanian binaan tetap memenuhi standar organik yang berlaku. Melalui pendekatan pendampingan yang berkelanjutan, PSRLB menjadi salah satu pilar penting dalam mendorong ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi masyarakat di wilayah pemberdayaan.





Meningkatkan Nilai Tambah Kakao Lokal melalui Pelatihan Pengolahan

Sebagai bagian dari implementasi Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM), PTVI melalui IGP Pomalaa menyelenggarakan pelatihan pengolahan kakao bagi masyarakat di wilayah pemberdayaan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan petani dan pelaku usaha lokal dalam mengolah biji kakao menjadi produk bernilai tambah, sekaligus memperkuat daya saing komoditas kakao lokal.

Pelatihan yang dilaksanakan selama dua hari ini mencakup seluruh tahapan proses produksi, mulai dari fermentasi, pengeringan, sortasi, pemanggangan, pengupasan, penghalusan, hingga tempering, pencetakan, dan pengemasan produk coklat. Selain itu, peserta juga dibekali dengan pengetahuan terkait pengemasan dan strategi pemasaran untuk mendukung akses pasar yang lebih luas. Program ini difasilitasi oleh instruktur berpengalaman dan dirancang untuk memberikan pemahaman praktis yang dapat langsung diterapkan oleh peserta.

Melalui pelatihan ini, masyarakat didorong untuk bertransformasi dari penjual bahan mentah menjadi produsen produk olahan dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Pendekatan ini sejalan dengan upaya PTVI dalam mendorong pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas dan nilai tambah komoditas unggulan daerah.

“Selama ini kami hanya menjual biji kakao mentah. Dengan adanya pelatihan ini, kami belajar mengolahnya menjadi produk jadi yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Ini membuka wawasan baru bagi kami sebagai petani,”

— Rahmad, Ketua Kelompok Forum Kakao Mandara





Tentang Laporan Ini

Tentang Laporan Ini

Laporan Keberlanjutan ini menegaskan komitmen PTVI terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola isu-isu keberlanjutan yang paling material sepanjang tahun 2025. Melalui laporan ini, kami berupaya memberikan gambaran yang menyeluruh kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk karyawan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat sipil, investor, pelanggan, pemasok, dan pemerintah, mengenai upaya serta capaian kami dalam menjalankan operasi yang bertanggung jawab.

Laporan ini menggambarkan perjalanan keberlanjutan Perusahaan dengan menyoroti pendekatan strategis dan tata kelola yang diterapkan. Di dalamnya, kami juga menjabarkan langkah-langkah nyata yang telah dilakukan untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengatasi berbagai tantangan, melindungi lingkungan, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi.

Sebagai bentuk akuntabilitas, Laporan Keberlanjutan ini telah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris sebagai organ tata kelola tertinggi yang mengawasi aspek keberlanjutan di perusahaan. Selain itu, laporan ini telah melalui proses penjaminan (assurance) eksternal oleh pihak independen, PT Sejahtera Rambah Asia Indonesia, sesuai dengan persetujuan Direksi. Proses verifikasi tersebut dilaksanakan pada 1–21 April 2026 tanpa adanya benturan kepentingan.^{[GRI 2-5][GRI 2-14]}

Prinsip Pelaporan

Laporan Keberlanjutan untuk tahun fiskal 2024 disusun dengan mengacu pada kerangka kerja, peraturan, dan standar berikut:

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik;

Standar Global Reporting Initiative (GRI) 2021;

GRI 14: Sektor Pertambangan 2024;

Sustainability Accounting Standards Board (SASB) Metals and Mining Standard 2021;

MSCI (digunakan sebagai referensi untuk indikator terkait pengungkapan);

Sustainalytics (digunakan sebagai referensi untuk indikator terkait pengungkapan);

International Council on Mining and Metals (ICMM) (digunakan sebagai referensi untuk indikator terkait pengungkapan).

Ruang Lingkup dan Batasan Pelaporan

Laporan keberlanjutan ini menyajikan gambaran komprehensif mengenai aktivitas operasional PTVI di seluruh unit bisnis. Data utama berasal dari wilayah Sorowako, serta dilengkapi dengan data dari IGP Morowali dan IGP Pomalaa.^[GRI 2-2]

Laporan ini mencakup data dan informasi sepanjang periode 1 Januari hingga 31 Desember 2025, dan merupakan laporan keberlanjutan kami yang ke-15. Untuk memastikan penyajian data yang semakin akurat, andal, dan selaras dengan standar

pelaporan yang berlaku, kami melakukan sejumlah penyesuaian (restatement) terhadap data pada laporan sebelumnya. Penyesuaian ini merupakan bagian dari komitmen kami terhadap peningkatan kualitas data dan praktik pelaporan yang berkelanjutan.^{[GRI 2-3][GRI 2-4]}

Penyesuaian (restatement) dilakukan pada beberapa aspek berikut:

1. Data Emisi: pembaruan dilakukan berdasarkan hasil audit tahun 2026 yang meningkatkan akurasi perhitungan Scope 1 dan Scope 2.
2. Data Energi: penyesuaian dilakukan untuk memastikan konsistensi metodologi dan keselarasan dengan data emisi.
3. Rehabilitasi DAS: data tahun 2024 diperbarui untuk mencerminkan perkembangan dan verifikasi terkini.
4. Data Finansial: diselaraskan dengan Laporan Keuangan yang telah diaudit.

Informasi dalam laporan mencakup data kualitatif dan kuantitatif yang menggambarkan kebijakan, inisiatif, dan capaian PTVI dalam aspek keberlanjutan. Data numerik disampaikan dalam satuan metrik menggunakan Bahasa Indonesia, kecuali dinyatakan lain. Dalam menyusun laporan ini, kami mengacu pada Standar GRI 2021 dengan menerapkan prinsip-prinsip pelaporan seperti akurasi, keseimbangan, kejelasan, perbandingan, kelengkapan, konteks keberlanjutan, ketepatan waktu, dan dapat diverifikasi. Kami juga melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses penetapan isi laporan melalui penilaian materialitas, agar laporan mencerminkan isu-isu yang relevan dan signifikan bagi keberlanjutan bisnis PTVI.

PTVI sangat menghargai setiap masukan dan tanggapan dari para pembaca Laporan Keberlanjutan ini. Kami mendorong para pembaca dan pengguna laporan untuk menyampaikan saran, umpan balik, pendapat, maupun wawasan lainnya yang dapat membantu meningkatkan kualitas pelaporan keberlanjutan kami.

Untuk memudahkan partisipasi Anda, kami menyediakan Lembar Umpan Balik di bagian akhir laporan. Kontribusi Anda sangat berarti dan akan berperan penting dalam mendukung perbaikan berkelanjutan laporan kami di masa mendatang. Mohon kirimkan lembar umpan balik yang telah diisi melalui surat elektronik ke:^[GRI 2-3]

ptvicommunications@vale.com

Tanggapan Terhadap Umpan Balik Laporan Keberlanjutan Tahun Sebelumnya ^[POJK51 G.3]

Berdasarkan hasil lembar umpan balik, para pembaca menilai bahwa Laporan Keberlanjutan PTVI telah memuat informasi yang bermanfaat serta disajikan secara sistematis dan mudah dipahami. Namun demikian, kami juga menerima sejumlah saran perbaikan, antara lain perlunya penjelasan yang lebih mendalam mengenai pengelolaan lingkungan pascatambang, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta kontribusi perusahaan terhadap pengembangan masyarakat dan negara.

Selain itu, pemangku kepentingan juga mengusulkan agar PTVI memperluas pengungkapan terkait rehabilitasi daerah

aliran sungai (DAS) di luar wilayah konsesi, penggunaan energi terbarukan, serta inisiatif uji coba penggunaan kendaraan listrik dan biodiesel dalam upaya menuju netralitas karbon.

Menanggapi hal tersebut, dalam Laporan Keberlanjutan tahun 2025 ini PTVI memperkuat pengungkapan mengenai inisiatif lingkungan, termasuk strategi dekarbonisasi, pengelolaan energi dan air, serta program reklamasi dan rehabilitasi lahan. Kami juga menambahkan informasi yang lebih komprehensif mengenai aspek keselamatan kerja, serta kontribusi sosial dan ekonomi perusahaan bagi masyarakat sekitar.

Kami berterima kasih atas partisipasi dan perhatian seluruh pemangku kepentingan, dan akan terus mendorong komunikasi terbuka untuk meningkatkan kualitas laporan di tahun-tahun mendatang.



Pengungkapan Topik Material

Dalam Laporan Keberlanjutan 2025, PTVI tidak melakukan penilaian materialitas secara menyeluruh dari awal, melainkan melakukan tinjauan materialitas untuk menegaskan kembali relevansi topik material yang telah diidentifikasi sebelumnya, sehingga tetap mencerminkan dampak aktual dan potensial kami yang paling signifikan terhadap ekonomi, lingkungan,

dan masyarakat, serta ekspektasi pemangku kepentingan yang terus berkembang seiring dengan perkembangan regulasi, ekspansi proyek di Pomalaa dan Bahodopi, serta perubahan dalam konteks operasional kami; tinjauan ini dilakukan dengan mengacu pada GRI Universal Standards 2021 dan mempertimbangkan berbagai sumber masukan, termasuk

catatan pengaduan kami, penilaian dampak dan risiko internal, serta perkembangan eksternal yang relevan terhadap sektor pertambangan nikel, sehingga memastikan bahwa pengungkapan keberlanjutan kami tahun 2025 tetap relevan, berbasis dampak, dan selaras dengan proses tata kelola serta manajemen risiko kami.

No	Topik Material	Pengungkapan GRI	Pengungkapan SASB
1	Waste and Water Management	GRI 3: Topik Material 2021 • GRI 303: Air dan Limbah 2018 • GRI 306: Limbah 2020 • GRI 14: Topik 14.7 Manajemen Air • GRI 14: Topik 14.6 Manajemen Limbah	Pengelolaan Air: EM-MM-140a.1 • EM-MM-140a.2 Pengelolaan Limbah & Bahan Berbahaya: EM-MM-150a.4 • EM-MM-150a.5 • EM-MM-150a.6 • EM-MM-150a.7 • EM-MM-150a.8 • EM-MM-150a.9 • EM-MM-150a.10 Pengelolaan Fasilitas Penyimpanan Tailing: EM-MM-540a.1 • EM-MM-540a.2 • EM-MM-540a.3
2	Low Emission Production	GRI 3: Topik Material 2021 • GRI 302: Energi 2016 • GRI 305: Emisi 2016	Emisi Gas Rumah Kaca: EM-MM-110a.1 • EM-MM-110a.2 Kualitas Udara: EM-MM-120a.1 Manajemen Energi: EM-MM-130a.1
3	Land Use Management	• GRI 3: Topik Material 2021 • GRI 101: Keanekaragaman Hayati 2024 • GRI 304: Keanekaragaman Hayati 2016 • GRI 14: Topik 14.8 Penutupan dan Rehabilitasi • GRI 14: Topik 14.12 Hak atas Tanah dan Sumber Daya	Dampak Keanekaragaman Hayati: EM-MM-160a.1 • EM-MM-160a.2 • EM-MM-160a.3
4	Local Community	• GRI 3: Topik Material 2021 • GRI 413: Komunitas Lokal 2016 • GRI 411: Hak-Hak Masyarakat Adat 2016 • GRI 410: Praktik Keamanan 2016 • GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung 2016 • GRI 204: Praktik Pengadaan 2016 • GRI 14: Topik 14.10 Komunitas Lokal • GRI 14: Topik 14.11 Masyarakat Adat • GRI 14: Topik 14.9 Dampak Ekonomi • GRI 14: Topik 14.25 Daerah yang Terdampak Konflik	Keamanan, Hak Asasi Manusia & Hak-Hak Masyarakat Adat: EM-MM-210a.1 • EM-MM-210a.2 • EM-MM-210a.3 Hubungan Masyarakat: EM-MM-210b.1 • EM-MM-210b.2
5	Well-being & Inclusion	• GRI 3: Topik Material 2021 • GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2018 • GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan 2016 • GRI 401: Ketenagakerjaan 2016 • GRI 402: Hubungan Kerja/Manajemen 2016 • GRI 405: Keragaman dan Kesempatan yang Sama 2016 • GRI 406: Non-diskriminasi 2016 • GRI 407: Kebebasan Berserikat 2016 • GRI 408: Pekerja Anak • GRI 409: Kerja Paksa • GRI 14: Topik 14.20 Kebebasan Berserikat	Praktik Ketenagakerjaan: EM-MM-310a.1 • EM-MM-310a.2 Kesehatan & Keselamatan Kerja: EM-MM-320a.1
6	Business Integrity	• GRI 3: Topik Material 2021 • GRI 205: Anti-Korupsi 2016 • GRI 206: Perilaku Anti-Persaingan 2016 • GRI 207: Pajak 2019 • GRI 415: Kebijakan Publik 2016 • GRI 418: Privasi Pelanggan 2016 • GRI 14: Topik 14.22 Anti-Korupsi • GRI 14: Topik 14.23 Pembayaran kepada Pemerintah	Etika Bisnis & Transparansi: EM-MM-510a.1 • EM-MM-510a.2

Kontribusi Kami Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Melalui keanggotaan dan inisiatif keberlanjutan: *Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD)*, PT Vale turut serta merancang dokumen kontribusi bisnis dalam mendukung TPB.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS	BAPPENAS METADATA		PT VALE'S SUPPORT		
	Target	Indicator	Target	Strategy	Achievements
2. Zero Hunger 	Mengakhiri segala bentuk malnutrisi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional terkait stunting dan wasting pada anak di bawah usia 5 tahun, serta memenuhi kebutuhan gizi remaja putri, ibu hamil dan menyusui, serta lansia.	Prevalensi stunting pada anak di bawah lima tahun	Menurunkan angka stunting di Kabupaten Luwu Timur menjadi 14% dan mendukung generasi muda yang sehat dan produktif.	Melaksanakan intervensi gizi terintegrasi dan penghidupan berkelanjutan melalui program Genzi dan pertanian masyarakat.	- Mendukung 43 petani dalam budidaya padi organik di lahan 12 hektare dan 37 petani dalam budidaya sayuran organik di sekitar 5 hektare. - Melanjutkan implementasi gerakan Genzi untuk pencegahan stunting dan pemenuhan gizi.
3. Good Health and Well-being 	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko finansial, akses terhadap layanan kesehatan esensial yang berkualitas serta akses terhadap obat dan vaksin yang aman, efektif, berkualitas dan terjangkau bagi semua.	Cakupan layanan kesehatan esensial	Memastikan akses universal terhadap perlindungan kesehatan dan memperkuat kinerja kesehatan dan keselamatan kerja.	Menerapkan cakupan perlindungan kesehatan wajib, layanan kesehatan preventif, dan memperkuat manajemen K3.	100% kepesertaan BPJS Kesehatan bagi karyawan. 100% kepesertaan BPJS Kesehatan bagi karyawan kontraktor, mitra dan vendor. - Nol fatalitas terkait pekerjaan. - Melanjutkan program pemantauan kesehatan bagi karyawan dan kontraktor.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS	BAPPENAS METADATA		PT VALE'S SUPPORT		
	Target	Indicator	Target	Strategy	Achievements
5. Gender Equality 	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan di mana pun.	Kerangka hukum yang mendorong kesetaraan gender	Meningkatkan jumlah karyawan perempuan dan karyawan penyandang disabilitas.	Menerapkan Piagam DEI dan memperkuat rekrutmen setara, pengembangan kepemimpinan dan program inklusi.	- Sosialisasi DEI dilaksanakan. 361 karyawan perempuan (12,1%) dari total tenaga kerja. 131 perempuan dalam peran kepemimpinan (17,2%). 50% keterwakilan perempuan di Dewan Komisaris. 313 karyawan perempuan berpartisipasi dalam pelatihan untuk mendukung pengembangan kapabilitas perempuan.
6. Clean Water and Sanitation 	Meningkatkan kualitas air dengan mengurangi pencemaran, menghilangkan pembuangan limbah dan meminimalkan pelepasan bahan kimia serta material berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah dan secara signifikan meningkatkan daur ulang serta penggunaan kembali yang aman secara global.	Proporsi air limbah yang diolah dengan aman	Menjaga kepatuhan kualitas air limbah dan memperkuat pengelolaan air yang bertanggung jawab di seluruh area operasi.	Melaksanakan pemantauan kualitas air, pengolahan air limbah, pengelolaan sedimentasi, dan memperkuat pengelolaan pembuangan air yang bertanggung jawab.	89,7 juta m³ air buangan dari operasi Sorowako dikelola melalui sistem pembuangan terkendali. 113.251 m³ air buangan dari IGP Morowali dipantau selama operasi awal. - Pemantauan parameter utama (TSS, Cr, Cr⁶⁺, Fe, Ni) tetap berada dalam batas regulasi di seluruh titik pemantauan.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS	BAPPENAS METADATA		PT VALE'S SUPPORT		
	Target	Indicator	Target	Strategy	Achievements
7. Affordable and Clean Energy 	Memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk penyediaan layanan energi modern dan berkelanjutan bagi semua di negara berkembang.	Kapasitas energi terbarukan terpasang	Energi terbarukan untuk operasi dengan 100% pembangkitan energi bersih pada 2030.	Mengoptimalkan energi bersih, stabilitas listrik, pemanfaatan panas buangan, tenaga surya dan konversi bahan bakar.	- Pangsa energi terbarukan Sorowako sebesar 30,02%. - IGP Morowali: 13.498 GJ, 31.06% energi terbarukan. - IGP Pomalaa: 8.422 GJ, 28.82% energi terbarukan.
10. Reduced Inequality 	Menjamin kesempatan yang setara dan mengurangi ketimpangan.	Proporsi pelanggaran HAM yang ditangani	Mendorong inklusi, partisipasi lokal dan kesadaran HAM.	Melaksanakan kampanye kesadaran HAM dan memberdayakan masyarakat adat melalui program pembangunan terpadu.	2.486 karyawan lokal (83,3%) dari tenaga kerja. 207 keluhan dikelola di Sorowako, 80 di IGP Pomalaa, dan 86 di IGP Morowali melalui mekanisme pengaduan. - Melanjutkan program kesadaran HAM dan pemberdayaan masyarakat yang inklusif.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS	BAPPENAS METADATA		PT VALE'S SUPPORT		
	Target	Indicator	Target	Strategy	Achievements
11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan 	Mengurangi dampak bencana dan melindungi masyarakat rentan.	Jumlah masyarakat terdampak bencana	Mendukung pemulihan wilayah terdampak bencana dan memperkuat ketahanan masyarakat.	Mendukung masyarakat tangguh melalui tanggap darurat, infrastruktur partisipatif dan program pemberdayaan.	- US\$4,73 juta dialokasikan untuk PPM (+18,3%). - Lebih dari 300 rumah tangga dan sekitar 21 fasilitas publik didukung melalui program subsidi listrik. 13 desa terlibat dalam pembangunan infrastruktur partisipatif.
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab 	Kelola bahan kimia dan limbah sepanjang siklus hidupnya dengan cara yang ramah lingkungan, dan kurangi secara signifikan polusi dan limbah kimia ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk.	Limbah B3 yang dihasilkan dan diolah	Mengurangi limbah B3 dan meningkatkan pemanfaatan/ pengolahan yang aman.	Meningkatkan efisiensi sumber daya, mengurangi timbulan limbah dan meningkatkan pemulihan/daur ulang.	9.967,65 ton total limbah dihasilkan. - Komposisi limbah: 75% non-B3, 25% B3. 3.120,18 ton (44,4%) limbah non-B3 dialihkan. 1.246,57 ton limbah B3 dipulihkan/ didaur ulang. - Timbulan limbah B3 turun 9,43% dan intensitas limbah membaik 12,5% dari 2024.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS	BAPPENAS METADATA		PT VALE'S SUPPORT		
	Target	Indicator	Target	Strategy	Achievements
13. Penanganan Perubahan Iklim 	Integrate climate mitigation into strategies and planning	GHG inventory and annual emissions	Move toward carbon-neutral operations by 2050; 33% GHG reduction by 2030.	Optimize energy, lower-carbon fuels, electrification, rehabilitation and reforestation.	• Penurunan 2,9% intensitas emisi GRK. • Penurunan 5,5% emisi SO₂. • Peningkatan 6,8% intensitas SO₂. • Penurunan 26,4% emisi partikulat.
15. Ekosistem Daratan 	Menjamin konservasi, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan dan perairan darat beserta jasa lingkungannya, khususnya hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering.	Luas kawasan hutan sebagai proporsi total daratan / kemajuan konservasi dan restorasi ekosistem	Melindungi keanekaragaman hayati dan memulihkan ekosistem terdampak operasi melalui program konservasi dan rehabilitasi.	Melaksanakan konservasi keanekaragaman hayati, reklamasi progresif, restorasi ekosistem, dan rehabilitasi pascatambang.	• Mengonservasi dan menanam kembali 72.296 pohon lokal, endemik dan dilindungi, sekitar meningkat 6% dari 2024. • Melanjutkan upaya konservasi satwa liar melalui program pengelolaan spesies. • Reklamasi progresif dan rehabilitasi diterapkan di seluruh area operasi yang terganggu.

Tabel Data

06 Tentang PTVI

Posisi dan Kinerja Keuangan (dalam ribuan US\$) 2023 – 2025^[POJK51-C.3]

Data Keuangan	2025	2024	2023	Varians	
				Nominal	%
Total Aset	3.345.847	3.176.528	2.925.999	169.319	5,33%
Total Liabilitas	570.771	443.752	361.462	127.019	28,62%
Total Ekuitas	2.775.076	2.732.776	2.564.537	42.300	1,55%
Pendapatan	990.195	950.388	1.232.263	39.807	4,19%
Laba Bersih	76.063	57.761	274.334	18.302	31,68%

Pendapatan Usaha (dalam ribuan US\$) berdasarkan Pembeli 2023–2025^[POJK51-B.1]

Customer	2025	2024	2023	Variance (2025:2024)	
				Nominal	%
Vale Canada Limited	711.475	760.201	985.812	(48.726)	-6,41%
Sumitomo Metal Mining Co., Ltd	177.109	190.187	246.451	(13.078)	-6,88%
Total	888.584	950.388	1.232.263	(61.804)	-6,50%

Target dan Realisasi Produksi serta Penjualan Nikel Matte (Ton) 2023–2025 [POJK51-B.1][POJK51-F.2]

Description	2025	2024	2023	Variance	
				Nominal	%
Produksi					
Target	71.234	70.805	-	429	0,61%
Realisasi	72.027	71.311	70.728	716	1,00%
Penjualan					
Target	72.234	71.797	-	437	0,61%
Realisasi	73.093	72.625	70.108	468	0,65%

Nilai Ekonomi Langsung yang Dihasilkan, Didistribusikan, dan Ditahan (dalam ribuan US\$) 2023–2025

	2025	2024	2023	Variance	
				Nominal	%
Nilai Ekonomi yang Dihasilkan					
Pendapatan Usaha	990.195	950.388	1.232.263	39.807	4%
Pendapatan Lainnya	3.922	3.719	823*	203	5%
Total Pendapatan	994.117	954.107	1.233.086*	3.922	3,719
Nilai Ekonomi yang Didistribusikan					
Biaya Operasional	638.007	785.160*	550.958*	48.841	8%
Gaji dan Tunjangan Karyawan	101.002	95.254	87.436	5.748	6%
Pembayaran kepada Penyedia Modal	34.607	0	60.093	34.607	100%

	2025	2024	2023	Variance	
				Nominal	%
Pembayaran Pajak kepada Pemerintah	170.419	202.242	204.617	-35.607	-18%
Investasi Masyarakat	3.983	3.912*	4.291	358	9%
Total Economic Value Distributed	944.234948.018	1.082.656*	907.395*	53.947	6%
Nilai Ekonomi yang Ditahan (Nilai Ekonomi yang Dihasilkan – Nilai Ekonomi yang Didistribusikan)					
Total Nilai Ekonomi yang Didistribusikan	49.883	73.693*	361.444*	-13.937	-22%

*Penyajian kembali (*restatement*) atas angka tahun sebelumnya dilakukan untuk menyesuaikan dengan metodologi Laporan Keuangan serta memastikan konsistensi dan keterbandingan antarperiode pelaporan

07 Pengelolaan Keberlanjutan

Total Pemasok berdasarkan Kategori ^[POJK51-C.3]

Description	2025		2024		2023	
	Total	%	Total	%	Total	%
Domestik	907	85%	783	77%	787	83%
Internasional	165	15%	235	23%	163	17%
TOTAL	1.072	100%	1.018	100%	950	100%

Biaya Pengadaan berdasarkan Kategori Pemasok (US\$) ^[POJK51-C.3]

Deskripsi	2025		2024		2023	
	Total	%	Total	%	Total	%
Domestik	895.424.509,35	90%	727.776.418.254	91%	723.529.595,03	86%
Internasional	97.254.721,73	10%	68.768.362,08	9%	119.703.373,33	14%
TOTAL	992.679.231,08	100%	796.544.780,33	100%	843.232.968,36	100%

08 Tata Kelola

Penanganan Laporan Pelanggaran melalui VWC

Deskripsi	2025	2024	2023
Jumlah Laporan yang Diterima	60	23	34
Jumlah Laporan yang Ditindaklanjuti	30	17	30
Persentase Laporan Valid	50%	74%	94%

09 Lingkungan

Volume Konsumsi Energi dalam Organisasi (GJ)^{[POJK51-F.6][GRI 302-1][GRI 302-3][SASB EM-MM-130a.1]}

Sorowako

Sumber Energi	Alokasi	Unit	2025	2024	2023
Sumber Energi Tidak Terbarukan					
Batu Bara	Tungku Pengering (Drying Kilns)	GJ	5.620.329,28	5.380.753,10	4.477.155,00
	Kiln Reduksi – Reduktan	GJ	3.514.493,10	3.263.552,46	3.399.804,00
	Kiln Reduksi – Pembakaran	GJ	2.803.557,17	2,611,034,77	1.761.553,00
	Total	GJ	11.938.379,55	11.255.340,33	9.638.512,00
High Speed Diesel (HSD)	Generator Termal	GJ	2.384,73	4.310,72	5.186,07
	Boiler Uap	GJ	925,73	877,43	6.045,14
	Tungku Pengering PP & Lainnya	GJ	24.068,99	25.318,14	26.881,96
	Kiln Reduksi	GJ	20.270,69	19.272,63	26.919,01
	Pemurnian – Nikel 78%	GJ	190.542,68	240.839,86	221.775,41
	Kendaraan Berat	GJ	1.075.633,75	1.105.445,61	1.054.569,59
	Kendaraan Ringan, Truk, dan Lainnya	GJ	77.752,87	70.289,39	142.438,65
	Total	GJ	1.391.579,42	1.466.353,78	1.483.815,83
Marine Fuel Oil (MFO)	Boiler Uap	GJ	26.435,01	30.696,12	24.928,00
	Tungku Pengering	GJ	874.214,34	1.202.834,46	1.600.666,00
	Kiln Reduksi	GJ	7.602.363,99	8.097.404,44	8.669.728,00
	Total	GJ	8.503.013,34	9.330.935,02	10.295.322,00
Bensin	Kendaraan Ringan	GJ	7.367,19	5.784,00	6.625,00
Total Penggunaan Energi Tidak Terbarukan		GJ	21.836.009,58	22.059.996,32	21.423.433,83

Sumber Energi	Alokasi	Unit	2025	2024	2023
Sumber Energi Terbarukan					
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	Pabrik Pengolahan	GJ	8.858.749,14	8.935.798,81	8,791,124.00
Biodiesel B30		GJ	-	-	150.766,00
Biodiesel B35		GJ	140.514,30	789.575,11	609.554,00
Biodiesel B40		GJ	753.749,50	-	
Tidak Terbarukan + Energi Terbarukan		GJ	9.753.012,94	9.725.373,92	9.551.444,00
Intensitas Energi		GJ/Ton Ni	437,94	445,73	438,57

IGP Pomalaa

Sumber Energi	Unit	2025
Sumber Energi Tidak Terbarukan		
Listrik	GJ	2.206,99
Diesel 65	GJ	764,40
Diesel 60	GJ	3.023,40
Total Penggunaan Energi Tidak Terbarukan	GJ	5.994,79
Sumber Energi Terbarukan		
Biodiesel B35	GJ	411,60
Biodiesel B40	GJ	2.015,60
Total Penggunaan Energi Terbarukan	GJ	2.427,20
Tidak Terbarukan + Energi Terbarukan	GJ	8.421,99

IGP Morowali

Sumber Energi	Unit	2025
Sumber Energi Tidak Terbarukan		
Listrik	GJ	2.872,42
Diesel 65	GJ	754,65
Diesel 60	GJ	5.679,00
Total Penggunaan Energi Tidak Terbarukan	GJ	9.306,07
Sumber Energi Terbarukan		
Biodiesel B35	GJ	406,35
Biodiesel B40	GJ	3.786,00
Total Penggunaan Energi Terbarukan	GJ	4.192,35
Tidak Terbarukan + Energi Terbarukan	GJ	13.498,42

Sumber Konsumsi Energi ^[GRI 302-4]

Sumber Konsumsi Energi	Satuan	2025	2024	2023	Variance (2025:2024)	
					Nominal	%
MFO	Barel	1.388.652,69	1.509.299,55	1.654.992,7	(120.646,86)	-7,99%
HSD	Liter	72.113.602,35	68,261,137,58	68.057.320,00	3.852.464,77	5,64%
Batu Bara	Ton	434.692,47	403.351,64	347.362,00	31.340,83	7,77%

Hasil Perhitungan Intensitas Emisi GRK ^{[GRI 305-1][GRI 305-2] [GRI 305-4] [POJK51-F.11][SASB EM-MM-110a.1]}

Sorowako

Deskripsi	Satuan	2025	2024*	2023	2017 Baseline
Scope 1	Ton CO ₂ eq	2.072.142	2.048.411,00	2.029.486,00	2.010.963,00
Scope 2	Ton CO ₂ eq	2481	2.580,00	2.827,00	2.987,00
Scope 3	Ton CO ₂ eq	N/A	N/A	N/A	N/A
Total Scopes	Ton CO ₂ eq	2,074,623.90	2.050.990,70	2.032.313,00	2.013.950,00
Nickel Production Amount	Ton	72.027,00	71.310,68	70.728,00	76.807,00
GHG Emission Intensity	Ton CO ₂ eq /Ton	28,80	28,76	28,73	26,22

*Restated: data emisi GRK 2024 setelah verifikasi independen oleh tekMIRA pada 2025, sesuai

IGP Morowali

Deskripsi	Satuan	2025
Lingkup 1	Ton CO ₂ eq	4.536,32
Lingkup 2	Ton CO ₂ eq	16,82
Lingkup 3	Ton CO ₂ eq	-
Total Lingkup	Ton CO ₂ eq	4.553,14

IGP Pomalaa

Deskripsi	Satuan	2025
Lingkup 1	Ton CO ₂ eq	419,00
Lingkup 2	Ton CO ₂ eq	-
Lingkup 3	Ton CO ₂ eq	-
Total Lingkup	Ton CO ₂ eq	419,00

Hasil Pengukuran dan Perhitungan Intensitas Emisi SO₂ [GRI 305-7] [POJK51-F.11][SASB EM-MM-120a.1]

Deskripsi	Satuan	2025	2024	2023
Total Produksi Nikel	Ton	72.027	71.311	70.728
Total Emisi SO ₂	Ton SO ₂ eq	49.297	52.172,00	53.188,00
Intensitas Emisi	Ton SO ₂ eq/ Ton Ni	0,68	0,73	0,75
Baku Mutu SO ₂		0,80	0,80	0,80

Hasil Pengukuran dan Perhitungan Intensitas Emisi Partikulat [GRI 305-7] [POJK51-F.11][SASB EM-MM-120a.1]

Deskripsi	Satuan	2025	2024	2023
Total Produksi Nikel	Ton	72.027	71.311	70.728
Total Emisi Partikulat	Ton Partikulat	647	879	600
Intensitas Emisi Partikulat	Ton Partikulat/ Ton Ni	0,009	0,012	0,007

Pengambilan dan Konsumsi Air [GRI303-5][SASB EM-MM-140a.1]

Sorowako

Deskripsi	Satuan	2025	2024	2023
Air Permukaan (Danau Matano)	m ³	15.079.167,00	11.748.150,00	9.442.313,00
Air Permukaan (Sungai) *jika ada	m ³	N/A	N/A	N/A
Air Tanah *jika ada	m ³	N/A	N/A	N/A
Pihak Ketiga (PDAM) *jika ada	m ³	N/A	N/A	N/A
Total	m³	15.079.167,00	11.848.150,00	9.442.313,00

IGP Morowali

Deskripsi	Satuan	2025	2024	2023
Air Permukaan (Danau)	m ³	N/A	N/A	N/A
Air Permukaan (Sungai)	m ³	10.035	No Data	No Data
Air Tanah	m ³	10.577	18.035	2.311
Pihak Ketiga (PDAM)	m ³	N/A	N/A	N/A
TOTAL	m³	20.612	18.035	2.311

IGP Pomalaa

Deskripsi	Satuan	2025	2024	2023
Air Permukaan (Danau)	m ³	N/A	N/A	N/A
Air Permukaan (Sungai)	m ³	9.969,00	8.903,00	N/A
Air Tanah	m ³	N/A	N/A	N/A
Pihak Ketiga (PDAM/Masyarakat/dll)	m ³	N/A	N/A	N/A
TOTAL	m³	9.969,00	8.903,00	0.00

Pembuangan Air^[GRI 303-4]

Sorowako

Deskripsi	Satuan	2025	2024	2023
Air Permukaan (Danau Matano)	m ³	25.372.487	25.639.690	17.384.078,97
Air Permukaan (Danau Mahalo-na)	m ³	21.221.547	20.648.522	11.370.115,20
Air Permukaan (Sungai Salo Lamunto)	m ³	3.898.304	3.705.430	-
Air Permukaan (Sungai Petea)	m ³	39.203.071	50.716.129	21.472.522,02
Air Tanah	m ³	N/A	N/A	N/A
Laut	m ³	N/A	N/A	N/A
Total	m³	89.695.408,20	100.709.771,00	50.226.716,19

IGP Morowali

Deskripsi	Satuan	2025
Air Permukaan (Danau)	m ³	N/A
Air Permukaan (Sungai)	m ³	100.228,32
Air Tanah	m ³	N/A
Laut	m ³	13.023,07
Total	m³	113.251,39

Sorowako Effluent Quality Measurement Results 2025^[POJK51 F.13]

No	Lokasi Titik Kepatuhan	Sumber	Titik Pembuangan	Volume Terolah	Parameter, Baku Mutu, dan Hasil Pengukuran				
					TSS	Jumlah Cr	Cr6+	Fe	Ni
					<200 ppm	0,5 ppm	0,1 ppm	5 ppm	0,5 ppm
1	Petea Far East	Pertambangan	Sungai Pe-tea	16.056.164	12,50	0,07	0,02	0,03	0,01
2	Petea East	Pertambangan	Sungai Petea	23.146.907	10,00	0,10	0,06	0,03	0,01
3	Petea West	Pertambangan	Matano	13.744.808	13,50	0,09	0,04	0,06	0,01
4	Lorraine	Pertambangan	Matano	1.983.131	10,50	0,05	0,01	0,03	0,01
5	Kathryn	Pertambangan	Matano	5.717.849	9,00	0,05	0,01	0,07	0,01
6	Lamangka 1	Pertambangan	Mahalona	6.282.546	10,00	0,07	0,02	0,03	0,01
7	Lamangka 2	Pertambangan	Mahalona	5.146.607	10,00	0,06	0,01	0,03	0,02
8	Lamangka 3	Pertambangan	Mahalona	9.792.393	12,50	0,15	0,07	0,03	0,01
9	LC-A	Pertambangan	Matano	3.853.042	8,50	0,05	0,01	0,03	0,01
10	Petea Washing Pad	Pertambangan	Matano	73.656	10,00	0,05	0,01	0,03	0,01
11	Petea D3 West	Pertambangan	Salo Lamunto	3.898.304	11,00	0,08	0,03	0,05	0,01
12	CP 4	Tumpukan Batu Bara dan Sulfur	Sungai Malili	2.535	20,00	N/A	N/A	N/A	N/A
13	D Lagoon	Domestik	Matano	391.211	9,00	N/A	N/A	N/A	N/A
14	F Lagoon	Domestik	Matano	226.74	9,00	N/A	N/A	N/A	N/A
15	Helai Lagoon	Domestik	Matano	14.127	10,00	N/A	N/A	N/A	N/A
16	SMP YPS	Domestik	Matano	8,88	8,00	N/A	N/A	N/A	N/A
17	Rumah Sakit	Domestik	Matano	12.357	10,00	N/A	N/A	N/A	N/A

Produksi Limbah B3^[GRI 306-3]

Sorowako

	Unit	2025	2024	2023
Timbulan Limbah	Ton	2.041	2.696	2.353
Intensitas	Ton/Matte	0,029	0,038	0,033

IGP Morowali

	Unit	2025	2024	2023
Timbulan Limbah	Ton	0,93	7,22	85,24

IGP Pomalaa

	Unit	2025	2024	2023
Timbulan Limbah	Ton	4,06	5,71	58,42

Produksi Limbah Non-B3^[GRI 306-3]

Sorowako

Kategori Pengelolaan Limbah	Unit	2025	2024	2023
Timbulan Limbah	Ton	6.378	5.906	5.349
Intensitas	Ton/Ton Matte	0,09	0,08	0,07
Limbah yang Dipilah	Ton	963	1.004	1.609

IGP Morowali

	Unit	2025
Timbulan Limbah	Ton	375

IGP Pomalaa

	Unit	2025
Timbulan Limbah	Ton	76

Luas Area Tambang Terganggu dan Direhabilitasi (Ha)^{[GRI 304-3][GRI 14.8.6]}

Sorowako

	2025	2024	2023
a) Luas lahan terganggu (ha) Tahunan	418,25	269,16	230,16
b) Total luas lahan terganggu (ha) Akumulatif	7.689,00	7.356,01	7.178,29
c) Fasilitas (Kantor + Perumahan + Lainnya)	1.754,80	1.460,61	1.460,61
d) Lahan terganggu yang belum direklamasi (Stockpile + Disposal)	2.071,64	2.104,27	2.014,10
e) Luas lahan direklamasi (ha) Akumulatif	3.862,56	3.791,13	3.703,58

	2025	2024	2023
f) Luas lahan direklamasi (ha) Tahunan	156,67	178,98	224,44
g) % lahan tambang yang direklamasi (e/d+e)	65,09%	64,31%	64,77%
h) Luas rehabilitasi daerah aliran sungai/DAS (ha) Akumulatif	14.879,00	14.879,00	10.435,00
i) Luas rehabilitasi daerah aliran sungai/DAS (ha)	0,00	4.444,00	435,00

IGP Morowali

	2025	2024	2023
Luas Lahan Terganggu (ha) Total Akumulatif	342,73	236,43	95,70
Luas Lahan Terganggu (ha)	106,30	140,73	95,68
Luas Lahan Direklamasi (ha) Total Akumulatif	1,42	-	-
Luas Lahan Direklamasi (ha)	1,42	-	-
Luas Rehabilitasi DAS (ha) Total Akumulatif	1.045,00	-	-
Luas Rehabilitasi DAS (ha)	1.045,00	-	-

IGP Pomalaa

	2025	2024	2023
Luas Lahan Terganggu (ha) Total Akumulatif	807,76	364,75	65,20
Luas Lahan Terganggu (ha)	443,01	299,55	30,10
Luas Lahan Direklamasi (ha) Total Akumulatif	-	-	-
Luas Lahan Direklamasi (ha)	-	-	-
Luas Rehabilitasi DAS (ha) Total Akumulatif	1.953,00	-	-
Luas Rehabilitasi DAS (ha)	1.953,00	-	-

Daftar Spesies Flora dan Fauna Dilindungi berdasarkan IUCN Red List^[GRI 304-4]

Spesies Fauna Sorowako dan Status Konservasi

Local Name	Species Name	IUCN Conservation Status
Fauna Terrestrial		
Anoa dataran rendah	<i>Bubalus depressicornis</i>	Endangered
Anoa pegunungan	<i>Bubalus quarlesi</i>	Endangered

Local Name	Species Name	IUCN Conservation Status
Kuskus beruang Sulawesi	<i>Ailurops ursinus</i>	Vulnerable
Babi rusa	<i>Babyrousa celebensis</i>	Vulnerable
Maleo	<i>Macrocephalon maleo</i>	Vulnerable
Monyet digo	<i>Macaca ochreata</i>	Vulnerable
Monyet hitam tonkean	<i>Macaca tonkeana</i>	Vulnerable
Kangkareng Sulawesi	<i>Rhabdotorrhinus exarhatus</i>	Vulnerable
Julang Sulawesi	<i>Rhyticeros cassidix</i>	Vulnerable
Tarsius	<i>Tarsius tarsier</i>	Vulnerable
Rusa Timor	<i>Rusa timorensis</i>	Vulnerable
Kadalan Sulawesi	<i>Rhamphococcyx calyrorhynchus</i>	Vulnerable
Babi Hutan	<i>Sus celebensis</i>	Near Threatened
Elang Alap Kecil	<i>Accipiter nanus</i>	Near Threatened
Kehicap Sulawesi	<i>Hypothymis puella</i>	Least Concern
Serindit sulawesi	<i>Loriculus stigmatus</i>	Least Concern
Cabai Panggu Kelabu	<i>Dicaeum celebicum</i>	Least Concern
Cabai Panggu Kuning	<i>Dicaeum aureolimbatum</i>	Least Concern
Elang Bondol	<i>Haliastur indus</i>	Least Concern
Elang Alap Nipon	<i>Accipiter gularis</i>	Least Concern
Elang Hitam	<i>Ictinaetus malayensis</i>	Least Concern
Alap-alap Sapi	<i>Falco moluccensis</i>	Least Concern
Elang Alap Ekor Total	<i>Accipiter trivirgatus</i>	Least Concern
Elang Ular Sulawesi	<i>Spilornis rufipectus</i>	Least Concern
Elang Tiram	<i>Pandion haliaetus</i>	Least Concern

Local Name	Species Name	IUCN Conservation Status
Tiong Lampu Sulawesi	<i>Coracias temminckii</i>	Least Concern
Kepudang Sungu Biru	<i>Coracina temminckii</i>	Least Concern
Pelatuk Kelabu Sulawesi	<i>Mulleripicus fulvus</i>	Least Concern
Tir-kiring Bukit	<i>Prioniturus platurus</i>	Least Concern
Raja Perling Sulawesi	<i>Basilornis celebensis</i>	Least Concern
Fauna Air Tawar		
Udang lamak merah	<i>Caridina lanceolata</i>	Critically Endangered
Udang biru	<i>Caridina loehae</i>	Critically Endangered
Udang air tawar	<i>Caridina holthuisi</i>	Endangered
Kepiting danau	<i>Nautilothelphusa zimmeri</i>	Endangered
Opudi	<i>Telmatherina wahjui</i>	Endangered
Butini	<i>Glossogobius matanensis</i>	Near Threatened
Opudi	<i>Telmatherina abendanoni</i>	Near Threatened
Opudi	<i>Telmatherina antoniae</i>	Near Threatened
Opudi	<i>Telmatherina obscura</i>	Near Threatened
Opudi	<i>Telmatherina opudi</i>	Near Threatened
Opudi	<i>Telmatherina prognatha</i>	Near Threatened
Udang Merah Sulawesi	<i>Ceyx fallax</i>	Near Threatened

Spesies Flora Sorowako dan Status Konservasi

Nama Lokal	Nama Spesies	Status Konservasi IUCN	Endemisitas
Timboewolo	<i>Manilkara celebica</i>	Critically Endangered	
	<i>Archidendron tjendana</i>	Endangered	
	<i>Beilschmiedia gigantocarpa</i>	Endangered	
Kaloju	<i>Xanthostemon confertiflorus</i>	Endangered	Endemic
Angsana / Cenrana	<i>Pterocarpus indicus</i>	Endangered	
Dengen Celebica	<i>Dillenia celebica</i>	Endangered	Endemic
Agathis	<i>Agathis celebica</i>	Vulnerable	Endemic
Agathis	<i>Agathis dammara</i>	Vulnerable	-
Eboni	<i>Diospyros celebica</i>	Vulnerable	Endemic
Kantong Semar	<i>Nepenthes petiolata</i>	Vulnerable	-
Kayu Mata Kucing	<i>Hopea celebica</i>	Vulnerable	-
Kumea	<i>Manilkara fasciculata</i>	Vulnerable	-
Buri	<i>Weinmannia devogelii</i>	Near Threatened	-
Betao	<i>Calophyllum soulattri</i>	Least Concern	-
Nyato	<i>Palaquium obovatum</i>	Least Concern	-
Bitti	<i>Vitex cofassus</i>	Least Concern	-
Manggis Hutan	<i>Garcinia celebica</i>	Least Concern	Endemic
Tembeuwa	<i>Kjellbergiodendron celebicum</i>	Least Concern	Endemic
Kayu asa	<i>Lithocarpus celebicus</i>	Least Concern	Endemic
Bayur	<i>Pterospermum celebicum</i>	Least Concern	Endemic
Belimbing Bajo	<i>Sarcotheca celebica</i>	Least Concern	Endemic

Nama Lokal	Nama Spesies	Status Konservasi IUCN	Endemisitas
Kantong Semar Maksimum	<i>Nepenthes maxima</i>	Least Concern	Endemic
Kantong Semar Bersungut	<i>Nepenthes tentaculata</i>	Least Concern	-
Beluang	<i>Eleusine indica</i>	Least Concern	Endemic
Lokomomo	<i>Deplanchea bancana</i>	Least Concern	-
Dengen Serata	<i>Dillenia serrata</i>	Least Concern	-
Knema	<i>Knema matanesis</i>	Least Concern	Endemic

Spesies Fauna IGP Morowali dan Status Konservasi

Nama Lokal	Nama Spesies	Status Konservasi IUCN
Bajing Alston Sulawesi	<i>Prosciurillus alstoni</i>	Near Threatened
Anoa	<i>Bubalus sp.</i>	Endangered
Babi hutan	<i>Sus celebensis</i>	Near Threatened
Codot Sulawesi	<i>Cynopterus luzoniensis</i>	Least Concern
Codot kecil	<i>Cynopterus minutus</i>	Least Concern
Cecadu pisang kecil	<i>MacroGLOSSUS minimus</i>	Least Concern
Nyap biasa	<i>Rousettus amplexicaudatus</i>	Least Concern
Codot walet	<i>Thoopterus nigrescens</i>	Least Concern
Barong besar	<i>Hipposideros diadema</i>	Least Concern
Tomosu besar	<i>Miniopterus tristis</i>	Least Concern
	<i>Spilornis rufipectus</i>	Least Concern
	<i>Nisaetus lanceolatus</i>	Least Concern

Nama Lokal	Nama Spesies	Status Konservasi IUCN
	<i>Todirhamphus chloris</i>	Least Concern
	<i>Hirundapus caudacutus</i>	Least Concern
	<i>Collocalia esculenta</i>	Least Concern
	<i>Artamus leucorhynchus</i>	Least Concern
	<i>Aceros cassidix</i>	Least Concern
	<i>Lalage leucopygialis</i>	Least Concern
	<i>Caprimulgus celebensis</i>	Least Concern
	<i>Egretta garzetta</i>	Least Concern
	<i>Ptilinopus melanospilus</i>	Least Concern
	<i>Streptopelia chinensis</i>	Least Concern
	<i>Treron vernans</i>	Least Concern
	<i>Ducula radiata</i>	Least Concern

Nama Lokal	Nama Spesies	Status Konservasi IUCN
	<i>Corvus enca</i>	Least Concern
	<i>Phaenicophaeus calyborhynchus</i>	Least Concern
	<i>Centropus bengalensis</i>	Least Concern
	<i>Cacomantis merulinus</i>	Least Concern
	<i>Centropus celebensis</i>	Least Concern
	<i>Dicaeum aureolimbatus</i>	Least Concern
	<i>Dicaeum nehrkorni</i>	Least Concern
	<i>Dicaeum celebicum</i>	Least Concern
	<i>Dicrurus hottentottus leucops</i>	Least Concern
	<i>Dicrurus montanus</i>	Least Concern
	<i>Lonchura malacca</i>	Least Concern
	<i>Lonchura punctulata</i>	Least Concern
	<i>Hemiprocne longipennis</i>	Least Concern
	<i>Hirundo tahitica</i>	Least Concern
	<i>Merops ornatus</i>	Least Concern
	<i>Hypothymis puella</i>	Least Concern
	<i>Culicicapa helianthea</i>	Least Concern
	<i>Nectarinia jugularis</i>	Least Concern
	<i>Aethopyga siparaja</i>	Least Concern
	<i>Anthreptes malacensis</i>	Least Concern
	<i>Leptocoma sericea</i>	Least Concern
	<i>Oriolus chinensis</i>	Least Concern
	<i>Edulisoma morio</i>	Least Concern

Nama Lokal	Nama Spesies	Status Konservasi IUCN
	<i>Passer montanus</i>	Least Concern
	<i>Prioniturus platurus</i>	Least Concern
	<i>Pycnonotus aurigaster</i>	Least Concern
	<i>Amaurornis phoenicurus</i>	Least Concern
	<i>Actitis hypoleucos</i>	Least Concern
	<i>Otus manadensis</i>	Least Concern
	<i>Scissirostrum dubium</i>	Least Concern
	<i>Basilornis celebensis</i>	Least Concern
	<i>Zosterops atrifrons</i>	Least Concern
	<i>Zosterops chloris</i>	Least Concern
	<i>Eutropis rudis</i>	Not Evaluated
	<i>Emoia caeruleocauda</i>	Least Concern
	<i>Emoia astrocostata</i>	Not Evaluated
	<i>Sphenomorphus nigrolabris</i>	Not Evaluated
	<i>Sphenomorphus variegatus</i>	Not Evaluated
	<i>Eutropis indepressa</i>	Not Evaluated
	<i>Eutropis rugifera</i>	Not Evaluated
	<i>Varanus salvator</i>	Least Concern
	<i>Gehyra mutilata</i>	Not Evaluated
	<i>Hemidactylus frenatus</i>	Least Concern
	<i>Bronchocela celebensis</i>	Least Concern
	<i>Ahaetulla prasina</i>	Least Concern
	<i>Psamodynastes pulverulentus</i>	Least Concern

Nama Lokal	Nama Spesies	Status Konservasi IUCN
	<i>Hypsiscopus plumbea</i>	Not Evaluated
	<i>Duttaphrynus melanostictus</i>	Least Concern
	<i>Ingerophrynus celebensis</i>	Least Concern
	<i>Fejervarya cancrivora</i>	Least Concern
	<i>Limnonectes sp. 2</i>	Least Concern
	<i>Limnonectes inflatus</i>	Least Concern
	<i>Polypedates iskandari</i>	Not Evaluated
	<i>Papurana calebensis</i>	Least Concern

Spesies Flora IGP Morowali dan Status Konservasi

Nama Lokal	Nama Spesies	Status Konservasi IUCN
	<i>Anacardium occidentale</i>	Least Concern
	<i>Buchanania arborescens</i>	Least Concern
	<i>Dracontomelon dao</i>	Least Concern
	<i>Mangifera indica</i>	Data Deficient
	<i>Mangifera minor</i>	Least Concern
	<i>Cananga odorata</i>	Least Concern
	<i>Alstonia macrophylla</i>	Least Concern
	<i>Alstonia scholaris</i>	Least Concern
	<i>Agathis celebica</i>	Vulnerable

Nama Lokal	Nama Spesies	Status Konservasi IUCN
	<i>Dolichandrone spathacea</i>	Least Concern
	<i>Trema orientale</i>	Least Concern
	<i>Casuarina equisetifolia</i>	Least Concern
	<i>Maranthes corymbosa</i>	Least Concern
	<i>Terminalia catappa</i>	Least Concern
	<i>Blumea balsamifera</i>	Least Concern
	<i>Ipomoea pes-caprae</i>	Least Concern
	<i>Cyathea celebica</i>	Least Concern
	<i>Cyathea contaminans</i>	Least Concern
	<i>Cycas rumphii</i>	Near Threatened
	<i>Scleria malaccensis</i>	Least Concern
	<i>Dillenia serrata</i>	Least Concern
	<i>Diospyros celebica</i>	Vulnerable
	<i>Bridelia tomentosa</i>	Least Concern
	<i>Hevea brasiliensis</i>	Least Concern
	<i>Macaranga mappa</i>	Least Concern
	<i>Mallotus paniculatus</i>	Least Concern
	<i>Castanopsis acuminatissima</i>	Least Concern
	<i>Lithocarpus celebicus</i>	Least Concern
	<i>Dicranopteris linearis</i>	Least Concern
	<i>Imperata cylindrica</i>	Least Concern
	<i>Phragmites karka</i>	Least Concern
	<i>Saccharum spontaneum</i>	Least Concern

Nama Lokal	Nama Spesies	Status Konservasi IUCN
	<i>Calophyllum soulatri</i>	Least Concern
	<i>Leea indica</i>	Least Concern
	<i>Acacia mangium</i>	Least Concern
	<i>Paraserianthes falcataria</i>	Least Concern
	<i>Archidendron clypearia</i>	Least Concern
	<i>Cassia alata</i>	Least Concern
	<i>Cassia siamensis</i>	Least Concern
	<i>Dalbergia candenatensis</i>	Least Concern
	<i>Gliricidia sepium</i>	Least Concern
	<i>Mimosa pudica</i>	Least Concern
	<i>Tamarindus indicus</i>	Least Concern
	<i>Lycopodiella cernua</i>	Least Concern
	<i>Lygodium microphyllum</i>	Least Concern
	<i>Ceiba pentandra</i>	Least Concern
	<i>Commersonia bartramia</i>	Least Concern
	<i>Heritiera littoralis</i>	Least Concern
	<i>Hibiscus tiliaceus</i>	Least Concern
	<i>Kleinhovia hospita</i>	Least Concern
	<i>Dysoxylum gaudichaudianum</i>	Least Concern
	<i>Toona ciliata</i>	Least Concern
	<i>Toona sureni</i>	Least Concern
	<i>Artocarpus elasticus</i>	Least Concern
	<i>Ficus hispida</i>	Least Concern

Nama Lokal	Nama Spesies	Status Konservasi IUCN
	<i>Ficus microcarpa</i>	Least Concern
	<i>Ficus punctata</i>	Least Concern
	<i>Ficus septica</i>	Least Concern
	<i>Ficus variegata</i>	Least Concern
	<i>Moringa oleifera</i>	Least Concern
	<i>Musa acuminata</i>	Least Concern
	<i>Myristica fragrans</i>	Data Deficient
	<i>Kjellbergiodendron celebicum</i>	Least Concern
	<i>Psidium guajava</i>	Least Concern
	<i>Syzygium acuminatissimum</i>	Least Concern
	<i>Nepenthes gracilis</i>	Least Concern
	<i>Areca catechu</i>	Data Deficient
	<i>Corypha utan</i>	Least Concern
	<i>Metroxylon sago</i>	Least Concern
	<i>Nypa fruticans</i>	Least Concern
	<i>Pandanus odorifer</i>	Least Concern
	<i>Piper aduncum</i>	Least Concern
	<i>Dacrycarpus imbricatus</i>	Least Concern
	<i>Podocarpus neriifolius</i>	Least Concern
	<i>Acrostichum aureum</i>	Least Concern
	<i>Pteris vittata</i>	Least Concern
	<i>Bruguiera sexangula</i>	Least Concern
	<i>Rhizophora apiculata</i>	Least Concern

Nama Lokal	Nama Spesies	Status Konservasi IUCN
	<i>Nauclea orientalis</i>	Least Concern
	<i>Melicope lunu-ankenda</i>	Least Concern
	<i>Lepisanthes alata</i>	Least Concern
	<i>Lepisanthes amoena</i>	Least Concern
	<i>Nephelium lappaceum</i>	Least Concern
	<i>Palaquium obovatum</i>	Least Concern
	<i>Duabanga moluccana</i>	Least Concern
	<i>Sonneratia alba</i>	Least Concern
	<i>Sonneratia caseolaris</i>	Least Concern
	<i>Cyclosorus interruptus</i>	Least Concern
	<i>Callicarpa tomentosa</i>	Least Concern
	<i>Gmelina arborea</i>	Least Concern
	<i>Stachytarpheta jamaicensis</i>	Least Concern
	<i>Vitex pinnata</i>	Least Concern

Spesies Fauna IGP Pomalaa dan Status Konservasi

Nama Lokal	Nama Spesies	Status Konservasi IUCN
Kima raksasa	<i>Tridachna gigas</i>	Critically Endangered
-	<i>Nomorhamphus sagittarius</i>	Endangered
Elang perut - karat	<i>Lophotriorchis kienerii</i>	Near Threatened
Pergam hijau	<i>Ducula aenea</i>	Near Threatened
Pungguk oker	<i>Ninox ochracea</i>	Near Threatened
Kangkareng Sulawesi	<i>Rhabdotorrhinus exarhatus</i>	Vulnerable
Julang emas Sulawesi	<i>Rhytyceros cassidix</i>	Vulnerable
-	<i>Tytthoscincus textus</i>	Vulnerable
Katak parasut gunung	<i>Rhacophorus monticola</i>	Vulnerable
Kuskus kerdil Sulawesi	<i>Strigocuscus celebensis</i>	Near Threatened
Bajing kecil Sulawesi	<i>Prosciurillus alstoni</i>	Near Threatened
Codot muka garis	<i>Styloctenium wallacei</i>	Near Threatened
Tarsius	<i>Tarsius tarsier</i>	Vulnerable
Kuskus beruang	<i>Auliurops ursinus</i>	Vulnerable
Bajing Merah Sulawesi	<i>Rubisciurus rubiventer</i>	Vulnerable
Monyet Dinggo / Monyet Butung	<i>Macaca ochreata</i>	Vulnerable
Musang Sulawesi	<i>Macrogalidia muschenbroekii</i>	Vulnerable
Anoa dataran rendah	<i>Bubalus depressicornis</i>	Endangered

09 Tenaga Kerja Kami

Total dan Persentase Pekerja Lokal

Description	2025	2024	2024
Jumlah Karyawan	2.985	3.038	3.017
Jumlah Karyawan Lokal	2.486	2.516	2.589
Persentase Karyawan Lokal	83%	83%	86%

Total Karyawan berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin^[GRI 405-1]

Posisi	2025			2024			2023		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
Managemen (L3)	36	4	40	30	4	34	24	3	27
General Manager atau Spesialis (L2)	106	17	123	112	13	125	104	11	115
Staf Senior atau Manager (L1)	488	110	598	473	102	575	402	79	481
Staf	719	154	873	685	155	840	691	131	822
Nonstaf	1.275	76	1.351	1.386	78	1.464	1.489	83	1.572
Total	2.624	361	2.985	2.686	352	3.038	2.710	307	3.017

Total Karyawan berdasarkan Kelompok Usia

Kelompok Usia	2025			2024			2023		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
>50 Tahun	630	35	665	577	28	605	539	23	562
30-50 Tahun	1.883	263	2.146	1.980	254	2.234	2.059	228	2.287
<30 tahun	111	63	174	129	70	199	112	56	168
Total	2.624	361	2.985	2.686	352	3.038	2.710	307	3.017

Total Karyawan berdasarkan Tingkat Pendidikan

Level Pendidikan	2025			2024			2023		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
S3/Sederajat	2	0	2	8	1	9	1	0	1
S2/Sederajat	67	30	97	68	26	94	56	21	77
S1/Sederajat	791	224	1.015	769	219	988	700	176	876
Diploma/Sederajat	295	65	360	301	64	365	276	57	333
SMA	1.459	42	1.501	1.526	42	1.568	1.657	53	1.710
SMP	10	0	10	14	0	14	20	0	20
Total	2.624	361	2.985	2.686	352	3.038	2.710	307	3.017

Total Karyawan berdasarkan Status Kepegawaian

Status Kepegawaian	2025			2024			2023		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
Pegawai Tetap	2.549	337	2.886	2.607	322	2.929	2.653	280	2.933
Pegawai Kontrak	75	24	99	79	30	109	57	27	84
Total	2.624	361	2.985	2.686	352	3.038	2.710	307	3.017

Total Karyawan berdasarkan Lokasi Operasional

Lokasi Operasional	2025			2024			2023		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
Bungku Timur	78	21	99	74	19	93	55	16	71
Jakarta	59	43	102	58	35	93	45	25	70
Makassar	11	4	15	5	3	8	3	2	5
Palu	1	0	1	1	0	1	1	0	1

Lokasi Operasional	2025			2024			2023		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
Pomalaa	73	26	99	71	29	100	56	21	77
Sorowako	2.402	267	2.669	2.477	266	2.743	2.550	243	2.793
Total	2.624	361	2.985	2.686	352	3.038	2.710	307	3.017

Total Karyawan berdasarkan Status Kewarganegaraan

	2025			2024			2023		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
Warga Negara Indonesia (WNI)	2.622	360	2.982	2.683	352	3.034	2.706	307	3.013
Warga Negara Asing (WNA)	2	1	3	3	0	4	4	0	4
Total	2.624	361	2.985	2.686	352	3.038	2.710	307	3.017

Keberagaman Tenaga Kerja dan Pekerja Lokal^[GRI 405-1]

	2025		2024		2023	
	Total	%	Total	%	Total	%
Penyandang Disabilitas	74	2,48%	67	2,21%	3	0,10%
Pekerja Lokal	2.457	82,31%	2.516	82,82%	2.589	85,81%

Total Kontraktor berdasarkan Kewarganegaraan

	2025			2024			2023		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
Indonesian Citizen (WNI)	20.549	1.953	22.502	12.533	1.500	14.033	10.614	1.239	11.853
Foreign National (WNA)	137	6	143	9	3	12	34	7	41
Total	20.686	1.959	22.645	12.542	1.503	14.045	10.648	1.246	11.894

Total Kontraktor Warga Negara Indonesia berdasarkan Lokalitas

Tingkat Pendidikan	2025			2024			2023		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
Lokal	16.173	1.673	17.846	10.508	1.326	11.834	8.743	1.055	9.798
Non Lokal	4.376	280	4.656	2.025	174	2.199	1.871	184	2.055
Total	20.549	1.953	22.502	12.533	1.500	14.033	10.614	1.239	11.853

Total Jam Kerja

Tingkat Pendidikan	Satuan	2025				2024				2023
		Sorowako	IGP Morowali	IGP Pomalaa	Total	Sorowako	IGP Morowali	IGP Pomalaa	Total	
Karyawan	Jam	6.127.468	239.952	197.540	6.564.960	6.280.560	176.040	184.680	6.641.280	6.379.740
Kontraktor	Jam	26.239.164	7.099.302	9.285.380	42.623.846	23.291.155	3.493.111	2.400.986	29.185.252	23.036.374
Total		32.366.632	7.339.254	9.482.920	49.188.806	29.571.715	3.669.151	2.585.666	35.826.532	29.416.114

Statistik Cedera Akibat Kerja untuk Karyawan dan Kontraktor^{[GRI 403-9][SASB EM-MM-320a.1]}

Level of Education	Satuan	2025				2024				2023
		Sorowako	IGP Morowali	IGP Pomalaa	Total	Sorowako	IGP Morowali	IGP Pomalaa	Total	
Karyawan										
Total Loss Time Injury	#	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Loss Time Injury Frequency Rate (LTIFR)	#	0,16	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Total Recordable Injury	#	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Level of Education	Satuan	2025				2024				2023
		Sorowako	IGP Morowali	IGP Pomalaa	Total	Sorowako	IGP Morowali	IGP Pomalaa	Total	
Total Recordable Injury Frequency Rate (TRIFR)	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kontraktor										
Total Loss Time Injury	#	5	0	0	5	1	0	0	1	4
Loss Time Injury Frequency Rate (LTIFR)	#	0,19	0	0	0,12	0,04	0	0	0,03	0,17
Total Recordable Injury	#	16	3	3	22	9	1	0	10	10
Total Recordable Injury Frequency Rate (TRIFR)	#	0,61	0,42	0,32	0,52	0,39	0,29	0	0,34	0,43
Karyawan dan Kontraktor										
Near Miss Incidents	#	53	10	13	76	59	6	1	66	62
Near Miss Frequency Rate	#	1,64	1,36	1,37	1,55	2,00	1,64	0,39	1,84	2,11

Pernyataan Asuror Independen^[POJK51-G.1]



Independent Assurance Statement The 2025 Sustainability Report of PT Vale Indonesia Tbk

Number : 11/000-758/IV/2026/SRAI

Assurance Type : Type 1 and Type 2 for the specific topic of Well-being and Inclusion

Assurance Level : Moderate

Reporting Standards : GRI Sustainability Reporting Standards and Sustainability Accounting Standard for Metals and Mining.

Reporting Regulation : Otoritas Jasa Keuangan Regulation (POJK) Number 51/POJK.03/2017 and SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021

Dear stakeholders,

PT Sejahtera Rambah Asia is issuing an **Independent Assurance Statement** ("the Statement") of the **2025 Sustainability Report** ("the Report") of **PT Vale Indonesia Tbk** ("the Company"). The Company is a company which operates in the mining sector, specifically in integrated nickel processing. The Report presents the commitment and efforts of the Company in managing its sustainability performance for the reporting period of **January 1st to December 31st, 2025**. As agreed with Management, PT Sejahtera Rambah Asia's responsibility is to make an assessment based on the data and content of the Report for the year.

Intended User and Purpose

The purpose of the Statement is to present our opinion including the findings and recommendations based on the results of assurance work to the Company's stakeholders. The Assurance Team in accordance with specific procedures and a specific scope of work carried out the assessment. Except for the areas covered in the scope of the assurance, we encourage all NOT to solely interpret the Statement as the basis to conclude the Company's overall sustainability performance.

Responsibilities

Our responsibilities to the Management are to evaluate the Report content, come up with findings and recommendations, and issue the Statement. We are also responsible for coming up with conclusions and recommendations based on the agreed standards, methods, and approaches. Hence, PT Sejahtera Rambah Asia is only evaluated for the latest received editorial and data on the final draft as of April 27th, 2026. PT Sejahtera Rambah Asia is only responsible for delivering assurance work, NOT an audit, by following the Non-Disclosure Agreement, the Assurance Engagement Agreement, Representation Letter, and Subsequent Event Testing. The Management has its sole responsibility for the presentation of data, information, and disclosures in the Report content. Therefore, any parties who depend on the Report and this Statement shall bear and manage their risks.

Independence, Impartiality, and Competency

PT Sejahtera Rambah Asia confirms NO relationships between the assessor team and the clients that can influence their independence and impartiality to conduct the assessment and generate the Statements. The assessor team is mandated to follow a particular assurance protocol and professional ethical code of conduct to ensure their objectivity and integrity. We carried out a pre-engagement assessment before the assurance work was taken to verify the risks of engagement as well as the independence and impartiality of the team. The assessor team members have knowledge of ISO 26000,

PT Sejahtera Rambah Asia Independent Assurance Statement, version 2026, page 1 of 4



AA1000 AccountAbility standards and principles, and also have experience in sustainability report assessment based on various reporting regulations, standards, and principles.

Type and Level of Assurance Service

1. **Type 1 assurance** on the Report content.
2. **Type 2 assurance on Well-being and Inclusion.**
3. **A moderate level of assurance** to the procedure on the Report content and evidence, where the risks of information and conclusions of the Report being error is reduced, but not to very low, but not zero.

Scope and Limitation of Assurance Service

1. Data and information in the Report for the period of **January 1st to December 31st, 2025**.
2. Material topics presented in the Report: **Waste and Water Management, Low Emission Production, Land Use Management, Local Community, Well-being and Inclusion, and Business Integrity.**
3. Evaluation of publicly disclosed information, system, and process of the Company to ensure adherence of the Report content to the reporting principles.
4. PT Sejahtera Rambah Asia does NOT include financial data, information, and figures in the Report content. We assumed that the Company, independent parties, or other parties associated with the Company have verified and/or audited financial statements, data, and information.
5. The conclusion provided herein does not constitute an opinion on the financial statements or the annual report. Any material changes to the underlying data occurring after the date of the Statement must be duly disclosed to those charged with governance to determine their impact on the reported findings.
6. Adherence to the following reporting principles, standards, and regulations:
 - a) Regulation of Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.51/POJK.03/2017 regarding the Implementation of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Listed, and Public Companies (POJK 51) as well as OJK Circular Letter (SEOJK) 2022 No.16/SEOJK.04/2021.
 - b) GRI Sustainability Reporting Standards issued by Global Reporting Initiative.
 - c) Sustainability Accounting Standard for Metals and Mining.

Exclusion

1. The expression of opinion, belief, expectation, advertisement, and also forward-looking statements, including future planning of the Company as specified in the Report content.
2. Analysis or assessment against regulations, principles, standards, guidelines, and indicators other than those indicated in the Statement.
3. Topics, data, and information outside the reporting period, or in the public domain not covered in the reporting period.
4. Financial performance data and information as presented in the Company's financial statements and documents, other than those mentioned in the Report.

Methodology and Source Disclosure

1. Form an Assuror Team whose members are capable in sustainability report development and assurance.
2. Perform the pre-engagement phase to ensure the independence and impartiality of the Assuror Team.
3. Hold a kick-off meeting and initial analysis of the Report draft based on the PT Sejahtera Rambah Asia Protocol on Assurance Analysis refers to the standards, principles, and indicators of AA1000AS v3, AA1000APS (2018), and standards/regulations used in the Report.

PT Sejahtera Rambah Asia Independent Assurance Statement, version 2026, page 2 of 4

Pernyataan Asuror Independen^[POJK51-G.1]



4. Discuss online the results of the analysis with the Management and data contributors.
5. Verify evidence and trace data and information as covered in the Report.
6. Conducted the On-Site Engagement (OSE) through direct interviews with both internal and external stakeholders.
7. The Company incorporated our recommendations in the draft Report and release the final Report content.
8. Prepare the Statement and send it to AA1000 AccountAbility for review to get approval before submitting it to the Company.
9. Prepare a Management Letter detailing all aspects seen, recorded, and observed during the assurance work to the Management of the Company for further improvement of sustainability processes.

Adherence to AA1000AP (2018) and GRI Universal Standards

Inclusivity – The Company has conducted stakeholder mapping through a systematic process by identifying stakeholders based on their engagement categories. This mapping is reviewed annually, including an evaluation of the effectiveness of engagement methods and the appropriateness of the categories. Based on the results, the Company carries out intensive and equitable engagement with all stakeholders as part of its decision-making and management of relevant issues. All engagement activities are properly documented and disclosed in the sustainability report as a form of transparency and accountability.

Materiality – In determining material topics, the Company refers to an ESG materiality review, utilizing a grievance report that documents issues raised by external stakeholders. These issues are then discussed through a series of meetings and receive approval from internal stakeholders. Furthermore, the Company considers the relevance of the topics from short-, medium-, and long-term perspectives. The identified material topics have been aligned with the Company's strategy, policies, and business direction.

Responsiveness – The Company has established KPIs within the sustainability department, with implementation involving all relevant departments. Although executed cross-functionally, the monitoring and achievement of these KPIs remain the responsibility of the sustainability department. In addition, stakeholder feedback is integrated into operational activities based on stakeholder mapping and received grievance reports. The Company maintains regular communication with stakeholders, including monthly intensive engagement. It also provides a feedback channel through a Whistleblowing System managed by an independent external party.

Impact – The Company has identified, measured, and assessed the impacts arising from its activities, and manages them through cross-functional collaboration. The process of identifying and assessing these impacts is documented and integrated into the organizational system. The Company also ensures the availability of competent human resources through an effective assignment process aligned with impact management needs. Measured impacts are defined within short, medium, and long-term timeframes and disclosed in the sustainability report. In addressing impacts, particularly regarding material issues, the Company has established mitigation measures and outlined its management efforts, with ongoing monitoring of the development of these impacts.

On Site Engagement: On-Site Engagement (OSE) constitutes one of our procedures performed to assess the Company's adherence to the AA1000 Principles (Inclusivity, Materiality, Responsiveness, and Impact), based on a sample of material topics and significant stakeholders. Based on the OSE

PT Sejahtera Rambah Asia Independent Assurance Statement, version 2026, page 3 of 4



performed, we conclude that the Company has implemented the process in a generally sufficient and appropriate manner, covering the aspects of Inclusivity, Materiality, Responsiveness, and Impact as identified, mapped, and applied in its engagement with stakeholders. The Company also discloses the latest progress on its efforts to address material issues identified through the stakeholder engagement process. All feedback received has been followed up through relevant programs and initiatives, with implementation progress monitored on a regular basis and reported as part of the outcomes of stakeholder engagement.

Statement of Use: "with Reference to the GRI Standards" – Our experts evaluated the Report content against the GRI Universal Standards principles, disclosures, and requirements for reporting. We believe the Report has fulfilled the requirements of its statement of use; publish a GRI Content Index, provide a statement of use, and notify GRI.

GRI Standards Principles – As the assurance work was taken, the report content sufficiently indicates its adherence to sustainability reporting principles (accuracy, balance, clarity, comparability, completeness, sustainability context, timeliness, and verifiability). The Management provide adequate support during the assurance work by submitting evidence/documents as requested.

Type 2 Assurance – The Company has established a structured occupational health and safety (OHS) and workforce management system, supported by clear organizational roles, active involvement of top management, and the implementation of various risk control, training, and employee welfare programs. Policy implementation is further strengthened through monitoring mechanisms, audits, and integrated incident reporting and investigation systems. In addition, the Company demonstrates a commitment to local workforce inclusion and maintaining harmonious industrial relations.

Recommendation

To ensure balanced and transparent disclosure, the Company is encouraged to provide information on the actions undertaken to address identified issues, particularly those deemed critical to its operations. Such disclosure is intended to support the management of public expectations regarding the Company's responses to the challenges it encounters.

The assurance provider,
Jakarta, April 27th 2026



Dr. Lim Hendra, LCSAP
Assurance Director of
PT Sejahtera Rambah Asia



PT Sejahtera Rambah Asia Independent Assurance Statement, version 2026, page 4 of 4

Indeks POJK dalam laporan ini disusun berdasarkan:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 16/SEOJK.04/2021

TOPIK		HALAMAN
A	Strategi Keberlanjutan	
	A.1. Penjelasan Strategi Keberlanjutan	36–37
B	Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan	
	B.1. Aspek Ekonomi, paling sedikit memuat: a. Kuantitas produksi atau jasa yang dijual; b. Pendapatan atau penjualan; c. Laba atau rugi bersih; d. Produk ramah lingkungan; dan e. Pelibatan pihak lokal yang berkaitan dengan proses bisnis Keuangan Berkelanjutan.	5, 11, 27, 162–163
	B.2. Aspek Lingkungan Hidup, paling sedikit memuat: a. Penggunaan energi; b. Pengurangan emisi yang dihasilkan; c. Pengurangan limbah dan efluen; dan d. Pelestarian keanekaragaman hayati.	6–7
	B.3. Aspek Sosial	8–10
C	Profil Perusahaan	
	C.1. Visi, Misi, dan Nilai Keberlanjutan	22
	C.2. Alamat Perusahaan	24
	C.3. Skala Usaha, paling sedikit memuat: a. Total aset atau kapitalisasi aset dan total kewajiban; b. Jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, pendidikan, dan status ketenagakerjaan; c. Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan saham; dan d. Wilayah operasional.	23, 25, 27, 109, 162, 164
	C.4. Produk, Layanan, dan Kegiatan Usaha yang Dijalankan	21

TOPIK			HALAMAN
	C.5.	Keanggotaan pada Asosiasi	29-30
	C.6.	Perubahan Emiten dan Perusahaan Publik yang Bersifat Signifikan	55
D	Penjelasan Direksi		
	D.1.	Penjelasan Direksi a. Kebijakan untuk merespon tantangan dalam pemenuhan strategi keberlanjutan b. Penerapan Keuangan Berkelanjutan c. Strategi pencapaian target	13
E	Tata Kelola Keberlanjutan		
	E.1.	Penanggung Jawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan	46
	E.2.	Pengembangan Kompetensi Terkait Keuangan Berkelanjutan	58-61
	E.3.	Penilaian Risiko Atas Penerapan Keuangan Berkelanjutan	41
	E.4.	Hubungan Dengan Pemangku Kepentingan	38
	E.5.	Permasalahan Terhadap Penerapan Keuangan Berkelanjutan	5
F	Kinerja Keberlanjutan		
	F.1.	Kegiatan Membangun Budaya Keberlanjutan	22
	Kinerja Ekonomi		
	F.2.	Perbandingan Target dan Kinerja Produksi, Portofolio, Target Pembiayaan atau Investasi, Pendapatan dan Laba Rugi	27, 163
	F.3.	Perbandingan Target dan Kinerja Portofolio, Target Pembiayaan atau Investasi pada Instrumen Keuangan atau Proyek yang Sejalan dengan Keuangan Berkelanjutan	Tidak Relevan
	Kinerja Lingkungan Hidup		
	Aspek Umum		
	F.4.	Biaya Lingkungan Hidup	75
	Aspek Material		
	F.5.	Penggunaan Material yang Ramah Lingkungan	81

TOPIK		HALAMAN
Aspek Energi		
F.6.	Jumlah dan Intensitas Energi yang Digunakan	81, 165
F.7.	Upaya dan Pencapaian Efisiensi Energi dan Penggunaan Energi Terbarukan	81, 84
Aspek Air		
F.8.	Penggunaan Air	86-87
Aspek Keanekaragaman Hayati		
F.9.	Dampak dari Wilayah Operasional yang Dekat atau Berada di Daerah Konservasi atau Memiliki Keanekaragaman Hayati	100
F.10.	Usaha Konservasi Keanekaragaman Hayati	101
Aspek Emisi		
F.11.	Jumlah dan Intensitas Emisi yang Dihasilkan Berdasarkan Jenisnya	83, 85, 167-168
F.12.	Upaya dan Pencapaian Pengurangan Emisi yang Dilakukan	84
Aspek Limbah dan Efluen		
F.13.	Jumlah Limbah dan Efluen yang Dihasilkan Berdasarkan Jenis	87, 93, 170
F.14.	Mekanisme Pengelolaan Limbah dan Efluen	92
F.15.	Tumpahan yang Terjadi (jika ada)	90
Aspek Pengaduan Terkait Lingkungan Hidup		
F.16.	Jumlah dan Materi Pengaduan Lingkungan Hidup yang Diterima dan Displeasing	143
Kinerja Sosial		
F.17.	Komitmen untuk Memberikan Layanan atas Produk dan/atau Jasa yang Setara kepada Konsumen	51
Aspek Ketenagakerjaan		
F.18.	Kesetaraan Kesempatan Bekerja	114
F.19.	Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa	113

TOPIK			HALAMAN
	F.20.	Upah Minimum Regional	120
	F.21.	Lingkungan Bekerja yang Layak dan Aman	125
	F.22.	Pelatihan dan Pengembangan Kemampuan Pegawai	121
	Aspek Masyarakat		
	F.23.	Dampak Operasi Terhadap Masyarakat Sekitar	140
	F.24.	Pengaduan Masyarakat	139, 142
	F.25.	Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL)	144
	Tanggung Jawab Pengembangan Produk/Jasa Berkelanjutan		
	F.26.	Inovasi dan Pengembangan Produk/Jasa Keuangan Berkelanjutan	26
	F.27.	Produk/Jasa yang Sudah Dievaluasi Keamanannya bagi Pelanggan	51
	F.28.	Dampak Produk/Jasa	51
	F.29.	Jumlah Produk yang Ditarik Kembali	51
	F.30.	Survei Kepuasan Pelanggan Terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan	51
G	Lain-lain		
	G.1.	Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen (jika ada)	186-187
	G.2.	Lembar Umpan Balik	209
	G.3.	Tanggapan Terhadap Umpan Balik Laporan Keberlanjutan Tahun Sebelumnya	155
	G.4.	Daftar Pengungkapan Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik	188

Indeks GRI

Pernyataan penggunaan	PT Vale Indonesia Tbk telah melaporkan informasi yang tertera dalam Indeks Isi GRI untuk periode 1 Januari–31 Desember 2025.	GRI 1 yang digunakan	GRI 1 : Fondasi 2021
		Standar Sektor GRI yang berlaku	GRI 14: Sektor Pertambangan 2024

STANDAR GRI	PENGUNGKAPAN	LOKASI	YANG TIDAK DICANTUMKAN			NO. RUJUKAN STANDAR SEKTOR GRI
			PERSYARATAN YANG TIDAK DICANTUMKAN	ALASAN	PENJELASAN	
GRI 2: Pengungkapan Umum 2021	2-1 Rincian organisasi	23, 25				
	2-2 Entitas yang dicantumkan dalam pelaporan keberlanjutan organisasi	154				
	2-3 Periode, frekuensi, dan titik kontak pelaporan	154, 155				
	2-4 Penyajian kembali informasi	154				
	2-5 Penjaminan eksternal	154				
	2-6 Kegiatan, rantai nilai dan hubungan bisnis lain	21, 55				
	2-7 Tenaga kerja	109, 111				
	2-8 Pekerja yang bukan pekerja langsung	111				
	2-9 Struktur dan komposisi tata kelola	55				
	2-10 Pencalonan dan pemilihan badan tata kelola tertinggi	55				
	2-11 Ketua badan tata kelola tertinggi	53				
	2-12 Peran badan tata kelola tertinggi dalam mengawasi manajemen dampak	37, 46, 47				
	2-13 Delegasi tanggung jawab untuk mengelola dampak	37, 46, 47				
	2-14 Peran badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan	47, 154				
	2-15 Konflik Kepentingan	68				
	2-16 Komunikasi masalah penting	57				
	2-17 Pengetahuan kolektif badan tata kelola tertinggi	57				

STANDAR GRI	PENGUNGKAPAN	LOKASI	YANG TIDAK DICANTUMKAN			NO. RUJUKAN STANDAR SEKTOR GRI
			PERSYARATAN YANG TIDAK DICANTUMKAN	ALASAN	PENJELASAN	
	2-18 Evaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi	62, 64				
	2-19 Kebijakan remunerasi	62				
	2-20 Proses untuk menentukan remunerasi	62				
	2-21 Rasio kompensasi total tahunan	62				
	2-22 Pernyataan tentang strategi pembangunan berkelanjutan	13				
	2-23 Komitmen kebijakan	49-50				
	2-24 Menanamkan komitmen kebijakan	22, 50				
	2-25 Proses untuk memperbaiki dampak negatif	47, 70, 139				
	2-26 Mekanisme untuk mencari nasihat dan mengemukakan masalah	70				
	2-27 Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan	53				
	2-28 Asosiasi keanggotaan	29-30				
	2-29 Pendekatan untuk keterlibatan pemangku kepentingan	38				
	2-30 Perjanjian perundingan kolektif	112				
GRI 3: Topik Material 2021	3-1 Proses untuk menentukan topik material	41				
	3-2 Daftar topik material	41, 43				
	3-3 Manajemen topik material	41, 43, 72, 86, 129				
GRI 101: Keanekaragaman Hayati 2024	101-1 Kebijakan untuk menghentikan dan mengembalikan hilangnya keanekaragaman hayati	97				14.4.2
	101-2 Manajemen dampak keanekaragaman hayati	99				14.4.3

STANDAR GRI	PENGUNGKAPAN	LOKASI	YANG TIDAK DICANTUMKAN			NO. RUJUKAN STANDAR SEKTOR GRI
			PERSYARATAN YANG TIDAK DICANTUMKAN	ALASAN	PENJELASAN	
	101-3 Akses dan berbagi manfaat		Seluruh pengungkapan	Informasi tidak relevan	PTVI tidak melakukan akses terhadap sumber daya genetik maupun pengetahuan tradisional dalam operasionalnya. Oleh karena itu, indikator ini tidak dianggap relevan dalam konteks kegiatan operasional PTVI.	
	101-4 Identifikasi dampak keanekaragaman hayati	99				14.4.4
	101-5 Lokasi yang memiliki dampak keanekaragaman hayati	100				14.4.5
	101-6 Pemicu langsung hilangnya keanekaragaman hayati	97				14.4.6
	101-7 Perubahan kondisi keanekaragaman hayati	101				14.4.7
	101-8 Layanan ekosistem	99				14.4.8
GRI 201: Kinerja Ekonomi 2016	201-1 Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan	27				14.2.2
	201-2 Implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat dari perubahan iklim	41				14.2.2 14.9.2 14.23.2
	201-3 Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya	120				
	201-4 Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah	28				14.23.3

STANDAR GRI	PENGUNGKAPAN	LOKASI	YANG TIDAK DICANTUMKAN			NO. RUJUKAN STANDAR SEKTOR GRI
			PERSYARATAN YANG TIDAK DICANTUMKAN	ALASAN	PENJELASAN	
GRI 202: Keberadaan Pasar 2016	202-1 Rasio standar upah karyawan pemula berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional	120				14.17.2
	202-2 Proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat setempat	116				14.21.2
GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung 2016	203-1 Investasi infrastruktur dan dukungan layanan	144				14.9.3
	203-2 Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan	144				14.9.4
GRI 204: Praktik Pengadaan 2016	204-1 Proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal	50, 51				14.9.5
GRI 205: Antikorupsi 2016	205-1 Operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi	63				14.22.2
	205-2 Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur antikorupsi	49, 64				14.22.3
	205-3 Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil	64				14.22.4
GRI 206: Perilaku Anti-persaingan 2016	206-1 Langkah-langkah hukum untuk perilaku antipersaingan, praktik antipakat dan monopoli	64				
GRI 207: Pajak 2019	207-1 Pendekatan terhadap pajak	65				14.23.4
	207-2 Tata kelola, pengontrolan, dan manajemen risiko pajak	65, 66				14.23.5
	207-3 Keterlibatan pemangku kepentingan dan pengelolaan kepedulian yang berkaitan dengan pajak	65				14.23.6
	207-4 Laporan per negara	65				14.23.7

STANDAR GRI	PENGUNGKAPAN	LOKASI	YANG TIDAK DICANTUMKAN			NO. RUJUKAN STANDAR SEKTOR GRI
			PERSYARATAN YANG TIDAK DICANTUMKAN	ALASAN	PENJELASAN	
GRI 301: Material 2016	301-1 Material digunakan berdasarkan berat atau volume	48				
	301-2 Material input dari daur ulang yang digunakan	48				
	301-3 Pemerolehan ulang produk dan material kemasannya	48				
GRI 302: Energi 2016	302-1 Konsumsi energi dalam organisasi	81, 165				14.1.2
	302-2 Konsumsi energi di luar organisasi	80				14.1.3
	302-3 Intensitas energi	81, 165				14.1.4
	302-4 Pengurangan konsumsi energi	81, 84, 167				
	302-5 Pengurangan untuk energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa	81, 84				
GRI 303: Air dan Efluen 2018	303-1 Interaksi dengan air sebagai sumber daya bersama	86-87				14.7.2
	303-2 Manajemen dampak yang berkaitan dengan pembuangan air	87				14.7.3
	303-3 Pengambilan air	86				14.7.4
	303-4 Pembungan air	87, 169				14.7.5
	303-5 Konsumsi air	86, 168				14.7.6

STANDAR GRI	PENGUNGKAPAN	LOKASI	YANG TIDAK DICANTUMKAN			NO. RUJUKAN STANDAR SEKTOR GRI
			PERSYARATAN YANG TIDAK DICANTUMKAN	ALASAN	PENJELASAN	
GRI 304: Keanekaragaman Hayati 2016	304-1 Lokasi operasi yang dimiliki, disewa, dikelola, atau berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung	100				
	304-2 Dampak signifikan dari aktivitas, produk, dan jasa pada keanekaragaman hayati	97				
	304-3 Habitat yang dilindungi atau direstorasi	171				
	304-4 Spesies Daftar Merah IUCN dan spesies daftar konservasi nasional dengan habitat dalam wilayah yang terkena efek operasi	100, 101, 172				
GRI 305: Emisi 2016	305-1 Emisi GRK (Cakupan 1) langsung	83, 167				14.1.5
	305-2 Emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung	83, 167				14.1.6
	305-3 Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya	83				14.1.7
	305-4 Intensitas emisi GRK	83, 167				14.1.8
	305-5 Pengurangan emisi GRK	83, 84				14.1.9
	305-6 Emisi zat perusak ozon (ODS)	84				
	305-7 Nitrogen oksida (NOx), belerang oksida (SOx), dan emisi udara signifikan lainnya	85, 168				14.3.2

STANDAR GRI	PENGUNGKAPAN	LOKASI	YANG TIDAK DICANTUMKAN			NO. RUJUKAN STANDAR SEKTOR GRI
			PERSYARATAN YANG TIDAK DICANTUMKAN	ALASAN	PENJELASAN	
GRI 306: Limbah 2020	306-1 Timbulan limbah dan dampak signifikan terkait limbah	92				14.5.2
	306-2 Manajemen dampak signifikan terkait limbah	92				14.5.3
	306-3 Timbulan limbah	90, 93, 94, 171				14.5.4
	306-4 Limbah yang dialihkan dari pembuangan akhir	92				14.5.5
	306-5 Limbah yang dikirimkan ke pembuangan akhir	94				14.5.6
GRI 401: Kepegawaian 2016	401-1 Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan	110				14.17.3
	401-2 Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan pada kurun waktu tertentu atau paruh waktu	120				14.17.4
	401-3 Cuti melahirkan	119				14.17.5 14.21.3
GRI 402: Hubungan Tenaga Kerja/Manajemen 2016	402-1 Periode pemberitahuan minimum terkait perubahan operasional	112				14.8.2 14.17.3

STANDAR GRI	PENGUNGKAPAN	LOKASI	YANG TIDAK DICANTUMKAN			NO. RUJUKAN STANDAR SEKTOR GRI
			PERSYARATAN YANG TIDAK DICANTUMKAN	ALASAN	PENJELASAN	
GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2018	403-1 Sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja	125-127				14.17.4
	403-2 Pengidentifikasian bahaya, penilaian risiko, dan investigasi insiden	125-126, 129				14.17.5 14.21.3
	403-3 Layanan kesehatan kerja	129				14.16.4
	403-4 Partisipasi, konsultasi, dan komunikasi pekerja tentang kesehatan dan keselamatan kerja	126				14.16.5
	403-5 Pelatihan pekerja mengenai kesehatan dan keselamatan kerja	129				14.16.6
	403-6 Peningkatan kualitas kesehatan Pekerja	127, 129-130				14.16.7
	403-7 Pencegahan dan mitigasi dampak-dampak kesehatan dan keselamatan kerja yang secara langsung terkait hubungan bisnis	126				14.16.8
	403-8 Pekerja yang tercakup dalam sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja	126				14.16.9
	403-9 Kecelakaan kerja	126-127, 132, 184				14.16.10
	403-10 Penyakit akibat kerja	126-127				14.16.11
GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan 2016	404-1 Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan	123				14.17.7 14.21.4
	404-2 Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan	122				14.8.3 14.17.8
	404-3 Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier	123				

STANDAR GRI	PENGUNGKAPAN	LOKASI	YANG TIDAK DICANTUMKAN			NO. RUJUKAN STANDAR SEKTOR GRI
			PERSYARATAN YANG TIDAK DICANTUMKAN	ALASAN	PENJELASAN	
GRI 405: Keanekaragaman dan Peluang Setara 2016	405-1 Keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan	180 109, 118, 181, 183				14.21.5
	405-2 Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki	120				14.21.6
GRI 406: Nondiskriminasi 2016	406-1 Insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan	115				14.21.7
GRI 407: Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif 2016	407-1 Operasi dan pemasok di mana hak atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif mungkin berisiko	50, 112				14.20.3
GRI 408: Pekerja anak 2016	408-1 Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden pekerja anak	50, 113				14.18.2
GRI 409: Kerja Paksa atau Wajib Kerja 2016	409-1 Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau wajib kerja	50, 113				14.19.2
GRI 410: Praktik Keamanan 2016	410-1 Petugas keamanan yang dilatih mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia	137				14.14.2
GRI 413: Masyarakat Setempat 2016	413-1 Operasi dengan keterlibatan masyarakat setempat, penilaian dampak, dan program pengembangan	140				14.10.2
	413-2 Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat setempat	142				14.10.3
GRI 414: Penilaian Sosial Pemasok 2016	414-1 Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria sosial	49				14.17.9 14.18.3 14.19.3
	414-2 Dampak sosial negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil	50				14.17.10
GRI 415: Kebijakan Publik 2016	415-1 Kontribusi politik	64				14.24.2
GRI 418: Privasi Pelanggan 2016	418-1 Pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan	72				

STANDAR GRI	PENGUNGKAPAN	LOKASI	YANG TIDAK DICANTUMKAN			NO. RUJUKAN STANDAR SEKTOR GRI
			PERSYARATAN YANG TIDAK DICANTUMKAN	ALASAN	PENJELASAN	
GRI 14: Sektor Pertambangan 2024						
14.6 Endapan (Tailings)	14.6.2 Laporkan metode pembuangan endapan yang digunakan oleh organisasi.	93				
	14.6.3 Sebutkan fasilitas endapan organisasi, dan laporkan nama, lokasi, dan status kepemilikan, termasuk apakah organisasi selaku operator atau tidak	93				
14.8 Penutupan dan Rehabilitasi	14.8.4 Untuk setiap lokasi tambang, laporkan apakah lokasi tambang: • Memiliki rencana penutupan dan rehabilitasi; • Sedang melakukan aktivitas penutupan tambang dan rehabilitasi; • Telah ditutup dan direhabilitasi.	102, 104				
	14.8.5 Untuk setiap rencana penutupan dan rehabilitasi: • Laporkan apakah rencana telah disetujui oleh otoritas terkait; • Laporkan tanggal evaluasi rencana terbaru dan evaluasi selanjutnya.	102, 104				
	14.8.6 Untuk setiap lokasi tambang, laporkan dalam satuan hektare: • Total lahan yang terganggu dan belum direhabilitasi; • Total lahan yang terganggu dan telah direhabilitasi (termasuk yang direhabilitasi secara progresif, jika ada).	102-103, 171				
	14.8.7 Untuk setiap lokasi tambang, laporkan perkiraan umur tambang (LOM).	102, 104				

STANDAR GRI	PENGUNGKAPAN	LOKASI	YANG TIDAK DICANTUMKAN			NO. RUJUKAN STANDAR SEKTOR GRI
			PERSYARATAN YANG TIDAK DICANTUMKAN	ALASAN	PENJELASAN	
	14.8.8 Untuk provisi keuangan yang dibuat oleh organisasi untuk penutupan dan rehabilitasi, termasuk pemantauan lingkungan dan sosial-ekonomi pascapenutupan dan tindak pemulihan untuk lokasi tambang, laporkan: • Total perkiraan biaya penutupan (tidak dipotong), apakah provisi finansial mampu menutup biaya penutupan perkiraan saat ini secara penuh, dan apakah provisi finansial yang dibuat telah sejalan dengan persyaratan peraturan yang berlaku, berdasarkan lokasi tambang; • Metode yang digunakan untuk menghitung perkiraan biaya penutupan; • Instrumen keuangan yang digunakan atau dikembangkan untuk memastikan provisi finansial cukup untuk penutupan dan rehabilitasi.	105				
	14.8.9 Jelaskan provisi nonkeuangan yang dibuat oleh organisasi untuk mengelola transisi sosial-ekonomi masyarakat lokal menuju ekonomi pascapenambangan yang berkelanjutan, termasuk upaya, proyek, dan program kolaboratif.	104				
14.9 Dampak Ekonomi	14.9.6 Laporkan persentase pekerja yang direkrut dari masyarakat lokal di tingkat lokasi tambang, diperinci berdasarkan gender, dan definisi 'masyarakat lokal' (komunitas lokal) menurut organisasi.	116				
14.10 Komunitas Lokal	14.10.4 Untuk setiap lokasi tambang, laporkan: • Jumlah dan jenis pengaduan dari masyarakat lokal selama periode pelaporan; • Persentase pengaduan yang ditangani dan diselesaikan selama periode pelaporan; • Persentase pengaduan yang diselesaikan melalui remediasi selama periode pelaporan.	139, 142				

STANDAR GRI	PENGUNGKAPAN	LOKASI	YANG TIDAK DICANTUMKAN			NO. RUJUKAN STANDAR SEKTOR GRI
			PERSYARATAN YANG TIDAK DICANTUMKAN	ALASAN	PENJELASAN	
14.12 Hak atas Tanah dan Sumber Daya	14.12.2 Sebutkan lokasi tambang di mana pemukiman kembali secara paksa direncanakan, berlangsung, atau telah dilakukan. Untuk setiap lokasi tambang tersebut: • Laporkan berapa banyak orang yang telah atau akan digusur, dan rincilah berdasarkan gender; • Jelaskan bagaimana mata pencaharian dan hak asasi manusia terdampak atau dapat terdampak dan telah dipulihkan.	138				
	14.12.3 Sebutkan lokasi operasi tempat terjadinya konflik atau pelanggaran hak atas tanah dan sumber daya (termasuk hak penguasaan adat, kolektif, dan informal), dan jelaskan insiden serta pemangku kepentingan yang hak-haknya terdampak atau dapat terdampak.	100				
14.15 Manajemen Krisis	14.15.3 Laporkan jumlah insiden kritis dalam periode pelaporan, jelaskan dampak, dan tindakan untuk memulihkan itu	131				
	14.15.4 Laporkan persentase lokasi tambang yang memiliki program kesiapan dan tanggap darurat, dan sebutkan lokasi yang tidak memilikinya.	128				
14.20 Kebebasan Perserikat dan Perundingan Bersama	14.20.3 Laporkan jumlah mogok kerja dan larangan bekerja yang melibatkan 1.000 pekerja atau lebih yang berlangsung satu shift penuh atau lebih lama, beserta durasi total hari pekerja manggurr.	113				

STANDAR GRI	PENGUNGKAPAN	LOKASI	YANG TIDAK DICANTUMKAN			NO. RUJUKAN STANDAR SEKTOR GRI
			PERSYARATAN YANG TIDAK DICANTUMKAN	ALASAN	PENJELASAN	
14.22 Antikorupsi	14.22.5 Menjelaskan pendekatan terhadap transparansi kontrak, termasuk: • apakah kontrak dan izin terbuka untuk publik. Jika ya, di mana hal itu dipublikasikan; • Jika kontrak atau izin tidak tersedia secara publik, alasan atas hal ini dan tindakan yang dilakukan untuk menjadikannya tersedia secara publik di masa depan.	64				
	14.22.6 Laporkan informasi berikut tentang pihak yang berhak atas manfaat organisasi, termasuk usaha patungan: • Nama, kewarganegaraan, dan negara tempat tinggal; • Apakah orang yang memiliki pengaruh politik; • Tingkat kepemilikan; • Bagaimana kepemilikan atau pengendalian digunakan.	64				
14.23 Pembayaran kepada Pemerintah	14.23.8 Untuk mineral yang dibeli dari negara, atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara untuk menjual atas nama mereka, laporkan: • Volume dan jenis mineral yang dibeli; • Nama lengkap entitas penjual dan penerima pembayaran; • Pembayaran yang dilakukan untuk pembelian.		Seluruh pengungkapan	Informasi tidak relevan	PTVI tidak membeli mineral dari negara sehingga indikator ini tidak relevan dengan operasional PTVI.	

TOPIK DALAM STANDAR SEKTOR GRI YANG BERLAKU YANG DITENTUKAN SEBAGAI BUKAN MATERIAL	
TOPIK	PENJELASAN
14.11 Hak-hak Masyarakat Adat	Topik ini saat ini belum dianggap material bagi PTVI karena belum terdapat pengakuan resmi maupun regulasi nasional terkait penetapan wilayah adat di area operasional kami. Meskipun demikian, kami tetap berkomitmen untuk menghormati hak-hak masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku.
14.13 Pertambangan rakyat dan pertambangan skala kecil	PTVI tidak terlibat dalam kegiatan pertambangan rakyat maupun pertambangan skala kecil (<i>artisanal and small-scale mining / ASM</i>), baik secara langsung maupun melalui rantai pasok kami. Seluruh kegiatan operasional kami dilakukan dalam skala industri berdasarkan izin usaha pertambangan yang sah dan berada di bawah pengawasan Pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, topik ini tidak dianggap material dalam konteks kegiatan operasional dan dampak keberlanjutan kami.
14.25 Kawasan terdampak konflik dan berisiko tinggi	PTVI tidak beroperasi di wilayah yang diklasifikasikan sebagai kawasan terdampak konflik maupun wilayah berisiko tinggi sebagaimana didefinisikan dalam panduan internasional yang relevan. Seluruh operasi utama kami berada di wilayah yang relatif stabil secara politik dan sosial, serta berada di bawah pengawasan dan perlindungan hukum nasional. Oleh karena itu, topik ini tidak dianggap material dalam konteks risiko dan dampak keberlanjutan yang relevan bagi PTVI.

Indeks SASB

KODE	METRIK	LOKASI
Emisi Gas Rumah Kaca		
EM-MM-110a.1	Emisi Scope 1 global bruto, persentase yang tercakup dalam peraturan pembatasan emisi	83, 167
EM-MM-110a.2	Diskusi strategi jangka panjang dan pendek untuk mengelola emisi Scope 1, target pengurangan emisi, dan analisis kinerja terhadap target tersebut	80
Kualitas Udara		
EM-MM-120a.1	Emisi udara dari polutan berikut: (1) CO, (2) NOx (tidak termasuk N2O), (3) SOx, (4) partikel materi (PM10), (5) merkuri (Hg), (6) timbal (Pb), dan (7) senyawa organik volatil (VOCs)	85, 168
Pengelolaan Energi		
EM-MM-130a.1	Total energi yang dikonsumsi, persentase listrik jaringan, dan persentase energi terbarukan	81, 165
Pengelolaan Air		
EM-MM-140a.1	Total air yang diambil, total air yang dikonsumsi; persentase masing-masing di wilayah dengan Tekanan Air Dasar Tinggi atau Sangat Tinggi	86, 168
EM-MM-140a.2	Jumlah insiden ketidakpatuhan terkait izin, standar, dan regulasi kualitas air	90
Pengelolaan Limbah & Bahan Berbahaya		
EM-MM-150a.4	Total berat limbah non-mineral yang dihasilkan	-
EM-MM-150a.5	Total berat tailing yang dihasilkan	93
EM-MM-150a.6	Total berat batuan limbah yang dihasilkan	-
EM-MM-150a.7	Total berat limbah berbahaya yang dihasilkan	94
EM-MM-150a.8	Total berat limbah berbahaya yang didaur ulang	94
EM-MM-150a.9	Jumlah insiden signifikan terkait dengan bahan berbahaya dan pengelolaan limbah	90
EM-MM-150a.10	Deskripsi kebijakan dan prosedur pengelolaan limbah dan bahan berbahaya untuk operasi aktif dan tidak aktif	92

KODE	METRIK	LOKASI
Dampak Keanekaragaman Hayati		
EM-MM-160a.1	Deskripsi kebijakan dan praktik manajemen lingkungan untuk lokasi aktif	97
EM-MM-160a.2	Persentase lokasi tambang di mana pengaliran air asam tambang: (1) diprediksi terjadi, (2) secara aktif dimitigasi, dan (3) sedang dalam perawatan atau remediasi	89
EM-MM-160a.3	Persentase dari (1) cadangan terbukti dan (2) cadangan probable yang berada di lokasi atau dekat dengan kawasan konservasi atau habitat spesies yang terancam punah	100
Keamanan, Hak Asasi Manusia, dan Hak Masyarakat Adat		
EM-MM-210a.1	Persentase dari (1) cadangan terbukti dan (2) cadangan probable yang berada di area konflik	100
EM-MM-210a.2	Persentase dari (1) cadangan terbukti dan (2) cadangan probable yang berada di tanah masyarakat adat	-
EM-MM-210a.3	Diskusi tentang proses keterlibatan dan praktik uji tuntas terkait dengan hak asasi manusia, hak masyarakat adat, dan operasi di daerah konflik	136
Hubungan Masyarakat		
EM-MM-210b.1	Diskusi tentang proses pengelolaan risiko dan peluang yang terkait dengan hak-hak masyarakat dan kepentingan	139
EM-MM-210b.2	(1) Jumlah dan (2) durasi keterlambatan non-teknis	-
Praktik Ketenagakerjaan		
EM-MM-310a.1	Persentase tenaga kerja aktif yang dipekerjakan berdasarkan perjanjian kolektif	112
EM-MM-310a.2	(1) Jumlah dan (2) durasi pemogokan dan penutupan perusahaan	113
Kesehatan & Keselamatan Tenaga Kerja		
EM-MM-320a.1	(1) Tingkat semua kejadian, (2) tingkat kematian, (3) tingkat frekuensi nyaris celaka (NMFR) dan (4) rata-rata jam pelatihan kesehatan, keselamatan, dan tanggap darurat untuk (a) karyawan langsung dan (b) karyawan kontrak.	132, 184

KODE	METRIK	LOKASI
Etika Bisnis dan Transparansi		
EM-MM-510a.1	Deskripsi sistem manajemen pencegahan korupsi dan penyuapan di seluruh rantai nilai	63
EM-MM-510a.2	Produksi di negara-negara yang memiliki peringkat 20 terendah dalam Indeks Persepsi Korupsi Transparency International	63
Pengelolaan Fasilitas Penyimpanan Tailing		
EM-MM-540a.1	Tabel inventaris fasilitas penyimpanan tailing: (1) nama fasilitas, (2) lokasi, (3) status kepemilikan, (4) status operasional, (5) metode konstruksi, (6) kapasitas penyimpanan maksimum yang diizinkan, (7) jumlah tailing yang disimpan saat ini, (8) klasifikasi konsekuensi, (9) tanggal tinjauan teknis independen terbaru, (10) temuan material, (11) tindakan mitigasi, (12) EPRP spesifik lokasi	93
EM-MM-540a.2	Ringkasan sistem pengelolaan tailing dan struktur tata kelola yang digunakan untuk memantau dan menjaga stabilitas fasilitas penyimpanan tailing	93
EM-MM-540a.3	Pendekatan untuk pengembangan Rencana Kesiapsiagaan dan Respons Darurat (EPRP) untuk fasilitas penyimpanan tailing	93
Metrik Aktivitas		
EM-MM-000.A	Produksi (1) bijih logam dan (2) produk logam jadi	27
EM-MM-000.B	Jumlah total karyawan, persentase kontraktor	109

Lembar Umpan Balik

[POJK51-G.2]

Terima kasih telah meluangkan waktu untuk membaca Laporan Keberlanjutan PT Vale Indonesia Tbk tahun 2025.

Untuk meningkatkan kualitas laporan, memperkuat transparansi kinerja keberlanjutan kami, serta mengumpulkan masukan bagi penyusunan laporan di masa mendatang, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi Lembar Umpan Balik berikut dan mengirimkannya kembali melalui email, atau memindai kode QR untuk mengisinya secara daring.

Sekali lagi, terima kasih atas waktu dan dukungan Anda.



Terima kasih telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan terhadap laporan ini. Kami sangat menghargai kontribusi Anda dalam mengisi lembar ini. Mohon kirimkan lembar umpan balik yang telah diisi melalui surat elektronik ke:

ptvicommunications@vale.com

Profil Pembaca

Nama Lengkap:

Nama Institusi/Perusahaan:

Surel:

Kategori (*checklist box* pada bagian kanan):

- | | |
|------------------------------------|--|
| ☐ Pemerintahan | ☐ Media |
| ☐ LSM | ☐ Masyarakat |
| ☐ Industri | ☐ Lain-lain (mohon sebutkan) |
| ☐ Akademik | |

1. Laporan ini memuat informasi yang bermanfaat mengenai kinerja ekonomi, lingkungan, sosial dan tata kelola yang telah dilaksanakan oleh PTVI.

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| ☐ Sangat Setuju | ☐ Kurang Setuju | ☐ Tidak Setuju |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|

2. Data dan informasi yang diungkapkan dalam Laporan ini disajikan secara terstruktur, sistematis, dan mudah dipahami.

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| ☐ Sangat Setuju | ☐ Kurang Setuju | ☐ Tidak Setuju |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|

3. Data dan informasi yang diungkapkan dalam Laporan ini disajikan secara lengkap, transparan dan berimbang.

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| ☐ Sangat Setuju | ☐ Kurang Setuju | ☐ Tidak Setuju |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|

4. Desain, jenis font, ukuran, tata warna, tata letak dan gambar dalam Laporan ini menarik dan mudah dibaca.

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| ☐ Sangat Setuju | ☐ Kurang Setuju | ☐ Tidak Setuju |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|

5. Informasi apa dalam Laporan ini yang menurut Anda paling bermanfaat?

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| ☐ Sangat Setuju | ☐ Kurang Setuju | ☐ Tidak Setuju |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|

6. Informasi apa dalam Laporan ini yang menurut Anda dapat ditingkatkan?

.....

7. Informasi apa dalam Laporan ini yang menurut Anda harus dilengkapi dalam Laporan mendatang?

.....



Sequis Tower, 20th Floor, Unit 6 & 7
Jl. Jend. Sudirman Kav. 71
Jakarta 12190, Indonesia Tel: +62-21 5249000
Fax: +62-21 5249020
<https://vale.com/indonesia>

2025
Laporan Keberlanjutan